

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

		Hal
	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023	i
Lamp I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	1 - 9
Lamp I.2	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.	10 - 11
Lamp I.3	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	
	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	12 - 18
	2. Dinas Kesehatan	19 - 27
	3. Rumah Sakit Umum Daerah	28 - 29
	4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30 - 36
	5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	37 - 39
	6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40 - 41
	7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42 - 46
	8. Dinas Ketenagakerjaan	47 - 49
	9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	50 - 53
	10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	54 - 57
	11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58 - 60
	12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP dan KB	61 - 66
	13. Dinas Perhubungan	67 - 71
	14. Dinas Komunikasi dan Informatika	72 - 74
	15. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	75 - 80
	16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81 - 83
	17. Dinas Kebudayaan	84 - 86
	18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	87 - 88
	19. Dinas Pariwisata	89 - 92
	20. Dinas Pertanian	93 - 97
	21. Sekretariat Daerah	98
	1. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	99 - 100
	2. Bagian Hukum	101
	3. Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	102 - 103
	4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa	104
	5. Bagian Umum	105 - 107
	6. Bagian Organisasi	108
	7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	109
	22. Sekretariat DPRD	110 - 112
	23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	113 - 116
	24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	117 - 121
	25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPKD	122 - 123
	26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	124 - 126
	27. Badan Riset dan Inovasi Daerah	127 - 129
	28. Inspektorat	130 - 132
	29. Kecamatan Klungkung	133 - 136
	30. Kecamatan Banjarangkan	137 - 139
	31. Kecamatan Nusa Penida	140 - 142
	32. Kecamatan Dawan	143 - 145
	33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	146 - 149

Lamp I.4	Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	150 - 220
Lamp II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	
Lamp III	Laporan Operasional (LO)	
Lamp IV	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
Lamp V	Neraca	
Lamp VI	Laporan Arus Kas (LAK)	
Lamp VII	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	
Lamp VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	
Lamp IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
Lamp X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	
Lamp XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
Lamp XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	
Lamp XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	
Lamp XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Lamp XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	
Lamp XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	
Lamp XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	
Lamp XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	
Lamp XIX	Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya	
Lamp XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	
Lampiran XX.1	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	
Lampiran XX.2	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	

Lampiran Informasi Lainnya

<<<<O>>>>



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama DPRD Kabupaten Klungkung dan telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
dan
BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca; dan
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah dan/atau perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp.1.370.586.084.745,33	
b. Belanja.....	<u>Rp. 1.355.627.177.837,47</u>	
c. Surplus/defisit.....		Rp. 14.958.906.907,86
d. Pembiayaan :		
Penerimaan.....	Rp. 55.874.539.707,64	
Pengeluaran.....	<u>Rp. 0,00</u>	
Pembiayaan Netto.....		<u>Rp. 55.874.539.707,64</u>
e. SiLPA.....		Rp. 70.833.446.615,50

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp35.188.202.824,67 (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh delapan dua ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.405.774.287.570,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.370.586.084.745,33</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. (35.188.202.824,67)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp105.972.775.744,53 (seratus lima milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.461.599.953.582,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.355.627.177.837,47</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. (105.972.775.744,53)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.70.784.572.919,86 (tujuh puluh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (55.825.666.012,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 14.958.906.907,86</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 70.784.572.919,86

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.48.873.695,64 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	55.825.666.012,00
b. Realisasi	Rp.	<u>55.874.539.707,64</u>
Selisih lebih/kurang	Rp.	48.873.695,64

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Realisasi	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih lebih/kurang	Rp.	0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.48.873.695,64 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	55.825.666.012,00
b. Realisasi	Rp.	<u>55.874.539.707,64</u>
Selisih lebih/kurang	Rp.	48.873.695,64

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	1.284.903.124.166,53
b. Jumlah kewajiban	Rp.	128.943.704.965,19
c. Jumlah ekuitas	Rp.	1.155.959.419.201,34

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp.	55.767.186.811,36
b. Koreksi saldo awal Kas BOS	Rp.	40.873.695,28
c. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	200.931.478.315,63
d. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(185.972.571.407,77)
e. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	66.500.000,00

f. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	10.526.301,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp.	70.843.993.715,50

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub. kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; dan
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 4 September 2024

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,



INYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 4 September 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI:
(5,46/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi**

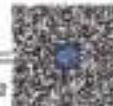


PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.405.774.287.570,00	1.370.586.084.745,33	(35.188.202.824,67)	97,50
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	161.834.842.342,00	179.758.714.446,50	17.923.872.104,50	111,06
4.1.01	PENDIDIKAN	7.850.000,00	23.950.000,00	16.100.000,00	305,10
4.1.01.1-01.2-19.0-00.01	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	7.850.000,00	23.950.000,00	16.100.000,00	305,10
4.1.02	KESEHATAN	159.548.942.342,00	177.878.328.395,50	17.529.686.053,50	110,99
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	28.757.992.342,00	27.900.027.570,99	(857.964.771,01)	97,02
4.1.02.1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah	130.790.950.000,00	149.178.300.824,51	18.387.350.824,51	114,06
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.278.350.000,00	2.656.436.051,00	378.086.051,00	116,59
4.1.03.1-03.1-04.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.278.350.000,00	2.656.436.051,00	378.086.051,00	116,59
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.307.479.992,00	23.831.352.654,60	(476.127.337,40)	98,04
4.2.07	TENAGA KERJA	288.764.892,00	458.618.748,00	169.854.056,00	158,82
4.2.07.2-07.3-32.3-29.01	Dinas Ketenagakerjaan	288.764.892,00	458.618.748,00	169.854.056,00	158,82
4.2.09	PANGAN	140.256.000,00	79.681.000,00	(60.575.000,00)	56,81
4.2.09.2-09.3-25.0-00.01	Dinas Kelangkaan Pangan dan Perikanan	140.256.000,00	79.681.000,00	(60.575.000,00)	56,81
4.2.10	PERTANAHAN	298.440.000,00	228.812.000,00	(69.628.000,00)	76,67
4.2.10.2-10.2-11.3-28.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	298.440.000,00	228.812.000,00	(69.628.000,00)	76,67
4.2.15	PERHUBUNGAN	11.393.422.000,00	11.720.311.613,00	326.889.613,00	102,87
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	11.393.422.000,00	11.720.311.613,00	326.889.613,00	102,87
4.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	93.600.000,00	92.900.800,00	(699.200,00)	99,25
4.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	93.600.000,00	92.900.800,00	(699.200,00)	99,25
4.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.074.247.300,00	11.229.153.243,60	(845.094.056,40)	93,00
4.2.17.2-17.3-31.3-30.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	12.074.247.300,00	11.229.153.243,60	(845.094.056,40)	93,00
4.2.22	KEBUDAYAAN	18.750.000,00	21.875.250,00	3.125.250,00	116,57
4.2.22.2-22.0-00.0-00.01	Dinas Kebudayaan	18.750.000,00	21.875.250,00	3.125.250,00	116,57
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18.951.985.000,00	20.776.808.500,00	1.824.823.500,00	109,63
4.3.26	PARIWISATA	18.923.385.000,00	20.743.503.500,00	1.820.118.500,00	109,62
4.3.26.3-26.0-00.0-00.01	Dinas Pariwisata	18.923.385.000,00	20.743.503.500,00	1.820.118.500,00	109,62
4.3.27	PERTANIAN	28.600.000,00	33.306.000,00	4.706.000,00	116,45
4.3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian	28.600.000,00	33.306.000,00	4.706.000,00	116,45
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.200.679.980.236,00	1.146.219.209.144,23	(54.460.771.091,77)	95,46
4.5.02	KEUANGAN	1.200.679.980.236,00	1.146.219.209.144,23	(54.460.771.091,77)	95,46



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.200.679.980.238,00	1.146.219.209.144,23	(54.460.771.091,77)	95,48
5	BELANJA DAERAH	1.461.589.953.582,00	1.355.827.177.837,47	(105.972.775.744,53)	92,75
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	790.931.673.043,00	728.842.903.384,48	(62.088.679.658,52)	92,15
5.1.01	PENDIDIKAN	287.055.030.671,00	277.744.650.082,07	(9.310.380.588,93)	96,76
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	287.055.030.671,00	277.744.650.082,07	(9.310.380.588,93)	96,76
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	269.047.844.821,00	260.841.619.216,94	(8.206.225.604,06)	96,95
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	205.312.928.927,00	200.004.839.999,00	(5.308.088.928,00)	96,94
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.008.275.694,00	48.044.503.951,94	(1.961.771.742,06)	95,91
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	13.918.440.000,00	13.996.775.266,00	78.335.266,00	100,56
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	810.200.000,00	795.500.000,00	(14.700.000,00)	98,19
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2	BELANJA MODAL	18.007.186.050,00	16.903.030.865,13	(1.104.155.184,87)	93,87
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.135.426.215,00	4.979.305.199,00	(156.121.016,00)	96,96
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.354.522.840,00	8.148.286.799,13	(1.206.236.040,87)	87,11
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.482.994.995,00	3.741.893.979,00	258.898.984,00	107,43
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	34.242.000,00	33.744.886,00	(497.112,00)	98,55
5.1.02	KESIHATAN	361.649.167.879,00	342.477.532.160,41	(19.171.635.718,59)	94,70
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	164.251.350.296,00	147.683.513.634,41	(16.567.836.661,59)	89,91
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	158.608.684.588,00	143.238.366.640,50	(15.370.317.947,50)	90,31
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	59.285.063.113,00	54.212.986.327,00	(5.062.076.786,00)	91,48
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.927.787.475,00	87.609.546.313,50	(10.318.241.161,50)	89,46
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.415.834.000,00	1.415.834.000,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	5.642.565.678,00	4.445.146.963,91	(1.197.518.684,09)	78,78
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.188.255.678,00	2.695.635.921,00	(492.619.757,00)	85,08
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.182.760.000,00	1.725.079.207,91	(467.680.792,09)	78,57
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	277.000.000,00	19.781.865,00	(257.218.135,00)	7,14
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah	197.397.817.613,00	194.794.018.526,00	(2.603.799.087,00)	98,68
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	189.477.689.628,00	186.884.035.112,00	(2.593.654.516,00)	98,63
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	89.003.897.223,00	85.066.476.432,00	(3.937.420.791,00)	96,91
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.473.792.405,00	101.817.558.680,00	(1.656.233.725,00)	98,40
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	7.920.127.985,00	7.909.983.414,00	(10.144.571,00)	99,87
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.158.469.921,00	4.158.471.350,00	(9.998.571,00)	99,76
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.751.658.064,00	3.751.512.064,00	(146.000,00)	100,00
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	107.893.930.711,00	75.908.467.226,00	(31.985.463.485,00)	70,35
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	107.893.930.711,00	75.908.467.226,00	(31.985.463.485,00)	70,35
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	25.274.971.490,00	24.090.078.244,00	(1.184.893.246,00)	95,31
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	10.283.667.424,00	10.077.950.387,00	(205.917.037,00)	98,00
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.991.104.066,00	14.012.127.857,00	(978.976.209,00)	93,47
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	82.618.959.221,00	51.818.388.982,00	(30.800.570.239,00)	62,72
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.920.000,00	32.844.000,00	(276.000,00)	99,16
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.095.219.221,00	9.889.217.996,00	(2.376.001.222,00)	80,31
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.420.820.000,00	42.095.525.983,00	(26.324.293.017,00)	59,78
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.775.703.272,00	21.917.451.018,00	(858.252.254,00)	96,23
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.146.925.208,00	17.546.418.203,00	(600.507.006,00)	96,69
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	16.430.096.409,00	16.044.210.203,00	(385.886.206,00)	97,65
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.817.974.386,00	11.546.578.435,00	(71.395.951,00)	96,39
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.812.122.023,00	4.497.831.768,00	(314.490.255,00)	93,46
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.716.828.800,00	1.502.208.000,00	(214.620.800,00)	87,50
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.507.500.000,00	1.502.208.000,00	(5.292.000,00)	99,65
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	209.328.800,00	0,00	(209.328.800,00)	0
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.628.778.063,00	4.371.032.815,00	(257.745.248,00)	94,43
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	4.603.124.063,00	4.345.391.815,00	(257.732.248,00)	94,40
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.314.852.550,00	3.221.403.556,00	(93.248.994,00)	97,19
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.288.471.513,00	1.123.988.259,00	(164.483.254,00)	87,23
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	25.654.000,00	25.641.000,00	(13.000,00)	99,95
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.654.000,00	25.641.000,00	(13.000,00)	99,95
5.1.06	SOSIAL	11.557.840.510,00	10.794.892.898,00	(762.947.612,00)	93,40
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.557.840.510,00	10.794.892.898,00	(762.947.612,00)	93,40
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.536.780.510,00	10.780.090.898,00	(756.689.612,00)	93,44
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.350.181.339,00	4.238.916.684,00	(111.264.655,00)	97,44
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.336.599.171,00	2.786.543.714,00	(570.055.457,00)	82,92
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.850.000.000,00	3.774.630.500,00	(75.369.500,00)	96,04
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.2	BELANJA MODAL	21.060.000,00	14.802.000,00	(6.258.000,00)	70,28
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.060.000,00	0,00	(6.060.000,00)	0
5.1.06.1-06.2-08.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	14.802.000,00	(198.000,00)	98,68
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	306.857.248.376,00	291.141.196.418,00	(15.716.048.958,00)	94,86
5.2.07	TENAGA KERJA	5.274.671.144,00	4.680.470.097,00	(594.201.047,00)	88,73
5.2.07.2-07.3-32.3-29.01	Dinas Ketenagakerjaan	5.274.671.144,00	4.680.470.097,00	(594.201.047,00)	88,73
5.2.07.2-07.3-32.3-29.01.1	BELANJA OPERASI	5.254.949.244,00	4.661.396.597,00	(593.552.647,00)	88,70
5.2.07.2-07.3-32.3-29.01.1.01	Belanja Pegawai	3.299.600.039,00	3.253.142.260,00	(46.657.779,00)	98,59
5.2.07.2-07.3-32.3-29.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.955.149.205,00	1.408.254.337,00	(546.894.868,00)	72,00
5.2.07.2-07.3-32.3-29.01.2	BELANJA MODAL	19.721.900,00	19.073.500,00	(648.400,00)	96,71
5.2.07.2-07.3-32.3-29.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.721.900,00	19.073.500,00	(648.400,00)	96,71
5.2.09	PANGAN	10.185.413.437,00	5.841.517.283,00	(4.343.896.154,00)	57,35
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.185.413.437,00	5.841.517.283,00	(4.343.896.154,00)	57,35
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.076.621.437,00	5.611.212.343,00	(465.409.094,00)	92,35
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.462.366.467,00	4.316.459.171,00	(145.907.316,00)	96,73
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.613.454.950,00	1.294.753.172,00	(318.701.778,00)	80,25
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.2	BELANJA MODAL	4.109.592.000,00	230.304.940,00	(3.879.287.060,00)	5,60



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.978.000,00	41.807.721,00	(5.170.279,00)	88,99
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.062.814.000,00	188.497.219,00	(3.874.316.781,00)	4,64
5.2.10	PERTANAHAN	31.485.953.515,00	29.326.616.359,00	(2.159.337.156,00)	93,14
5.2.10.2-10.2-11.3-28.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	31.485.953.515,00	29.326.616.359,00	(2.159.337.156,00)	93,14
5.2.10.2-10.2-11.3-28.01.1	BELANJA OPERASI	24.709.505.705,00	23.932.551.049,00	(776.954.656,00)	96,86
5.2.10.2-10.2-11.3-28.01.1.01	Belanja Pegawai	10.825.329.259,00	10.659.908.004,00	(165.421.255,00)	98,47
5.2.10.2-10.2-11.3-28.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.884.176.446,00	13.272.643.045,00	(611.533.401,00)	95,60
5.2.10.2-10.2-11.3-28.01.2	BELANJA MODAL	6.776.447.810,00	5.394.066.310,00	(1.382.381.500,00)	79,80
5.2.10.2-10.2-11.3-28.01.2.01	Belanja Modal Tanah	211.153.810,00	1.458.000,00	(209.695.810,00)	0,69
5.2.10.2-10.2-11.3-28.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.438.694.000,00	1.411.840.000,00	(26.854.000,00)	98,13
5.2.10.2-10.2-11.3-28.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.123.600.000,00	3.980.767.310,00	(1.142.832.690,00)	77,99
5.2.10.2-10.2-11.3-28.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.720.760.934,00	6.401.265.100,00	(319.495.834,00)	95,25
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.720.760.934,00	6.401.265.100,00	(319.495.834,00)	95,25
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.700.040.934,00	6.381.265.100,00	(318.755.834,00)	95,24
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.692.285.806,00	4.465.188.357,00	(127.097.449,00)	97,23
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.107.755.128,00	1.916.096.743,00	(191.658.385,00)	90,91
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	20.720.000,00	19.980.000,00	(740.000,00)	96,43
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.720.000,00	19.980.000,00	(740.000,00)	96,43
5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.850.673.843,00	12.477.958.090,00	(1.372.715.753,00)	90,09
5.2.13.2-13.2-14.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.850.673.843,00	12.477.958.090,00	(1.372.715.753,00)	90,09
5.2.13.2-13.2-14.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.654.093.843,00	12.306.163.090,00	(1.347.930.753,00)	90,13
5.2.13.2-13.2-14.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.191.954.101,00	4.064.656.988,00	(127.297.113,00)	96,96
5.2.13.2-13.2-14.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.134.189.742,00	6.913.556.102,00	(1.220.633.640,00)	84,99
5.2.13.2-13.2-14.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.327.950.000,00	1.327.950.000,00	0,00	100,00
5.2.13.2-13.2-14.0-00.01.2	BELANJA MODAL	196.580.000,00	171.795.000,00	(24.785.000,00)	87,39
5.2.13.2-13.2-14.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.580.000,00	171.795.000,00	(24.785.000,00)	87,39
5.2.15	PERHUBUNGAN	28.821.891.646,00	27.438.548.434,00	(1.383.343.212,00)	95,20
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	28.821.891.646,00	27.438.548.434,00	(1.383.343.212,00)	95,20
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	28.584.191.646,00	27.208.844.434,00	(1.375.347.212,00)	95,19
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.650.640.301,00	8.502.366.215,00	(148.274.086,00)	98,29
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.933.551.345,00	18.706.458.219,00	(1.227.093.126,00)	93,84
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	237.500.000,00	229.702.000,00	(7.798.000,00)	96,72
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.580.000,00	41.319.000,00	(3.261.000,00)	92,89
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.920.000,00	188.383.000,00	(4.537.000,00)	97,65
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	9.211.913.814,00	8.636.258.214,00	(575.655.600,00)	93,75
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.211.913.814,00	8.636.258.214,00	(575.655.600,00)	93,75
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	8.759.913.814,00	8.224.558.214,00	(535.355.600,00)	93,89
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	3.724.101.693,00	3.627.536.871,00	(96.564.822,00)	97,41
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.033.312.121,00	3.564.521.343,00	(468.790.778,00)	88,04



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.05	Belanja Hibah	1.032.500.000,00	1.032.500.000,00	0,00	100,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	462.000.000,00	411.700.000,00	(40.300.000,00)	91,08
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	422.000.000,00	411.700.000,00	(10.300.000,00)	97,56
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0
5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	98.027.515.686,00	95.397.201.883,00	(2.630.313.803,00)	97,32
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	98.027.515.686,00	95.397.201.883,00	(2.630.313.803,00)	97,32
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1	BELANJA OPERASI	20.208.053.177,00	18.855.851.885,00	(1.351.201.512,00)	92,32
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.01	Belanja Pegawai	7.171.570.920,00	7.142.647.529,00	(28.922.991,00)	99,60
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.778.482.257,00	11.255.203.736,00	(1.522.278.521,00)	88,09
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.05	Belanja Hibah	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	100,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2	BELANJA MODAL	77.819.462.509,00	75.740.350.218,00	(1.079.112.291,00)	98,61
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.821.900,00	178.592.800,00	(10.229.100,00)	94,58
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.630.640.609,00	75.561.757.418,00	(1.068.883.191,00)	98,62
5.2.18	PENANAMAN MODAL	5.644.763.184,00	5.279.523.443,00	(365.239.741,00)	93,53
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.644.763.184,00	5.279.523.443,00	(365.239.741,00)	93,53
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.644.763.184,00	5.279.523.443,00	(365.239.741,00)	93,53
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.360.755.997,00	4.126.326.616,00	(234.429.381,00)	94,16
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.264.004.187,00	1.153.196.827,00	(110.807.360,00)	91,23
5.2.22	KEBUDAYAAN	90.731.061.969,00	91.889.822.891,00	(1.861.439.278,00)	98,01
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01	Dinas Kebudayaan	90.731.061.969,00	91.889.822.891,00	(1.861.439.278,00)	98,01
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	90.848.003.969,00	91.787.826.241,00	(1.860.377.728,00)	98,01
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.543.486.824,00	4.494.577.514,00	(48.909.310,00)	99,92
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.309.667.145,00	6.958.196.727,00	(351.468.418,00)	95,19
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	81.794.850.000,00	80.334.850.000,00	(1.460.000.000,00)	98,22
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	63.058.000,00	61.996.450,00	(1.061.550,00)	98,72
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.058.000,00	42.396.450,00	(661.550,00)	98,46
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00
5.2.23	PERPUSTAKAAN	3.902.827.204,00	3.792.216.824,00	(110.610.380,00)	97,17
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.902.827.204,00	3.792.216.824,00	(110.610.380,00)	97,17
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.745.580.604,00	3.641.651.824,00	(103.928.780,00)	97,23
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.173.705.010,00	3.118.619.842,00	(55.085.168,00)	98,26
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.875.594,00	523.031.982,00	(48.843.612,00)	91,46
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	157.246.600,00	150.565.000,00	(6.681.600,00)	95,75
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.246.600,00	150.565.000,00	(6.681.600,00)	95,75
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	43.207.848.250,00	37.721.690.781,00	(5.486.157.469,00)	87,30
5.3.26	PARIWISATA	29.377.798.993,00	24.361.988.082,00	(5.015.810.911,00)	82,93
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01	Dinas Pariwisata	29.377.798.993,00	24.361.988.082,00	(5.015.810.911,00)	82,93
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	14.489.330.918,00	13.242.882.582,00	(1.246.448.336,00)	91,40
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.470.630.400,00	6.331.576.239,00	(139.054.161,00)	97,85
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.018.700.518,00	6.911.306.343,00	(1.107.394.175,00)	86,19



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.26.3-28.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	14.888.468.075,00	11.119.105.500,00	(3.769.362.575,00)	74,88
5.3.26.3-28.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	347.438.300,00	326.975.500,00	(20.461.800,00)	94,11
5.3.26.3-28.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.541.029.775,00	10.792.129.000,00	(3.748.900.775,00)	74,22
5.3.27	PERTANIAN	13.830.049.257,00	13.359.702.699,00	(470.346.558,00)	96,60
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian	13.830.049.257,00	13.359.702.699,00	(470.346.558,00)	96,60
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.830.049.257,00	13.359.702.699,00	(470.346.558,00)	96,60
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.122.000.395,00	10.947.628.025,00	(174.372.370,00)	98,43
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.358.048.862,00	2.080.074.674,00	(277.974.188,00)	88,21
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	332.000.000,00	(18.000.000,00)	94,86
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	93.991.462.108,00	86.435.393.242,00	(7.556.068.866,00)	91,96
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	43.511.013.234,00	38.293.047.866,00	(5.217.965.568,00)	88,01
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	43.511.013.234,00	38.293.047.866,00	(5.217.965.568,00)	88,01
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	41.456.749.544,00	36.736.357.486,00	(4.720.392.078,00)	88,61
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	19.713.698.506,00	18.411.499.825,00	(1.302.198.681,00)	93,39
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.743.053.038,00	18.324.857.641,00	(3.418.195.397,00)	84,28
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.054.263.690,00	1.556.690.200,00	(497.573.490,00)	75,78
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.674.551.690,00	1.271.253.500,00	(403.298.190,00)	75,92
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.712.000,00	0,00	(79.712.000,00)	0
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	7.000.000,00	(13.000.000,00)	35,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	260.000.000,00	278.436.700,00	(1.563.300,00)	99,44
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	50.480.448.874,00	48.142.345.576,00	(2.338.103.298,00)	95,37
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50.480.448.874,00	48.142.345.576,00	(2.338.103.298,00)	95,37
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	50.144.160.874,00	47.614.273.781,00	(2.329.887.093,00)	95,35
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	27.228.685.601,00	26.594.840.027,00	(634.045.574,00)	97,67
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.915.275.273,00	21.219.433.754,00	(1.695.841.519,00)	92,60
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	336.288.000,00	328.071.795,00	(8.216.205,00)	97,56
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.960.000,00	80.720.000,00	(7.240.000,00)	91,77
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.328.000,00	97.711.795,00	(616.205,00)	99,37
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	149.640.000,00	(360.000,00)	99,76
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	165.232.787.057,00	157.374.079.255,26	(7.858.707.801,74)	95,24
5.5.01	PERENCANAAN	5.929.800.439,00	5.247.706.244,00	(682.094.195,00)	88,50
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.929.800.439,00	5.247.706.244,00	(682.094.195,00)	88,50
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.779.282.439,00	5.099.792.544,00	(679.489.895,00)	88,24
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.646.511.390,00	4.353.168.906,00	(293.342.484,00)	93,69
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.132.771.049,00	746.623.638,00	(386.147.402,00)	65,91
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	150.518.000,00	147.913.700,00	(2.604.300,00)	98,27
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.518.000,00	48.913.700,00	(1.604.300,00)	96,82
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00
5.5.02	KEUANGAN	147.775.714.851,00	142.438.221.591,26	(5.337.493.259,74)	96,39
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	147.775.714.851,00	142.438.221.591,26	(5.337.493.259,74)	96,39



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	18.933.974.040,00	18.241.170.536,00	(2.692.803.504,00)	85,78
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	10.403.363.435,00	9.156.201.179,00	(1.247.162.256,00)	88,01
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.627.919.930,00	3.652.059.238,00	(975.860.692,00)	78,91
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03	Belanja Bunga	3.902.690.675,00	3.432.910.119,00	(469.780.556,00)	87,96
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	876.853.800,00	682.232.080,00	(214.621.520,00)	77,52
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	478.853.800,00	484.232.080,00	(14.621.520,00)	98,95
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	398.000.000,00	198.000.000,00	(200.000.000,00)	49,75
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.826.721.728,00	2.940.474.524,26	(886.247.203,74)	76,86
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.826.721.728,00	2.940.474.524,26	(886.247.203,74)	76,86
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	124.139.165.483,00	122.594.344.451,00	(1.544.821.032,00)	98,76
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.000.620.483,00	15.455.999.451,00	(1.544.821.032,00)	90,91
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.138.345.000,00	107.138.345.000,00	0,00	100,00
5.5.03	KEPEGAWAIAN	9.014.794.768,00	7.599.422.929,00	(1.415.371.839,00)	84,30
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.014.794.768,00	7.599.422.929,00	(1.415.371.839,00)	84,30
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.882.158.768,00	7.474.571.979,00	(1.407.586.789,00)	84,15
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.920.778.820,00	4.795.579.458,00	(125.199.362,00)	97,46
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.961.379.948,00	2.678.992.521,00	(1.282.387.427,00)	67,63
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	132.636.000,00	124.850.950,00	(7.785.050,00)	94,13
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.636.000,00	115.110.700,00	(7.525.300,00)	93,86
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	9.740.250,00	(259.750,00)	97,40
5.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.512.477.008,00	2.088.728.491,00	(423.748.517,00)	83,13
5.5.05.5-05.0-00.0-00.01	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.512.477.008,00	2.088.728.491,00	(423.748.517,00)	83,13
5.5.05.5-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	1.953.026.008,00	1.539.404.491,00	(413.621.517,00)	78,82
5.5.05.5-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	949.707.760,00	824.389.894,00	(325.317.866,00)	85,75
5.5.05.5-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.003.318.248,00	915.014.597,00	(88.303.651,00)	91,20
5.5.05.5-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	559.451.000,00	549.324.000,00	(10.127.000,00)	98,19
5.5.05.5-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399.451.000,00	390.480.000,00	(8.971.000,00)	97,75
5.5.05.5-05.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	160.000.000,00	158.844.000,00	(1.156.000,00)	99,28
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.099.216.821,00	9.110.039.276,00	(4.989.177.545,00)	64,61
5.6.01	INSPEKTORAT	14.099.216.821,00	9.110.039.276,00	(4.989.177.545,00)	64,61
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat	14.099.216.821,00	9.110.039.276,00	(4.989.177.545,00)	64,61
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.187.873.821,00	8.554.283.011,00	(4.633.590.810,00)	64,96
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.272.233.226,00	8.267.224.497,00	(5.008.729,00)	99,92
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.895.440.595,00	2.287.058.514,00	(4.608.382.081,00)	33,17
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	931.543.000,00	555.756.265,00	(375.786.735,00)	59,86
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	831.543.000,00	456.003.340,00	(375.539.660,00)	54,84
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.752.925,00	(247.075,00)	99,75
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	27.908.822.169,00	25.881.782.235,73	(2.028.039.933,27)	92,73
5.7.01	KECAMATAN	27.908.822.169,00	25.881.782.235,73	(2.028.039.933,27)	92,73
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Klungkung	12.301.653.616,00	11.708.200.052,00	(593.453.564,00)	95,16



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.821.755.818,00	11.242.494.531,00	(579.261.285,00)	95,10
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.198.786.654,00	7.968.781.755,00	(230.004.899,00)	97,19
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.622.968.962,00	3.273.712.776,00	(349.256.186,00)	90,36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	479.898.000,00	483.705.521,00	(16.192.478,00)	96,63
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.794.000,00	350.785.250,00	(14.026.750,00)	96,15
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.382.843,00	(617.157,00)	98,73
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.104.000,00	83.577.428,00	(1.526.572,00)	97,86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Banjarangkan	5.134.717.185,00	4.834.339.259,80	(500.377.925,40)	94,26
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	3.411.957.129,00	3.327.446.342,00	(84.510.787,00)	97,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.867.327.222,00	2.823.316.537,00	(44.010.685,00)	98,47
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.629.907,00	504.129.805,00	(40.500.102,00)	92,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	1.722.760.036,00	1.306.892.917,60	(415.867.118,40)	75,86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.560.000,00	23.241.000,00	(1.319.000,00)	94,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.698.200.036,00	1.283.651.917,60	(414.548.118,40)	75,59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Nusa Penida	6.380.513.768,00	4.978.794.153,40	(401.719.614,60)	92,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	3.648.113.768,00	3.605.443.596,00	(42.670.172,00)	98,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	2.644.929.623,00	2.635.264.584,00	(9.664.939,00)	99,63
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.003.184.145,00	970.178.912,00	(33.005.233,00)	96,71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	1.732.400.000,00	1.373.350.557,40	(359.049.442,60)	79,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.400.000,00	31.850.000,00	(1.550.000,00)	95,36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.699.000.000,00	1.341.500.557,40	(357.499.442,60)	78,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Dawan	5.082.937.620,00	4.582.428.770,73	(500.508.849,27)	89,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	2.541.007.620,00	2.502.328.863,00	(38.677.757,00)	98,48
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	1.971.367.608,00	1.948.168.367,00	(22.198.241,00)	98,87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.640.012,00	553.160.496,00	(16.479.516,00)	97,11
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	2.551.930.000,00	2.080.098.907,73	(491.831.092,27)	80,73
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.930.000,00	60.930.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.491.000.000,00	1.999.168.907,73	(491.831.092,27)	80,26
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	19.389.897.758,00	19.120.023.245,00	(269.874.513,00)	98,71
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.389.897.758,00	19.120.023.245,00	(269.874.513,00)	98,71
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.389.897.758,00	19.120.023.245,00	(269.874.513,00)	98,71
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	19.325.321.758,00	19.076.163.115,00	(249.128.643,00)	98,71
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.282.769.346,00	3.237.781.491,00	(44.987.855,00)	98,63
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.187.942.232,00	1.983.801.444,00	(204.140.788,00)	90,67
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	13.854.610.180,00	13.854.610.180,00	0,00	100,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	44.576.000,00	43.830.130,00	(745.870,00)	98,33
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.576.000,00	43.830.130,00	(745.870,00)	98,33
6	PEMBIAYAAN DAERAH	55.825.666.012,00	55.874.539.707,64	48.873.695,64	100,09
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	55.825.666.012,00	55.874.539.707,64	48.873.695,64	100,09
6.5.02	KEUANGAN	55.825.666.012,00	55.874.539.707,64	48.873.695,64	100,09



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	55.825.886.012,00	55.874.539.707,64	48.873.895,64	100,09
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.825.886.012,00	55.874.539.707,64	48.873.895,64	100,09
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Pembungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.787.166.012,00	55.808.039.707,64	40.873.895,64	100,07
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	58.500.000,00	66.500.000,00	8.000.000,00	113,88



LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

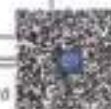
**Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG **RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	1.405.774.287.570,00	1.370.585.084.745,33	97,50	1.147.881.200.982,81
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	352.325.957.788,00	350.535.512.385,33	99,49	309.462.458.434,81
4.1.01	Pajak Daerah	98.607.836.827,00	113.695.107.806,00	115,30	86.962.734.048,00
4.1.02	Retribusi Daerah	46.080.714.238,00	47.649.857.636,55	103,41	31.578.996.300,38
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.602.949.071,00	7.602.949.070,93	100,00	7.035.424.452,86
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.034.457.652,00	181.568.597.871,85	90,78	203.885.303.832,77
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.053.249.934.803,00	1.019.842.353.788,00	96,83	838.345.455.086,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	818.854.573.000,00	818.590.718.389,00	99,97	741.830.848.905,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	745.536.770.000,00	745.272.915.389,00	99,96	674.518.732.905,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	25.474.548.000,00	25.474.548.000,00	100,00	21.254.382.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	47.843.257.000,00	47.843.257.000,00	100,00	45.857.734.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	234.395.361.803,00	201.251.635.397,00	85,86	98.714.608.191,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	108.697.251.806,00	103.794.221.758,00	95,49	90.357.255.218,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	125.698.110.197,00	97.457.413.641,00	77,53	8.357.350.973,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	198.394.979,00	207.218.574,00	104,45	73.287.452,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	198.394.979,00	199.960.479,00	100,79	995.628,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.258.095,00	0	72.291.834,00
5	BELANJA DAERAH	1.481.599.953.582,00	1.355.627.177.837,47	92,75	1.209.203.552.416,43
5.1	BELANJA OPERASI	1.101.348.670.417,00	1.043.731.802.885,44	94,77	958.970.417.187,11
5.1.01	Belanja Pegawai	550.867.552.386,00	532.237.023.471,00	96,82	547.933.902.006,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.978.043.177,00	390.939.219.129,44	91,36	351.182.651.334,91
5.1.03	Belanja Bunga	3.902.690.675,00	3.432.910.119,00	87,96	1.160.435.668,00
5.1.05	Belanja Hibah	113.952.184.180,00	112.552.519.446,00	98,77	53.221.636.678,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.660.200.000,00	4.570.130.800,00	98,07	5.471.791.500,00
5.2	BELANJA MODAL	232.286.395.954,00	188.360.556.196,77	80,23	130.873.281.726,32
5.2.01	Belanja Modal Tanah	311.153.810,00	1.458.000,00	0,47	2.179.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.143.897.804,00	19.547.261.141,00	92,45	52.122.646.756,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.147.613.346,00	119.708.395.962,77	88,58	38.249.152.175,32
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.668.844.000,00	42.368.269.276,00	59,71	38.233.177.116,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.672.644.996,00	3.917.785.979,00	106,67	2.286.226.681,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.052.242.000,00	817.365.838,00	77,68	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.825.721.728,00	2.940.474.524,25	76,88	8.615.770.807,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.825.721.728,00	2.940.474.524,25	76,88	8.615.770.807,00
5.4	BELANJA TRANSFER	124.139.165.483,00	122.594.344.451,00	98,76	112.744.082.895,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.000.820.483,00	15.455.999.451,00	90,91	7.901.892.982,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.138.345.000,00	107.138.345.000,00	100,00	104.842.189.714,00
	SURPLUS / DEFISIT	(55.825.696.012,00)	14.956.906.907,85	0	(91.322.351.423,62)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.825.696.012,00	55.874.539.707,64	100,09	117.089.517.435,98
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.787.166.012,00	55.808.039.707,64	100,07	60.507.386.186,96
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0	55.899.353.269,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	58.500.000,00	66.500.000,00	113,88	682.775.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	55.825.696.012,00	55.874.539.707,64	100,09	117.089.517.435,98
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	70.833.446.515,50	0	55.787.166.012,36



LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN

SKPD : 1-01 2-19 0-00.01 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.000.00.4	PENDAPATAN DAERAH	7.850.000,00	23.950.000,00	16.100.000,00	305,10		
00.000.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.850.000,00	23.950.000,00	16.100.000,00	305,10		
00.000.00.4.1.02	Retribusi Daerah	7.850.000,00	23.950.000,00	16.100.000,00	305,10		
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	267.065.030.671,00	277.744.650.082,07	(9.310.380.586,93)	96,78		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	209.227.231.897,00	202.784.582.762,00	(6.442.649.135,00)	96,92		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.984.600,00	34.770.023,00	(214.577,00)	99,38		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.449.600,00	19.307.617,00	(141.983,00)	99,27		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.449.600,00	19.307.617,00	(141.983,00)	99,27		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.449.600,00	19.307.617,00	(141.983,00)	99,27		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.535.000,00	15.462.406,00	(72.594,00)	99,53		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	15.535.000,00	15.462.406,00	(72.594,00)	99,53		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.535.000,00	15.462.406,00	(72.594,00)	99,53		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	206.377.772.277,00	200.069.462.849,00	(6.308.309.628,00)	96,94		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	206.377.772.277,00	200.069.462.849,00	(6.308.309.628,00)	96,94		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	206.312.928.927,00	200.004.839.999,00	(6.308.088.928,00)	96,94		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	206.312.928.927,00	200.004.839.999,00	(6.308.088.928,00)	96,94		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	206.312.928.927,00	200.004.839.999,00	(6.308.088.928,00)	96,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	64.843.360,00	64.622.650,00	(220.700,00)	99,66		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	64.843.360,00	64.622.650,00	(220.700,00)	99,66		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.843.360,00	64.622.650,00	(220.700,00)	99,66		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.760.845.532,00	1.748.972.684,00	(11.872.868,00)	99,33		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.760.845.532,00	1.748.972.684,00	(11.872.868,00)	99,33		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.760.845.532,00	1.748.972.684,00	(11.872.868,00)	99,33		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.760.845.532,00	1.748.972.684,00	(11.872.868,00)	99,33		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.053.629.488,00	931.377.426,00	(122.252.062,00)	88,40		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.045.085.288,00	922.833.226,00	(122.252.062,00)	88,30		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	669.795.288,00	588.403.226,00	(81.392.062,00)	87,85		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.795.288,00	588.403.226,00	(81.392.062,00)	87,85		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	375.290.000,00	334.430.000,00	(40.860.000,00)	89,11		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.290.000,00	334.430.000,00	(40.860.000,00)	89,11		
01.2.06.10	Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	8.544.200,00	8.544.200,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	8.544.200,00	8.544.200,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.544.200,00	8.544.200,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.795.375.774,00	59.323.272.059,13	(2.472.103.714,87)	96,00		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.161.665.428,00	26.833.171.217,00	(1.328.494.211,00)	95,28		
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.876.200.000,00	1.037.580.669,00	(838.619.341,00)	55,30		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.876.200.000,00	1.037.580.669,00	(838.619.341,00)	55,30		
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.876.200.000,00	1.037.580.669,00	(838.619.341,00)	55,30		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	889.533.800,00	890.463.477,00	(9.000.323,00)	99,99		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	90.442.800,00	82.365.363,00	(8.077.437,00)	91,07		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.442.800,00	82.365.363,00	(8.077.437,00)	91,07		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	809.091.000,00	808.118.114,00	(972.886,00)	99,88		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	809.091.000,00	808.118.114,00	(972.886,00)	99,88		
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	579.800.000,00	565.540.168,00	(14.259.832,00)	97,54		
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	579.800.000,00	565.540.168,00	(14.259.832,00)	97,54		
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	579.800.000,00	565.540.168,00	(14.259.832,00)	97,54		
02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	403.830.000,00	376.500.000,00	(27.330.000,00)	93,23		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	403.830.000,00	376.500.000,00	(27.330.000,00)	93,23		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.830.000,00	376.500.000,00	(27.330.000,00)	93,23		
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	675.205.050,00	665.365.050,00	(9.820.000,00)	98,55		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	675.205.050,00	665.365.050,00	(9.820.000,00)	98,55		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.205.050,00	4.885.050,00	(2.320.000,00)	67,80		
02.2.01.21.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	668.000.000,00	660.500.000,00	(7.500.000,00)	98,88		
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	250.000.000,00	165.500.000,00	(84.500.000,00)	66,20		
02.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	249.600.000,00	185.100.000,00	(84.500.000,00)	68,15		
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.600.000,00	185.100.000,00	(84.500.000,00)	68,15		
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.252.400,00	9.195.000,00	(57.400,00)	99,38		
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	9.252.400,00	9.195.000,00	(57.400,00)	99,38		
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.252.400,00	9.195.000,00	(57.400,00)	99,38		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	286.642.600,00	214.507.600,00	(72.135.000,00)	74,83		
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	286.642.600,00	214.507.600,00	(72.135.000,00)	74,83		
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.642.600,00	214.507.600,00	(72.135.000,00)	74,83		
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.545.361.778,00	5.416.275.720,00	(129.086.058,00)	97,67		
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	5.511.119.778,00	5.382.530.832,00	(128.588.946,00)	97,67		
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.511.119.778,00	5.382.530.832,00	(128.588.946,00)	97,67		
02.2.01.26.5.2	BELANJA MODAL	34.242.000,00	33.744.888,00	(497.112,00)	98,55		
02.2.01.26.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	34.242.000,00	33.744.888,00	(497.112,00)	98,55		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	39.753.800,00	8.181.500,00	(31.572.300,00)	20,58		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	39.753.800,00	8.181.500,00	(31.572.300,00)	20,58		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.753.800,00	8.181.500,00	(31.572.300,00)	20,58		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.584.100.000,00	17.472.130.543,00	(111.969.457,00)	99,38		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	12.690.246.684,00	12.368.748.627,00	(321.498.057,00)	97,47		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.690.246.684,00	12.368.748.627,00	(321.498.057,00)	97,47		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	4.893.853.316,00	5.103.381.916,00	209.528.600,00	104,28		
02.2.01.29.5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.738.394.716,00	2.747.905.916,00	9.511.200,00	100,35		
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.155.458.600,00	2.355.476.000,00	200.017.400,00	109,28		
02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.591.500,00	1.560.000,00	(31.500,00)	98,02		
02.2.01.35.5.1	BELANJA OPERASI	1.591.500,00	1.560.000,00	(31.500,00)	98,02		
02.2.01.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.591.500,00	1.560.000,00	(31.500,00)	98,02		
02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.591.500,00	1.591.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.38.5.1	BELANJA OPERASI	1.591.500,00	1.591.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.591.500,00	1.591.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.591.500,00	1.560.000,00	(31.500,00)	98,02		
02.2.01.39.5.1	BELANJA OPERASI	1.591.500,00	1.560.000,00	(31.500,00)	98,02		
02.2.01.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.591.500,00	1.560.000,00	(31.500,00)	98,02		
02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.211.500,00	7.180.000,00	(31.500,00)	99,56		
02.2.01.40.5.1	BELANJA OPERASI	7.211.500,00	7.180.000,00	(31.500,00)	99,56		
02.2.01.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.211.500,00	7.180.000,00	(31.500,00)	99,56		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.381.345.240,00	20.517.298.365,00	(864.046.875,00)	95,95		



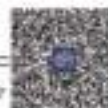
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.529.488.200,00	1.182.024.750,00	(347.463.450,00)	77,28		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.529.488.200,00	1.182.024.750,00	(347.463.450,00)	77,28		
02.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.529.488.200,00	1.182.024.750,00	(347.463.450,00)	77,28		
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	2.732.888.000,00	2.732.874.850,00	(13.350,00)	100,00		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	2.732.888.000,00	2.732.874.850,00	(13.350,00)	100,00		
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.732.888.000,00	2.732.874.850,00	(13.350,00)	100,00		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.305.000.000,00	1.302.991.188,00	(2.008.834,00)	99,85		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	208.000.000,00	208.008.000,00	(1.994.000,00)	99,04		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.000.000,00	208.008.000,00	(1.994.000,00)	99,04		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	1.097.000.000,00	1.096.985.188,00	(14.834,00)	100,00		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.097.000.000,00	1.096.985.188,00	(14.834,00)	100,00		
02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	333.832.800,00	322.400.000,00	(11.432.800,00)	96,58		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	333.832.800,00	322.400.000,00	(11.432.800,00)	96,58		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.832.800,00	322.400.000,00	(11.432.800,00)	96,58		
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	142.200.000,00	135.000.000,00	(7.200.000,00)	94,94		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	142.200.000,00	135.000.000,00	(7.200.000,00)	94,94		
02.2.02.32.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	142.200.000,00	135.000.000,00	(7.200.000,00)	94,94		
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa	125.000.000,00	82.750.000,00	(42.250.000,00)	66,20		
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.35.5.2	BELANJA MODAL	124.800.000,00	82.550.000,00	(42.250.000,00)	66,15		
02.2.02.35.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.800.000,00	82.550.000,00	(42.250.000,00)	66,15		
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.993.345.740,00	3.873.722.172,00	(119.623.568,00)	97,00		
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	3.993.345.740,00	3.873.722.172,00	(119.623.568,00)	97,00		
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.993.345.740,00	3.873.722.172,00	(119.623.568,00)	97,00		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.210.790.000,00	10.878.832.127,00	(333.957.873,00)	97,02		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	9.115.188.556,00	8.721.357.870,00	(393.830.686,00)	95,66		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.115.188.556,00	8.721.357.870,00	(393.830.686,00)	95,66		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	2.092.601.444,00	2.155.474.257,00	62.872.813,00	103,00		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	964.565.048,00	968.395.162,00	3.830.113,00	100,40		
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.128.036.396,00	1.187.079.095,00	(59.042.700,00)	105,23		
02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.591.500,00	1.560.000,00	(31.500,00)	98,02		
02.2.02.48.5.1	BELANJA OPERASI	1.591.500,00	1.560.000,00	(31.500,00)	98,02		
02.2.02.48.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.591.500,00	1.560.000,00	(31.500,00)	98,02		
02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.551.500,00	2.551.500,00	0,00	100,00		
02.2.02.51.5.1	BELANJA OPERASI	2.551.500,00	2.551.500,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.51.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.551.500,00	2.551.500,00	0,00	100,00		
02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.551.500,00	2.520.000,00	(31.500,00)	98,77		
02.2.02.52.5.1	BELANJA OPERASI	2.551.500,00	2.520.000,00	(31.500,00)	98,77		
02.2.02.52.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.551.500,00	2.520.000,00	(31.500,00)	98,77		
02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.106.000,00	2.070.000,00	(36.000,00)	98,29		
02.2.02.53.5.1	BELANJA OPERASI	2.106.000,00	2.070.000,00	(36.000,00)	98,29		
02.2.02.53.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.106.000,00	2.070.000,00	(36.000,00)	98,29		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.696.495.606,00	11.431.496.150,13	(264.999.455,87)	97,73		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.029.156.340,00	1.010.148.191,13	(19.008.148,87)	98,15		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	113.720.700,00	104.410.700,00	(9.310.000,00)	91,81		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.720.700,00	104.410.700,00	(9.310.000,00)	91,81		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	915.435.640,00	906.737.491,13	(8.698.148,87)	98,94		
02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.780.000,00	225.763.250,00	(5.016.750,00)	97,83		
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	485.155.640,00	480.836.357,13	(4.320.282,87)	99,11		
02.2.03.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.500.000,00	199.138.884,00	(361.116,00)	99,82		
02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	158.800.000,00	158.227.935,00	(572.065,00)	99,64		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	158.800.000,00	158.227.935,00	(572.065,00)	99,64		
02.2.03.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.800.000,00	158.227.935,00	(572.065,00)	99,64		
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.942.784.064,00	3.877.974.907,00	(64.809.157,00)	98,36		
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	3.942.784.064,00	3.877.974.907,00	(64.809.157,00)	98,36		
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.942.784.064,00	3.877.974.907,00	(64.809.157,00)	98,36		
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.458.011.802,00	1.451.536.802,00	(6.475.000,00)	99,56		
02.2.03.15.5.1	BELANJA OPERASI	1.458.011.802,00	1.451.536.802,00	(6.475.000,00)	99,56		
02.2.03.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.458.011.802,00	1.451.536.802,00	(6.475.000,00)	99,56		
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.928.639.300,00	1.774.249.800,00	(154.389.500,00)	91,99		
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.928.639.300,00	1.774.249.800,00	(154.389.500,00)	91,99		
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.928.639.300,00	1.774.249.800,00	(154.389.500,00)	91,99		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.163.200.000,00	3.143.920.415,00	(19.279.585,00)	99,39		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	2.762.734.350,00	2.739.633.084,00	(23.101.266,00)	99,16		
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.342.024.350,00	1.290.485.561,00	(51.538.789,00)	93,18		
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	1.420.710.000,00	1.489.147.503,00	68.437.503,00	104,82		
02.2.03.18.5.2	BELANJA MODAL	400.465.650,00	404.287.351,00	3.821.701,00	100,96		
02.2.03.18.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.465.650,00	404.287.351,00	3.821.701,00	100,96		
02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	734.500,00	484.500,00	(250.000,00)	65,96		
02.2.03.25.5.1	BELANJA OPERASI	734.500,00	484.500,00	(250.000,00)	65,96		
02.2.03.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	734.500,00	484.500,00	(250.000,00)	65,96		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.626.800,00	1.626.800,00	0,00	100,00		
02.2.03.26.5.1	BELANJA OPERASI	1.626.800,00	1.626.800,00	0,00	100,00		
02.2.03.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.626.800,00	1.626.800,00	0,00	100,00		
02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	13.542.800,00	13.326.800,00	(216.000,00)	98,41		
02.2.03.27.5.1	BELANJA OPERASI	13.542.800,00	13.326.800,00	(216.000,00)	98,41		
02.2.03.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.542.800,00	13.326.800,00	(216.000,00)	98,41		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	555.869.500,00	541.308.327,00	(14.561.173,00)	97,36		
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	149.980.500,00	145.841.564,00	(4.138.936,00)	97,24		
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	149.980.500,00	145.841.564,00	(4.138.936,00)	97,24		
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.980.500,00	145.841.564,00	(4.138.936,00)	97,24		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	362.890.000,00	362.687.763,00	(2.202,00)	100,00		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	362.890.000,00	362.687.763,00	(2.202,00)	100,00		
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.960.000,00	105.060.000,00	(9.900.000,00)	91,39		
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	247.730.000,00	257.627.763,00	9.897,76	104,00		
02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	43.199.000,00	32.779.000,00	(10.420.000,00)	75,88		
02.2.04.22.5.1	BELANJA OPERASI	43.199.000,00	32.779.000,00	(10.420.000,00)	75,88		
02.2.04.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.199.000,00	32.779.000,00	(10.420.000,00)	75,88		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.823.084.900,00	1.413.743.432,00	(209.341.468,00)	87,10		
02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.823.084.900,00	1.413.743.432,00	(209.341.468,00)	87,10		
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.823.084.900,00	1.413.743.432,00	(209.341.468,00)	87,10		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.823.084.900,00	1.413.743.432,00	(209.341.468,00)	87,10		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.373.084.900,00	1.163.743.432,00	(209.341.468,00)	84,75		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	74.605.900,00	73.248.500,00	(1.357.400,00)	98,18		
03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.815.900,00	8.760.000,00	(55.900,00)	99,37		
03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.815.900,00	8.760.000,00	(55.900,00)	99,37		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.815.900,00	8.760.000,00	(55.900,00)	99,37		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.815.900,00	8.760.000,00	(55.900,00)	99,37		
03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	65.790.000,00	64.488.500,00	(1.301.500,00)	98,02		
03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	65.790.000,00	64.488.500,00	(1.301.500,00)	98,02		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	65.790.000,00	64.488.500,00	(1.301.500,00)	98,02		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.790.000,00	64.488.500,00	(1.301.500,00)	98,02		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAJING KEOLAHRAGAAN	14.327.960.000,00	14.143.103.328,94	(184.856.671,06)	98,71		
00.2.02	Penyelenggaraan Kejuruan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.628.774.900,00	13.537.159.510,00	(91.615.390,00)	99,53		
00.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuruan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	13.628.774.900,00	13.537.159.510,00	(91.615.390,00)	99,53		
00.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.628.774.900,00	13.537.159.510,00	(91.615.390,00)	99,53		
00.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.774.900,00	1.537.159.510,00	(91.615.390,00)	94,36		
00.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	100,00		
00.2.05	Pembiayaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	599.185.300,00	605.943.818,94	(66.741.481,06)	88,88		
00.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	599.185.300,00	605.943.818,94	(66.741.481,06)	88,88		
00.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	561.554.500,00	468.970.298,94	(92.584.201,06)	83,51		
00.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.554.500,00	468.970.298,94	(92.584.201,06)	83,51		
00.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	137.630.800,00	136.973.520,00	(657.280,00)	99,52		
00.2.05.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.630.800,00	50.873.520,00	(757.280,00)	98,72		
00.2.05.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.000.000,00	86.100.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	6.772.000,00	6.790.000,00	(18.000,00)	99,94		
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.772.000,00	6.790.000,00	(18.000,00)	99,94		
04.2.01.01	Perhitungan dan Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.106.000,00	2.070.000,00	(36.000,00)	98,29		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.106.000,00	2.070.000,00	(36.000,00)	98,29		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.106.000,00	2.070.000,00	(36.000,00)	98,29		
04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4.666.000,00	4.630.000,00	(36.000,00)	99,23		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.666.000,00	4.630.000,00	(36.000,00)	99,23		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.666.000,00	4.630.000,00	(36.000,00)	99,23		
	SURPLUS / DEFISIT	(287.547.180.671,00)	(277.720.700.082,07)	9.826.480.588,93	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKESANAAN	(287.547.180.671,00)	(277.720.700.082,07)	9.826.480.588,93	0		



DINAS KESEHATAN



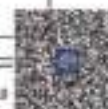
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

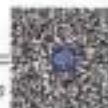
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

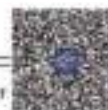
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	28.757.992.342,00	27.900.027.570,99	(857.964.771,01)	97,02		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.757.992.342,00	27.900.027.570,99	(857.964.771,01)	97,02		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.757.992.342,00	27.900.027.570,99	(857.964.771,01)	97,02		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	184.251.350.266,00	147.683.513.634,41	(136.567.836.631,59)	80,91		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.855.304.671,00	72.638.388.234,50	(9.216.916.436,50)	88,74		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.992.600,00	30.320.065,00	(8.672.535,00)	77,76		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.432.600,00	24.381.053,00	(1.051.547,00)	95,87		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.432.600,00	24.381.053,00	(1.051.547,00)	95,87		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.432.600,00	24.381.053,00	(1.051.547,00)	95,87		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.560.000,00	5.939.012,00	(7.620.988,00)	43,80		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	13.560.000,00	5.939.012,00	(7.620.988,00)	43,80		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.560.000,00	5.939.012,00	(7.620.988,00)	43,80		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.475.432.067,00	45.480.914.570,00	(3.994.517.497,00)	91,93		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.459.249.217,00	45.464.790.470,00	(3.994.458.747,00)	91,92		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.459.249.217,00	45.464.790.470,00	(3.994.458.747,00)	91,92		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	49.385.677.778,00	45.371.219.031,00	(3.994.458.747,00)	91,91		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.571.439,00	93.571.439,00	0,00	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.182.850,00	16.124.100,00	(58.750,00)	99,64		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	16.182.850,00	16.124.100,00	(58.750,00)	99,64		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.182.850,00	16.124.100,00	(58.750,00)	99,64		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.664.390,00	52.501.512,00	(162.878,00)	99,69		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52.664.390,00	52.501.512,00	(162.878,00)	99,69		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	52.664.390,00	52.501.512,00	(162.878,00)	99,69		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.664.390,00	52.501.512,00	(162.878,00)	99,69		



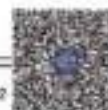
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	463.133.510,00	368.992.808,00	(94.141.002,00)	79,67		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	458.119.000,00	364.106.168,00	(94.012.802,00)	79,48		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	405.320.300,00	314.006.168,00	(91.314.202,00)	77,47		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.320.300,00	314.006.168,00	(91.314.202,00)	77,47		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	52.798.700,00	50.100.000,00	(2.698.700,00)	94,89		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.798.700,00	50.100.000,00	(2.698.700,00)	94,89		
01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	5.014.450,00	4.886.350,00	(128.100,00)	97,45		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	5.014.450,00	4.886.350,00	(128.100,00)	97,45		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.014.450,00	4.886.350,00	(128.100,00)	97,45		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	31.825.082.104,00	26.703.659.579,50	(5.121.422.524,50)	83,91		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	31.825.082.104,00	26.703.659.579,50	(5.121.422.524,50)	83,91		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	28.849.390.104,00	24.547.307.643,50	(4.302.082.460,50)	85,09		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.676.985.335,00	7.631.463.539,00	(745.511.796,00)	87,41		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.172.424.769,00	16.615.884.104,50	(3.556.570.664,50)	82,37		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	2.975.692.000,00	2.156.351.938,00	(819.340.062,00)	72,47		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.527.042.000,00	2.126.075.921,00	(400.966.079,00)	84,13		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	167.000.000,00	5.844.150,00	(161.155.850,00)	3,50		
01.2.10.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	277.000.000,00	19.781.869,00	(257.218.135,00)	7,14		
01.2.10.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	73.230.395.349,00	66.308.198.928,91	(6.922.196.420,09)	90,55		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.695.949.159,00	6.601.827.488,91	(1.094.121.672,09)	85,81		
02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.634.353.200,00	1.390.529.117,91	(243.824.082,09)	85,08		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.753.200,00	1.474.500,00	(1.278.700,00)	53,56		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.753.200,00	1.474.500,00	(1.278.700,00)	53,56		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	1.831.800.000,00	1.389.054.617,91	(242.545.382,09)	85,13		
02.2.01.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.831.800.000,00	1.389.054.617,91	(242.545.382,09)	85,13		
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	395.253.100,00	331.099.540,00	(64.153.560,00)	83,77		
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	1.093.100,00	919.100,00	(174.000,00)	84,08		
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.093.100,00	919.100,00	(174.000,00)	84,08		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	394.160.000,00	330.180.440,00	(63.979.560,00)	83,77		
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	394.160.000,00	330.180.440,00	(63.979.560,00)	83,77		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.731.950,00	14.081.500,00	(7.650.450,00)	64,80		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	4.292.000,00	3.511.500,00	(780.500,00)	81,82		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.292.000,00	3.511.500,00	(780.500,00)	81,82		



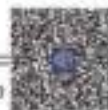
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	17.439.950,00	10.570.000,00	(6.869.950,00)	60,61		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.439.950,00	10.570.000,00	(6.869.950,00)	60,61		
02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	59.000.000,00	49.888.600,00	(9.111.400,00)	84,56		
02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	59.000.000,00	49.888.600,00	(9.111.400,00)	84,56		
02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	49.888.600,00	(9.111.400,00)	84,56		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.230.887.482,00	1.890.159.768,00	(340.727.714,00)	84,73		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	2.192.281.282,00	1.851.904.768,00	(340.356.514,00)	84,47		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.192.281.282,00	1.851.904.768,00	(340.356.514,00)	84,47		
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	38.626.200,00	38.255.000,00	(371.200,00)	99,04		
02.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.626.200,00	38.255.000,00	(371.200,00)	99,04		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.079.367.727,00	2.529.262.175,00	(550.105.552,00)	82,14		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	3.079.367.727,00	2.529.262.175,00	(550.105.552,00)	82,14		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.079.367.727,00	2.529.262.175,00	(550.105.552,00)	82,14		
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	262.660.700,00	212.851.736,00	(49.808.964,00)	81,04		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	262.660.700,00	212.851.736,00	(49.808.964,00)	81,04		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.660.700,00	212.851.736,00	(49.808.964,00)	81,04		
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	212.695.000,00	183.965.050,00	(28.739.950,00)	86,49		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	212.695.000,00	183.965.050,00	(28.739.950,00)	86,49		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.695.000,00	183.965.050,00	(28.739.950,00)	86,49		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.697.505.812,00	58.336.820.236,00	(5.360.685.576,00)	91,58		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	539.041.000,00	487.538.600,00	(51.502.400,00)	90,45		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	539.041.000,00	487.538.600,00	(51.502.400,00)	90,45		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.041.000,00	487.538.600,00	(51.502.400,00)	90,45		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.527.150,00	3.767.560,00	(21.759.600,00)	14,76		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.527.150,00	3.767.560,00	(21.759.600,00)	14,76		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.527.150,00	3.767.560,00	(21.759.600,00)	14,76		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.732.050,00	6.605.560,00	(9.126.500,00)	41,99		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.732.050,00	6.605.560,00	(9.126.500,00)	41,99		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.732.050,00	6.605.560,00	(9.126.500,00)	41,99		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	266.524.750,00	247.458.750,00	(19.066.000,00)	92,85		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	266.524.750,00	247.458.750,00	(19.066.000,00)	92,85		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.524.750,00	247.458.750,00	(19.066.000,00)	92,85		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	274.394.800,00	268.399.600,00	(5.995.200,00)	97,82		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	274.394.800,00	268.399.600,00	(5.995.200,00)	97,82		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.394.800,00	268.399.600,00	(5.995.200,00)	97,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	506.508.100,00	457.940.800,00	(48.567.300,00)	90,41		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	470.148.100,00	421.580.800,00	(48.567.300,00)	89,67		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.148.100,00	356.580.800,00	(48.567.300,00)	88,01		
02.2.02.06.5.1.05	Belanja Hibah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	188.197.600,00	186.321.750,00	(1.875.850,00)	99,00		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	188.197.600,00	186.321.750,00	(1.875.850,00)	99,00		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.197.600,00	186.321.750,00	(1.875.850,00)	99,00		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.531.250,00	531.250,00	(3.000.000,00)	15,04		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.531.250,00	531.250,00	(3.000.000,00)	15,04		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.531.250,00	531.250,00	(3.000.000,00)	15,04		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	177.238.000,00	154.170.900,00	(23.067.100,00)	86,99		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	177.238.000,00	154.170.900,00	(23.067.100,00)	86,99		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.238.000,00	154.170.900,00	(23.067.100,00)	86,99		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jera Berat	91.035.400,00	81.606.300,00	(9.430.100,00)	89,64		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	91.035.400,00	81.606.300,00	(9.430.100,00)	89,64		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.035.400,00	81.606.300,00	(9.430.100,00)	89,64		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	783.626.050,00	206.370.950,00	(578.255.100,00)	26,21		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	783.626.050,00	206.370.950,00	(578.255.100,00)	26,21		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.176.050,00	70.920.950,00	(578.255.100,00)	10,92		
02.2.02.11.5.1.05	Belanja Hibah	134.450.000,00	134.450.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	423.592.850,00	361.118.462,00	(62.478.388,00)	85,25		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	423.592.850,00	361.118.462,00	(62.478.388,00)	85,25		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.592.850,00	136.118.462,00	(62.478.388,00)	68,54		
02.2.02.12.5.1.05	Belanja Hibah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	102.848.700,00	44.427.300,00	(58.421.400,00)	43,20		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	102.848.700,00	44.427.300,00	(58.421.400,00)	43,20		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.848.700,00	44.427.300,00	(58.421.400,00)	43,20		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.024.928.100,00	1.077.203.450,00	(947.724.650,00)	53,20		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	2.024.928.100,00	1.077.203.450,00	(947.724.650,00)	53,20		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.024.928.100,00	1.077.203.450,00	(947.724.650,00)	53,20		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	201.747.000,00	182.621.000,00	(19.126.000,00)	90,52		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	201.747.000,00	182.621.000,00	(19.126.000,00)	90,52		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.747.000,00	182.621.000,00	(19.126.000,00)	90,52		



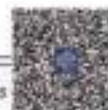
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	637.273.900,00	593.582.150,00	(43.691.750,00)	93,14		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	335.474.900,00	293.732.150,00	(41.742.750,00)	87,56		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.474.900,00	293.732.150,00	(41.742.750,00)	87,56		
02.2.02.17.5.2	BELANJA MODAL	301.799.000,00	299.850.000,00	(1.949.000,00)	99,35		
02.2.02.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	301.799.000,00	299.850.000,00	(1.949.000,00)	99,35		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	710.885.000,00	663.815.035,00	(46.869.965,00)	93,40		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	710.885.000,00	663.815.035,00	(46.869.965,00)	93,40		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.885.000,00	663.815.035,00	(46.869.965,00)	93,40		
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.099.800,00	1.099.600,00	0,00	100,00		
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	1.099.800,00	1.099.600,00	0,00	100,00		
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.099.800,00	1.099.600,00	0,00	100,00		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	179.105.200,00	151.079.200,00	(28.026.000,00)	84,35		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	179.105.200,00	151.079.200,00	(28.026.000,00)	84,35		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.105.200,00	151.079.200,00	(28.026.000,00)	84,35		
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.324.583.500,00	1.873.437.120,00	(451.126.380,00)	80,59		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	2.324.583.500,00	1.873.437.120,00	(451.126.380,00)	80,59		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.324.583.500,00	1.873.437.120,00	(451.126.380,00)	80,59		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	46.285.967.462,00	44.133.114.400,00	(2.152.853.062,00)	95,35		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	46.285.967.462,00	44.133.114.400,00	(2.152.853.062,00)	95,35		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.285.967.462,00	44.133.114.400,00	(2.152.853.062,00)	95,35		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00		
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	119.505.150,00	111.218.400,00	(8.286.750,00)	93,07		
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	119.505.150,00	111.218.400,00	(8.286.750,00)	93,07		
02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.505.150,00	111.218.400,00	(8.286.750,00)	93,07		
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.599.823.400,00	5.411.783.962,00	(188.039.438,00)	96,64		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	5.599.823.400,00	5.411.783.962,00	(188.039.438,00)	96,64		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.599.823.400,00	5.411.783.962,00	(188.039.438,00)	96,64		
02.2.02.32.5.2	BELANJA MODAL	96.000.000,00	94.450.000,00	(1.550.000,00)	98,39		
02.2.02.32.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.000.000,00	94.450.000,00	(1.550.000,00)	98,39		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.689.134.000,00	1.148.984.057,00	(520.189.943,00)	68,84		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	1.689.134.000,00	1.148.984.057,00	(520.189.943,00)	68,84		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	1.222.420.000,00	910.313.757,00	(312.106.243,00)	74,47		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.714.000,00	238.550.300,00	(208.163.700,00)	53,42		
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.942.850,00	1.267.000,00	(1.675.850,00)	43,05		
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	2.942.850,00	1.267.000,00	(1.675.850,00)	43,05		
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.942.850,00	1.267.000,00	(1.675.850,00)	43,05		
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	244.290.050,00	193.599.200,00	(50.690.850,00)	79,25		
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	244.290.050,00	193.599.200,00	(50.690.850,00)	79,25		
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.290.050,00	193.599.200,00	(50.690.850,00)	79,25		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	49.443.900,00	48.430.900,00	(1.013.000,00)	97,95		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	49.443.900,00	48.430.900,00	(1.013.000,00)	97,95		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.443.900,00	48.430.900,00	(1.013.000,00)	97,95		
02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	55.150.000,00	52.550.000,00	(2.600.000,00)	95,29		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	55.150.000,00	52.550.000,00	(2.600.000,00)	95,29		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.150.000,00	52.550.000,00	(2.600.000,00)	95,29		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	31.250.000,00	28.050.000,00	(3.200.000,00)	89,76		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	31.250.000,00	28.050.000,00	(3.200.000,00)	89,76		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	28.050.000,00	(3.200.000,00)	89,76		
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	8.861.750,00	8.796.850,00	(64.900,00)	99,27		
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8.861.750,00	8.796.850,00	(64.900,00)	99,27		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.861.750,00	8.796.850,00	(64.900,00)	99,27		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.861.750,00	8.796.850,00	(64.900,00)	99,27		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.628.077.628,00	1.360.754.356,00	(267.323.272,00)	83,58		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.628.077.628,00	1.360.754.356,00	(267.323.272,00)	83,58		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.628.077.628,00	1.360.754.356,00	(267.323.272,00)	83,58		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.503.800,00	329.396.356,00	(209.108.444,00)	61,17		
02.2.04.03.5.1.05	Belanja Hibah	991.384.000,00	991.384.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	98.189.828,00	39.975.000,00	(58.214.828,00)	40,71		
02.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.189.828,00	39.975.000,00	(58.214.828,00)	40,71		
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.175.408.296,00	7.825.362.521,00	(350.045.775,00)	95,72		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.391.349.796,00	7.047.802.409,00	(343.547.387,00)	95,35		
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.329.500,00	1.261.450,00	(68.050,00)	94,88		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.329.500,00	1.261.450,00	(68.050,00)	94,88		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.329.500,00	1.261.450,00	(68.050,00)	94,86		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	7.270.617.896,00	6.945.212.209,00	(325.405.687,00)	95,52		
	Kesehatan Sesuai Standar						
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.270.617.896,00	6.945.212.209,00	(325.405.687,00)	95,52		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.270.617.896,00	6.945.212.209,00	(325.405.687,00)	95,52		
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	119.402.400,00	101.328.750,00	(18.073.650,00)	84,86		
	Kesehatan						
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	119.402.400,00	101.328.750,00	(18.073.650,00)	84,86		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.402.400,00	101.328.750,00	(18.073.650,00)	84,86		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	784.056.500,00	777.560.112,00	(6.496.388,00)	99,17		
	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah						
	Kabupaten/Kota						
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	784.056.500,00	777.560.112,00	(6.496.388,00)	99,17		
	Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat						
	Daerah Kabupaten/Kota						
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	784.056.500,00	777.560.112,00	(6.496.388,00)	99,17		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.056.500,00	777.560.112,00	(6.496.388,00)	99,17		
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	426.003.750,00	372.816.500,00	(53.187.250,00)	87,51		
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan	80.717.000,00	70.357.500,00	(10.359.500,00)	87,17		
	dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	7.086.000,00	5.946.000,00	(1.140.000,00)	83,91		
	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat						
	Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional						
	(UMOT)						
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.086.000,00	5.946.000,00	(1.140.000,00)	83,91		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.086.000,00	5.946.000,00	(1.140.000,00)	83,91		
04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak	73.631.000,00	64.411.500,00	(9.219.500,00)	87,46		
	Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat						
	Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional						
	(UMOT)						
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.631.000,00	64.411.500,00	(9.219.500,00)	87,46		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.631.000,00	64.411.500,00	(9.219.500,00)	87,46		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah	155.939.000,00	142.942.000,00	(12.997.000,00)	91,57		
	Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk						
	Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat						
	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	155.939.000,00	142.942.000,00	(12.997.000,00)	91,57		
	Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah						
	Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk						
	Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat						
	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	155.939.000,00	142.942.000,00	(12.997.000,00)	91,57		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.939.000,00	142.942.000,00	(12.997.000,00)	91,97		
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27.493.750,00	27.455.000,00	(38.750,00)	99,86		
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27.493.750,00	27.455.000,00	(38.750,00)	99,86		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.493.750,00	27.455.000,00	(38.750,00)	99,86		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.493.750,00	27.455.000,00	(38.750,00)	99,86		
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	161.854.000,00	132.062.000,00	(29.792.000,00)	81,59		
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	161.854.000,00	132.062.000,00	(29.792.000,00)	81,59		
04.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	161.854.000,00	132.062.000,00	(29.792.000,00)	81,59		
04.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.854.000,00	132.062.000,00	(29.792.000,00)	81,59		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	564.240.200,00	540.747.450,00	(23.492.750,00)	95,84		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.630.000,00	64.872.750,00	(4.757.250,00)	93,17		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	69.630.000,00	64.872.750,00	(4.757.250,00)	93,17		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.630.000,00	64.872.750,00	(4.757.250,00)	93,17		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.630.000,00	64.872.750,00	(4.757.250,00)	93,17		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.124.000,00	6.068.000,00	(56.000,00)	99,05		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6.124.000,00	6.068.000,00	(56.000,00)	99,05		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.124.000,00	6.068.000,00	(56.000,00)	99,05		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.124.000,00	6.068.000,00	(56.000,00)	99,05		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	488.486.200,00	469.808.700,00	(18.677.500,00)	96,18		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	488.486.200,00	469.808.700,00	(18.677.500,00)	96,18		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	488.486.200,00	469.808.700,00	(18.677.500,00)	96,18		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.486.200,00	489.808.700,00	(18.877.500,00)	98,18		
	SURPLUS / DEFISIT	(135.493.357.934,00)	(119.783.486.053,42)	15.709.871.880,58	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(135.493.357.934,00)	(119.783.486.053,42)	15.709.871.880,58	0		



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(R S U D)



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
 SKPD : 1-02.0-00.0-00.02 Rumah Sakit Umum Daerah
 Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.02.000 Rumah Sakit Umum Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	130.790.650.000,00	148.178.300.824,51	18.387.650.824,51	114,06		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.790.650.000,00	148.178.300.824,51	18.387.650.824,51	114,06		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130.790.650.000,00	148.178.300.824,51	18.387.650.824,51	114,06		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	197.397.817.813,00	194.794.016.826,00	(2.603.799.087,00)	98,56		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	194.867.256.549,00	192.278.606.962,00	(2.588.649.587,00)	98,67		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.488.152.318,00	29.174.792.046,00	(323.360.272,00)	98,90		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.488.152.318,00	29.174.792.046,00	(323.360.272,00)	98,90		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.488.152.318,00	29.174.792.046,00	(323.360.272,00)	98,90		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	29.488.152.318,00	29.174.792.046,00	(323.360.272,00)	98,90		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	165.369.104.231,00	163.103.814.916,00	(2.265.289.315,00)	98,63		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	165.369.104.231,00	163.103.814.916,00	(2.265.289.315,00)	98,63		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	159.709.537.310,00	157.454.382.688,00	(2.255.144.744,00)	98,59		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	55.505.744.906,00	55.891.684.386,00	(614.060.519,00)	98,91		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.203.792.405,00	101.562.708.190,00	(1.641.084.225,00)	98,41		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	5.659.566.821,00	5.649.422.350,00	(10.144.571,00)	99,82		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.158.489.921,00	4.158.471.350,00	(9.998.571,00)	99,76		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.491.067.000,00	1.490.951.000,00	(148.000,00)	99,99		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.530.561.064,00	2.515.411.664,00	(15.149.500,00)	99,40		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.260.561.064,00	2.260.561.064,00	0,00	100,00		
02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.260.561.064,00	2.260.561.064,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	2.260.561.064,00	2.260.561.064,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.290.561.094,00	2.290.561.094,00	0,00	100,00		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	270.000.000,00	254.850.500,00	(15.149.500,00)	94,39		
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	270.000.000,00	254.850.500,00	(15.149.500,00)	94,39		
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	270.000.000,00	254.850.500,00	(15.149.500,00)	94,39		
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	254.850.500,00	(15.149.500,00)	94,39		
	SURPLUS / DEFISIT	(98.607.167.813,00)	(45.615.717.701,49)	20.991.449.911,51	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(98.607.167.813,00)	(45.615.717.701,49)	20.991.449.911,51	0		



**DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 SKPD : 1-03.1-04.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Unit Organisasi : 1-03.1-04.0-00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	2.278.350.000,00	2.656.438.051,00	378.088.051,00	116,59		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.278.350.000,00	2.656.438.051,00	378.088.051,00	116,59		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	2.278.350.000,00	2.656.438.051,00	378.088.051,00	116,59		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	107.893.930.711,00	75.908.467.226,00	(31.985.463.485,00)	70,35		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.980.875.663,00	10.638.661.181,00	(342.224.472,00)	96,68		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.710.099,00	12.076.010,00	(634.089,00)	95,01		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.470.800,00	5.113.060,00	(357.740,00)	93,46		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.470.800,00	5.113.060,00	(357.740,00)	93,46		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.470.800,00	5.113.060,00	(357.740,00)	93,46		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.239.299,00	6.962.950,00	(276.349,00)	96,18		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.239.299,00	6.962.950,00	(276.349,00)	96,18		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.239.299,00	6.962.950,00	(276.349,00)	96,18		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.286.247.424,00	10.082.205.387,00	(204.042.037,00)	98,00		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.283.867.424,00	10.077.950.387,00	(205.917.037,00)	98,00		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.283.867.424,00	10.077.950.387,00	(205.917.037,00)	98,00		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.283.867.424,00	10.077.950.387,00	(205.917.037,00)	98,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.380.000,00	4.255.000,00	(125.000,00)	97,15		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.380.000,00	4.255.000,00	(125.000,00)	97,15		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.255.000,00	(125.000,00)	97,15		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.734.653,00	22.005.614,00	(1.729.039,00)	92,72		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.734.653,00	22.005.614,00	(1.729.039,00)	92,72		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.734.653,00	22.005.614,00	(1.729.039,00)	92,72		



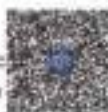
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.734.853,00	22.005.814,00	(1.729.039,00)	92,72		
01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.442.538,00	245.211.089,00	(22.231.449,00)	91,89		
01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.358.288,00	242.156.838,00	(22.201.449,00)	91,60		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	231.438.288,00	209.512.839,00	(21.925.449,00)	90,53		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.438.288,00	209.512.839,00	(21.925.449,00)	90,53		
01.2.05.02.5.2	BELANJA MODAL	32.920.000,00	32.644.000,00	(276.000,00)	99,16		
01.2.05.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.920.000,00	32.644.000,00	(276.000,00)	99,16		
01.2.05.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	3.084.250,00	3.054.250,00	(30.000,00)	99,03		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.084.250,00	3.054.250,00	(30.000,00)	99,03		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.084.250,00	3.054.250,00	(30.000,00)	99,03		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.740.939,00	277.153.081,00	(111.587.858,00)	71,30		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	388.740.939,00	277.153.081,00	(111.587.858,00)	71,30		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	388.740.939,00	277.153.081,00	(111.587.858,00)	71,30		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.740.939,00	277.153.081,00	(111.587.858,00)	71,30		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.882.202.878,00	1.349.717.315,00	(312.485.563,00)	81,20		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	492.074.500,00	295.408.041,00	(206.666.459,00)	58,00		
02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	79.213.500,00	73.556.644,00	(5.656.856,00)	92,88		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	55.213.500,00	54.789.144,00	(444.356,00)	99,20		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.213.500,00	54.789.144,00	(444.356,00)	99,20		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	18.787.500,00	(5.212.500,00)	78,28		
02.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.000.000,00	18.787.500,00	(5.212.500,00)	78,28		
02.2.01.18	Pembangunan Sempai dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	208.042.500,00	7.954.869,00	(200.087.631,00)	3,82		
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	8.042.500,00	7.954.869,00	(87.631,00)	98,91		
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.042.500,00	7.954.869,00	(87.631,00)	98,91		
02.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
02.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	204.818.500,00	203.896.528,00	(921.972,00)	99,55		
02.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	4.818.500,00	4.696.528,00	(121.972,00)	97,47		
02.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.818.500,00	4.696.528,00	(121.972,00)	97,47		
02.2.01.24.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.200.000,00	(800.000,00)	99,60		
02.2.01.24.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.200.000,00	(800.000,00)	99,60		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.170.128.178,00	1.084.309.274,00	(105.818.904,00)	90,96		
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	74.243.750,00	73.525.932,00	(717.818,00)	99,03		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	67.878.750,00	67.010.832,00	(867.918,00)	99,01		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.878.750,00	67.010.832,00	(867.918,00)	99,01		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	6.565.000,00	6.515.100,00	(49.900,00)	99,24		
02.2.02.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.565.000,00	6.515.100,00	(49.900,00)	99,24		
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	545.651.328,00	537.528.502,00	(8.122.826,00)	98,51		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	438.216.328,00	428.335.702,00	(7.880.626,00)	98,19		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.216.328,00	428.335.702,00	(7.880.626,00)	98,19		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	109.435.000,00	109.192.800,00	(242.200,00)	99,78		
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.435.000,00	109.192.800,00	(242.200,00)	99,78		
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	550.233.100,00	453.254.840,00	(96.978.260,00)	82,38		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	550.233.100,00	453.254.840,00	(96.978.260,00)	82,38		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.233.100,00	453.254.840,00	(96.978.260,00)	82,38		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	101.498.100,00	1.475.200,00	(100.022.900,00)	1,45		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	101.498.100,00	1.475.200,00	(100.022.900,00)	1,45		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	101.498.100,00	1.475.200,00	(100.022.900,00)	1,45		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	101.498.100,00	1.475.200,00	(100.022.900,00)	1,45		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.498.100,00	1.475.200,00	(100.022.900,00)	1,45		
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	233.037.018,00	231.936.818,00	(1.100.200,00)	99,53		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	233.037.018,00	231.936.818,00	(1.100.200,00)	99,53		
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	59.841.500,00	59.024.500,00	(817.000,00)	98,63		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.401.500,00	2.379.500,00	(22.000,00)	99,08		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.401.500,00	2.379.500,00	(22.000,00)	99,08		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	57.440.000,00	56.645.000,00	(795.000,00)	98,62		
03.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.440.000,00	56.645.000,00	(795.000,00)	98,62		
03.2.01.08	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	71.884.118,00	71.868.918,00	(15.200,00)	99,98		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	71.884.118,00	71.868.918,00	(15.200,00)	99,98		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.884.118,00	71.868.918,00	(15.200,00)	99,98		
03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	101.311.400,00	101.043.400,00	(268.000,00)	99,74		
03.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	1.311.400,00	1.293.400,00	(18.000,00)	98,63		



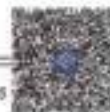
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.311.400,00	1.283.400,00	(18.000,00)	98,63		
03.2.01.19.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.750.000,00	(250.000,00)	99,75		
03.2.01.19.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.750.000,00	(250.000,00)	99,75		
03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	50.659.400,00	49.992.900,00	(666.500,00)	98,68		
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.659.400,00	49.992.900,00	(666.500,00)	98,68		
03.2.03.05	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	50.659.400,00	49.992.900,00	(666.500,00)	98,68		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.659.400,00	49.992.900,00	(666.500,00)	98,68		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.659.400,00	49.992.900,00	(666.500,00)	98,68		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	9.746.800,00	9.128.722,00	(618.078,00)	93,66		
04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	9.746.800,00	9.128.722,00	(618.078,00)	93,66		
04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	9.746.800,00	9.128.722,00	(618.078,00)	93,66		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.746.800,00	9.128.722,00	(618.078,00)	93,66		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.746.800,00	9.128.722,00	(618.078,00)	93,66		
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.701.519.906,00	2.701.445.406,00	(74.500,00)	100,00		
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.701.519.906,00	2.701.445.406,00	(74.500,00)	100,00		
05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.827.850,00	5.592.650,00	(35.200,00)	99,37		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.827.850,00	5.592.650,00	(35.200,00)	99,37		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.827.850,00	5.592.650,00	(35.200,00)	99,37		
05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00	(39.300,00)	100,00		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00	(39.300,00)	100,00		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00	(39.300,00)	100,00		
06	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.627.300,00	6.545.600,00	(81.700,00)	98,77		
06.2.01	Urutan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.627.300,00	6.545.600,00	(81.700,00)	98,77		
06.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.627.300,00	6.545.600,00	(81.700,00)	98,77		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.627.300,00	6.545.600,00	(81.700,00)	98,77		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.627.300,00	6.545.600,00	(81.700,00)	98,77		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	430.281.250,00	427.447.750,00	(2.813.500,00)	99,35		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	430.261.250,00	427.447.750,00	(2.813.500,00)	99,36		
06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	26.248.750,00	25.964.750,00	(284.000,00)	98,92		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.248.750,00	25.964.750,00	(284.000,00)	98,92		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.248.750,00	25.964.750,00	(284.000,00)	98,92		
06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	404.012.500,00	401.483.000,00	(2.529.500,00)	99,37		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	404.012.500,00	401.483.000,00	(2.529.500,00)	99,37		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.012.500,00	401.483.000,00	(2.529.500,00)	99,37		
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	12.724.351.033,00	10.060.576.167,00	(2.663.774.866,00)	79,07		
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	12.724.351.033,00	10.060.576.167,00	(2.663.774.866,00)	79,07		
09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	370.215.077,00	370.167.500,00	(27.577,00)	99,99		
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.143.400,00	21.116.500,00	(26.900,00)	99,87		
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.143.400,00	21.116.500,00	(26.900,00)	99,87		
09.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	349.071.677,00	349.071.000,00	(677,00)	100,00		
09.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	349.071.677,00	349.071.000,00	(677,00)	100,00		
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	12.354.135.956,00	9.690.388.667,00	(2.663.747.289,00)	78,44		
09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	637.988.412,00	350.241.668,00	(287.746.744,00)	54,90		
09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.988.412,00	350.241.668,00	(287.746.744,00)	54,90		
09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	11.716.147.544,00	9.340.146.999,00	(2.376.000.545,00)	79,72		
09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.716.147.544,00	9.340.146.999,00	(2.376.000.545,00)	79,72		
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	78.232.976.527,00	49.737.519.964,00	(28.495.456.563,00)	63,56		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	78.232.976.527,00	49.737.519.964,00	(28.495.456.563,00)	63,56		
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknik Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.937.660.467,00	2.873.306.224,00	(1.064.254.233,00)	72,97		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	783.025.457,00	777.774.095,00	(5.251.362,00)	99,33		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.025.457,00	777.774.095,00	(5.251.362,00)	99,33		
10.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	3.154.535.000,00	2.095.532.129,00	(1.059.002.871,00)	66,43		
10.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.154.535.000,00	2.095.532.129,00	(1.059.002.871,00)	66,43		
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	37.796.624.760,00	14.201.969.634,00	(23.594.655.126,00)	37,57		
10.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	362.279.760,00	223.627.248,00	(138.652.512,00)	61,76		
10.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.279.760,00	223.627.248,00	(138.652.512,00)	61,76		
10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	37.434.345.000,00	13.978.332.386,00	(23.456.012.614,00)	37,34		
10.2.01.05.5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.336.345.000,00	13.978.132.386,00	(23.358.212.614,00)	37,44		
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	15.210.000.000,00	12.897.381.478,00	(2.312.618.522,00)	84,80		
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	15.210.000.000,00	12.897.381.478,00	(2.312.618.522,00)	84,80		
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.210.000.000,00	12.897.381.478,00	(2.312.618.522,00)	84,80		
10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	19.383.791.310,00	17.878.853.784,00	(1.504.937.526,00)	92,24		
10.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	6.878.291.310,00	6.743.168.880,00	(133.122.430,00)	98,06		
10.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.878.291.310,00	6.743.168.880,00	(133.122.430,00)	98,06		
10.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	12.507.500.000,00	11.135.684.884,00	(1.371.815.116,00)	89,03		
10.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.507.500.000,00	11.135.684.884,00	(1.371.815.116,00)	89,03		
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	1.515.000.000,00	1.499.705.706,00	(15.294.294,00)	98,99		
10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	1.515.000.000,00	1.499.705.706,00	(15.294.294,00)	98,99		
10.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.515.000.000,00	1.499.705.706,00	(15.294.294,00)	98,99		
10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	388.000.000,00	386.313.158,00	(1.686.842,00)	99,57		
10.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	388.000.000,00	386.313.158,00	(1.686.842,00)	99,57		
10.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.000.000,00	386.313.158,00	(1.686.842,00)	99,57		
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	53.282.350,00	30.316.195,00	(22.966.155,00)	56,90		
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	42.648.400,00	19.910.345,00	(22.738.055,00)	46,68		
11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	42.648.400,00	19.910.345,00	(22.738.055,00)	46,68		
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	42.648.400,00	19.910.345,00	(22.738.055,00)	46,68		
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.648.400,00	19.910.345,00	(22.738.055,00)	46,68		
11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	2.422.550,00	2.387.850,00	(34.700,00)	98,57		
11.2.02.10	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.422.550,00	2.387.850,00	(34.700,00)	98,57		
11.2.02.10.5.1	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja	2.422.550,00	2.387.850,00	(34.700,00)	98,57		
11.2.02.10.5.1.02	Proyek Konstruksi	2.422.550,00	2.387.850,00	(34.700,00)	98,57		
11.2.02.10.5.1.02.1	BELANJA OPERASI	2.422.550,00	2.387.850,00	(34.700,00)	98,57		
11.2.02.10.5.1.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.422.550,00	2.387.850,00	(34.700,00)	98,57		
11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	8.211.400,00	8.018.000,00	(193.400,00)	97,64		
11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	8.211.400,00	8.018.000,00	(193.400,00)	97,64		
11.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.211.400,00	8.018.000,00	(193.400,00)	97,64		
11.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.211.400,00	8.018.000,00	(193.400,00)	97,64		
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	708.892.896,00	663.714.008,00	(43.178.888,00)	93,89		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RURTR) Kabupaten/Kota	168.261.820,00	157.141.450,00	(9.120.370,00)	94,51		
12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	168.261.820,00	157.141.450,00	(9.120.370,00)	94,51		
12.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	168.261.820,00	157.141.450,00	(9.120.370,00)	94,51		
12.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.261.820,00	157.141.450,00	(9.120.370,00)	94,51		



KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	530.498.886,00	496.515.368,00	(33.983.518,00)	93,59		
12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	530.498.886,00	496.515.368,00	(33.983.518,00)	93,59		
12.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	530.498.886,00	496.515.368,00	(33.983.518,00)	93,59		
12.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.498.886,00	496.515.368,00	(33.983.518,00)	93,59		
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemertan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	10.132.190,00	10.067.190,00	(75.000,00)	99,26		
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10.132.190,00	10.067.190,00	(75.000,00)	99,26		
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.132.190,00	10.067.190,00	(75.000,00)	99,26		
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.132.190,00	10.067.190,00	(75.000,00)	99,26		
	SURPLUS / DEFISIT	(106.515.580.711,00)	(73.252.031.175,00)	32.363.549.536,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(106.515.580.711,00)	(73.252.031.175,00)	32.363.549.536,00	0		



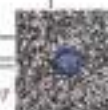
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 SKPD : 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	18.146.925.206,00	17.546.418.203,00	(600.507.006,00)	96,69		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.559.272.228,00	12.212.102.184,00	(347.170.034,00)	97,24		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.407.048,00	101.215.048,00	(192.000,00)	99,81		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.860.248,00	95.714.548,00	(145.700,00)	99,85		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	95.860.248,00	95.714.548,00	(145.700,00)	99,85		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.860.248,00	95.714.548,00	(145.700,00)	99,85		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.546.800,00	5.500.500,00	(46.300,00)	99,17		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.546.800,00	5.500.500,00	(46.300,00)	99,17		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.546.800,00	5.500.500,00	(46.300,00)	99,17		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.858.582.405,00	11.587.141.854,00	(71.440.551,00)	99,38		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.817.974.386,00	11.546.578.435,00	(71.395.951,00)	99,38		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.817.974.386,00	11.546.578.435,00	(71.395.951,00)	99,38		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.817.974.386,00	11.546.578.435,00	(71.395.951,00)	99,38		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.608.019,00	40.563.419,00	(44.600,00)	99,89		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.608.019,00	40.563.419,00	(44.600,00)	99,89		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.608.019,00	40.563.419,00	(44.600,00)	99,89		
01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	148.737.210,00	148.451.737,00	(285.473,00)	99,81		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	148.737.210,00	148.451.737,00	(285.473,00)	99,81		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	148.737.210,00	148.451.737,00	(285.473,00)	99,81		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.737.210,00	148.451.737,00	(285.473,00)	99,81		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	860.545.566,00	371.792.255,00	(275.252.010,00)	57,69		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	846.993.366,00	371.792.255,00	(275.201.110,00)	57,48		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	437.664.565,00	371.792.255,00	(65.872.310,00)	84,96		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.664.565,00	371.792.255,00	(65.872.310,00)	84,96		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	209.328.800,00	0,00	(209.328.800,00)	0		
01.2.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	209.328.800,00	0,00	(209.328.800,00)	0		
01.2.06.10	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	3.552.200,00	3.501.300,00	(50.900,00)	98,57		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.552.200,00	3.501.300,00	(50.900,00)	98,57		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.552.200,00	3.501.300,00	(50.900,00)	98,57		
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.665.151.241,00	2.595.600.532,00	(69.550.709,00)	97,39		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.339.529.755,00	2.299.682.645,00	(39.847.109,00)	98,30		
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	148.093.052,00	144.851.128,00	(3.241.924,00)	97,81		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	148.093.052,00	144.851.128,00	(3.241.924,00)	97,81		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.093.052,00	144.851.128,00	(3.241.924,00)	97,81		
02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.109.879.679,00	2.076.703.156,00	(33.176.523,00)	98,43		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.109.879.679,00	2.076.703.156,00	(33.176.523,00)	98,43		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.109.879.679,00	2.076.703.156,00	(33.176.523,00)	98,43		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.853.250,00	9.797.200,00	(2.056.050,00)	82,65		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.853.250,00	9.797.200,00	(2.056.050,00)	82,65		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.853.250,00	9.797.200,00	(2.056.050,00)	82,65		
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hati Asasi Manusia	69.703.774,00	68.331.162,00	(1.372.612,00)	98,03		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	69.703.774,00	68.331.162,00	(1.372.612,00)	98,03		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.703.774,00	68.331.162,00	(1.372.612,00)	98,03		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	325.621.486,00	295.917.888,00	(29.703.598,00)	90,88		
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	73.162.762,00	57.760.762,00	(15.402.000,00)	78,95		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	68.662.762,00	57.760.762,00	(11.902.000,00)	82,91		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.662.762,00	57.760.762,00	(11.902.000,00)	82,91		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0		
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	252.456.724,00	238.157.124,00	(14.301.600,00)	94,34		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	252.456.724,00	238.157.124,00	(14.301.600,00)	94,34		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.456.724,00	238.157.124,00	(14.301.600,00)	94,34		
04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.922.501.740,00	2.736.715.477,00	(183.786.263,00)	93,71		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.055.348.040,00	1.024.186.277,00	(31.162.763,00)	97,05		
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.055.348.040,00	1.024.186.277,00	(31.162.763,00)	97,05		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.055.348.040,00	1.024.186.277,00	(31.162.763,00)	97,05		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.055.348.040,00	1.024.186.277,00	(31.162.763,00)	97,05		
04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.867.153.700,00	1.714.590.200,00	(152.603.500,00)	91,83		
04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.867.153.700,00	1.714.590.200,00	(152.603.500,00)	91,83		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	363.153.700,00	212.342.200,00	(150.811.500,00)	58,47		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.153.700,00	212.342.200,00	(150.811.500,00)	58,47		
04.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	1.504.000.000,00	1.502.208.000,00	(1.792.000,00)	99,98		
04.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.504.000.000,00	1.502.208.000,00	(1.792.000,00)	99,98		
	SURPLUS / DEFISIT	(18.146.925.209,00)	(17.546.418.203,00)	600.507.006,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(18.146.925.209,00)	(17.546.418.203,00)	600.507.006,00	0		



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

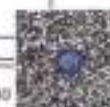
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.02.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.628.778.063,00	4.371.032.816,00	(257.745.248,00)	94,43		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.758.438.406,00	3.621.284.763,00	(137.153.653,00)	96,35		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.022.300,00	21.750.960,00	(2.271.340,00)	90,54		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.457.300,00	20.448.460,00	(2.010.840,00)	91,05		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.457.300,00	20.448.460,00	(2.010.840,00)	91,05		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.457.300,00	20.448.460,00	(2.010.840,00)	91,05		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.565.000,00	1.304.500,00	(260.500,00)	83,35		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.565.000,00	1.304.500,00	(260.500,00)	83,35		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.565.000,00	1.304.500,00	(260.500,00)	83,35		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.316.734.350,00	3.223.250.256,00	(93.484.094,00)	97,18		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.314.652.550,00	3.221.403.556,00	(93.248.994,00)	97,19		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.314.652.550,00	3.221.403.556,00	(93.248.994,00)	97,19		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.314.652.550,00	3.221.403.556,00	(93.248.994,00)	97,19		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.081.800,00	1.846.700,00	(235.100,00)	88,71		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.081.800,00	1.846.700,00	(235.100,00)	88,71		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.081.800,00	1.846.700,00	(235.100,00)	88,71		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.433.212,00	22.206.392,00	(226.820,00)	98,99		
01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.433.212,00	22.206.392,00	(226.820,00)	98,99		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.433.212,00	22.206.392,00	(226.820,00)	98,99		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.433.212,00	22.206.392,00	(226.820,00)	98,99		
01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	395.248.544,00	354.077.145,00	(41.171.399,00)	89,58		
01.2.08.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	393.994.544,00	353.029.545,00	(40.964.999,00)	89,61		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	368.310.544,00	327.388.548,00	(40.921.996,00)	88,89		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.310.544,00	327.388.548,00	(40.921.996,00)	88,89		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	25.654.000,00	25.641.000,00	(13.000,00)	99,95		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.654.000,00	25.641.000,00	(13.000,00)	99,95		
01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinams pada SKPD	1.284.000,00	1.047.600,00	(236.400,00)	81,59		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.284.000,00	1.047.600,00	(236.400,00)	81,59		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.000,00	1.047.600,00	(236.400,00)	81,59		
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	670.339.657,00	749.748.062,00	(120.581.595,00)	88,14		
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	15.816.000,00	6.334.400,00	(9.481.600,00)	40,05		
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	15.816.000,00	6.334.400,00	(9.481.600,00)	40,05		
	Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)						
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.816.000,00	6.334.400,00	(9.481.600,00)	40,05		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.816.000,00	6.334.400,00	(9.481.600,00)	40,05		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	64.909.650,00	20.936.580,00	(43.971.070,00)	32,26		
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	38.480.750,00	14.150.500,00	(24.330.250,00)	36,77		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.480.750,00	14.150.500,00	(24.330.250,00)	36,77		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.480.750,00	14.150.500,00	(24.330.250,00)	36,77		
03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	26.428.900,00	6.786.080,00	(19.642.820,00)	25,68		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	26.428.900,00	6.786.080,00	(19.642.820,00)	25,68		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.428.900,00	6.786.080,00	(19.642.820,00)	25,68		
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	777.730.207,00	713.292.077,00	(64.438.130,00)	91,71		
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	11.827.000,00	8.393.185,00	(3.433.815,00)	70,97		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.827.000,00	8.393.185,00	(3.433.815,00)	70,97		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.827.000,00	8.393.185,00	(3.433.815,00)	70,97		
03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	751.099.207,00	702.892.040,00	(48.237.167,00)	93,58		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	751.099.207,00	702.892.040,00	(48.237.167,00)	93,58		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.099.207,00	702.892.040,00	(48.237.167,00)	93,58		
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.804.000,00	2.036.852,00	(12.767.148,00)	13,76		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.804.000,00	2.036.852,00	(12.767.148,00)	13,76		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.804.000,00	2.036.852,00	(12.767.148,00)	13,76		
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11.883.800,00	9.183.005,00	(2.700.795,00)	77,27		
03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	11.883.800,00	9.183.005,00	(2.700.795,00)	77,27		
03.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.883.800,00	9.183.005,00	(2.700.795,00)	77,27		
03.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.883.800,00	9.183.005,00	(2.700.795,00)	77,27		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.628.778.063,00)	(4.371.032.815,00)	257.745.248,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(4.628.778.063,00)	(4.371.032.815,00)	257.745.248,00	0		



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

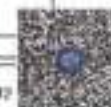


PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

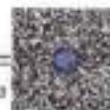
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
 SKPD : 1-06.2-08.0-00.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Unit Organisasi : 1-06.2-08.0-00.01.000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	11.557.840.510,00	10.794.892.898,00	(762.947.612,00)	93,40		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.792.797.760,00	4.636.828.475,00	(123.969.285,00)	97,40		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.620.112,00	34.023.312,00	(596.800,00)	98,28		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.695.162,00	27.401.962,00	(293.200,00)	98,94		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.695.162,00	27.401.962,00	(293.200,00)	98,94		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.695.162,00	27.401.962,00	(293.200,00)	98,94		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.924.950,00	6.621.350,00	(303.600,00)	95,62		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.924.950,00	6.621.350,00	(303.600,00)	95,62		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.924.950,00	6.621.350,00	(303.600,00)	95,62		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.382.159.139,00	4.249.816.684,00	(112.341.065,00)	97,42		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.350.181.339,00	4.238.916.684,00	(111.264.655,00)	97,44		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.350.181.339,00	4.238.916.684,00	(111.264.655,00)	97,44		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.350.181.339,00	4.238.916.684,00	(111.264.655,00)	97,44		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.977.800,00	10.901.400,00	(1.076.400,00)	91,01		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.977.800,00	10.901.400,00	(1.076.400,00)	91,01		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.977.800,00	10.901.400,00	(1.076.400,00)	91,01		
01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.930.750,00	3.890.750,00	(2.040.000,00)	65,60		
01.2.06.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.930.750,00	3.890.750,00	(2.040.000,00)	65,60		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.930.750,00	3.890.750,00	(2.040.000,00)	65,60		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.930.750,00	3.890.750,00	(2.040.000,00)	65,60		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.087.759,00	351.096.329,00	(8.991.430,00)	97,50		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.518.896,00	305.265.505,00	(8.253.390,00)	97,37		



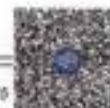
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	313.518.896,00	305.265.505,00	(8.253.390,00)	97,37		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.518.896,00	305.265.505,00	(8.253.390,00)	97,37		
01.2.06.10	Penetakaan Anjg Dinamis pada SKPD	45.568.864,00	45.830.824,00	(738.040,00)	98,42		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	45.568.864,00	45.830.824,00	(738.040,00)	98,42		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.568.864,00	45.830.824,00	(738.040,00)	98,42		
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.185.878.320,00	4.944.035.368,00	(241.842.952,00)	95,34		
02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	734.130.234,00	581.442.123,00	(152.688.111,00)	79,20		
02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian	734.130.234,00	581.442.123,00	(152.688.111,00)	79,20		
	Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	734.130.234,00	581.442.123,00	(152.688.111,00)	79,20		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	734.130.234,00	581.442.123,00	(152.688.111,00)	79,20		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	4.451.748.086,00	4.362.593.235,00	(89.154.851,00)	98,00		
	Daerah Kabupaten/Kota						
02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	4.153.948.500,00	4.072.894.751,00	(81.053.749,00)	98,05		
	Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan						
	Kabupaten/Kota						
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.153.948.500,00	4.058.092.751,00	(95.855.749,00)	98,05		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.948.500,00	283.462.251,00	(5.486.249,00)	98,10		
02.2.03.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.850.000.000,00	3.774.630.500,00	(75.369.500,00)	98,04		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.802.000,00	(198.000,00)	98,68		
02.2.03.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	14.802.000,00	(198.000,00)	98,68		
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	297.799.586,00	289.698.484,00	(8.101.102,00)	97,28		
	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat						
	Kewenangan Kabupaten/Kota						
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	297.799.586,00	289.698.484,00	(8.101.102,00)	97,28		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.799.586,00	289.698.484,00	(8.101.102,00)	97,28		
02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	91.588.150,00	71.610.625,00	(19.977.525,00)	78,19		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada	16.838.700,00	12.532.575,00	(4.306.125,00)	74,43		
	Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						
02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	16.838.700,00	12.532.575,00	(4.306.125,00)	74,43		
	PUG termasuk PPRG						
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.838.700,00	12.532.575,00	(4.306.125,00)	74,43		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.838.700,00	12.532.575,00	(4.306.125,00)	74,43		
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	74.749.450,00	59.078.050,00	(15.671.400,00)	79,03		
	dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan						
	Kewenangan Kabupaten/Kota						
02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	74.749.450,00	59.078.050,00	(15.671.400,00)	79,03		
	Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.749.450,00	59.078.050,00	(15.671.400,00)	79,03		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.749.450,00	59.078.050,00	(15.671.400,00)	79,03		
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	89.504.800,00	63.539.800,00	(25.965.000,00)	70,99		
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	23.000.100,00	13.242.400,00	(9.757.700,00)	57,58		
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	23.000.100,00	13.242.400,00	(9.757.700,00)	57,58		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.000.100,00	13.242.400,00	(9.757.700,00)	57,58		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.100,00	13.242.400,00	(9.757.700,00)	57,58		
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	66.504.500,00	50.297.200,00	(16.207.300,00)	75,63		
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	66.504.500,00	50.297.200,00	(16.207.300,00)	75,63		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	66.504.500,00	50.297.200,00	(16.207.300,00)	75,63		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.504.500,00	50.297.200,00	(16.207.300,00)	75,63		
03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
03.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	0		
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	635.271.896,00	523.144.186,00	(112.127.510,00)	82,36		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	387.094.900,00	359.200.250,00	(27.894.250,00)	92,79		
04.2.01.01	Penyediaan Pemakanan	333.475.800,00	310.974.300,00	(22.501.500,00)	93,25		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	333.475.800,00	310.974.300,00	(22.501.500,00)	93,25		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.475.800,00	310.974.300,00	(22.501.500,00)	93,25		
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	53.818.700,00	48.225.950,00	(5.592.750,00)	89,94		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	53.818.700,00	48.225.950,00	(5.592.750,00)	89,94		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.818.700,00	48.225.950,00	(5.592.750,00)	89,94		
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	248.177.196,00	163.943.936,00	(84.233.260,00)	66,06		
04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fiskal, Mental, Spiritual, dan Sosial	106.929.774,00	93.250.774,00	(13.699.000,00)	87,22		
04.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	106.929.774,00	93.250.774,00	(13.699.000,00)	87,22		
04.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.929.774,00	93.250.774,00	(13.699.000,00)	87,22		
04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.247.422,00	70.583.152,00	(70.564.260,00)	50,04		
04.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	141.247.422,00	70.583.152,00	(70.564.260,00)	50,04		
04.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.247.422,00	70.583.152,00	(70.564.260,00)	50,04		
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	267.027.224,00	266.328.574,00	(698.650,00)	99,74		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	257.027.224,00	255.328.574,00	(1.698.650,00)	99,74		
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	109.628.100,00	109.431.050,00	(197.050,00)	99,82		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	109.628.100,00	109.431.050,00	(197.050,00)	99,82		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.628.100,00	109.431.050,00	(197.050,00)	99,82		
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	157.399.124,00	156.897.524,00	(501.600,00)	99,68		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	157.399.124,00	156.897.524,00	(501.600,00)	99,68		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.399.124,00	156.897.524,00	(501.600,00)	99,68		
05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	12.746.750,00	12.416.370,00	(330.380,00)	97,41		
05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.746.750,00	12.416.370,00	(330.380,00)	97,41		
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	12.746.750,00	12.416.370,00	(330.380,00)	97,41		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.746.750,00	12.416.370,00	(330.380,00)	97,41		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.746.750,00	12.416.370,00	(330.380,00)	97,41		
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	442.149.700,00	206.746.800,00	(233.402.900,00)	47,21		
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	442.149.700,00	206.746.800,00	(233.402.900,00)	47,21		
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	442.149.700,00	206.746.800,00	(233.402.900,00)	47,21		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	442.149.700,00	206.746.800,00	(233.402.900,00)	47,21		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.149.700,00	206.746.800,00	(233.402.900,00)	47,21		
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	57.487.960,00	52.994.250,00	(4.493.700,00)	92,18		
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	37.958.160,00	34.520.360,00	(3.437.800,00)	90,94		
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	37.958.160,00	34.520.360,00	(3.437.800,00)	90,94		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.958.160,00	34.520.360,00	(3.437.800,00)	90,94		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.958.160,00	34.520.360,00	(3.437.800,00)	90,94		
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.529.800,00	18.473.900,00	(1.055.900,00)	94,59		
06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.529.800,00	18.473.900,00	(1.055.900,00)	94,59		
06.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.529.800,00	18.473.900,00	(1.055.900,00)	94,59		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.525.800,00	18.473.800,00	(1.055.900,00)	94,59		
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	13.388.350,00	13.248.650,00	(139.700,00)	99,96		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	13.388.350,00	13.248.650,00	(139.700,00)	99,96		
07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	13.388.350,00	13.248.650,00	(139.700,00)	99,96		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.388.350,00	13.248.650,00	(139.700,00)	99,96		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.388.350,00	13.248.650,00	(139.700,00)	99,96		
	SURPLUS / DEFISIT	(11.557.840.510,00)	(10.794.892.898,00)	762.947.612,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(11.557.840.510,00)	(10.794.892.898,00)	762.947.612,00	0		



DINAS KETENAGAKERJAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

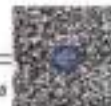
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.07 TENAGA KERJA
 SKPD : 2-07.3-32.3-29.01 Dinas Ketenagakerjaan
 Unit Organisasi : 2-07.3-32.3-29.01.000 Dinas Ketenagakerjaan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	288.764.692,00	458.616.748,00	169.854.056,00	158,82		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	288.764.692,00	458.616.748,00	169.854.056,00	158,82		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	288.764.692,00	458.616.748,00	169.854.056,00	158,82		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.274.671.144,00	4.680.470.087,00	(594.201.047,00)	88,73		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.874.253.936,00	3.814.845.947,00	(59.407.988,00)	98,38		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.361.200,00	8.211.700,00	(149.500,00)	98,21		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.718.400,00	4.626.900,00	(91.500,00)	98,06		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.718.400,00	4.626.900,00	(91.500,00)	98,06		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.718.400,00	4.626.900,00	(91.500,00)	98,06		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.642.800,00	3.584.800,00	(58.000,00)	98,41		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.642.800,00	3.584.800,00	(58.000,00)	98,41		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.642.800,00	3.584.800,00	(58.000,00)	98,41		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.345.281.129,00	3.298.328.272,00	(46.952.857,00)	98,60		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.299.800.039,00	3.253.142.260,00	(46.657.779,00)	98,59		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.299.800.039,00	3.253.142.260,00	(46.657.779,00)	98,59		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.299.800.039,00	3.253.142.260,00	(46.657.779,00)	98,59		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	46.481.090,00	46.186.012,00	(295.078,00)	99,35		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	46.481.090,00	46.186.012,00	(295.078,00)	99,35		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.481.090,00	46.186.012,00	(295.078,00)	99,35		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.861.198,00	88.627.948,00	(233.250,00)	99,73		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	88.861.198,00	88.627.948,00	(233.250,00)	99,73		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	88.861.198,00	88.627.948,00	(233.250,00)	99,73		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.881.198,00	85.627.948,00	(233.250,00)	96,73		
01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.750.408,00	221.478.027,00	(12.272.381,00)	94,75		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.128.608,00	219.153.227,00	(11.975.381,00)	94,82		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	211.406.708,00	200.079.727,00	(11.326.981,00)	94,54		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.406.708,00	200.079.727,00	(11.326.981,00)	94,54		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	19.721.900,00	19.073.500,00	(648.400,00)	96,71		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.721.900,00	19.073.500,00	(648.400,00)	96,71		
01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	2.621.800,00	2.324.800,00	(297.000,00)	88,57		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.621.800,00	2.324.800,00	(297.000,00)	88,57		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.621.800,00	2.324.800,00	(297.000,00)	88,57		
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	518.030.500,00	506.832.600,00	(22.198.000,00)	96,41		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	92.890.850,00	86.852.600,00	(6.038.250,00)	93,50		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	92.890.850,00	86.852.600,00	(6.038.250,00)	93,50		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	92.890.850,00	86.852.600,00	(6.038.250,00)	93,50		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.890.850,00	86.852.600,00	(6.038.250,00)	93,50		
03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.139.750,00	508.980.000,00	(16.159.750,00)	96,92		
03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	525.139.750,00	508.980.000,00	(16.159.750,00)	96,92		
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	525.139.750,00	508.980.000,00	(16.159.750,00)	96,92		
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.139.750,00	508.980.000,00	(16.159.750,00)	96,92		
03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	8.931.600,00	7.772.000,00	(1.159.600,00)	87,02		
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.931.600,00	7.772.000,00	(1.159.600,00)	87,02		
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.931.600,00	7.772.000,00	(1.159.600,00)	87,02		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.931.600,00	7.772.000,00	(1.159.600,00)	87,02		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.931.600,00	7.772.000,00	(1.159.600,00)	87,02		
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	909.812.159,00	416.588.900,00	(493.225.259,00)	45,79		
04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	880.197.059,00	388.627.100,00	(491.569.959,00)	44,15		
04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	880.197.059,00	388.627.100,00	(491.569.959,00)	44,15		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	880.197.059,00	388.627.100,00	(491.569.959,00)	44,15		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.197.059,00	388.627.100,00	(491.569.959,00)	44,15		
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	17.919.250,00	16.530.750,00	(1.388.500,00)	92,25		
04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	17.919.250,00	16.530.750,00	(1.388.500,00)	92,25		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.919.250,00	16.530.750,00	(1.388.500,00)	92,25		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.919.250,00	16.530.750,00	(1.388.500,00)	92,25		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.05	Penerbitan Perperangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.695.850,00	11.429.050,00	(266.800,00)	97,72		
04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perperangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.695.850,00	11.429.050,00	(266.800,00)	97,72		
04.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.695.850,00	11.429.050,00	(266.800,00)	97,72		
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.695.850,00	11.429.050,00	(266.800,00)	97,72		
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	53.542.850,00	45.632.650,00	(7.910.200,00)	71,70		
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.195.000,00	22.326.200,00	(12.868.800,00)	63,43		
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	35.195.000,00	22.326.200,00	(12.868.800,00)	63,43		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.195.000,00	22.326.200,00	(12.868.800,00)	63,43		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.195.000,00	22.326.200,00	(12.868.800,00)	63,43		
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	28.446.850,00	23.306.450,00	(5.140.400,00)	81,93		
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Bersifat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.269.150,00	11.958.450,00	(310.700,00)	97,47		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.269.150,00	11.958.450,00	(310.700,00)	97,47		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.269.150,00	11.958.450,00	(310.700,00)	97,47		
05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiasi	16.177.700,00	11.348.000,00	(4.829.700,00)	70,15		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.177.700,00	11.348.000,00	(4.829.700,00)	70,15		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.177.700,00	11.348.000,00	(4.829.700,00)	70,15		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.985.905.452,00)	(4.221.851.349,00)	764.055.103,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENDARAAN	(4.985.905.452,00)	(4.221.851.349,00)	764.055.103,00	0		



**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

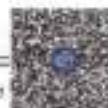
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN
 SKPD : 2-09.3-25.0-00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 Unit Organisasi : 2-09.3-25.0-00.01.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

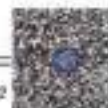
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	140.256.000,00	79.681.000,00	(60.575.000,00)	56,81		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.256.000,00	79.681.000,00	(60.575.000,00)	56,81		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	135.275.000,00	74.700.000,00	(60.575.000,00)	55,22		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.981.000,00	4.981.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	10.185.413.437,00	5.841.517.283,00	(4.343.896.154,00)	57,35		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.231.192.371,00	4.980.723.882,00	(250.468.689,00)	95,21		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.708.300,00	4.606.700,00	(1.102.600,00)	80,69		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.251.100,00	2.940.000,00	(311.100,00)	90,43		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.251.100,00	2.940.000,00	(311.100,00)	90,43		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.251.100,00	2.940.000,00	(311.100,00)	90,43		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.456.200,00	1.666.700,00	(791.500,00)	67,80		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.456.200,00	1.666.700,00	(791.500,00)	67,80		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.456.200,00	1.666.700,00	(791.500,00)	67,80		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.464.855.287,00	4.318.744.971,00	(146.120.316,00)	96,73		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.462.366.487,00	4.316.459.171,00	(145.907.316,00)	96,73		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.462.366.487,00	4.316.459.171,00	(145.907.316,00)	96,73		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.462.366.487,00	4.316.459.171,00	(145.907.316,00)	96,73		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.498.800,00	2.285.800,00	(213.000,00)	91,48		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.498.800,00	2.285.800,00	(213.000,00)	91,48		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.498.800,00	2.285.800,00	(213.000,00)	91,48		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	288.448.768,00	247.211.144,00	(41.237.624,00)	85,70		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	288.448.768,00	247.211.144,00	(41.237.624,00)	85,70		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	288.448.768,00	247.211.144,00	(41.237.624,00)	85,70		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.448.768,00	247.211.144,00	(41.237.624,00)	85,70		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.169.016,00	410.180.867,00	(62.008.149,00)	86,67		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	471.007.016,00	406.998.867,00	(62.008.149,00)	86,63		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	459.029.016,00	397.020.867,00	(62.008.149,00)	86,49		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.029.016,00	397.020.867,00	(62.008.149,00)	86,49		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	11.978.000,00	11.978.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.978.000,00	11.978.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Aneka Dinamis pada SKPD	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	88.623.250,00	81.714.750,00	(6.908.500,00)	92,20		
03.2.01	Penyediaan dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	84.274.850,00	57.799.450,00	(6.475.200,00)	89,93		
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	80.544.300,00	54.482.700,00	(6.061.600,00)	89,99		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.544.300,00	54.482.700,00	(6.061.600,00)	89,99		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.544.300,00	54.482.700,00	(6.061.600,00)	89,99		
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3.730.350,00	3.316.750,00	(413.600,00)	88,91		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.730.350,00	3.316.750,00	(413.600,00)	88,91		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.730.350,00	3.316.750,00	(413.600,00)	88,91		
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	24.348.600,00	23.915.300,00	(433.300,00)	98,22		
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5.155.500,00	5.005.200,00	(150.300,00)	97,08		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.155.500,00	5.005.200,00	(150.300,00)	97,08		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.155.500,00	5.005.200,00	(150.300,00)	97,08		
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	19.193.100,00	18.910.100,00	(283.000,00)	98,53		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.193.100,00	18.910.100,00	(283.000,00)	98,53		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.193.100,00	18.910.100,00	(283.000,00)	98,53		
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	64.008.416,00	44.331.066,00	(19.677.350,00)	69,26		
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.008.416,00	44.331.066,00	(19.677.350,00)	69,26		
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	64.008.416,00	44.331.066,00	(19.677.350,00)	69,26		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.008.416,00	24.631.066,00	(16.377.350,00)	60,06		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.008.416,00	24.631.066,00	(16.377.350,00)	60,06		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	23.000.000,00	19.700.000,00	(3.300.000,00)	85,65		
03.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	19.700.000,00	(3.300.000,00)	85,65		
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	124.241.450,00	2.694.900,00	(121.546.550,00)	2,17		
04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	124.241.450,00	2.694.900,00	(121.546.550,00)	2,17		
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	124.241.450,00	2.694.900,00	(121.546.550,00)	2,17		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	124.241.450,00	2.694.900,00	(121.546.550,00)	2,17		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.241.450,00	2.694.900,00	(121.546.550,00)	2,17		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.623.410.800,00	678.609.085,00	(3.944.801.715,00)	14,68		
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	4.359.205.990,00	421.924.106,00	(3.937.281.884,00)	9,68		
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	4.359.205.990,00	421.924.106,00	(3.937.281.884,00)	9,68		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	298.591.990,00	233.426.887,00	(65.165.103,00)	78,70		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.591.990,00	233.426.887,00	(65.165.103,00)	78,70		
04.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	4.060.614.000,00	188.497.219,00	(3.872.116.781,00)	4,64		
04.2.02.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.060.614.000,00	188.497.219,00	(3.872.116.781,00)	4,64		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	264.204.810,00	256.684.979,00	(7.519.831,00)	97,15		
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	264.204.810,00	256.684.979,00	(7.519.831,00)	97,15		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	252.204.810,00	248.555.258,00	(3.649.552,00)	97,76		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.204.810,00	248.555.258,00	(3.649.552,00)	97,76		
04.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	10.129.721,00	(1.870.279,00)	84,41		
04.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	10.129.721,00	(1.870.279,00)	84,41		
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	13.090.350,00	12.948.800,00	(141.550,00)	98,90		
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	13.090.350,00	12.948.800,00	(141.550,00)	98,90		
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	13.090.350,00	12.948.800,00	(141.550,00)	98,90		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.090.350,00	12.948.800,00	(141.550,00)	98,90		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.090.350,00	12.948.800,00	(141.550,00)	98,90		
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	40.846.800,00	40.497.000,00	(349.800,00)	99,14		
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.846.800,00	40.497.000,00	(349.800,00)	99,14		
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.846.800,00	40.497.000,00	(349.800,00)	99,14		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.846.800,00	40.497.000,00	(349.800,00)	99,14		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.846.800,00	40.497.000,00	(349.800,00)	99,14		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
	SURPLUS / DEFISI	(10.045.157.437,00)	(5.781.836.283,00)	4.263.321.154,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.045.157.437,00)	(5.781.836.283,00)	4.263.321.154,00	0		



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN



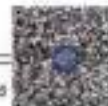
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.10 PERTANAHAN
 SKPD : 2-10.2-11.3-28.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
 Unit Organisasi : 2-10.2-11.3-28.01.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

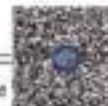
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	298.440.000,00	228.812.000,00	(69.628.000,00)	76,67		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	298.440.000,00	228.812.000,00	(69.628.000,00)	76,67		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	298.440.000,00	228.812.000,00	(69.628.000,00)	76,67		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	31.485.953.515,00	29.326.818.359,00	(2.159.137.156,00)	93,14		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.660.719.893,00	12.339.478.341,00	(341.241.552,00)	97,31		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.042.324,00	46.953.974,00	(88.350,00)	99,82		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.830.224,00	47.769.474,00	(60.750,00)	99,87		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.830.224,00	47.769.474,00	(60.750,00)	99,87		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.830.224,00	47.769.474,00	(60.750,00)	99,87		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.212.100,00	1.184.500,00	(27.600,00)	97,72		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.212.100,00	1.184.500,00	(27.600,00)	97,72		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.212.100,00	1.184.500,00	(27.600,00)	97,72		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.830.938.309,00	10.665.517.054,00	(165.421.255,00)	98,47		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.825.329.259,00	10.659.908.004,00	(165.421.255,00)	98,47		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.825.329.259,00	10.659.908.004,00	(165.421.255,00)	98,47		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.825.329.259,00	10.659.908.004,00	(165.421.255,00)	98,47		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.606.050,00	5.609.050,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.606.050,00	5.609.050,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.606.050,00	5.609.050,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.331.475.400,00	1.324.446.536,00	(7.028.864,00)	99,47		
01.2.06.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.331.475.400,00	1.324.446.536,00	(7.028.864,00)	99,47		
01.2.06.03.6.1	BELANJA OPERASI	1.331.475.400,00	1.324.446.536,00	(7.028.864,00)	99,47		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.331.475.400,00	1.324.445.535,00	(7.028.864,00)	99,47		
01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.263.880,00	300.560.777,00	(168.703.083,00)	64,05		
01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	469.263.880,00	300.560.777,00	(168.703.083,00)	64,05		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	469.263.880,00	290.560.777,00	(168.703.083,00)	63,27		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.263.880,00	290.560.777,00	(168.703.083,00)	63,27		
01.2.05.02.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	109.111.950,00	100.536.200,00	(8.575.750,00)	92,14		
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	109.111.950,00	100.536.200,00	(8.575.750,00)	92,14		
02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	109.111.950,00	100.536.200,00	(8.575.750,00)	92,14		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	109.111.950,00	100.536.200,00	(8.575.750,00)	92,14		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.111.950,00	100.536.200,00	(8.575.750,00)	92,14		
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.715.815.848,00	1.602.755.048,00	(113.060.800,00)	93,41		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.535.228.824,00	1.423.214.824,00	(112.014.000,00)	92,70		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.535.228.824,00	1.423.214.824,00	(112.014.000,00)	92,70		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	66.934.824,00	45.214.824,00	(21.720.000,00)	67,56		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.934.824,00	45.214.824,00	(21.720.000,00)	67,56		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	1.468.294.000,00	1.378.000.000,00	(90.294.000,00)	93,85		
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.404.694.000,00	1.378.000.000,00	(26.694.000,00)	98,10		
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.600.000,00	0,00	(63.600.000,00)	0		
03.2.02	Perenggulungan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	180.587.024,00	179.540.224,00	(1.046.800,00)	99,42		
03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	145.043.312,00	145.511.512,00	(531.800,00)	99,64		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	145.043.312,00	145.511.512,00	(531.800,00)	99,64		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.043.312,00	145.511.512,00	(531.800,00)	99,64		
03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	34.543.712,00	34.028.712,00	(515.000,00)	98,51		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.543.712,00	34.028.712,00	(515.000,00)	98,51		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.543.712,00	34.028.712,00	(515.000,00)	98,51		
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.579.898.714,00	1.577.694.394,00	(102.204.320,00)	93,92		
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.579.898.714,00	1.577.694.394,00	(102.204.320,00)	93,92		
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.579.898.714,00	1.577.694.394,00	(102.204.320,00)	93,92		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.579.898.714,00	1.577.694.394,00	(102.204.320,00)	93,92		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.879.898.714,00	1.577.894.394,00	(102.204.320,00)	83,92		
04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	10.853.900,00	8.202.400,00	(2.651.500,00)	75,57		
04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	10.853.900,00	8.202.400,00	(2.651.500,00)	75,57		
04.2.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Perutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	10.853.900,00	8.202.400,00	(2.651.500,00)	75,57		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.853.900,00	8.202.400,00	(2.651.500,00)	75,57		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.853.900,00	8.202.400,00	(2.651.500,00)	75,57		
07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	333.443.434,00	112.887.424,00	(220.556.010,00)	33,86		
07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	333.443.434,00	112.887.424,00	(220.556.010,00)	33,86		
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.757.022,00	81.800.512,00	(218.956.510,00)	27,20		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	89.603.212,00	80.342.512,00	(9.260.700,00)	89,66		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.603.212,00	80.342.512,00	(9.260.700,00)	89,66		
07.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	211.153.810,00	1.458.000,00	(209.695.810,00)	0,69		
07.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	211.153.810,00	1.458.000,00	(209.695.810,00)	0,69		
07.2.01.03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kelentutan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	32.686.412,00	31.086.912,00	(1.599.500,00)	95,11		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	32.686.412,00	31.086.912,00	(1.599.500,00)	95,11		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.686.412,00	31.086.912,00	(1.599.500,00)	95,11		
08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	224.890.020,00	220.999.020,00	(3.891.000,00)	98,27		
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	224.890.020,00	220.999.020,00	(3.891.000,00)	98,27		
08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	224.890.020,00	220.999.020,00	(3.891.000,00)	98,27		
08.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	224.890.020,00	220.999.020,00	(3.891.000,00)	98,27		
08.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.890.020,00	220.999.020,00	(3.891.000,00)	98,27		
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.731.219.756,00	13.364.063.532,00	(1.367.156.224,00)	90,72		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	14.731.219.756,00	13.364.063.532,00	(1.367.156.224,00)	90,72		
11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1.498.655.352,00	1.412.031.111,00	(86.624.241,00)	94,35		
11.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.498.655.352,00	1.412.031.111,00	(86.624.241,00)	94,35		
11.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.498.655.352,00	1.412.031.111,00	(86.624.241,00)	94,35		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pembelian, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPT/ST/BPA Kabupaten/Kota	3.927.539.128,00	3.895.668.191,00	(31.872.937,00)	99,19		
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.903.539.128,00	3.871.826.191,00	(31.712.937,00)	99,19		
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.903.539.128,00	3.871.826.191,00	(31.712.937,00)	99,19		
11.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	23.840.000,00	(160.000,00)	99,33		
11.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	23.840.000,00	(160.000,00)	99,33		
11.2.01.04	Peningkatan Penan Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.612.188.872,00	1.600.871.752,00	(11.327.120,00)	99,30		
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.612.188.872,00	1.600.871.752,00	(11.327.120,00)	99,30		
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.612.188.872,00	1.600.871.752,00	(11.327.120,00)	99,30		
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	7.649.216.630,00	6.411.678.704,00	(1.237.537.926,00)	83,82		
11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.586.216.630,00	2.431.111.394,00	(155.105.236,00)	94,00		
11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.586.216.630,00	2.431.111.394,00	(155.105.236,00)	94,00		
11.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	5.063.000.000,00	3.980.767.310,00	(1.082.232.690,00)	78,82		
11.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.063.000.000,00	3.980.767.310,00	(1.082.232.690,00)	78,82		
11.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		
11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	45.609.774,00	43.615.774,00	(1.994.000,00)	95,63		
11.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	45.609.774,00	43.615.774,00	(1.994.000,00)	95,63		
11.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.609.774,00	43.615.774,00	(1.994.000,00)	95,63		
	SURPLUS / DEFISIT	(31.187.513.515,00)	(29.097.604.359,00)	2.089.709.156,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(31.187.513.515,00)	(29.097.604.359,00)	2.089.709.156,00	0		



PJ. BUPATI KLUNGKUNG



NYOMAN JENDRIKA



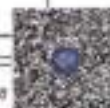
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
 SKPD : 2.12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Unit Organisasi : 2.12.0-00.0-00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.720.760.934,00	6.401.265.100,00	(319.495.834,00)	95,25		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.468.416.934,00	5.202.400.700,00	(266.016.234,00)	95,14		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.712.250,00	4.962.800,00	(749.650,00)	86,88		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.628.000,00	2.356.400,00	(271.600,00)	89,67		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.628.000,00	2.356.400,00	(271.600,00)	89,67		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.628.000,00	2.356.400,00	(271.600,00)	89,67		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.084.250,00	2.606.200,00	(478.050,00)	84,50		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.084.250,00	2.606.200,00	(478.050,00)	84,50		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.084.250,00	2.606.200,00	(478.050,00)	84,50		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.598.203.156,00	4.470.897.707,00	(127.505.449,00)	97,23		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.592.285.806,00	4.465.188.357,00	(127.097.449,00)	97,23		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.592.285.806,00	4.465.188.357,00	(127.097.449,00)	97,23		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.592.285.806,00	4.465.188.357,00	(127.097.449,00)	97,23		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.917.350,00	5.509.350,00	(408.000,00)	93,11		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.917.350,00	5.509.350,00	(408.000,00)	93,11		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.917.350,00	5.509.350,00	(408.000,00)	93,11		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227.411.718,00	203.238.378,00	(24.173.340,00)	89,37		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	227.411.718,00	203.238.378,00	(24.173.340,00)	89,37		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	227.411.718,00	203.238.378,00	(24.173.340,00)	89,37		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.411.718,00	203.238.378,00	(24.173.340,00)	89,37		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	837.089.810,00	823.602.016,00	(13.587.796,00)	98,17		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	634.483.910,00	521.291.115,00	(113.172.795,00)	82,16		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	613.743.910,00	501.311.115,00	(112.432.795,00)	81,68		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.743.910,00	501.311.115,00	(112.432.795,00)	81,68		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	20.720.000,00	19.980.000,00	(740.000,00)	96,43		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.720.000,00	19.980.000,00	(740.000,00)	96,43		
01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	2.825.900,00	2.210.900,00	(415.000,00)	84,20		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.825.900,00	2.210.900,00	(415.000,00)	84,20		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.825.900,00	2.210.900,00	(415.000,00)	84,20		
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	6.797.550,00	6.304.850,00	(492.700,00)	92,75		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6.797.550,00	6.304.850,00	(492.700,00)	92,75		
02.2.01.01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan	2.554.150,00	2.388.500,00	(165.650,00)	93,51		
	Administrasi Kependudukan						
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.554.150,00	2.388.500,00	(165.650,00)	93,51		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.554.150,00	2.388.500,00	(165.650,00)	93,51		
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	2.084.100,00	1.841.900,00	(242.200,00)	88,38		
	Atas Pendaftaran Penduduk						
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.084.100,00	1.841.900,00	(242.200,00)	88,38		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.084.100,00	1.841.900,00	(242.200,00)	88,38		
02.2.01.03	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	2.159.300,00	2.074.450,00	(84.850,00)	96,07		
	Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.159.300,00	2.074.450,00	(84.850,00)	96,07		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.159.300,00	2.074.450,00	(84.850,00)	96,07		
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.176.895.450,00	1.126.424.350,00	(50.271.100,00)	95,73		
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	4.507.900,00	4.335.650,00	(172.050,00)	96,18		
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	2.098.000,00	2.037.950,00	(60.050,00)	97,14		
	Atas Pelaporan Peristiwa Penting						
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.098.000,00	2.037.950,00	(60.050,00)	97,14		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.098.000,00	2.037.950,00	(60.050,00)	97,14		
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2.409.900,00	2.297.900,00	(112.000,00)	95,35		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.409.900,00	2.297.900,00	(112.000,00)	95,35		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.409.900,00	2.297.900,00	(112.000,00)	95,35		
03.2.02	Penyenggaraan Pencatatan Sipil	1.172.187.550,00	1.122.088.500,00	(50.099.050,00)	95,73		
03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	1.172.187.550,00	1.122.088.500,00	(50.099.050,00)	95,73		
	Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait						
	Pencatatan Sipil						
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.172.187.550,00	1.122.088.500,00	(50.099.050,00)	95,73		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.172.187.550,00	1.122.088.500,00	(50.099.050,00)	95,73		
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	68.851.000,00	66.135.200,00	(2.715.800,00)	96,06		
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	65.090.200,00	62.564.400,00	(2.525.800,00)	96,12		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	83.140.800,00	80.821.400,00	(2.319.200,00)	96,01		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.140.800,00	80.821.400,00	(2.319.200,00)	96,01		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.140.800,00	80.821.400,00	(2.319.200,00)	96,01		
04.2.01.02	Kerja Sama Pemantapan Data Kependudukan	1.949.800,00	1.943.000,00	(6.800,00)	99,65		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.949.800,00	1.943.000,00	(6.800,00)	99,65		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.949.800,00	1.943.000,00	(6.800,00)	99,65		
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.760.800,00	3.570.800,00	(190.000,00)	94,95		
04.2.03.03	Facilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.760.800,00	3.570.800,00	(190.000,00)	94,95		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.760.800,00	3.570.800,00	(190.000,00)	94,95		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.760.800,00	3.570.800,00	(190.000,00)	94,95		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.720.760.934,00)	(6.401.265.100,00)	319.495.834,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.720.760.934,00)	(6.401.265.100,00)	319.495.834,00	0		


 Pj. BUPATI KLUNGKUNG

 NYOMAN JENDRIKA



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

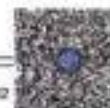
SKPD : 2-13.2-14.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi : 2-13.2-14.0-00.01.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	13.850.873.843,00	12.477.958.090,00	(1.372.715.753,00)	90,09		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.715.888.123,00	4.548.578.187,00	(168.309.936,00)	96,43		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.219.600,00	7.343.500,00	(2.876.100,00)	71,86		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.604.000,00	3.603.400,00	(600,00)	99,98		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.604.000,00	3.603.400,00	(600,00)	99,98		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.604.000,00	3.603.400,00	(600,00)	99,98		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.615.600,00	3.740.100,00	(2.875.500,00)	56,53		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.615.600,00	3.740.100,00	(2.875.500,00)	56,53		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.615.600,00	3.740.100,00	(2.875.500,00)	56,53		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.200.789.701,00	4.073.472.588,00	(127.297.113,00)	96,97		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.191.954.101,00	4.064.656.988,00	(127.297.113,00)	96,96		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.191.954.101,00	4.064.656.988,00	(127.297.113,00)	96,96		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.191.954.101,00	4.064.656.988,00	(127.297.113,00)	96,96		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.815.600,00	8.815.600,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.815.600,00	8.815.600,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.815.600,00	8.815.600,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.065.415,00	50.470.415,00	(595.000,00)	98,83		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	51.065.415,00	50.470.415,00	(595.000,00)	98,83		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	51.065.415,00	50.470.415,00	(595.000,00)	98,83		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.065.415,00	50.470.415,00	(595.000,00)	98,83		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.833.407,00	417.291.684,00	(37.541.723,00)	91,75		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	454.833.407,00	417.291.684,00	(37.541.723,00)	91,75		



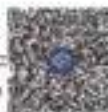
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	454.833.407,00	417.291.884,00	(37.541.723,00)	91,75		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.833.407,00	417.291.884,00	(37.541.723,00)	91,75		
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	164.695.600,00	152.941.360,00	(11.754.240,00)	92,86		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	164.695.600,00	152.941.360,00	(11.754.240,00)	92,86		
02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	9.895.600,00	8.990.000,00	(905.600,00)	90,85		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.895.600,00	8.990.000,00	(905.600,00)	90,85		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.895.600,00	8.990.000,00	(905.600,00)	90,85		
02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	58.939.000,00	(5.261.000,00)	91,81		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	58.939.000,00	(5.261.000,00)	91,81		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	58.939.000,00	(5.261.000,00)	91,81		
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	72.600.000,00	71.000.000,00	(1.600.000,00)	97,80		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	72.600.000,00	71.000.000,00	(1.600.000,00)	97,80		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.600.000,00	71.000.000,00	(1.600.000,00)	97,80		
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	18.000.000,00	14.012.360,00	(3.987.640,00)	77,85		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	14.012.360,00	(3.987.640,00)	77,85		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	14.012.360,00	(3.987.640,00)	77,85		
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	9.706.802,00	9.671.950,00	(34.852,00)	99,64		
03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	9.706.802,00	9.671.950,00	(34.852,00)	99,64		
03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	9.706.802,00	9.671.950,00	(34.852,00)	99,64		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.706.802,00	9.671.950,00	(34.852,00)	99,64		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.706.802,00	9.671.950,00	(34.852,00)	99,64		
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.042.050.774,00	1.124.309.094,00	(917.741.680,00)	55,06		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	807.659.774,00	518.556.994,00	(289.102.780,00)	64,34		
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000,00	76.550.000,00	(3.450.000,00)	95,69		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	76.550.000,00	(3.450.000,00)	95,69		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	76.550.000,00	(3.450.000,00)	95,69		
03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	101.209.774,00	97.743.974,00	(3.465.800,00)	96,58		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.209.774,00	97.743.974,00	(3.465.800,00)	96,58		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.209.774,00	97.743.974,00	(3.465.800,00)	96,58		
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	130.182.600,00	(19.817.400,00)	86,79		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	130.182.600,00	(19.817.400,00)	86,79		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	130.182.600,00	(19.817.400,00)	86,79		
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	52.000.000,00	39.700.000,00	(12.300.000,00)	76,35		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	39.700.000,00	(12.300.000,00)	76,35		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	39.700.000,00	(12.300.000,00)	76,35		
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	144.450.000,00	113.695.420,00	(30.753.580,00)	78,71		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	144.450.000,00	113.695.420,00	(30.753.580,00)	78,71		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.450.000,00	113.695.420,00	(30.753.580,00)	78,71		
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	60.684.000,00	(19.316.000,00)	75,86		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	60.684.000,00	(19.316.000,00)	75,86		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	60.684.000,00	(19.316.000,00)	75,86		
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.165.891.000,00	365.569.100,00	(820.321.900,00)	30,83		
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26.800.000,00	25.948.900,00	(2.850.100,00)	90,10		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.800.000,00	25.948.900,00	(2.850.100,00)	90,10		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	25.948.900,00	(2.850.100,00)	90,10		
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	932.790.000,00	141.583.000,00	(791.207.000,00)	15,18		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	932.790.000,00	141.583.000,00	(791.207.000,00)	15,18		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.790.000,00	141.583.000,00	(791.207.000,00)	15,18		
03.2.03.05	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	206.601.000,00	181.625.000,00	(24.976.000,00)	87,91		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	18.021.000,00	16.765.000,00	(1.256.000,00)	93,03		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.021.000,00	16.765.000,00	(1.256.000,00)	93,03		
03.2.03.05.5.2	BELANJA MODAL	188.580.000,00	164.860.000,00	(23.720.000,00)	87,42		
03.2.03.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.580.000,00	164.860.000,00	(23.720.000,00)	87,42		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.700.000,00	16.411.200,00	(1.288.800,00)	92,72		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	17.700.000,00	16.411.200,00	(1.288.800,00)	92,72		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	16.411.200,00	(1.288.800,00)	92,72		
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Personel Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	88.500.000,00	78.183.000,00	(8.317.000,00)	90,38		
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	8.433.000,00	(567.000,00)	93,70		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.433.000,00	(567.000,00)	93,70		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.433.000,00	(567.000,00)	93,70		
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	77.500.000,00	69.750.000,00	(7.750.000,00)	90,00		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	77.500.000,00	69.750.000,00	(7.750.000,00)	90,00		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	69.750.000,00	(7.750.000,00)	90,00		
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.129.737.818,00	1.082.608.930,00	(47.127.888,00)	96,83		
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.129.737.818,00	1.082.608.930,00	(47.127.888,00)	96,83		
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.687.550,00	6.373.450,00	(314.100,00)	96,30		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.687.550,00	6.373.450,00	(314.100,00)	96,30		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.687.550,00	6.373.450,00	(314.100,00)	96,30		
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	881.627.432,00	848.496.794,00	(33.130.638,00)	96,24		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	881.627.432,00	848.496.794,00	(33.130.638,00)	96,24		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	881.627.432,00	848.496.794,00	(33.130.638,00)	96,24		
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	241.422.836,00	227.739.686,00	(13.683.150,00)	94,33		
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	241.422.836,00	227.739.686,00	(13.683.150,00)	94,33		
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.422.836,00	227.739.686,00	(13.683.150,00)	94,33		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.814.682.042,00	1.631.782.518,00	(182.899.524,00)	89,92		
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.814.682.042,00	1.631.782.518,00	(182.899.524,00)	89,92		
04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	98.384.574,00	97.174.574,00	(1.190.000,00)	98,79		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	98.384.574,00	97.174.574,00	(1.190.000,00)	98,79		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.354.574,00	97.174.574,00	(1.180.000,00)	98,79		
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	238.280.000,00	(124.720.000,00)	65,36		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	238.280.000,00	(124.720.000,00)	65,36		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	238.280.000,00	(124.720.000,00)	65,36		
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	30.710.400,00	27.420.400,00	(3.290.000,00)	89,29		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.710.400,00	27.420.400,00	(3.290.000,00)	89,29		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.710.400,00	27.420.400,00	(3.290.000,00)	89,29		
04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	323.907.088,00	270.207.544,00	(53.699.524,00)	83,42		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	323.907.088,00	270.207.544,00	(53.699.524,00)	83,42		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.907.088,00	270.207.544,00	(53.699.524,00)	83,42		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.972.912.684,00	3.928.065.051,00	(44.847.633,00)	98,87		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.972.912.684,00	3.928.065.051,00	(44.847.633,00)	98,87		
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Pseyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.868.786.074,00	2.832.367.910,00	(28.458.164,00)	98,97		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.868.786.074,00	2.832.367.910,00	(28.458.164,00)	98,97		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.532.816.074,00	1.504.367.910,00	(28.458.164,00)	98,14		
05.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.327.950.000,00	1.327.950.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	6.935.000,00	(1.065.000,00)	86,89		
05.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	6.935.000,00	(1.065.000,00)	86,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.05	Facilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	41.394.950,00	37.220.700,00	(4.174.250,00)	89,92		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	41.394.950,00	37.220.700,00	(4.174.250,00)	89,92		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.394.950,00	37.220.700,00	(4.174.250,00)	89,92		
05.2.01.09	Facilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.062.751.660,00	1.061.601.441,00	(11.150.219,00)	99,95		
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.062.751.660,00	1.061.601.441,00	(11.150.219,00)	99,95		
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.751.660,00	1.061.601.441,00	(11.150.219,00)	99,95		
	SURPLUS / DEFISIT	(13.860.673.843,00)	(12.477.958.090,00)	1.372.715.753,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(13.860.673.843,00)	(12.477.958.090,00)	1.372.715.753,00	0		



PJ. BUPATI KLUNGKUNG

[Signature]
I NYOMAN JENDRIKA



DINAS PERHUBUNGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN
 SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	11.383.422.000,00	11.720.311.813,00	336.889.813,00	102,87		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.383.422.000,00	11.720.311.813,00	336.889.813,00	102,87		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	11.386.422.000,00	11.696.811.813,00	330.389.813,00	102,91		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.000.000,00	23.500.000,00	(3.500.000,00)	87,04		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	28.821.891.846,00	27.438.546.434,00	(1.383.345.212,00)	95,20		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.722.825.006,00	10.520.081.943,00	(202.743.063,00)	98,11		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.867.000,00	2.551.840,00	(315.160,00)	89,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.842.500,00	1.802.140,00	(40.360,00)	98,95		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.842.500,00	1.802.140,00	(40.360,00)	98,95		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.842.500,00	1.802.140,00	(40.360,00)	98,95		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.024.500,00	949.500,00	(75.000,00)	92,68		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.024.500,00	949.500,00	(75.000,00)	92,68		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.024.500,00	949.500,00	(75.000,00)	92,68		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.855.459.501,00	8.507.187.265,00	(348.272.236,00)	96,29		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.850.840.301,00	8.502.386.215,00	(348.454.086,00)	96,29		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.850.840.301,00	8.502.386.215,00	(348.454.086,00)	96,29		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.850.840.301,00	8.502.386.215,00	(348.454.086,00)	96,29		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.819.200,00	4.801.050,00	(18.150,00)	99,82		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.819.200,00	4.801.050,00	(18.150,00)	99,82		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.819.200,00	4.801.050,00	(18.150,00)	99,82		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.700.000,00	3.630.400,00	(69.600,00)	98,12		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.700.000,00	3.630.400,00	(69.600,00)	98,12		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.630.400,00	(69.600,00)	98,12		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.630.400,00	(69.600,00)	98,12		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.060.596.505,00	2.006.692.638,00	(53.903.867,00)	97,38		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.060.596.505,00	2.006.760.638,00	(53.835.867,00)	97,38		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.049.296.505,00	1.995.560.638,00	(53.735.867,00)	97,38		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.049.296.505,00	1.995.560.638,00	(53.735.867,00)	97,38		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	10.360.000,00	10.200.000,00	(160.000,00)	98,46		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.360.000,00	10.200.000,00	(160.000,00)	98,46		
01.2.06.10	Penetakaan Anasir Dinamis pada SKPD	942.000,00	932.000,00	(10.000,00)	98,94		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	942.000,00	932.000,00	(10.000,00)	98,94		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.000,00	932.000,00	(10.000,00)	98,94		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.456.586.431,00	8.518.848.125,00	(937.738.306,00)	90,07		
02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	55.191.960,00	53.653.800,00	(1.538.160,00)	97,58		
02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	55.191.960,00	53.653.800,00	(1.538.160,00)	97,58		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.191.960,00	53.653.800,00	(1.538.160,00)	97,58		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.191.960,00	53.653.800,00	(1.538.160,00)	97,58		
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.593.674.580,00	4.273.866.959,00	(319.807.621,00)	93,04		
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.123.866.300,00	3.810.360.808,00	(313.505.492,00)	92,40		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.920.946.300,00	3.614.699.808,00	(306.246.492,00)	92,19		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.920.946.300,00	3.614.699.808,00	(306.246.492,00)	92,19		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	202.920.000,00	196.681.000,00	(6.239.000,00)	96,42		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	7.278.000,00	(2.722.000,00)	72,78		
02.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.920.000,00	188.383.000,00	(4.537.000,00)	97,65		
02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	469.808.280,00	463.506.151,00	(6.302.129,00)	98,66		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	469.808.280,00	463.506.151,00	(6.302.129,00)	98,66		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.808.280,00	463.506.151,00	(6.302.129,00)	98,66		
02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	123.503.950,00	91.357.150,00	(32.146.800,00)	73,97		
02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	122.811.250,00	91.189.450,00	(31.621.800,00)	74,25		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	122.811.250,00	91.189.450,00	(31.621.800,00)	74,25		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.811.250,00	91.189.450,00	(31.621.800,00)	74,25		
02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	692.700,00	167.700,00	(525.000,00)	24,21		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	692.700,00	167.700,00	(525.000,00)	24,21		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.700,00	167.700,00	(525.000,00)	24,21		
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	590.149.900,00	400.093.906,00	(190.055.994,00)	67,80		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	539.538.100,00	350.486.600,00	(189.151.500,00)	64,96		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	539.538.100,00	350.486.600,00	(189.151.500,00)	64,96		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.538.100,00	350.486.600,00	(189.151.500,00)	64,96		
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	50.511.800,00	49.607.386,00	(904.414,00)	98,21		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.511.800,00	49.607.386,00	(904.414,00)	98,21		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.511.800,00	49.607.386,00	(904.414,00)	98,21		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.324.860,00	11.923.409,00	(2.401.451,00)	83,24		
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.324.860,00	11.923.409,00	(2.401.451,00)	83,24		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.324.860,00	11.923.409,00	(2.401.451,00)	83,24		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.324.860,00	11.923.409,00	(2.401.451,00)	83,24		
02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.786.000,00	1.778.300,00	(7.700,00)	99,57		
02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	1.786.000,00	1.778.300,00	(7.700,00)	99,57		
02.2.07.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.786.000,00	1.778.300,00	(7.700,00)	99,57		
02.2.07.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.786.000,00	1.778.300,00	(7.700,00)	99,57		
02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3.217.200,00	1.947.200,00	(1.270.000,00)	60,52		
02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1.049.500,00	279.500,00	(770.000,00)	26,63		
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.049.500,00	279.500,00	(770.000,00)	26,63		
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.500,00	279.500,00	(770.000,00)	26,63		
02.2.08.06	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.167.700,00	1.667.700,00	(500.000,00)	76,93		
02.2.08.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.167.700,00	1.667.700,00	(500.000,00)	76,93		
02.2.08.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.167.700,00	1.667.700,00	(500.000,00)	76,93		
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.075.644.001,00	3.684.127.341,00	(391.516.660,00)	90,39		
02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.075.532.201,00	3.684.015.541,00	(391.516.660,00)	90,39		
02.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.075.532.201,00	3.684.015.541,00	(391.516.660,00)	90,39		
02.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.075.532.201,00	3.684.015.541,00	(391.516.660,00)	90,39		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	111.800,00	111.800,00	0,00	100,00		
02.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	111.800,00	111.800,00	0,00	100,00		
02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.800,00	111.800,00	0,00	100,00		
02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.094.000,00	0,00	(1.094.000,00)	0		
02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.094.000,00	0,00	(1.094.000,00)	0		
02.2.10.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.094.000,00	0,00	(1.094.000,00)	0		
02.2.10.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.000,00	0,00	(1.094.000,00)	0		
03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8.640.480.209,00	8.399.536.366,00	(240.943.843,00)	97,21		
03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	8.021.424.759,00	7.961.656.258,00	(69.768.501,00)	99,13		
03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	8.021.424.759,00	7.961.656.258,00	(69.768.501,00)	99,13		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.021.424.759,00	7.961.656.258,00	(69.768.501,00)	99,13		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.021.424.759,00	7.961.656.258,00	(69.768.501,00)	99,13		
03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	31.459.500,00	31.013.250,00	(446.250,00)	98,58		
03.2.06.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.459.500,00	31.013.250,00	(446.250,00)	98,58		
03.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.459.500,00	31.013.250,00	(446.250,00)	98,58		
03.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.459.500,00	31.013.250,00	(446.250,00)	98,58		
03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	587.595.950,00	416.866.858,00	(170.729.092,00)	70,94		
03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	279.500,00	279.500,00	0,00	100,00		
03.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	279.500,00	279.500,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.500.00	279.500.00	0.00	100.00		
03.2.12.02	Pembangunan Pelatukan Pengumpan Lokal	167.700.00	167.700.00	0.00	100.00		
03.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	167.700.00	167.700.00	0.00	100.00		
03.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.700.00	167.700.00	0.00	100.00		
03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelatukan Pengumpan Lokal	330.819.250.00	171.523.056.00	(159.296.192.00)	51.88		
03.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	306.399.250.00	147.682.056.00	(158.717.192.00)	48.20		
03.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.399.250.00	147.682.056.00	(158.717.192.00)	48.20		
03.2.12.03.6.2	BELANJA MODAL	24.220.000.00	23.841.000.00	(379.000.00)	98.44		
03.2.12.03.6.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.220.000.00	23.841.000.00	(379.000.00)	98.44		
03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelatukan Pengumpan Lokal	296.529.500.00	244.896.600.00	(11.632.900.00)	95.47		
03.2.12.04.5.1	BELANJA OPERASI	296.529.500.00	244.896.600.00	(11.632.900.00)	95.47		
03.2.12.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.529.500.00	244.896.600.00	(11.632.900.00)	95.47		
	SURPLUS / DEFISIT	(17.428.266.646.00)	(15.718.234.821.00)	1.710.034.825.00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(17.428.266.646.00)	(15.718.234.821.00)	1.710.034.825.00	0		


 BUPATI KLUNGKUNG

 NYOMAN JENDRIKA



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



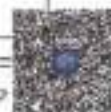
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA

SKPD : 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	93.600.000,00	92.900.800,00	(699.200,00)	99,25		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.600.000,00	92.900.800,00	(699.200,00)	99,25		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	93.600.000,00	92.900.800,00	(699.200,00)	99,25		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.211.913.814,00	8.638.258.214,00	(573.655.600,00)	93,75		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.121.360.967,00	3.973.620.030,00	(147.740.937,00)	96,42		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.829.700,00	12.806.500,00	(24.200,00)	99,81		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.409.800,00	8.392.900,00	(16.900,00)	99,80		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.409.800,00	8.392.900,00	(16.900,00)	99,80		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.409.800,00	8.392.900,00	(16.900,00)	99,80		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.419.900,00	4.412.600,00	(7.300,00)	99,83		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.419.900,00	4.412.600,00	(7.300,00)	99,83		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.419.900,00	4.412.600,00	(7.300,00)	99,83		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.726.831.793,00	3.630.255.471,00	(96.576.322,00)	97,41		
01.2.02.01	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	3.724.101.693,00	3.627.536.871,00	(96.564.822,00)	97,41		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.724.101.693,00	3.627.536.871,00	(96.564.822,00)	97,41		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.724.101.693,00	3.627.536.871,00	(96.564.822,00)	97,41		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.730.100,00	2.728.600,00	(1.500,00)	99,96		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.730.100,00	2.728.600,00	(1.500,00)	99,96		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.730.100,00	2.728.600,00	(1.500,00)	99,96		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.087.668,00	96.053.168,00	(34.500,00)	99,96		
01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	96.087.668,00	96.053.168,00	(34.500,00)	99,96		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	96.087.668,00	96.053.168,00	(34.500,00)	99,96		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.087.668,00	96.053.168,00	(34.500,00)	99,96		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.611.806,00	234.495.891,00	(51.115.915,00)	82,10		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.282.244,00	212.257.129,00	(51.025.115,00)	80,62		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	263.282.244,00	212.257.129,00	(51.025.115,00)	80,62		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.282.244,00	212.257.129,00	(51.025.115,00)	80,62		
01.2.06.10	Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	22.329.562,00	22.238.762,00	(90.800,00)	99,59		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	22.329.562,00	22.238.762,00	(90.800,00)	99,59		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.329.562,00	22.238.762,00	(90.800,00)	99,59		
02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.234.874.050,00	1.213.682.295,00	(20.991.755,00)	98,30		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.234.874.050,00	1.213.682.295,00	(20.991.755,00)	98,30		
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	41.816.400,00	32.029.945,00	(9.786.455,00)	76,60		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.816.400,00	32.029.945,00	(9.786.455,00)	76,60		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.816.400,00	32.029.945,00	(9.786.455,00)	76,60		
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.085.999.250,00	1.085.018.200,00	(10.983.050,00)	99,00		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.085.999.250,00	1.085.018.200,00	(10.983.050,00)	99,00		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.499.250,00	52.518.200,00	(10.983.050,00)	82,70		
02.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	1.032.500.000,00	1.032.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	98.858.400,00	96.636.150,00	(222.250,00)	99,77		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	98.858.400,00	96.636.150,00	(222.250,00)	99,77		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.858.400,00	96.636.150,00	(222.250,00)	99,77		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.864.800,00	2.370.530,00	(494.270,00)	82,75		
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.864.800,00	2.370.530,00	(494.270,00)	82,75		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1.787.400,00	1.393.330,00	(374.070,00)	78,84		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.787.400,00	1.393.330,00	(374.070,00)	78,84		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.787.400,00	1.393.330,00	(374.070,00)	78,84		
02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	1.097.400,00	977.200,00	(120.200,00)	89,05		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.097.400,00	977.200,00	(120.200,00)	89,05		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.097.400,00	977.200,00	(120.200,00)	89,05		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	33.954.813,00	33.212.354,00	(742.459,00)	97,81		
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.954.813,00	33.212.354,00	(742.459,00)	97,81		
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	33.954.813,00	33.212.354,00	(742.459,00)	97,81		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.954.813,00	13.512.354,00	(442.459,00)	96,83		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.954.813,00	13.512.354,00	(442.459,00)	96,83		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.700.000,00	(300.000,00)	98,50		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.700.000,00	(300.000,00)	98,50		
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.819.059.184,00	3.413.373.005,00	(405.686.179,00)	89,38		
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.819.059.184,00	3.413.373.005,00	(405.686.179,00)	89,38		
03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1.119.188.400,00	1.023.675.752,00	(95.512.648,00)	91,47		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	757.188.400,00	675.675.752,00	(81.512.648,00)	89,07		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.188.400,00	675.675.752,00	(81.512.648,00)	89,07		
03.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	352.000.000,00	348.000.000,00	(4.000.000,00)	98,86		
03.2.02.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.000.000,00	348.000.000,00	(4.000.000,00)	98,86		
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.397.381.834,00	1.230.810.965,00	(166.570.869,00)	88,08		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.317.381.834,00	1.186.810.965,00	(130.570.869,00)	90,09		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.317.381.834,00	1.186.810.965,00	(130.570.869,00)	90,09		
03.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	80.000.000,00	44.000.000,00	(36.000.000,00)	55,00		
03.2.02.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	44.000.000,00	(36.000.000,00)	55,00		
03.2.02.07.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0		
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	1.302.489.950,00	1.158.886.298,00	(143.603.652,00)	88,97		
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.302.489.950,00	1.158.886.298,00	(143.603.652,00)	88,97		
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.302.489.950,00	1.158.886.298,00	(143.603.652,00)	88,97		
	SURPLUS / DEFISIT	(9.118.313.814,00)	(8.543.357.414,00)	574.956.400,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.118.313.814,00)	(8.543.357.414,00)	574.956.400,00	0		



 PJ. BUPATI KLUNGKUNG

 NYOMAN JENDRA



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SKPD : 2-17.3-31.3-30.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	12.074.247.300,00	11.229.153.243,60	(845.094.056,40)	93,00		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.074.247.300,00	11.229.153.243,60	(845.094.056,40)	93,00		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	12.074.247.300,00	11.145.268.953,60	(928.980.346,40)	92,31		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	83.886.290,00	83.886.290,00	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	96.027.515.886,00	96.397.201.883,00	(2.630.313.803,00)	97,32		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.912.546.354,00	7.825.817.827,00	(86.728.527,00)	98,90		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.701.400,00	6.229.900,00	(471.500,00)	92,96		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.478.500,00	3.215.400,00	(263.100,00)	92,44		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.478.500,00	3.215.400,00	(263.100,00)	92,44		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.478.500,00	3.215.400,00	(263.100,00)	92,44		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.222.900,00	3.014.500,00	(208.400,00)	93,53		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.222.900,00	3.014.500,00	(208.400,00)	93,53		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.222.900,00	3.014.500,00	(208.400,00)	93,53		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.176.509.920,00	7.149.463.929,00	(29.045.991,00)	99,60		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.171.570.920,00	7.142.647.929,00	(28.922.991,00)	99,60		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.171.570.920,00	7.142.647.929,00	(28.922.991,00)	99,60		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.171.570.920,00	7.142.647.929,00	(28.922.991,00)	99,60		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.938.900,00	6.816.000,00	(122.900,00)	98,23		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.938.900,00	6.816.000,00	(122.900,00)	98,23		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.938.900,00	6.816.000,00	(122.900,00)	98,23		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.372.650,00	1.279.250,00	(93.400,00)	93,20		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.372.650,00	1.279.250,00	(93.400,00)	93,20		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.372.650,00	1.279.250,00	(93.400,00)	93,20		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.372.650,00	1.279.250,00	(93.400,00)	93,20		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	725.932.484,00	666.844.748,00	(57.117.736,00)	92,13		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	724.732.984,00	667.679.748,00	(57.053.236,00)	92,13		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	724.732.984,00	667.679.748,00	(57.053.236,00)	92,13		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	724.732.984,00	667.679.748,00	(57.053.236,00)	92,13		
01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	1.229.500,00	1.165.000,00	(64.500,00)	94,75		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.229.500,00	1.165.000,00	(64.500,00)	94,75		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.229.500,00	1.165.000,00	(64.500,00)	94,75		
02	PROGRAM PELAYANAN IDN USAHA SIMPAN PINJAM	25.127.650,00	24.617.300,00	(510.350,00)	97,97		
02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.127.650,00	24.617.300,00	(510.350,00)	97,97		
02.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.127.650,00	24.617.300,00	(510.350,00)	97,97		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.127.650,00	24.617.300,00	(510.350,00)	97,97		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.127.650,00	24.617.300,00	(510.350,00)	97,97		
02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	39.138.950,00	31.159.725,00	(7.979.225,00)	79,61		
02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	39.138.950,00	31.159.725,00	(7.979.225,00)	79,61		
02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	39.138.950,00	31.159.725,00	(7.979.225,00)	79,61		
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.138.950,00	31.159.725,00	(7.979.225,00)	79,61		
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.138.950,00	31.159.725,00	(7.979.225,00)	79,61		
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	524.983.512,00	382.361.978,00	(142.621.534,00)	72,83		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	524.983.512,00	382.361.978,00	(142.621.534,00)	72,83		
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	48.078.000,00	29.385.100,00	(18.692.900,00)	63,77		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	48.078.000,00	29.385.100,00	(18.692.900,00)	63,77		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.078.000,00	29.385.100,00	(18.692.900,00)	63,77		
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	79.542.350,00	71.796.600,00	(7.745.750,00)	90,26		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	79.542.350,00	71.796.600,00	(7.745.750,00)	90,26		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.542.350,00	21.796.600,00	(7.745.750,00)	73,78		
02.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		



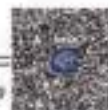
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	399.383.162,00	281.180.278,00	(118.182.884,00)	70,41		
02.2.01.05.5.1	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						
02.2.01.05.5.1.02	BELANJA OPERASI	399.383.162,00	281.180.278,00	(118.182.884,00)	70,41		
03	Belanja Barang dan Jasa	399.383.162,00	281.180.278,00	(118.182.884,00)	70,41		
03.2.01	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	148.091.460,00	144.838.712,00	(3.254.748,00)	97,80		
03.2.01.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	148.091.460,00	144.838.712,00	(3.254.748,00)	97,80		
03.2.01.02.5.1	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
03.2.01.02.5.1.02	BELANJA OPERASI	148.091.460,00	144.838.712,00	(3.254.748,00)	97,80		
03	Belanja Barang dan Jasa	148.091.460,00	144.838.712,00	(3.254.748,00)	97,80		
03.2.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	87.271.148.401,00	85.144.419.901,00	(2.126.728.500,00)	97,56		
03.2.01.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	76.648.031.800,00	76.475.553.767,00	(172.478.033,00)	99,77		
03.2.01.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	76.648.031.800,00	76.475.553.767,00	(172.478.033,00)	99,77		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	143.398.300,00	88.722.187,00	(54.676.113,00)	61,87		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.398.300,00	88.722.187,00	(54.676.113,00)	61,87		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	76.504.833.500,00	76.386.831.580,00	(117.801.920,00)	99,86		
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	44.788.500,00	(211.500,00)	99,53		
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.459.833.500,00	76.342.043.080,00	(117.790.420,00)	99,86		
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	10.623.114.601,00	8.668.866.134,00	(1.954.248.467,00)	81,60		
03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10.623.114.601,00	8.668.866.134,00	(1.954.248.467,00)	81,60		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.659.752.701,00	8.660.985.134,00	(998.767.567,00)	89,66		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.659.752.701,00	8.660.985.134,00	(998.767.567,00)	89,66		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	963.361.900,00	7.881.000,00	(955.480.900,00)	0,82		
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.361.900,00	7.881.000,00	(5.480.900,00)	58,98		
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	950.000.000,00	0,00	(950.000.000,00)	0		
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	5.733.400,00	5.703.500,00	(29.900,00)	99,48		
04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.733.400,00	5.703.500,00	(29.900,00)	99,48		
04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.733.400,00	5.703.500,00	(29.900,00)	99,48		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.733.400,00	5.703.500,00	(29.900,00)	99,48		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.733.400,00	5.703.500,00	(29.900,00)	99,48		
04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	52.126.250,00	15.825.400,00	(36.300.850,00)	30,36		
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	49.548.250,00	14.866.200,00	(34.682.050,00)	29,90		
04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	49.548.250,00	14.866.200,00	(34.682.050,00)	29,90		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.548.250,00	14.866.200,00	(34.682.050,00)	29,90		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.548.250,00	14.866.200,00	(34.682.050,00)	29,90		
04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.578.000,00	1.159.200,00	(1.418.800,00)	44,97		
04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	2.578.000,00	1.159.200,00	(1.418.800,00)	44,97		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.578.000,00	1.159.200,00	(1.418.800,00)	44,97		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.578.000,00	1.159.200,00	(1.418.800,00)	44,97		
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	474.946.000,00	466.142.750,00	(8.803.250,00)	98,15		
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	211.546.000,00	205.930.600,00	(5.615.400,00)	97,35		
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	211.546.000,00	205.930.600,00	(5.615.400,00)	97,35		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	211.546.000,00	205.930.600,00	(5.615.400,00)	97,35		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.546.000,00	205.930.600,00	(5.615.400,00)	97,35		
05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	263.400.000,00	260.212.150,00	(3.187.850,00)	98,79		
05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	263.400.000,00	260.212.150,00	(3.187.850,00)	98,79		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	263.400.000,00	260.212.150,00	(3.187.850,00)	98,79		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.400.000,00	260.212.150,00	(3.187.850,00)	98,79		
06	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	203.242.500,00	202.756.250,00	(486.250,00)	99,76		
05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Tersapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	203.242.500,00	202.756.250,00	(486.250,00)	99,76		
05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	203.242.500,00	202.756.250,00	(486.250,00)	99,76		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	203.242.500,00	202.756.250,00	(486.250,00)	99,76		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.242.500,00	202.756.250,00	(486.250,00)	99,76		
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	225.394.400,00	221.745.500,00	(3.648.900,00)	98,38		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.394.400,00	221.745.500,00	(3.648.900,00)	98,38		
06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewonongan Kabupaten/Kota	222.333.000,00	219.011.700,00	(3.321.300,00)	98,51		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	222.333.000,00	219.011.700,00	(3.321.300,00)	98,51		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.333.000,00	11.011.700,00	(3.321.300,00)	76,83		
06.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	3.061.400,00	2.733.800,00	(327.600,00)	89,30		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.061.400,00	2.733.800,00	(327.600,00)	89,30		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.061.400,00	2.733.800,00	(327.600,00)	89,30		
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	166.332.104,00	90.660.820,00	(75.671.284,00)	54,51		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	166.332.104,00	90.660.820,00	(75.671.284,00)	54,51		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	166.332.104,00	90.660.820,00	(75.671.284,00)	54,51		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	166.332.104,00	90.660.820,00	(75.671.284,00)	54,51		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.332.104,00	90.660.820,00	(75.671.284,00)	54,51		
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	56.254.550,00	27.101.700,00	(29.152.850,00)	48,18		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	56.254.550,00	27.101.700,00	(29.152.850,00)	48,18		
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	33.836.050,00	11.099.500,00	(22.736.550,00)	32,80		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.836.050,00	11.099.500,00	(22.736.550,00)	32,80		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.836.050,00	11.099.500,00	(22.736.550,00)	32,80		
07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	22.416.500,00	16.002.200,00	(6.414.300,00)	71,39		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	22.416.500,00	16.002.200,00	(6.414.300,00)	71,39		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.416.500,00	16.002.200,00	(6.414.300,00)	71,39		
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	922.452.155,00	814.052.520,00	(108.399.635,00)	88,25		
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	922.452.155,00	814.052.520,00	(108.399.635,00)	88,25		



KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	922.482.155,00	814.062.500,00	(108.399.655,00)	86,25		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	570.985.046,00	468.414.862,00	(102.570.184,00)	82,04		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.985.046,00	468.414.862,00	(102.570.184,00)	82,04		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	351.497.109,00	345.637.638,00	(5.829.471,00)	98,34		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.480.000,00	125.303.300,00	(4.536.700,00)	96,52		
06.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.007.109,00	219.714.338,00	(1.292.771,00)	99,42		
	SURPLUS / DEFISIT	(85.953.266.385,00)	(84.168.046.639,40)	1.785.219.745,60	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(85.953.266.385,00)	(84.168.046.639,40)	1.785.219.745,60	0		



 Pj. BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN JENDRIKA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

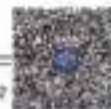
Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.644.703.184,00	5.278.523.443,00	(366.239.741,00)	93,53		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.676.812.182,00	4.369.316.069,00	(277.496.093,00)	94,07		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.691.800,00	5.221.660,00	(470.140,00)	91,74		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.263.800,00	3.146.360,00	(115.440,00)	96,46		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.263.800,00	3.146.360,00	(115.440,00)	96,46		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.263.800,00	3.146.360,00	(115.440,00)	96,46		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.428.000,00	2.073.300,00	(354.700,00)	85,39		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.428.000,00	2.073.300,00	(354.700,00)	85,39		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.000,00	2.073.300,00	(354.700,00)	85,39		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.384.158.297,00	4.129.687.266,00	(254.471.031,00)	94,20		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.380.758.997,00	4.126.326.616,00	(254.432.381,00)	94,19		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.380.758.997,00	4.126.326.616,00	(254.432.381,00)	94,19		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.380.758.997,00	4.126.326.616,00	(254.432.381,00)	94,19		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.399.300,00	3.360.650,00	(38.650,00)	98,86		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.399.300,00	3.360.650,00	(38.650,00)	98,86		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.399.300,00	3.360.650,00	(38.650,00)	98,86		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.328.850,00	110.299.660,00	(29.200,00)	99,97		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	110.328.850,00	110.299.660,00	(29.200,00)	99,97		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	110.328.850,00	110.299.660,00	(29.200,00)	99,97		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.328.850,00	110.299.660,00	(29.200,00)	99,97		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.633.205,00	154.107.483,00	(22.525.722,00)	87,25		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.633.205,00	154.107.483,00	(22.525.722,00)	87,25		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	176.633.205,00	154.107.483,00	(22.525.722,00)	87,25		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.633.205,00	154.107.483,00	(22.525.722,00)	87,25		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	179.273.752,00	173.908.812,00	(5.364.950,00)	97,01		
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.105.662,00	70.114.512,00	(4.992.150,00)	93,35		
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	48.239.700,00	45.300.000,00	(2.939.700,00)	93,91		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	48.239.700,00	45.300.000,00	(2.939.700,00)	93,91		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.239.700,00	45.300.000,00	(2.939.700,00)	93,91		
02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	26.865.962,00	24.814.512,00	(2.052.450,00)	92,36		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.865.962,00	24.814.512,00	(2.052.450,00)	92,36		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.865.962,00	24.814.512,00	(2.052.450,00)	92,36		
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	104.167.100,00	103.794.300,00	(372.800,00)	99,64		
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	104.167.100,00	103.794.300,00	(372.800,00)	99,64		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	104.167.100,00	103.794.300,00	(372.800,00)	99,64		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.167.100,00	103.794.300,00	(372.800,00)	99,64		
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	161.406.900,00	154.415.952,00	(6.990.948,00)	96,67		
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	161.406.900,00	154.415.952,00	(6.990.948,00)	96,67		
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	668.200,00	507.200,00	(161.000,00)	75,91		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	668.200,00	507.200,00	(161.000,00)	75,91		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.200,00	507.200,00	(161.000,00)	75,91		
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	160.738.700,00	153.908.752,00	(6.829.948,00)	96,75		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	160.738.700,00	153.908.752,00	(6.829.948,00)	96,75		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.738.700,00	153.908.752,00	(6.829.948,00)	96,75		
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	175.016.348,00	170.349.198,00	(4.667.150,00)	97,33		
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	175.016.348,00	170.349.198,00	(4.667.150,00)	97,33		
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	159.084.748,00	155.534.598,00	(3.550.150,00)	97,77		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	159.084.748,00	155.534.598,00	(3.550.150,00)	97,77		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.084.748,00	155.534.598,00	(3.550.150,00)	97,77		
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	11.475.600,00	11.408.400,00	(67.200,00)	99,41		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.475.600,00	11.408.400,00	(67.200,00)	99,41		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.475.600,00	11.406.400,00	(69.200,00)	99,41		
04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4.456.000,00	3.406.200,00	(1.049.800,00)	76,44		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.456.000,00	3.406.200,00	(1.049.800,00)	76,44		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.456.000,00	3.406.200,00	(1.049.800,00)	76,44		
06	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	421.487.000,00	351.006.250,00	(70.480.800,00)	83,28		
06.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	421.487.000,00	351.006.250,00	(70.480.800,00)	83,28		
06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemertan Pelaksanaan Penanaman Modal	10.916.000,00	7.748.400,00	(3.167.600,00)	70,98		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.916.000,00	7.748.400,00	(3.167.600,00)	70,98		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.916.000,00	7.748.400,00	(3.167.600,00)	70,98		
06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemertan Pelaksanaan Penanaman Modal	315.196.050,00	250.003.650,00	(65.192.400,00)	79,32		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	315.196.050,00	250.003.650,00	(65.192.400,00)	79,32		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.196.050,00	250.003.650,00	(65.192.400,00)	79,32		
06.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	95.355.000,00	93.254.200,00	(2.100.800,00)	97,80		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	95.355.000,00	93.254.200,00	(2.100.800,00)	97,80		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.355.000,00	93.254.200,00	(2.100.800,00)	97,80		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30.786.962,00	30.527.162,00	(259.800,00)	99,16		
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.786.962,00	30.527.162,00	(259.800,00)	99,16		
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.786.962,00	30.527.162,00	(259.800,00)	99,16		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.786.962,00	30.527.162,00	(259.800,00)	99,16		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.786.962,00	30.527.162,00	(259.800,00)	99,16		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.644.763.184,00)	(5.279.523.443,00)	365.239.741,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.644.763.184,00)	(5.279.523.443,00)	365.239.741,00	0		



 BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN JENDRA

DINAS KEBUDAYAAN



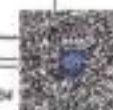
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 KEBUDAYAAN

SKPD : 2-22 0-00 0-00.01 Dinas Kebudayaan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	18.750.000,00	21.875.250,00	3.125.250,00	116,67		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.750.000,00	21.875.250,00	3.125.250,00	116,67		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	18.750.000,00	21.875.250,00	3.125.250,00	116,67		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	93.731.061.989,00	91.869.622.691,00	(1.861.439.278,00)	98,01		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.082.879.503,00	5.012.094.260,00	(70.785.243,00)	98,81		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.907.500,00	5.838.250,00	(69.250,00)	98,83		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.955.000,00	3.630.600,00	(34.400,00)	99,06		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.955.000,00	3.630.600,00	(34.400,00)	99,06		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.955.000,00	3.630.600,00	(34.400,00)	99,06		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.242.500,00	2.207.650,00	(34.850,00)	98,45		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.242.500,00	2.207.650,00	(34.850,00)	98,45		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.242.500,00	2.207.650,00	(34.850,00)	98,45		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.543.736.824,00	4.494.825.514,00	(48.911.310,00)	98,92		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.543.486.824,00	4.494.577.514,00	(48.909.310,00)	98,92		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.543.486.824,00	4.494.577.514,00	(48.909.310,00)	98,92		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.543.486.824,00	4.494.577.514,00	(48.909.310,00)	98,92		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	250.000,00	248.000,00	(2.000,00)	99,20		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	248.000,00	(2.000,00)	99,20		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	248.000,00	(2.000,00)	99,20		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.390.584,00	144.290.584,00	(100.000,00)	99,93		
01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	144.390.584,00	144.290.584,00	(100.000,00)	99,93		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	144.390.584,00	144.290.584,00	(100.000,00)	99,93		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.390.584,00	144.290.584,00	(100.000,00)	99,93		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.844.595,00	367.139.912,00	(21.704.683,00)	94,42		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	386.844.795,00	365.185.422,00	(21.658.373,00)	94,40		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	303.785.795,00	283.189.972,00	(20.596.823,00)	93,22		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.785.795,00	283.189.972,00	(20.596.823,00)	93,22		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	83.058.000,00	81.996.450,00	(1.061.550,00)	98,72		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.058.000,00	42.396.450,00	(661.550,00)	98,46		
01.2.06.02.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00		
01.2.08.10	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	1.999.800,00	1.953.490,00	(46.310,00)	97,68		
01.2.08.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.999.800,00	1.953.490,00	(46.310,00)	97,68		
01.2.08.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.800,00	1.953.490,00	(46.310,00)	97,68		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	12.793.422.374,00	12.611.554.134,00	(181.868.240,00)	98,58		
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.391.661.400,00	10.362.701.315,00	(28.960.085,00)	99,72		
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	10.391.661.400,00	10.362.701.315,00	(28.960.085,00)	99,72		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.391.661.400,00	10.362.701.315,00	(28.960.085,00)	99,72		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890.661.400,00	881.701.315,00	(8.960.085,00)	98,99		
02.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	9.501.000.000,00	9.481.000.000,00	(20.000.000,00)	99,79		
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.401.760.974,00	2.248.852.819,00	(152.908.155,00)	93,63		
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.220.049.212,00	2.070.163.882,00	(149.885.330,00)	93,25		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.220.049.212,00	2.070.163.882,00	(149.885.330,00)	93,25		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.049.212,00	2.070.163.882,00	(149.885.330,00)	93,25		
02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	181.711.762,00	178.688.937,00	(3.022.825,00)	98,34		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	181.711.762,00	178.688.937,00	(3.022.825,00)	98,34		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.711.762,00	178.688.937,00	(3.022.825,00)	98,34		
04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	74.498.420.706,00	72.934.730.031,00	(1.563.690.675,00)	97,90		
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.498.420.706,00	72.934.730.031,00	(1.563.690.675,00)	97,90		
04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	442.284.024,00	429.177.424,00	(13.106.600,00)	97,04		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	442.284.024,00	429.177.424,00	(13.106.600,00)	97,04		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.284.024,00	429.177.424,00	(13.106.600,00)	97,04		
04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	73.984.684.682,00	72.449.537.137,00	(1.535.447.545,00)	97,92		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.984.684.682,00	72.449.537.137,00	(1.535.447.545,00)	97,92		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.691.134.682,00	1.595.687.137,00	(95.447.545,00)	94,36		
04.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	72.293.650.000,00	70.853.850.000,00	(1.440.000.000,00)	98,01		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.02	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	71.152.000,00	56.015.470,00	(15.136.530,00)	78,73		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	71.152.000,00	56.015.470,00	(15.136.530,00)	78,73		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.152.000,00	56.015.470,00	(15.136.530,00)	78,73		
05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	80.710.080,00	72.979.120,00	(7.730.960,00)	90,42		
05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	36.632.500,00	31.881.570,00	(4.750.930,00)	87,03		
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	36.632.500,00	31.881.570,00	(4.750.930,00)	87,03		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.632.500,00	31.881.570,00	(4.750.930,00)	87,03		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.632.500,00	31.881.570,00	(4.750.930,00)	87,03		
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	44.077.580,00	41.097.550,00	(2.980.030,00)	93,24		
05.2.02.01	Pelestarian Cagar Budaya	32.784.000,00	29.784.000,00	(2.980.000,00)	90,90		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.784.000,00	29.784.000,00	(2.980.000,00)	90,90		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.784.000,00	29.784.000,00	(2.980.000,00)	90,90		
05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	11.313.580,00	11.313.550,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.313.580,00	11.313.550,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.313.580,00	11.313.550,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.275.629.336,00	1.238.265.146,00	(37.364.190,00)	97,07		
06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.275.629.336,00	1.238.265.146,00	(37.364.190,00)	97,07		
06.2.01.01	Pelestarian, Pengembangan, dan Pemertataan Koleksi Secara Terpadu	412.128.512,00	398.428.762,00	(13.699.750,00)	96,68		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	412.128.512,00	398.428.762,00	(13.699.750,00)	96,68		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.128.512,00	398.428.762,00	(13.699.750,00)	96,68		
06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	745.845.824,00	722.182.384,00	(23.664.440,00)	96,83		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	745.845.824,00	722.182.384,00	(23.664.440,00)	96,83		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	745.845.824,00	722.182.384,00	(23.664.440,00)	96,83		
06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	117.654.000,00	117.654.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	117.654.000,00	117.654.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.654.000,00	117.654.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(93.712.311.999,00)	(91.847.747.441,00)	1.864.564.558,00	0		
	BISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(93.712.311.999,00)	(91.847.747.441,00)	1.864.564.558,00	0		



PJ. BUPATI KLUNGKUNG

[Signature]
INDRA JENDRIKA



**DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 PERPUSTAKAAN

SKPD : 2-23.2-24.0-00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.902.627.204,00	3.792.216.824,00	(110.610.380,00)	97,17		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.652.533.818,00	3.568.672.483,00	(83.861.335,00)	97,70		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.149.912,00	25.108.812,00	(41.100,00)	99,94		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.631.612,00	22.615.512,00	(16.100,00)	99,93		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.631.612,00	22.615.512,00	(16.100,00)	99,93		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.631.612,00	22.615.512,00	(16.100,00)	99,93		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.518.300,00	2.493.300,00	(25.000,00)	99,01		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.518.300,00	2.493.300,00	(25.000,00)	99,01		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.518.300,00	2.493.300,00	(25.000,00)	99,01		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.178.191.510,00	3.123.046.842,00	(55.145.668,00)	98,26		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.173.705.010,00	3.118.619.842,00	(55.085.168,00)	98,26		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.173.705.010,00	3.118.619.842,00	(55.085.168,00)	98,26		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.173.705.010,00	3.118.619.842,00	(55.085.168,00)	98,26		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4.486.500,00	4.425.800,00	(60.700,00)	98,65		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.486.500,00	4.425.800,00	(60.700,00)	98,65		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.486.500,00	4.425.800,00	(60.700,00)	98,65		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.734.524,00	42.702.524,00	(32.000,00)	99,93		
01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	42.734.524,00	42.702.524,00	(32.000,00)	99,93		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.734.524,00	42.702.524,00	(32.000,00)	99,93		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.734.524,00	42.702.524,00	(32.000,00)	99,93		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.457.872,00	377.815.506,00	(28.642.366,00)	92,96		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	404.982.872,00	376.359.506,00	(28.623.366,00)	92,93		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	371.476.272,00	343.784.506,00	(27.691.767,00)	92,56		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.476.272,00	343.784.506,00	(27.691.767,00)	92,56		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DAJAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	33.506.800,00	32.575.000,00	(931.800,00)	97,22		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.506.800,00	32.575.000,00	(931.800,00)	97,22		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.475.000,00	1.456.000,00	(19.000,00)	98,71		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.475.000,00	1.456.000,00	(19.000,00)	98,71		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	1.456.000,00	(19.000,00)	98,71		
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	111.454.986,00	101.563.992,00	(9.890.994,00)	91,13		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	18.006.800,00	8.293.388,00	(9.712.244,00)	46,06		
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah	17.084.100,00	7.376.656,00	(9.707.444,00)	43,18		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.084.100,00	7.376.656,00	(9.707.444,00)	43,18		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.084.100,00	7.376.656,00	(9.707.444,00)	43,18		
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	921.500,00	916.700,00	(4.800,00)	99,48		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	921.500,00	916.700,00	(4.800,00)	99,48		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	921.500,00	916.700,00	(4.800,00)	99,48		
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	93.449.386,00	93.270.636,00	(178.750,00)	99,81		
02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Segmen Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	93.449.386,00	93.270.636,00	(178.750,00)	99,81		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.949.386,00	85.770.636,00	(178.750,00)	99,79		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.949.386,00	85.770.636,00	(178.750,00)	99,79		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	138.636.400,00	121.960.348,00	(16.676.052,00)	87,98		
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	18.594.950,00	8.064.400,00	(10.480.550,00)	43,55		
02.2.01.01	Penataan dan Penggunaan Arsip Dinamis	17.535.900,00	7.078.750,00	(10.457.150,00)	40,37		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.535.900,00	7.078.750,00	(10.457.150,00)	40,37		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.535.900,00	7.078.750,00	(10.457.150,00)	40,37		
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	1.029.050,00	1.006.650,00	(22.400,00)	97,73		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.029.050,00	1.006.650,00	(22.400,00)	97,73		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.029.050,00	1.006.650,00	(22.400,00)	97,73		
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	120.273.450,00	113.895.948,00	(6.377.502,00)	94,70		
02.2.02.02	Akuisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	120.273.450,00	113.895.948,00	(6.377.502,00)	94,70		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.033.450,00	3.405.948,00	(627.502,00)	84,44		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.033.450,00	3.405.948,00	(627.502,00)	84,44		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	116.240.000,00	110.490.000,00	(5.750.000,00)	95,05		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.240.000,00	110.490.000,00	(5.750.000,00)	95,05		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.902.827.204,00)	(3.792.216.624,00)	110.610.580,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.902.827.204,00)	(3.792.216.624,00)	110.610.580,00	0		



M. BUPATI KLUNGKUNG
UNYOMAN JENDRA



DINAS PARIWISATA



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA
 SKPD : 3-26 0-00 0-00.01 Dinas Pariwisata

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	18.923.385.000,00	20.743.503.500,00	1.820.118.500,00	109,62		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.923.385.000,00	20.743.503.500,00	1.820.118.500,00	109,62		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	18.886.250.000,00	20.547.996.000,00	1.881.746.000,00	110,08		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	257.135.000,00	195.508.500,00	(61.626.500,00)	76,03		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	29.377.798.993,00	24.361.988.082,00	(5.015.810.911,00)	82,93		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.284.272.350,00	7.103.054.239,00	(181.218.111,00)	97,51		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.625.100,00	4.577.900,00	(48.200,00)	99,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.727.800,00	3.683.000,00	(44.800,00)	98,80		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.727.800,00	3.683.000,00	(44.800,00)	98,80		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.727.800,00	3.683.000,00	(44.800,00)	98,80		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	896.300,00	894.900,00	(1.400,00)	99,82		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	896.300,00	894.900,00	(1.400,00)	99,82		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.300,00	894.900,00	(1.400,00)	99,82		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.479.126.800,00	6.338.700.039,00	(139.426.761,00)	97,85		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.470.630.400,00	6.331.576.239,00	(139.054.161,00)	97,85		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.470.630.400,00	6.331.576.239,00	(139.054.161,00)	97,85		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.470.630.400,00	6.331.576.239,00	(139.054.161,00)	97,85		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.496.200,00	8.123.800,00	(372.400,00)	95,62		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	8.496.200,00	8.123.800,00	(372.400,00)	95,62		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.496.200,00	8.123.800,00	(372.400,00)	95,62		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	489.315.280,00	486.521.524,00	(2.793.756,00)	99,43		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	489.315.280,00	486.521.524,00	(2.793.756,00)	99,43		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	489.315.280,00	486.521.524,00	(2.793.756,00)	99,43		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.315.280,00	486.521.524,00	(2.793.756,00)	99,43		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.204.370,00	272.254.776,00	(38.949.594,00)	87,46		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.828.570,00	271.883.576,00	(38.944.994,00)	87,47		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.400.270,00	167.453.576,00	(32.946.694,00)	83,56		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.400.270,00	167.453.576,00	(32.946.694,00)	83,56		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	110.428.300,00	104.430.000,00	(5.998.300,00)	94,57		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.428.300,00	104.430.000,00	(5.998.300,00)	94,57		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	375.800,00	371.200,00	(4.600,00)	98,78		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	375.800,00	371.200,00	(4.600,00)	98,78		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.800,00	371.200,00	(4.600,00)	98,78		
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.234.463.445,00	13.955.802.815,00	(4.278.660.630,00)	76,54		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	17.905.584.053,00	13.732.470.165,00	(4.173.113.888,00)	76,69		
02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	203.587.500,00	200.613.198,00	(2.974.302,00)	98,54		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	103.587.500,00	101.669.741,00	(1.917.759,00)	98,15		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.587.500,00	101.669.741,00	(1.917.759,00)	98,15		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.943.457,00	(1.056.543,00)	98,94		
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	98.943.457,00	(1.056.543,00)	98,94		
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.868.273.075,00	3.580.014.273,00	(1.288.258.802,00)	73,54		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	132.962.300,00	128.395.500,00	(4.566.800,00)	96,57		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.962.300,00	128.395.500,00	(4.566.800,00)	96,57		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	4.735.310.775,00	3.451.618.773,00	(1.283.692.002,00)	72,89		
02.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.682.500,00	(317.500,00)	99,21		
02.2.03.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.695.310.775,00	3.411.936.273,00	(1.283.374.502,00)	72,67		
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11.207.625.652,00	8.508.620.968,00	(2.699.005.684,00)	75,92		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.438.707.652,00	1.204.480.298,00	(234.227.354,00)	83,72		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.438.707.652,00	1.204.480.298,00	(234.227.354,00)	83,72		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	9.768.919.000,00	7.304.140.670,00	(2.464.778.330,00)	74,77		
02.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.200.000,00	22.891.400,00	(308.600,00)	98,67		
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.745.719.000,00	7.281.249.270,00	(2.464.469.730,00)	74,71		
02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.210.703.726,00	1.070.730.880,00	(139.972.846,00)	88,44		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.703.726,00	967.034.680,00	(133.669.046,00)	87,86		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.703.726,00	967.034.680,00	(133.669.046,00)	87,86		
02.2.03.05.5.2	BELANJA MODAL	110.000.000,00	103.696.200,00	(6.303.800,00)	94,27		
02.2.03.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	103.696.200,00	(6.303.800,00)	94,27		
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	415.393.100,00	372.490.648,00	(42.902.254,00)	89,67		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	415.393.100,00	372.490.648,00	(42.902.254,00)	89,67		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.393.100,00	372.490.846,00	(42.902.254,00)	89,67		
02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	328.878.392,00	223.332.650,00	(105.546.742,00)	67,91		
02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	240.452.160,00	145.979.150,00	(94.473.000,00)	60,71		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	240.452.160,00	145.979.150,00	(94.473.000,00)	60,71		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.452.160,00	145.979.150,00	(94.473.000,00)	60,71		
02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	88.427.232,00	77.353.490,00	(11.073.742,00)	87,48		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	88.427.232,00	77.353.490,00	(11.073.742,00)	87,48		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.427.232,00	77.353.490,00	(11.073.742,00)	87,48		
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.312.387.448,00	2.054.313.430,00	(258.084.018,00)	88,84		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.312.387.448,00	2.054.313.430,00	(258.084.018,00)	88,84		
03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.303.890.096,00	2.047.444.090,00	(256.446.006,00)	88,87		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.285.580.096,00	2.012.917.890,00	(252.662.406,00)	88,85		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.285.580.096,00	2.012.917.890,00	(252.662.406,00)	88,85		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	38.310.000,00	34.526.400,00	(3.783.600,00)	90,12		
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.310.000,00	34.526.400,00	(3.783.600,00)	90,12		
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4.762.350,00	4.192.540,00	(569.710,00)	88,04		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.762.350,00	4.192.540,00	(569.710,00)	88,04		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.762.350,00	4.192.540,00	(569.710,00)	88,04		
03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3.745.000,00	2.676.700,00	(1.068.300,00)	71,47		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.745.000,00	2.676.700,00	(1.068.300,00)	71,47		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.745.000,00	2.676.700,00	(1.068.300,00)	71,47		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	63.086.000,00	18.319.400,00	(44.766.600,00)	29,04		
04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	63.086.000,00	18.319.400,00	(44.766.600,00)	29,04		
04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	63.086.000,00	18.319.400,00	(44.766.600,00)	29,04		
04.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	63.086.000,00	18.319.400,00	(44.766.600,00)	29,04		
04.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.086.000,00	18.319.400,00	(44.766.600,00)	29,04		
05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.483.579.750,00	1.230.498.198,00	(253.081.552,00)	82,94		
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.483.579.750,00	1.230.498.198,00	(253.081.552,00)	82,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	4.586.750,00	1.795.000,00	(2.791.750,00)	39,13		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.586.750,00	1.795.000,00	(2.791.750,00)	39,13		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.586.750,00	1.795.000,00	(2.791.750,00)	39,13		
05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.333.729.100,00	1.105.460.156,00	(228.268.942,00)	82,88		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.308.229.100,00	1.083.710.156,00	(224.518.942,00)	82,84		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.308.229.100,00	1.083.710.156,00	(224.518.942,00)	82,84		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	25.500.000,00	21.750.000,00	(3.750.000,00)	85,29		
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.500.000,00	21.750.000,00	(3.750.000,00)	85,29		
05.2.01.06	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	145.263.900,00	123.243.040,00	(22.020.860,00)	84,84		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	145.263.900,00	123.243.040,00	(22.020.860,00)	84,84		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.263.900,00	123.243.040,00	(22.020.860,00)	84,84		
	SURPLUS / DEFISIT	(10.484.413.993,00)	(3.618.484.582,00)	6.865.929.411,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.484.413.993,00)	(3.618.484.582,00)	6.865.929.411,00	0		



 PJ. BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN JENDRA



DINAS PERTANIAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

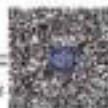
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN
 SKPD : 3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	28.800.000,00	33.305.000,00	4.705.000,00	116,45		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.800.000,00	33.305.000,00	4.705.000,00	116,45		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	28.800.000,00	33.305.000,00	4.705.000,00	116,45		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	13.830.049.257,00	13.359.702.899,00	(470.346.558,00)	96,60		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.923.417.908,00	11.702.558.839,00	(220.780.967,00)	98,15		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.768.700,00	5.768.700,00	0,00	100,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.814.200,00	3.814.200,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.814.200,00	3.814.200,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.814.200,00	3.814.200,00	0,00	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.954.500,00	1.954.500,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.954.500,00	1.954.500,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.954.500,00	1.954.500,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.123.913.645,00	10.949.541.275,00	(174.372.370,00)	98,43		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.122.000.395,00	10.947.628.025,00	(174.372.370,00)	98,43		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.122.000.395,00	10.947.628.025,00	(174.372.370,00)	98,43		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.122.000.395,00	10.947.628.025,00	(174.372.370,00)	98,43		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.913.250,00	1.913.250,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.913.250,00	1.913.250,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.913.250,00	1.913.250,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	909.500,00	909.500,00	0,00	100,00		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	909.500,00	909.500,00	0,00	100,00		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	909.500,00	909.500,00	0,00	100,00		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.500,00	909.500,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	792.825.761,00	748.437.164,00	(44.388.597,00)	94,15		



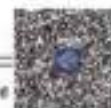
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	791.975.411,00	745.585.814,00	(46.389.597,00)	94,14		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	791.975.411,00	745.585.814,00	(46.389.597,00)	94,14		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.975.411,00	745.585.814,00	(46.389.597,00)	94,14		
01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	850.350,00	850.350,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	850.350,00	850.350,00	0,00	100,00		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.350,00	850.350,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	778.528.584,00	651.082.418,00	(127.446.166,00)	83,85		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	114.798.150,00	39.068.150,00	(75.730.000,00)	34,03		
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	72.359.100,00	5.534.100,00	(66.825.000,00)	7,65		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.359.100,00	5.534.100,00	(66.825.000,00)	7,65		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.359.100,00	5.534.100,00	(66.825.000,00)	7,65		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	42.439.050,00	33.534.050,00	(8.905.000,00)	79,02		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.439.050,00	33.534.050,00	(8.905.000,00)	79,02		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.439.050,00	33.534.050,00	(8.905.000,00)	79,02		
02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	861.730.414,00	612.014.298,00	(49.716.116,00)	92,49		
02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	652.874.114,00	604.782.968,00	(48.091.146,00)	92,63		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	652.874.114,00	604.782.968,00	(48.091.146,00)	92,63		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.874.114,00	574.782.968,00	(48.091.146,00)	92,26		
02.2.03.01.5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	8.856.300,00	7.231.300,00	(1.625.000,00)	81,65		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.856.300,00	7.231.300,00	(1.625.000,00)	81,65		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.856.300,00	7.231.300,00	(1.625.000,00)	81,65		
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	490.680.812,00	472.144.812,00	(18.536.000,00)	96,22		
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	141.540.700,00	141.354.500,00	(186.200,00)	99,87		
03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	130.000.000,00	129.988.800,00	(11.200,00)	99,99		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.988.800,00	(11.200,00)	99,99		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.988.800,00	(11.200,00)	99,99		
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	11.540.700,00	11.365.700,00	(175.000,00)	98,48		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.540.700,00	11.365.700,00	(175.000,00)	98,48		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.540.700,00	11.365.700,00	(175.000,00)	98,48		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	327.430.750,00	309.430.750,00	(18.000.000,00)	94,50		
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.104.750,00	3.104.750,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.104.750,00	3.104.750,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.104.750,00	3.104.750,00	0,00	100,00		
03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	2.390.900,00	2.390.900,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.390.900,00	2.390.900,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.390.900,00	2.390.900,00	0,00	100,00		
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	200.111.800,00	200.111.800,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	200.111.800,00	200.111.800,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.800,00	111.800,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Part	162.100,00	162.100,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	162.100,00	162.100,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.100,00	162.100,00	0,00	100,00		
03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	66.700,00	66.700,00	0,00	100,00		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	66.700,00	66.700,00	0,00	100,00		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.700,00	66.700,00	0,00	100,00		
03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	73.900,00	73.900,00	0,00	100,00		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	73.900,00	73.900,00	0,00	100,00		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.900,00	73.900,00	0,00	100,00		
03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	111.800,00	111.800,00	0,00	100,00		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	111.800,00	111.800,00	0,00	100,00		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.800,00	111.800,00	0,00	100,00		
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	121.408.800,00	103.408.800,00	(18.000.000,00)	85,17		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	121.408.800,00	103.408.800,00	(18.000.000,00)	85,17		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.408.800,00	1.408.800,00	0,00	100,00		
03.2.02.09.5.1.05	Belanja Hibah	120.000.000,00	102.000.000,00	(18.000.000,00)	85,00		
03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	21.709.362,00	21.359.362,00	(350.000,00)	98,39		
03.2.03.02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	21.709.362,00	21.359.362,00	(350.000,00)	98,39		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.709.362,00	21.359.362,00	(350.000,00)	98,39		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.709.362,00	21.359.362,00	(350.000,00)	98,39		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	549.970.475,00	445.613.830,00	(104.356.645,00)	81,03		
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	212.648.476,00	165.996.494,00	(46.651.982,00)	78,06		
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	212.648.476,00	165.996.494,00	(46.651.982,00)	78,06		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	212.648.476,00	165.996.494,00	(46.651.982,00)	78,06		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.648.476,00	165.996.494,00	(46.651.982,00)	78,06		
04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	156.532.099,00	135.728.536,00	(20.803.563,00)	86,71		
04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	156.532.099,00	135.728.536,00	(20.803.563,00)	86,71		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	156.532.099,00	135.728.536,00	(20.803.563,00)	86,71		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.532.099,00	135.728.536,00	(20.803.563,00)	86,71		
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.575.000,00	126.101.900,00	(24.473.100,00)	83,75		
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000,00	126.101.900,00	(24.473.100,00)	83,75		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.575.000,00	126.101.900,00	(24.473.100,00)	83,75		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.575.000,00	126.101.900,00	(24.473.100,00)	83,75		
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	30.214.900,00	17.786.900,00	(12.428.000,00)	58,87		
04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30.214.900,00	17.786.900,00	(12.428.000,00)	58,87		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.214.900,00	17.786.900,00	(12.428.000,00)	58,87		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.214.900,00	17.786.900,00	(12.428.000,00)	58,87		
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	89.451.800,00	88.205.200,00	(1.246.600,00)	98,61		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	89.451.800,00	88.205.200,00	(1.246.600,00)	98,61		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	50.117.300,00	49.723.300,00	(394.000,00)	99,21		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.117.300,00	49.723.300,00	(394.000,00)	99,21		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.117.300,00	49.723.300,00	(394.000,00)	99,21		
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18.580.500,00	18.095.500,00	(485.000,00)	97,39		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.580.500,00	18.095.500,00	(485.000,00)	97,39		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.580.500,00	18.095.500,00	(485.000,00)	97,39		
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.378.500,00	3.328.500,00	(50.000,00)	98,52		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.378.500,00	3.328.500,00	(50.000,00)	98,52		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.378.500,00	3.328.500,00	(50.000,00)	98,52		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kecengkokan Tani Tingkat Kabupaten/Kota	17.375.500,00	17.057.900,00	(317.600,00)	98,17		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.375.500,00	17.057.900,00	(317.600,00)	98,17		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.375.500,00	17.057.900,00	(317.600,00)	98,17		
	SURPLUS / DEFISIT	(13.801.449.257,00)	(13.326.397.699,00)	475.051.558,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(13.801.449.257,00)	(13.326.397.699,00)	475.051.558,00	0		



 Pj. BUPATI KLUNGKUNG



 LANYOM W. JENDRIKA



SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 SKPD : 4-01 9-00 0-00 01 Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : 4-01 9-00 0-00 01.000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4-01 9-00 0-00 01.000.000 Sekretariat Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	19.713.696.506,00	18.411.499.825,00	(1.302.196.681,00)	93,39		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.713.696.506,00	18.411.499.825,00	(1.302.196.681,00)	93,39		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.110.269.532,00	17.203.376.020,00	(906.893.512,00)	94,99		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.110.269.532,00	17.203.376.020,00	(906.893.512,00)	94,99		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.110.269.532,00	17.203.376.020,00	(906.893.512,00)	94,99		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	18.110.269.532,00	17.203.376.020,00	(906.893.512,00)	94,99		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.603.426.974,00	1.208.123.805,00	(395.303.169,00)	75,35		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.003.426.974,00	638.123.805,00	(365.303.169,00)	63,59		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.003.426.974,00	638.123.805,00	(365.303.169,00)	63,59		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.003.426.974,00	638.123.805,00	(365.303.169,00)	63,59		
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	570.000.000,00	(30.000.000,00)	95,00		
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	570.000.000,00	(30.000.000,00)	95,00		
01.2.11.04.5.1.01	Belanja Pegawai	600.000.000,00	570.000.000,00	(30.000.000,00)	95,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(19.713.696.506,00)	(18.411.499.825,00)	1.302.196.681,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKESALAN	(19.713.696.506,00)	(18.411.499.825,00)	1.302.196.681,00	0		

P. BUPATI KLUNGKUNG

 LUYCIMA JENDRIKA

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.002 Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.051.681.785,00	1.917.004.879,00	(134.676.907,00)	93,44		
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.051.681.785,00	1.917.004.879,00	(134.676.907,00)	93,44		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	69.607.700,00	64.872.692,00	(34.735.008,00)	81,24		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	65.194.700,00	44.887.192,00	(20.307.508,00)	68,85		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	65.194.700,00	44.887.192,00	(20.307.508,00)	68,85		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.194.700,00	44.887.192,00	(20.307.508,00)	68,85		
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	13.911.000,00	2.718.500,00	(11.192.500,00)	19,54		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.911.000,00	2.718.500,00	(11.192.500,00)	19,54		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.911.000,00	2.718.500,00	(11.192.500,00)	19,54		
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	10.502.000,00	7.267.000,00	(3.235.000,00)	69,20		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.502.000,00	7.267.000,00	(3.235.000,00)	69,20		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.502.000,00	7.267.000,00	(3.235.000,00)	69,20		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.877.836.886,00	1.784.854.887,00	(93.181.999,00)	95,04		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.852.430.474,00	1.783.376.887,00	(69.053.787,00)	96,27		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.852.430.474,00	1.783.376.887,00	(69.053.787,00)	96,27		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.852.430.474,00	1.783.376.887,00	(69.053.787,00)	96,27		
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	22.047.512,00	1.278.000,00	(20.769.512,00)	5,80		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.047.512,00	1.278.000,00	(20.769.512,00)	5,80		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.047.512,00	1.278.000,00	(20.769.512,00)	5,80		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.358.700,00	0,00	(3.358.700,00)	0		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.358.700,00	0,00	(3.358.700,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.358.700,00	0,00	(3.358.700,00)	0		
02.2.04	Facilitasi Kerja Sama Daerah	84.237.400,00	77.477.500,00	(6.759.900,00)	91,98		
02.2.04.01	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	83.728.800,00	77.477.500,00	(6.251.300,00)	92,53		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.728.800,00	77.477.500,00	(6.251.300,00)	92,53		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.728.800,00	77.477.500,00	(6.251.300,00)	92,53		
02.2.04.02	Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	293.000,00	0,00	(293.000,00)	0		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	293.000,00	0,00	(293.000,00)	0		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.000,00	0,00	(293.000,00)	0		
02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	215.600,00	0,00	(215.600,00)	0		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	215.600,00	0,00	(215.600,00)	0		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.600,00	0,00	(215.600,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.051.681.786,00)	(1.917.004.879,00)	134.676.907,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.051.681.786,00)	(1.917.004.879,00)	134.676.907,00	0		


PJ. BUPATI KLUNGKUNG

NYOMAN IMDIKA



BAGIAN HUKUM



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 SKPD : 4.01 0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : 4.01 0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01 0-00.0-00.01.000.003 Bagian Hukum

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00 0 00 00 5	BELANJA DAERAH	801.835.196,00	826.899.478,00	(174.935.688,00)	78,18		
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	801.835.196,00	826.899.478,00	(174.935.688,00)	78,18		
02 2 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	801.835.196,00	826.899.478,00	(174.935.688,00)	78,18		
02 2 03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	279.697.022,00	249.098.904,00	(30.498.218,00)	89,09		
02 2 03 01 5 1	BELANJA OPERASI	249.697.022,00	219.162.104,00	(30.434.918,00)	87,81		
02 2 03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	249.697.022,00	219.162.104,00	(30.434.918,00)	87,81		
02 2 03 01 5 2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.936.700,00	(63.300,00)	99,79		
02 2 03 01 5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	29.936.700,00	(63.300,00)	99,79		
02 2 03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	474.693.532,00	331.373.132,00	(143.320.400,00)	69,81		
02 2 03 02 5 1	BELANJA OPERASI	474.693.532,00	331.373.132,00	(143.320.400,00)	69,81		
02 2 03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	474.693.532,00	331.373.132,00	(143.320.400,00)	69,81		
02 2 03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	47.544.612,00	46.427.542,00	(1.117.070,00)	97,65		
02 2 03 03 5 1	BELANJA OPERASI	47.544.612,00	46.427.542,00	(1.117.070,00)	97,65		
02 2 03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.544.612,00	46.427.542,00	(1.117.070,00)	97,65		
	SURPLUS / DEFISIT	(801.835.196,00)	(826.899.478,00)	174.935.688,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKURANG	(801.835.196,00)	(826.899.478,00)	174.935.688,00	0		


 Pj. BUPATI KLUNGKUNG

 NYOMAN ENDRIKA



**BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000.006 Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	604.059.054,00	424.382.185,00	(179.676.869,00)	70,26		
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	604.059.054,00	424.382.185,00	(179.676.869,00)	70,26		
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	79.798.612,00	54.770.974,00	(25.027.638,00)	68,64		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8.932.600,00	2.540.000,00	(6.392.600,00)	28,44		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.932.600,00	2.540.000,00	(6.392.600,00)	28,44		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.932.600,00	2.540.000,00	(6.392.600,00)	28,44		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	58.546.012,00	50.160.974,00	(8.385.038,00)	85,68		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.546.012,00	50.160.974,00	(8.385.038,00)	85,68		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.546.012,00	50.160.974,00	(8.385.038,00)	85,68		
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12.320.000,00	2.070.000,00	(10.250.000,00)	16,80		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.320.000,00	2.070.000,00	(10.250.000,00)	16,80		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.320.000,00	2.070.000,00	(10.250.000,00)	16,80		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	337.736.710,00	286.635.711,00	(50.902.999,00)	84,93		
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	92.212.500,00	67.639.551,00	(24.372.949,00)	73,57		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	92.212.500,00	67.639.551,00	(24.372.949,00)	73,57		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.212.500,00	67.639.551,00	(24.372.949,00)	73,57		
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	70.819.400,00	50.468.600,00	(20.350.800,00)	71,26		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.819.400,00	50.468.600,00	(20.350.800,00)	71,26		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.819.400,00	50.468.600,00	(20.350.800,00)	71,26		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	174.706.810,00	166.527.560,00	(8.179.250,00)	96,46		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	174.706.810,00	166.527.560,00	(8.179.250,00)	96,46		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.3.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.706.816,00	186.527.590,00	(8.179.256,00)	96,46		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	186.521.792,00	82.775.500,00	(103.746.292,00)	44,38		
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	186.521.792,00	82.775.500,00	(103.746.292,00)	44,38		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	186.521.792,00	82.775.500,00	(103.746.292,00)	44,38		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.521.792,00	82.775.500,00	(103.746.292,00)	44,38		
	SURPLUS / DEFISIT	(504.055.084,00)	(424.382.185,00)	179.676.899,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKESAN	(504.055.084,00)	(424.382.185,00)	179.676.899,00	0		



 Pj. BUPATI KLUNGKUNG

 INDOMAN JENDRIKA



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 SKPD : 4-01 0-00 0-00 01 Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : 4-01 0-00 0-00 01 000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4-01 0-00 0-00 01 000 007 Bagian Pengadaan Barang/Jasa

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	424.946.386,00	367.046.440,00	(57.899.946,00)	86,37		
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	424.946.386,00	367.046.440,00	(57.899.946,00)	86,37		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	424.946.386,00	367.046.440,00	(57.899.946,00)	86,37		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	226.907.962,00	186.177.677,00	(40.729.985,00)	81,33		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	226.907.962,00	186.177.677,00	(40.729.985,00)	81,33		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.907.962,00	186.177.677,00	(40.729.985,00)	81,33		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	56.904.262,00	54.512.501,00	(2.391.761,00)	95,80		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.904.262,00	47.519.501,00	(2.384.761,00)	95,22		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.904.262,00	47.519.501,00	(2.384.761,00)	95,22		
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	6.993.000,00	(7.000,00)	99,90		
03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	7.000.000,00	6.993.000,00	(7.000,00)	99,90		
03.2.03.03	Pertimbangan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.134.162,00	126.355.962,00	(12.778.200,00)	90,82		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	89.134.162,00	86.355.962,00	(12.778.200,00)	81,52		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.134.162,00	86.355.962,00	(12.778.200,00)	81,52		
03.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(424.946.386,00)	(367.046.440,00)	57.899.946,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(424.946.386,00)	(367.046.440,00)	57.899.946,00	0		

BUPATI KLUNGKUNG

 WYOMAN JENORISA

BAGIAN UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 SKPD : 4-01 0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : 4-01 0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4-01 0-00.0-00.01.000.010 Bagian Umum

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.000.00.5	BELANJA DAERAH	14.512.310.010,00	12.068.082.791,00	(2.444.227.219,00)	83,18		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.512.310.010,00	12.068.082.791,00	(2.444.227.219,00)	83,18		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.795.900,00	13.083.550,00	(4.712.350,00)	73,52		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.293.500,00	6.801.750,00	(4.491.750,00)	60,23		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.293.500,00	6.801.750,00	(4.491.750,00)	60,23		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.293.500,00	6.801.750,00	(4.491.750,00)	60,23		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.502.400,00	6.281.800,00	(220.600,00)	96,61		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.502.400,00	6.281.800,00	(220.600,00)	96,61		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.502.400,00	6.281.800,00	(220.600,00)	96,61		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.887.300,00	26.556.500,00	(5.330.800,00)	83,28		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.887.300,00	26.556.500,00	(5.330.800,00)	83,28		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	31.887.300,00	26.556.500,00	(5.330.800,00)	83,28		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.887.300,00	26.556.500,00	(5.330.800,00)	83,28		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550.192.812,00	558.942.312,00	(1.250.500,00)	99,78		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengelahan Administrasi Kepegawaian	550.192.812,00	558.942.312,00	(1.250.500,00)	99,78		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	550.192.812,00	558.942.312,00	(1.250.500,00)	99,78		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.192.812,00	558.942.312,00	(1.250.500,00)	99,78		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.294.994.953,00	8.252.507.638,00	(2.032.487.315,00)	80,26		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.938.572.013,00	3.988.596.346,00	(970.005.667,00)	80,36		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.563.786.323,00	2.950.624.346,00	(613.161.977,00)	83,64		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.663.786.323,00	2.980.624.348,00	(583.161.977,00)	83,64		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	1.374.785.890,00	987.942.000,00	(386.843.890,00)	71,86		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.275.073.890,00	980.942.000,00	(294.131.890,00)	76,93		
01.2.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.712.000,00	0,00	(79.712.000,00)	0		
01.2.06.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	7.000.000,00	(13.000.000,00)	35,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.000.000,00	14.000.000,00	(25.000.000,00)	35,90		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	39.000.000,00	14.000.000,00	(25.000.000,00)	35,90		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	14.000.000,00	(25.000.000,00)	35,90		
01.2.06.06	Facilitasi Kunjungan Tamu	601.223.000,00	685.307.950,00	(245.915.050,00)	73,59		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	601.223.000,00	685.307.950,00	(245.915.050,00)	73,59		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.223.000,00	685.307.950,00	(245.915.050,00)	73,59		
01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.367.283.140,00	3.576.017.142,00	(791.265.998,00)	81,88		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.367.283.140,00	3.576.017.142,00	(791.265.998,00)	81,88		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.367.283.140,00	3.576.017.142,00	(791.265.998,00)	81,88		
01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	18.916.800,00	18.616.200,00	(300.600,00)	98,41		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	18.916.800,00	18.616.200,00	(300.600,00)	98,41		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.916.800,00	18.616.200,00	(300.600,00)	98,41		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.818.615.173,00	1.607.509.271,00	(211.105.902,00)	88,39		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.818.615.173,00	1.607.509.271,00	(211.105.902,00)	88,39		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.588.337.173,00	1.400.760.771,00	(187.576.402,00)	89,32		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.588.337.173,00	1.400.760.771,00	(187.576.402,00)	89,32		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	250.278.000,00	206.748.500,00	(43.529.500,00)	82,61		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.278.000,00	206.748.500,00	(43.529.500,00)	82,61		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	901.223.872,00	824.637.578,00	(76.586.294,00)	91,50		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	901.223.872,00	824.637.578,00	(76.586.294,00)	91,50		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	901.223.872,00	824.637.578,00	(76.586.294,00)	91,50		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	901.223.872,00	824.637.578,00	(76.586.294,00)	91,50		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	47.600.000,00	15.000.000,00	(32.600.000,00)	31,51		
01.2.11.02	Penyediaan Paketan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31.600.000,00	15.000.000,00	(16.600.000,00)	47,47		
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.600.000,00	15.000.000,00	(16.600.000,00)	47,47		
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	15.000.000,00	(16.600.000,00)	47,47		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	0		
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	0		
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	0		
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	840.000.000,00	799.845.942,00	(80.154.058,00)	95,46		
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	480.000.000,00	462.115.942,00	(17.884.058,00)	96,27		
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	480.000.000,00	462.115.942,00	(17.884.058,00)	96,27		
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	462.115.942,00	(17.884.058,00)	96,27		
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	360.000.000,00	297.730.000,00	(62.270.000,00)	82,70		
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	297.730.000,00	(62.270.000,00)	82,70		
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	297.730.000,00	(62.270.000,00)	82,70		
	SURPLUS / DEFISIT	(14.512.310.010,00)	(12.068.082.791,00)	2.444.227.219,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.512.310.010,00)	(12.068.082.791,00)	2.444.227.219,00	0		



 BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN JENDRA



BAGIAN ORGANISASI



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 SKPD : 4.01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : 4.01.0-00.0-00.01.000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0-00.0-00.01.000.009 Bagian Organisasi

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.000.00.0	BELANJA DAERAH	352.736.500,00	339.819.134,00	(13.117.466,00)	96,28		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	352.736.500,00	339.819.134,00	(13.117.466,00)	96,28		
01.2.13	Penataan Organisasi	352.736.500,00	339.819.134,00	(13.117.466,00)	96,28		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15.450.000,00	13.817.150,00	(1.632.850,00)	89,43		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.450.000,00	13.817.150,00	(1.632.850,00)	89,43		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	13.817.150,00	(1.632.850,00)	89,43		
01.2.13.02	Facilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20.546.900,00	17.816.825,00	(2.929.775,00)	86,74		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.546.900,00	17.816.825,00	(2.929.775,00)	86,74		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.546.900,00	17.816.825,00	(2.929.775,00)	86,74		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	316.740.000,00	308.185.159,00	(8.554.841,00)	97,30		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	316.740.000,00	308.185.159,00	(8.554.841,00)	97,30		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.740.000,00	308.185.159,00	(8.554.841,00)	97,30		
01.2.13.03.5.2	BELANJA MODAL	250.000.000,00	248.900.000,00	(1.100.000,00)	99,40		
01.2.13.03.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	248.900.000,00	(1.100.000,00)	99,40		
	SURPLUS / DEFISIT	(352.736.500,00)	(339.819.134,00)	13.117.466,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(352.736.500,00)	(339.819.134,00)	13.117.466,00	0		

PL BUPATI KLUNGKUNG

 LUYOMAN JENGERUKA

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 SKPD : 4.01 0-00 0-00 01 Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : 4.01 0-00 0-00 01.000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01 0-00 0-00 01.000.005 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.000.00.0	BELANJA DAERAH	5.049.747.696,00	4.138.512.934,00	(911.234.762,00)	81,95		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.049.747.696,00	4.138.512.934,00	(911.234.762,00)	81,95		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.049.747.696,00	4.138.512.934,00	(911.234.762,00)	81,95		
01.2.14.01	Facilities Keprotokolan	394.900.012,00	320.347.474,00	(74.552.538,00)	81,12		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	394.900.012,00	320.347.474,00	(74.552.538,00)	81,12		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.900.012,00	320.347.474,00	(74.552.538,00)	81,12		
01.2.14.02	Facilities Komunikasi Pimpinan	3.560.855.284,00	2.979.091.810,00	(581.763.474,00)	83,66		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.560.855.284,00	2.979.091.810,00	(581.763.474,00)	83,66		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.560.855.284,00	2.979.091.810,00	(581.763.474,00)	83,66		
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.093.992.400,00	832.503.650,00	(261.488.750,00)	75,70		
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.093.992.400,00	832.503.650,00	(261.488.750,00)	75,70		
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.093.992.400,00	832.503.650,00	(261.488.750,00)	75,70		
01.2.14.03.5.2	BELANJA MODAL	72.200.000,00	6.570.000,00	(65.630.000,00)	9,10		
01.2.14.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.200.000,00	6.570.000,00	(65.630.000,00)	9,10		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.049.747.696,00)	(4.138.512.934,00)	911.234.762,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.049.747.696,00)	(4.138.512.934,00)	911.234.762,00	0		

PL BUPATI KLUNGKUNG

 LANYOMAN ENDRIKA

SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Usuran Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 SKPD : 4-02 0-00.0-00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Unit Organisasi : 4-02 0-00.0-00.01.000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4-02 0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	50.480.448.874,00	48.142.345.576,00	(2.338.103.298,00)	95,37		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.488.011.410,00	31.017.680.173,00	(1.480.331.237,00)	95,44		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	776.487.798,00	706.596.427,00	(70.901.371,00)	90,87		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.421.348,00	82.762.248,00	(2.659.100,00)	96,80		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.421.348,00	82.762.248,00	(2.659.100,00)	96,80		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.421.348,00	82.762.248,00	(2.659.100,00)	96,80		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	691.076.450,00	622.834.179,00	(68.242.271,00)	90,13		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	691.076.450,00	622.834.179,00	(68.242.271,00)	90,13		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.076.450,00	622.834.179,00	(68.242.271,00)	90,13		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.382.284.541,00	3.275.007.403,00	(107.277.138,00)	96,83		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.367.718.341,00	3.272.587.903,00	(95.130.438,00)	97,18		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.367.718.341,00	3.272.587.903,00	(95.130.438,00)	97,18		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.367.718.341,00	3.272.587.903,00	(95.130.438,00)	97,18		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	14.566.200,00	2.418.500,00	(12.146.700,00)	16,61		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	14.566.200,00	2.418.500,00	(12.146.700,00)	16,61		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.566.200,00	2.418.500,00	(12.146.700,00)	16,61		
01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	919.235.016,00	897.247.622,00	(21.987.394,00)	97,61		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawainan	919.235.016,00	897.247.622,00	(21.987.394,00)	97,61		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	919.235.016,00	897.247.622,00	(21.987.394,00)	97,61		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.235.016,00	897.247.622,00	(21.987.394,00)	97,61		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.893.103.988,00	1.497.143.745,00	(395.959.823,00)	79,08		
01.2.08.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.805.009.518,00	1.438.894.783,00	(366.144.735,00)	79,60		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.567.049.518,00	1.206.504.783,00	(360.544.735,00)	76,99		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.567.049.518,00	1.206.504.783,00	(360.544.735,00)	76,99		
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	237.960.000,00	230.360.000,00	(7.600.000,00)	96,81		
01.2.08.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.960.000,00	80.720.000,00	(7.240.000,00)	91,77		
01.2.08.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	149.640.000,00	(360.000,00)	99,76		
01.2.08.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	88.093.850,00	60.278.962,00	(27.814.888,00)	68,43		
01.2.08.10.5.1	BELANJA OPERASI	88.093.850,00	60.278.962,00	(27.814.888,00)	68,43		
01.2.08.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.093.850,00	60.278.962,00	(27.814.888,00)	68,43		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.702.797,00	896.793.216,00	(269.999.581,00)	76,86		
01.2.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	389.103.801,00	224.320.878,00	(164.782.923,00)	57,65		
01.2.09.08.5.1	BELANJA OPERASI	389.103.801,00	224.320.878,00	(164.782.923,00)	57,65		
01.2.09.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.103.801,00	224.320.878,00	(164.782.923,00)	57,65		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	777.508.996,00	672.382.338,00	(105.216.658,00)	86,47		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	679.270.996,00	574.670.543,00	(104.600.453,00)	84,60		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.270.996,00	574.670.543,00	(104.600.453,00)	84,60		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	98.328.000,00	97.711.795,00	(616.205,00)	99,37		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.328.000,00	97.711.795,00	(616.205,00)	99,37		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.190.043.882,00	23.622.526.256,00	(567.517.626,00)	97,65		
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.861.167.260,00	23.322.252.124,00	(538.915.136,00)	97,74		
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.861.167.260,00	23.322.252.124,00	(538.915.136,00)	97,74		
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	23.861.167.260,00	23.322.252.124,00	(538.915.136,00)	97,74		
01.2.15.02	Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut DPRD	248.876.632,00	225.076.632,00	(23.800.000,00)	90,44		
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	248.876.632,00	225.076.632,00	(23.800.000,00)	90,44		
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.876.632,00	225.076.632,00	(23.800.000,00)	90,44		
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	80.000.000,00	75.197.500,00	(4.802.500,00)	94,00		
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	75.197.500,00	(4.802.500,00)	94,00		
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	75.197.500,00	(4.802.500,00)	94,00		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	170.143.998,00	123.455.504,00	(46.688.494,00)	72,56		
01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	170.143.998,00	123.455.504,00	(46.688.494,00)	72,56		
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	170.143.998,00	123.455.504,00	(46.688.494,00)	72,56		
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.143.998,00	123.455.504,00	(46.688.494,00)	72,56		
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.982.437.454,00	17.124.665.403,00	(857.772.061,00)	95,23		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	995.019.336,00	830.825.493,00	(164.193.843,00)	83,50		
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	995.019.336,00	830.825.493,00	(164.193.843,00)	83,50		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	995.019.336,00	830.825.493,00	(164.193.843,00)	83,50		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	965.019.336,00	830.825.493,00	(134.193.843,00)	83,90		
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.808.803.750,00	5.790.624.364,00	(18.179.386,00)	99,69		
02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	5.808.803.750,00	5.790.624.364,00	(18.179.386,00)	99,69		
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.808.803.750,00	5.790.624.364,00	(18.179.386,00)	99,69		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.808.803.750,00	5.790.624.364,00	(18.179.386,00)	99,69		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.669.196.798,00	9.539.504.060,00	(548.692.738,00)	94,56		
02.2.04.01	Orientasi DPRD	6.978.838.790,00	6.831.870.072,00	(146.968.718,00)	97,90		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.978.838.790,00	6.831.870.072,00	(146.968.718,00)	97,90		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.978.838.790,00	6.831.870.072,00	(146.968.718,00)	97,90		
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.728.682.100,00	1.563.718.220,00	(164.963.880,00)	90,46		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.728.682.100,00	1.563.718.220,00	(164.963.880,00)	90,46		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.728.682.100,00	1.563.718.220,00	(164.963.880,00)	90,46		
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.380.875.948,00	1.143.915.798,00	(236.960.150,00)	82,84		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.380.875.948,00	1.143.915.798,00	(236.960.150,00)	82,84		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.875.948,00	1.143.915.798,00	(236.960.150,00)	82,84		
02.2.05	Penyusunan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.090.417.580,00	963.711.436,00	(126.706.144,00)	88,38		
02.2.05.03	Pelaksanaan Rases	1.090.417.580,00	963.711.436,00	(126.706.144,00)	88,38		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.090.417.580,00	963.711.436,00	(126.706.144,00)	88,38		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.090.417.580,00	963.711.436,00	(126.706.144,00)	88,38		
	SURPLUS / DEFISIT	(50.480.448.874,00)	(48.142.345.676,00)	2.338.103.298,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(50.480.448.874,00)	(48.142.345.676,00)	2.338.103.298,00	0		



PJ. BUPATI KLUNGKUNG

[Signature]
UNYOMAN JENDRIKA



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
SKPD : 5-01.0-00.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi : 5-01.0-00.0-00.01.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.929.800.430,00	5.247.706.244,00	(682.094.186,00)	88,50		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.018.760.718,00	4.662.427.635,00	(356.333.183,00)	93,30		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.588.500,00	3.817.200,00	(771.300,00)	83,55		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.475.500,00	2.873.850,00	(601.650,00)	82,69		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.475.500,00	2.873.850,00	(601.650,00)	82,69		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.475.500,00	2.873.850,00	(601.650,00)	82,69		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.093.000,00	943.350,00	(149.650,00)	86,31		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.093.000,00	943.350,00	(149.650,00)	86,31		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.093.000,00	943.350,00	(149.650,00)	86,31		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.650.676.790,00	4.356.785.156,00	(293.891.634,00)	93,68		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.646.511.390,00	4.353.168.906,00	(293.342.484,00)	93,68		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.646.511.390,00	4.353.168.906,00	(293.342.484,00)	93,68		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.646.511.390,00	4.353.168.906,00	(293.342.484,00)	93,68		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.165.400,00	3.618.250,00	(549.150,00)	86,82		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.165.400,00	3.618.250,00	(549.150,00)	86,82		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.165.400,00	3.618.250,00	(549.150,00)	86,82		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.906.262,00	21.329.262,00	(1.577.000,00)	93,12		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.906.262,00	21.329.262,00	(1.577.000,00)	93,12		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.906.262,00	21.329.262,00	(1.577.000,00)	93,12		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.906.262,00	21.329.262,00	(1.577.000,00)	93,12		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.884.374,00	83.838.737,00	(29.045.637,00)	74,27		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.709.500,00	1.197.000,00	(512.500,00)	70,02		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.709.500,00	1.197.000,00	(512.500,00)	70,02		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.709.500,00	1.197.000,00	(512.500,00)	70,02		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.228.000,00	58.733.700,00	(5.494.300,00)	89,73		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.710.000,00	7.820.000,00	(4.890.000,00)	61,53		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.710.000,00	7.820.000,00	(4.890.000,00)	61,53		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	50.518.000,00	48.913.700,00	(1.604.300,00)	96,82		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.518.000,00	48.913.700,00	(1.604.300,00)	96,82		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.426.750,00	1.894.000,00	(534.750,00)	77,98		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.426.750,00	1.894.000,00	(534.750,00)	77,98		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.426.750,00	1.894.000,00	(534.750,00)	77,98		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45.518.124,00	24.014.037,00	(21.504.087,00)	52,76		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	45.518.124,00	24.014.037,00	(21.504.087,00)	52,76		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.518.124,00	24.014.037,00	(21.504.087,00)	52,76		
01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.725.040,00	156.249.388,00	(7.475.652,00)	95,43		
01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.684.000,00	59.336.048,00	(3.347.952,00)	94,66		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	62.684.000,00	59.336.048,00	(3.347.952,00)	94,66		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.684.000,00	59.336.048,00	(3.347.952,00)	94,66		
01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.041.040,00	96.913.340,00	(4.127.700,00)	95,91		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	101.041.040,00	96.913.340,00	(4.127.700,00)	95,91		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.041.040,00	96.913.340,00	(4.127.700,00)	95,91		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.999.752,00	60.407.792,00	(3.591.960,00)	94,38		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.999.752,00	59.432.792,00	(3.566.960,00)	94,34		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.999.752,00	59.432.792,00	(3.566.960,00)	94,34		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.999.752,00	59.432.792,00	(3.566.960,00)	94,34		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50		
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	412.355.600,00	396.267.740,00	(26.087.860,00)	93,67		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	338.332.500,00	319.551.300,00	(18.781.200,00)	94,17		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	338.332.500,00	319.551.300,00	(18.781.200,00)	94,17		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	239.332.500,00	220.551.300,00	(18.781.200,00)	92,15		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.332.500,00	220.561.300,00	(18.781.200,00)	92,15		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00		
02.2.01.07.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00		
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	27.420.000,00	24.896.340,00	(2.523.660,00)	90,80		
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	27.420.000,00	24.896.340,00	(2.523.660,00)	90,80		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.420.000,00	24.896.340,00	(2.523.660,00)	90,80		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.420.000,00	24.896.340,00	(2.523.660,00)	90,80		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	45.603.100,00	41.620.100,00	(3.983.000,00)	91,70		
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	38.559.700,00	35.611.300,00	(2.948.400,00)	92,35		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.559.700,00	35.611.300,00	(2.948.400,00)	92,35		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.559.700,00	35.611.300,00	(2.948.400,00)	92,35		
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	7.043.400,00	6.208.800,00	(834.600,00)	88,15		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.043.400,00	6.208.800,00	(834.600,00)	88,15		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.043.400,00	6.208.800,00	(834.600,00)	88,15		
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	496.684.112,00	179.010.969,00	(319.673.143,00)	35,90		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	112.138.800,00	106.311.826,00	(5.826.974,00)	93,91		
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.394.800,00	1.136.700,00	(258.100,00)	81,50		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.394.800,00	1.136.700,00	(258.100,00)	81,50		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.394.800,00	1.136.700,00	(258.100,00)	81,50		
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.438.700,00	76.059.226,00	(2.379.474,00)	96,97		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	78.438.700,00	76.059.226,00	(2.379.474,00)	96,97		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.438.700,00	76.059.226,00	(2.379.474,00)	96,97		
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32.305.300,00	28.115.900,00	(4.189.400,00)	87,03		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	32.305.300,00	28.115.900,00	(4.189.400,00)	87,03		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.305.300,00	28.115.900,00	(4.189.400,00)	87,03		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	66.750.612,00	60.376.143,00	(6.372.469,00)	90,45		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.216.200,00	38.156.131,00	(4.059.069,00)	90,39		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.216.200,00	38.156.131,00	(4.059.069,00)	90,39		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.216.200,00	38.156.131,00	(4.059.069,00)	90,39		
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SOA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.534.412,00	22.220.012,00	(2.314.400,00)	90,57		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.534.412,00	22.220.012,00	(2.314.400,00)	90,57		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.534.412,00	22.220.012,00	(2.314.400,00)	90,57		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kelayakan	316.794.700,00	13.321.000,00	(306.473.700,00)	4,17		
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	316.794.700,00	13.321.000,00	(306.473.700,00)	4,17		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	316.794.700,00	13.321.000,00	(306.473.700,00)	4,17		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.794.700,00	13.321.000,00	(306.473.700,00)	4,17		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.929.800.430,00)	(5.247.706.244,00)	682.094.186,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.929.800.430,00)	(5.247.706.244,00)	682.094.186,00	0		



PJ. BUPATI KLUNGKUNG

[Signature]
IYU MANUENDRIKA



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	147.430.045.433,00	128.376.855.358,23	(21.053.190.074,77)	85,72		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.231.650.454,00	126.169.838.784,23	(21.062.013.669,77)	85,69		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	98.607.838.827,00	113.695.107.809,00	15.087.270.979,00	115,30		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	824.185.246,00	869.185.220,96	(154.979.025,05)	81,20		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.602.949.071,00	7.602.949.070,93	(0,07)	100,00		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.196.699.310,00	4.202.393.686,35	(35.994.305.623,65)	10,45		
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	198.394.979,00	207.218.574,00	8.823.595,00	104,45		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	198.394.979,00	199.950.479,00	1.565.500,00	100,79		
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.258.095,00	7.258.095,00	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	19.810.827.640,00	16.903.402.615,00	(2.907.425.024,00)	85,32		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.064.855.222,00	10.413.992.719,00	(1.640.862.503,00)	86,39		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.688.862,00	34.133.674,00	(1.555.188,00)	95,64		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.416.412,00	28.554.674,00	(861.738,00)	97,07		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.416.412,00	28.554.674,00	(861.738,00)	97,07		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.416.412,00	28.554.674,00	(861.738,00)	97,07		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.273.450,00	5.679.000,00	(594.450,00)	88,93		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.273.450,00	5.679.000,00	(594.450,00)	88,93		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.273.450,00	5.679.000,00	(594.450,00)	88,93		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.460.910.435,00	9.208.638.979,00	(1.252.270.456,00)	88,03		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.403.363.435,00	9.156.201.179,00	(1.247.162.256,00)	88,01		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.403.363.435,00	9.156.201.179,00	(1.247.162.256,00)	88,01		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.403.363.435,00	9.156.201.179,00	(1.247.162.256,00)	88,01		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	57.547.000,00	52.438.800,00	(5.108.200,00)	91,12		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	57.547.000,00	52.438.800,00	(5.108.200,00)	91,12		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.547.000,00	52.438.800,00	(5.108.200,00)	91,12		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.613.724,00	53.618.648,00	(32.995.076,00)	61,91		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	88.613.724,00	53.618.648,00	(32.995.076,00)	61,91		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	88.613.724,00	53.618.648,00	(32.995.076,00)	61,91		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.613.724,00	53.618.648,00	(32.995.076,00)	61,91		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.471.641.201,00	1.117.600.418,00	(354.040.783,00)	75,94		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.448.914.189,00	1.067.138.906,00	(351.775.283,00)	75,72		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	770.060.589,00	632.908.826,00	(137.153.763,00)	82,19		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.060.589,00	632.908.826,00	(137.153.763,00)	82,19		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	678.853.600,00	484.232.080,00	(214.621.520,00)	68,38		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	478.853.600,00	484.232.080,00	(14.621.520,00)	96,95		
01.2.06.02.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
01.2.06.10	Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	22.727.012,00	20.461.512,00	(2.265.500,00)	90,03		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	22.727.012,00	20.461.512,00	(2.265.500,00)	90,03		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.727.012,00	20.461.512,00	(2.265.500,00)	90,03		
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.046.158.053,00	4.228.721.257,00	(817.436.796,00)	83,80		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	436.706.800,00	355.457.140,00	(81.249.660,00)	81,39		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	200.590.800,00	160.322.120,00	(40.268.680,00)	79,92		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	200.590.800,00	160.322.120,00	(40.268.680,00)	79,92		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.590.800,00	160.322.120,00	(40.268.680,00)	79,92		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	95.078.800,00	62.033.100,00	(33.045.700,00)	65,24		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	95.078.800,00	62.033.100,00	(33.045.700,00)	65,24		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.078.800,00	62.033.100,00	(33.045.700,00)	65,24		
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	141.037.200,00	133.101.920,00	(7.935.280,00)	94,37		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	141.037.200,00	133.101.920,00	(7.935.280,00)	94,37		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.037.200,00	133.101.920,00	(7.935.280,00)	94,37		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.397.891.053,00	3.723.708.823,00	(674.182.430,00)	84,87		
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	46.438.300,00	27.701.750,00	(18.736.550,00)	59,65		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.438.300,00	27.701.750,00	(18.736.550,00)	59,65		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.438.300,00	27.701.750,00	(18.736.550,00)	59,65		
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4.242.254.703,00	3.634.561.523,00	(607.693.180,00)	85,68		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.242.254.703,00	3.634.561.523,00	(607.693.180,00)	85,68		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.584.028,00	201.651.404,00	(137.932.624,00)	68,38		
02.2.02.05.5.1.03	Belanja Bunga	3.902.690.675,00	3.432.910.119,00	(469.780.556,00)	87,96		
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	109.198.050,00	61.445.350,00	(47.752.700,00)	56,27		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	109.198.050,00	61.445.350,00	(47.752.700,00)	56,27		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.198.050,00	61.445.350,00	(47.752.700,00)	56,27		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	211.580.200,00	149.555.494,00	(62.024.706,00)	70,69		
02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	40.558.050,00	24.022.050,00	(16.536.000,00)	59,23		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.558.050,00	24.022.050,00	(16.536.000,00)	59,23		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.558.050,00	24.022.050,00	(16.536.000,00)	59,23		
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18.447.000,00	13.520.360,00	(4.926.640,00)	73,29		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.447.000,00	13.520.360,00	(4.926.640,00)	73,29		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.447.000,00	13.520.360,00	(4.926.640,00)	73,29		
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.451.300,00	25.888.984,00	(8.564.316,00)	75,14		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.451.300,00	25.888.984,00	(8.564.316,00)	75,14		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.451.300,00	25.888.984,00	(8.564.316,00)	75,14		
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	98.607.950,00	69.161.350,00	(27.446.600,00)	71,58		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	98.607.950,00	69.161.350,00	(27.446.600,00)	71,58		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.607.950,00	69.161.350,00	(27.446.600,00)	71,58		
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	21.495.900,00	16.964.750,00	(4.531.150,00)	78,92		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	21.495.900,00	16.964.750,00	(4.531.150,00)	78,92		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.495.900,00	16.964.750,00	(4.531.150,00)	78,92		
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	629.978.482,00	538.999.840,00	(90.978.622,00)	85,56		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	629.978.482,00	538.999.840,00	(90.978.622,00)	85,56		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	60.555.100,00	54.912.834,00	(5.642.266,00)	90,88		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.555.100,00	54.912.834,00	(5.642.266,00)	90,88		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.555.100,00	54.912.834,00	(5.642.266,00)	90,88		
03.2.01.05	Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	377.458.800,00	343.046.350,00	(34.413.450,00)	90,88		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	377.458.800,00	343.046.350,00	(34.413.450,00)	90,88		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.458.800,00	343.046.350,00	(34.413.450,00)	90,88		
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	191.963.582,00	141.040.656,00	(50.922.906,00)	73,47		
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	191.963.582,00	141.040.656,00	(50.922.906,00)	73,47		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.963.582,00	141.040.656,00	(50.922.906,00)	73,47		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.079.835.903,00	1.721.688.800,00	(358.147.103,00)	82,78		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.079.835.903,00	1.721.688.800,00	(358.147.103,00)	82,78		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	387.265.500,00	292.907.400,00	(104.378.100,00)	73,73		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	387.265.500,00	292.907.400,00	(104.378.100,00)	73,73		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.265.500,00	292.907.400,00	(104.378.100,00)	73,73		
04.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	86.269.000,00	74.041.616,00	(12.227.384,00)	85,83		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	86.269.000,00	74.041.616,00	(12.227.384,00)	85,83		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.269.000,00	74.041.616,00	(12.227.384,00)	85,83		
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	114.175.300,00	93.774.710,00	(20.400.590,00)	82,13		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	114.175.300,00	93.774.710,00	(20.400.590,00)	82,13		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.175.300,00	93.774.710,00	(20.400.590,00)	82,13		
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8.627.750,00	7.793.150,00	(834.600,00)	90,33		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.627.750,00	7.793.150,00	(834.600,00)	90,33		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.627.750,00	7.793.150,00	(834.600,00)	90,33		
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	529.501.490,00	503.229.253,00	(26.272.237,00)	95,04		
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	529.501.490,00	503.229.253,00	(26.272.237,00)	95,04		
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.501.490,00	503.229.253,00	(26.272.237,00)	95,04		
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	619.805.163,00	642.357.595,00	(177.447.568,00)	78,35		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	619.805.163,00	642.357.595,00	(177.447.568,00)	78,35		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619.805.163,00	642.357.595,00	(177.447.568,00)	78,35		



KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	124.171.700,00	107.585.076,00	(16.586.624,00)	86,64		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	124.171.700,00	107.585.076,00	(16.586.624,00)	86,64		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.171.700,00	107.585.076,00	(16.586.624,00)	86,64		
	SURPLUS / DEFISIT	127.619.217.793,00	109.473.452.742,23	(18.145.765.050,77)	85,78		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	127.619.217.793,00	109.473.452.742,23	(18.145.765.050,77)	85,78		



PJ. BUPATI KLUNGKUNG

[Signature]
NYOMAN JENDRA



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH SELAKU
SKPKD**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000.001 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPKD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.053.249.934.803,00	1.019.842.353.788,00	(33.407.581.017,00)	96,83		
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.053.249.934.803,00	1.019.842.353.788,00	(33.407.581.017,00)	96,83		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	818.854.573.000,00	818.590.718.388,00	(263.854.811,00)	99,97		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	234.395.361.803,00	201.251.635.397,00	(33.143.726.406,00)	85,85		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	127.964.887.211,00	125.534.818.975,26	(2.430.068.235,74)	98,10		
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	127.964.887.211,00	125.534.818.975,26	(2.430.068.235,74)	98,10		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	127.964.887.211,00	125.534.818.975,26	(2.430.068.235,74)	98,10		
02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	107.138.345.000,00	107.138.345.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.06.5.4	BELANJA TRANSFER	107.138.345.000,00	107.138.345.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.06.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.138.345.000,00	107.138.345.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.825.721.728,00	2.940.474.524,26	(885.247.203,74)	75,86		
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.825.721.728,00	2.940.474.524,26	(885.247.203,74)	75,86		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.825.721.728,00	2.940.474.524,26	(885.247.203,74)	75,86		
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	17.000.820.483,00	15.455.999.451,00	(1.544.821.032,00)	90,91		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.10.5.4	BELANJA TRANSFER	17.000.820.480,00	15.455.999.451,00	(1.544.821.032,00)	90,91		
02.2.04.10.5.4.01	Belanja Reg. Hast	17.000.820.480,00	15.455.999.451,00	(1.544.821.032,00)	90,91		
	SURPLUS / DEFISIT	925.295.047.550,00	954.307.534.810,74	(30.977.512.781,26)	96,55		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.825.895.012,00	55.874.539.707,54	48.873.895,54	100,09		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.797.188.012,00	55.808.039.707,54	40.873.895,54	100,07		
00.0.00.00.6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	98.500.000,00	96.500.000,00	6.000.000,00	113,68		
	PEMBIAYAAN NETTO	55.825.895.012,00	55.874.539.707,54	48.873.895,54	100,09		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	981.110.713.654,00	950.182.974.518,38	(30.925.639.085,62)	96,55		



 P. BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN JENDRIKA



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

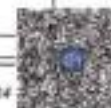


PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

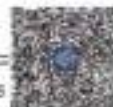
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.014.794.768,00	7.599.422.929,00	(1.415.371.839,00)	84,30		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.253.805.572,00	5.086.074.108,00	(1.167.732.464,00)	81,35		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.298.000,00	6.674.450,00	(623.550,00)	91,46		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.973.500,00	3.724.500,00	(249.000,00)	93,73		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.973.500,00	3.724.500,00	(249.000,00)	93,73		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.973.500,00	3.724.500,00	(249.000,00)	93,73		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.324.500,00	2.949.950,00	(374.550,00)	88,73		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.324.500,00	2.949.950,00	(374.550,00)	88,73		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.324.500,00	2.949.950,00	(374.550,00)	88,73		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.820.778.820,00	4.795.579.458,00	(25.199.362,00)	97,46		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.820.778.820,00	4.795.579.458,00	(25.199.362,00)	97,46		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.820.778.820,00	4.795.579.458,00	(25.199.362,00)	97,46		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.820.778.820,00	4.795.579.458,00	(25.199.362,00)	97,46		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.406.500,00	2.078.000,00	(330.500,00)	86,27		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.406.500,00	2.078.000,00	(330.500,00)	86,27		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.406.500,00	2.078.000,00	(330.500,00)	86,27		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.406.500,00	2.078.000,00	(330.500,00)	86,27		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.323.252,00	283.744.200,00	(39.579.052,00)	87,76		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321.832.752,00	283.122.750,00	(38.710.002,00)	87,97		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	198.198.752,00	188.012.050,00	(31.184.702,00)	84,34		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.198.752,00	188.012.050,00	(31.184.702,00)	84,34		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	122.636.000,00	115.110.700,00	(7.525.300,00)	93,86		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.636.000,00	115.110.700,00	(7.525.300,00)	93,86		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.490.500,00	621.450,00	(869.050,00)	41,66		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.490.500,00	621.450,00	(869.050,00)	41,66		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.490.500,00	621.450,00	(869.050,00)	41,66		
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.504.522.300,00	456.657.114,00	(1.047.865.186,00)	30,36		
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	680.084.400,00	84.758.110,00	(595.326.290,00)	7,36		
02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	654.866.600,00	43.444.474,00	(511.422.126,00)	5,08		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	654.866.600,00	43.444.474,00	(511.422.126,00)	5,08		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.866.600,00	43.444.474,00	(511.422.126,00)	5,08		
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4.598.400,00	2.153.616,00	(2.444.784,00)	46,83		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.598.400,00	2.153.616,00	(2.444.784,00)	46,83		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.598.400,00	2.153.616,00	(2.444.784,00)	46,83		
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.619.400,00	19.160.020,00	(1.459.380,00)	92,92		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.619.400,00	9.419.770,00	(1.199.630,00)	88,70		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.619.400,00	9.419.770,00	(1.199.630,00)	88,70		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.740.250,00	(259.750,00)	97,40		
02.2.01.10.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	9.740.250,00	(259.750,00)	97,40		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	337.409.000,00	150.296.240,00	(187.112.760,00)	44,54		
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	35.293.800,00	30.422.440,00	(4.871.360,00)	86,20		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.293.800,00	30.422.440,00	(4.871.360,00)	86,20		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.293.800,00	30.422.440,00	(4.871.360,00)	86,20		
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	302.115.200,00	119.873.800,00	(182.241.400,00)	39,68		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	302.115.200,00	119.873.800,00	(182.241.400,00)	39,68		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.115.200,00	119.873.800,00	(182.241.400,00)	39,68		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	287.026.900,00	241.602.764,00	(45.426.136,00)	84,17		
02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	78.902.400,00	76.385.800,00	(2.516.600,00)	96,81		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	78.902.400,00	76.385.800,00	(2.516.600,00)	96,81		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.902.400,00	76.385.800,00	(2.516.600,00)	96,81		
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	65.534.650,00	47.570.144,00	(17.964.506,00)	72,59		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	65.534.650,00	47.570.144,00	(17.964.506,00)	72,59		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.534.650,00	47.570.144,00	(17.964.506,00)	72,59		
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	142.591.850,00	117.646.820,00	(24.945.030,00)	82,51		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	142.591.850,00	117.646.820,00	(24.945.030,00)	82,51		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.591.850,00	117.646.820,00	(24.945.030,00)	82,51		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.256.465.896,00	2.054.691.707,00	(201.774.189,00)	91,06		
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.256.465.896,00	2.054.691.707,00	(201.774.189,00)	91,06		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.256.465.896,00	2.054.691.707,00	(201.774.189,00)	91,06		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.256.465.896,00	2.054.691.707,00	(201.774.189,00)	91,06		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.256.465.896,00	2.054.691.707,00	(201.774.189,00)	91,06		
	SURPLUS / DEFISIT	(9.014.794.766,00)	(7.599.422.929,00)	1.415.371.839,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.014.794.766,00)	(7.599.422.929,00)	1.415.371.839,00	0		



 PL. BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN HENDRIKA



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 SKPD : 5-05.0-00.0-00.01 Badan Riset dan Inovasi Daerah
 Unit Organisasi : 5-05.0-00.0-00.01.000 Badan Riset dan Inovasi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5-05.0-00.0-00.01.000.000 Badan Riset dan Inovasi Daerah

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.512.477.008,00	2.088.726.491,00	(423.748.517,00)	83,13		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.425.648.668,00	1.096.132.641,00	(369.516.117,00)	74,08		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.889.000,00	2.329.260,00	(369.760,00)	86,62		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.316.900,00	1.962.200,00	(334.700,00)	85,56		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.316.900,00	1.962.200,00	(334.700,00)	85,56		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.316.900,00	1.962.200,00	(334.700,00)	85,56		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	372.100,00	347.060,00	(25.060,00)	93,27		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	372.100,00	347.060,00	(25.060,00)	93,27		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.100,00	347.060,00	(25.060,00)	93,27		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	861.604.110,00	825.936.044,00	(325.666.066,00)	65,78		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	649.707.760,00	624.389.894,00	(325.317.866,00)	65,75		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	649.707.760,00	624.389.894,00	(325.317.866,00)	65,75		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	649.707.760,00	624.389.894,00	(325.317.866,00)	65,75		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.796.350,00	1.548.150,00	(248.200,00)	86,18		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.796.350,00	1.548.150,00	(248.200,00)	86,18		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.796.350,00	1.548.150,00	(248.200,00)	86,18		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	791.400,00	675.600,00	(115.800,00)	85,37		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	791.400,00	675.600,00	(115.800,00)	85,37		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	791.400,00	675.600,00	(115.800,00)	85,37		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.400,00	675.600,00	(115.800,00)	85,37		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.384.700,00	391.855.000,00	(11.529.700,00)	97,14		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	401.751.000,00	390.480.000,00	(11.271.000,00)	97,19		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	0		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	0		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	399.451.000,00	390.480.000,00	(8.971.000,00)	97,75		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399.451.000,00	390.480.000,00	(8.971.000,00)	97,75		
01.2.06.10	Penatausahaan Atribut Dinamis pada SKPD	1.633.700,00	1.375.000,00	(258.700,00)	84,16		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.633.700,00	1.375.000,00	(258.700,00)	84,16		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.633.700,00	1.375.000,00	(258.700,00)	84,16		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.952.850,00	10.237.147,00	(29.715.703,00)	25,62		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.533.500,00	3.210.597,00	(15.322.903,00)	17,32		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.533.500,00	3.210.597,00	(15.322.903,00)	17,32		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.533.500,00	3.210.597,00	(15.322.903,00)	17,32		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.419.350,00	7.026.550,00	(14.392.800,00)	32,80		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.419.350,00	7.026.550,00	(14.392.800,00)	32,80		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.419.350,00	7.026.550,00	(14.392.800,00)	32,80		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.326.598,00	25.097.500,00	(2.229.098,00)	91,84		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.326.598,00	25.097.500,00	(2.229.098,00)	91,84		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.326.598,00	25.097.500,00	(2.229.098,00)	91,84		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.326.598,00	25.097.500,00	(2.229.098,00)	91,84		
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.085.828.350,00	1.032.596.850,00	(53.231.500,00)	95,01		
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengujian Peraturan	71.256.800,00	65.246.040,00	(6.010.760,00)	91,56		
02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	71.256.800,00	65.246.040,00	(6.010.760,00)	91,56		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.256.800,00	65.246.040,00	(6.010.760,00)	91,56		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.256.800,00	65.246.040,00	(6.010.760,00)	91,56		
02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	172.472.300,00	170.381.050,00	(2.091.250,00)	98,79		
02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	51.095.000,00	50.401.450,00	(693.550,00)	98,64		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.095.000,00	50.401.450,00	(693.550,00)	98,64		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.095.000,00	50.401.450,00	(693.550,00)	98,64		
02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	121.377.300,00	119.979.600,00	(1.397.700,00)	98,85		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	121.377.300,00	119.979.600,00	(1.397.700,00)	98,85		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.377.300,00	119.979.600,00	(1.397.700,00)	98,86		
02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	127.009.000,00	126.450.600,00	(1.558.400,00)	99,57		
02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Pangan	52.009.000,00	51.450.600,00	(558.400,00)	98,93		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	52.009.000,00	51.450.600,00	(558.400,00)	98,93		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.009.000,00	51.450.600,00	(558.400,00)	98,93		
02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	98,67		
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	98,67		
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	98,67		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	716.080.250,00	671.518.260,00	(44.571.990,00)	93,78		
02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	164.803.800,00	161.655.000,00	(3.148.800,00)	98,08		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.803.800,00	2.811.000,00	(1.992.800,00)	58,52		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.803.800,00	2.811.000,00	(1.992.800,00)	58,52		
02.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	160.000.000,00	158.844.000,00	(1.156.000,00)	99,28		
02.2.04.02.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	160.000.000,00	158.844.000,00	(1.156.000,00)	99,28		
02.2.04.03	Diseminasi Jasa, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	547.374.650,00	507.330.260,00	(40.044.390,00)	92,68		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	547.374.650,00	507.330.260,00	(40.044.390,00)	92,68		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.374.650,00	507.330.260,00	(40.044.390,00)	92,68		
02.2.04.04	Solusi/aksi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keltbangin	3.911.800,00	2.533.000,00	(1.378.800,00)	64,75		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.911.800,00	2.533.000,00	(1.378.800,00)	64,75		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.911.800,00	2.533.000,00	(1.378.800,00)	64,75		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.512.477.008,00)	(2.968.728.491,00)	423.748.517,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.512.477.008,00)	(2.968.728.491,00)	423.748.517,00	0		



 P. BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN JENDRA



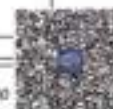
INSPEKTORAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT
 SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat
 Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000 Inspektorat
 Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000.000 Inspektorat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	14.099.218.821,00	9.110.039.276,00	(4.989.177.545,00)	64,61		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.484.281.173,00	7.484.262.110,00	(2.000.079.063,00)	78,91		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.000.812,00	29.678.712,00	(1.322.100,00)	95,74		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.542.800,00	6.264.600,00	(1.258.200,00)	83,32		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.542.800,00	6.264.600,00	(1.258.200,00)	83,32		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.542.800,00	6.264.600,00	(1.258.200,00)	83,32		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.458.012,00	23.394.112,00	(63.900,00)	99,73		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	23.458.012,00	23.394.112,00	(63.900,00)	99,73		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.458.012,00	23.394.112,00	(63.900,00)	99,73		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.283.750.326,00	6.277.823.497,00	(5.926.829,00)	99,91		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.272.233.226,00	6.267.224.497,00	(5.008.729,00)	99,92		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.272.233.226,00	6.267.224.497,00	(5.008.729,00)	99,92		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.272.233.226,00	6.267.224.497,00	(5.008.729,00)	99,92		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.517.100,00	10.599.000,00	(918.100,00)	92,03		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.517.100,00	10.599.000,00	(918.100,00)	92,03		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.517.100,00	10.599.000,00	(918.100,00)	92,03		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.669.965.620,00	311.610.144,00	(1.358.355.476,00)	18,66		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.669.965.620,00	311.610.144,00	(1.358.355.476,00)	18,66		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.669.965.620,00	311.610.144,00	(1.358.355.476,00)	18,66		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.669.965.620,00	311.610.144,00	(1.358.355.476,00)	18,66		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.499.594.415,00	865.089.757,00	(634.474.658,00)	57,69		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.495.327.015,00	862.180.757,00	(633.166.258,00)	57,66		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	563.784.015,00	306.404.462,00	(257.379.553,00)	54,35		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.784.015,00	306.404.462,00	(257.379.553,00)	54,35		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	931.543.000,00	555.785.295,00	(375.757.705,00)	59,66		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	831.543.000,00	456.003.340,00	(375.539.660,00)	54,84		
01.2.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.782.955,00	(247.075,00)	99,75		
01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	4.237.400,00	2.929.000,00	(1.308.400,00)	69,12		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	4.237.400,00	2.929.000,00	(1.308.400,00)	69,12		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.237.400,00	2.929.000,00	(1.308.400,00)	69,12		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.224.141.324,00	1.508.982.642,00	(2.715.548.682,00)	35,71		
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.095.254.312,00	781.450.662,00	(913.803.650,00)	48,10		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4.119.250,00	2.631.350,00	(1.487.900,00)	63,88		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.119.250,00	2.631.350,00	(1.487.900,00)	63,88		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.119.250,00	2.631.350,00	(1.487.900,00)	63,88		
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	482.830.650,00	51.904.000,00	(430.926.650,00)	10,75		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	482.830.650,00	51.904.000,00	(430.926.650,00)	10,75		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.830.650,00	51.904.000,00	(430.926.650,00)	10,75		
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	2.693.500,00	2.643.500,00	(50.000,00)	98,14		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.693.500,00	2.643.500,00	(50.000,00)	98,14		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.693.500,00	2.643.500,00	(50.000,00)	98,14		
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	7.920.800,00	7.885.000,00	(35.800,00)	99,55		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.920.800,00	7.885.000,00	(35.800,00)	99,55		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.800,00	7.885.000,00	(35.800,00)	99,55		
02.2.01.06	Pengawasan Desa	635.783.412,00	444.205.512,00	(391.577.900,00)	63,15		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	635.783.412,00	444.205.512,00	(391.577.900,00)	63,15		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.783.412,00	444.205.512,00	(391.577.900,00)	63,15		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	381.916.700,00	272.191.300,00	(89.725.400,00)	75,21		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	381.916.700,00	272.191.300,00	(89.725.400,00)	75,21		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.916.700,00	272.191.300,00	(89.725.400,00)	75,21		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.528.877.012,00	727.131.980,00	(1.801.745.032,00)	28,75		
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.528.877.012,00	727.131.980,00	(1.801.745.032,00)	28,75		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.528.877.012,00	727.131.980,00	(1.801.745.032,00)	28,75		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.528.877.012,00	727.131.980,00	(1.801.745.032,00)	28,75		
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	390.794.324,00	117.244.524,00	(273.549.800,00)	30,00		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	390.794.324,00	117.244.524,00	(273.549.800,00)	30,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56.308.812,00	25.730.812,00	(30.578.000,00)	45,70		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.308.812,00	25.730.812,00	(30.578.000,00)	45,70		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.308.812,00	25.730.812,00	(30.578.000,00)	45,70		
03.2.02.03	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.529.212,00	50.497.812,00	(70.031.400,00)	41,90		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	120.529.212,00	50.497.812,00	(70.031.400,00)	41,90		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.529.212,00	50.497.812,00	(70.031.400,00)	41,90		
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	213.956.300,00	41.016.100,00	(172.940.200,00)	19,17		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	213.956.300,00	41.016.100,00	(172.940.200,00)	19,17		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.956.300,00	41.016.100,00	(172.940.200,00)	19,17		
	SURPLUS / DEFISIT	(14.099.218.821,00)	(9.110.039.276,00)	4.989.177.545,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.099.218.821,00)	(9.110.039.276,00)	4.989.177.545,00	0		



 PJ. BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN JENDRA



KECAMATAN KLUNGKUNG



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Klungkung

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	12.301.653.616,00	11.706.200.052,00	(595.453.564,00)	95,16		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.478.820.556,00	8.060.999.261,00	(415.821.295,00)	95,61		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.259.902,00	119.061.542,00	(43.198.360,00)	73,38		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.487.100,00	8.537.750,00	(1.949.350,00)	81,41		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.487.100,00	8.537.750,00	(1.949.350,00)	81,41		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.487.100,00	8.537.750,00	(1.949.350,00)	81,41		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.772.802,00	110.523.792,00	(41.249.010,00)	72,82		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	151.772.802,00	110.523.792,00	(41.249.010,00)	72,82		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.772.802,00	110.523.792,00	(41.249.010,00)	72,82		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.205.139.154,00	7.974.475.806,00	(231.663.348,00)	97,16		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.198.785.654,00	7.966.781.755,00	(230.004.899,00)	97,19		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.198.785.654,00	7.966.781.755,00	(230.004.899,00)	97,19		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.198.785.654,00	7.966.781.755,00	(230.004.899,00)	97,19		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.352.500,00	5.594.050,00	(1.858.450,00)	77,44		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.352.500,00	5.594.050,00	(1.858.450,00)	77,44		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.352.500,00	5.594.050,00	(1.858.450,00)	77,44		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.646.600,00	134.126.594,00	(14.520.006,00)	90,23		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	148.646.600,00	134.126.594,00	(14.520.006,00)	90,23		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	148.646.600,00	134.126.594,00	(14.520.006,00)	90,23		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.646.600,00	134.126.594,00	(14.520.006,00)	90,23		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	959.774.900,00	833.335.320,00	(126.439.580,00)	86,83		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	873.640.688,00	563.381.815,00	(110.258.873,00)	83,63		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	873.640.688,00	563.381.815,00	(110.258.873,00)	83,63		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	873.640.688,00	563.381.815,00	(110.258.873,00)	83,63		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	258.794.000,00	244.410.893,00	(14.383.107,00)	94,44		
01.2.08.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.794.000,00	195.048.050,00	(13.745.950,00)	93,42		
01.2.08.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.362.843,00	(637.157,00)	98,73		
01.2.08.10	Penetasehan Arsip Dinamis pada SKPD	27.340.212,00	25.542.612,00	(1.797.600,00)	93,43		
01.2.08.10.5.1	BELANJA OPERASI	27.340.212,00	25.542.612,00	(1.797.600,00)	93,43		
01.2.08.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.340.212,00	25.542.612,00	(1.797.600,00)	93,43		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.429.900,00	11.338.900,00	(13.090.000,00)	46,41		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.439.800,00	3.575.800,00	(10.864.000,00)	24,76		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.025.800,00	987.800,00	(2.038.000,00)	32,65		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.025.800,00	987.800,00	(2.038.000,00)	32,65		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.800,00	987.800,00	(2.038.000,00)	32,65		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.413.800,00	2.587.800,00	(8.826.000,00)	22,67		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.413.800,00	2.587.800,00	(8.826.000,00)	22,67		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.413.800,00	2.587.800,00	(8.826.000,00)	22,67		
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	8.756.500,00	7.098.500,00	(1.658.000,00)	81,07		
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8.756.500,00	7.098.500,00	(1.658.000,00)	81,07		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.756.500,00	7.098.500,00	(1.658.000,00)	81,07		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.756.500,00	7.098.500,00	(1.658.000,00)	81,07		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.233.800,00	662.800,00	(571.000,00)	53,72		
02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.233.800,00	662.800,00	(571.000,00)	53,72		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.233.800,00	662.800,00	(571.000,00)	53,72		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.233.800,00	662.800,00	(571.000,00)	53,72		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.767.093.810,00	2.606.514.491,00	(160.579.319,00)	94,20		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.186.650,00	1.101.650,00	(2.085.000,00)	34,57		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.186.650,00	1.101.650,00	(2.085.000,00)	34,57		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.186.650,00	1.101.650,00	(2.085.000,00)	34,57		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.186.650,00	1.101.650,00	(2.085.000,00)	34,57		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.763.907.160,00	2.605.412.841,00	(158.494.319,00)	94,27		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	247.685.350,00	239.483.078,00	(8.202.272,00)	96,89		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	182.581.350,00	175.905.850,00	(6.675.700,00)	96,34		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.581.350,00	175.905.850,00	(6.675.700,00)	96,34		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	65.104.000,00	63.577.428,00	(1.526.572,00)	97,66		
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.104.000,00	63.577.428,00	(1.526.572,00)	97,66		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.337.296.640,00	1.220.046.975,00	(117.249.665,00)	91,23		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.181.296.640,00	1.064.329.775,00	(116.966.865,00)	90,10		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.181.296.640,00	1.064.329.775,00	(116.966.865,00)	90,10		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	156.000.000,00	155.717.200,00	(282.800,00)	99,82		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.000.000,00	155.717.200,00	(282.800,00)	99,82		
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	1.178.925.170,00	1.145.882.788,00	(33.042.382,00)	97,20		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.178.925.170,00	1.145.882.788,00	(33.042.382,00)	97,20		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.178.925.170,00	1.145.882.788,00	(33.042.382,00)	97,20		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.488.900,00	4.062.950,00	(1.425.950,00)	74,02		
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0		
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0		
04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	5.488.900,00	4.062.950,00	(1.425.950,00)	74,02		
04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.488.900,00	4.062.950,00	(1.425.950,00)	74,02		
04.7.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.488.900,00	4.062.950,00	(1.425.950,00)	74,02		
04.7.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.488.900,00	4.062.950,00	(1.425.950,00)	74,02		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.231.350,00	14.895.350,00	(3.336.000,00)	81,70		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.231.350,00	14.895.350,00	(3.336.000,00)	81,70		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.231.350,00	14.895.350,00	(3.336.000,00)	81,70		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	18.231.350,00	14.895.350,00	(3.336.000,00)	81,70		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.231.350,00	14.895.350,00	(3.336.000,00)	81,70		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.589.100,00	8.391.100,00	(1.198.000,00)	87,51		
05.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.589.100,00	8.391.100,00	(1.198.000,00)	87,51		
05.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.589.100,00	8.391.100,00	(1.198.000,00)	87,51		
05.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	9.589.100,00	8.391.100,00	(1.198.000,00)	87,51		
05.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.589.100,00	8.391.100,00	(1.198.000,00)	87,51		
	SURPLUS / DEFISIT	(12.301.853.815,00)	(11.706.200.852,00)	595.653.964,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(12.301.853.815,00)	(11.706.200.852,00)	595.653.964,00	0		

PL. BUPATI KLUNGKUNG

 LENNYMAN JENDRIKA



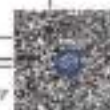
KECAMATAN BANJARANGKAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 SKPD : 7-01 0-00 0-00.02 Kecamatan Banjarangkan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.134.717.165,00	4.634.339.259,60	(500.377.905,40)	90,26		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.312.478.729,00	3.242.219.742,00	(70.258.987,00)	97,88		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.024.200,00	5.948.500,00	(1.077.700,00)	84,66		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.538.400,00	2.997.300,00	(541.100,00)	84,71		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.538.400,00	2.997.300,00	(541.100,00)	84,71		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.538.400,00	2.997.300,00	(541.100,00)	84,71		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.485.800,00	2.949.200,00	(536.600,00)	84,61		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.485.800,00	2.949.200,00	(536.600,00)	84,61		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.485.800,00	2.949.200,00	(536.600,00)	84,61		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.674.944.922,00	2.630.641.437,00	(44.303.485,00)	98,46		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.667.327.222,00	2.623.316.537,00	(44.010.685,00)	98,47		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.667.327.222,00	2.623.316.537,00	(44.010.685,00)	98,47		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.667.327.222,00	2.623.316.537,00	(44.010.685,00)	98,47		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.617.700,00	7.324.900,00	(292.800,00)	96,16		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.617.700,00	7.324.900,00	(292.800,00)	96,16		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.617.700,00	7.324.900,00	(292.800,00)	96,16		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.451.362,00	159.886.984,00	(564.378,00)	99,65		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	160.451.362,00	159.886.984,00	(564.378,00)	99,65		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	160.451.362,00	159.886.984,00	(564.378,00)	99,65		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.451.362,00	159.886.984,00	(564.378,00)	99,65		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.058.245,00	245.744.521,00	(24.313.724,00)	91,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.314.245,00	244.374.521,00	(23.939.724,00)	91,08		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	247.754.245,00	225.033.521,00	(22.720.724,00)	90,83		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.754.245,00	225.033.521,00	(22.720.724,00)	90,83		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.02.5.2	BELANJA MODAL	20.560.000,00	19.341.000,00	(1.219.000,00)	94,07		
01.2.05.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.560.000,00	19.341.000,00	(1.219.000,00)	94,07		
01.2.05.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.744.000,00	1.370.300,00	(373.700,00)	78,57		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.744.000,00	1.370.300,00	(373.700,00)	78,57		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.744.000,00	1.370.300,00	(373.700,00)	78,57		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.806.909.336,00	1.377.329.667,60	(429.579.668,40)	76,23		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.521.100,00	32.576.100,00	(11.945.000,00)	73,17		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.646.700,00	28.971.300,00	(11.675.400,00)	70,93		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.646.700,00	28.971.300,00	(11.675.400,00)	70,93		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.646.700,00	28.971.300,00	(11.675.400,00)	70,93		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.674.400,00	3.604.800,00	(69.600,00)	98,11		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.674.400,00	3.604.800,00	(69.600,00)	98,11		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.674.400,00	3.604.800,00	(69.600,00)	98,11		
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.756.033.686,00	1.342.064.417,60	(415.969.268,40)	76,34		
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.756.033.686,00	1.342.064.417,60	(415.969.268,40)	76,34		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.833.650,00	54.512.500,00	(1.321.150,00)	97,63		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.833.650,00	54.512.500,00	(1.321.150,00)	97,63		
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	1.702.200.036,00	1.287.551.917,60	(414.648.118,40)	75,64		
02.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50		
02.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.698.200.036,00	1.283.651.917,60	(414.548.118,40)	75,59		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.354.550,00	2.689.150,00	(1.665.400,00)	61,75		
02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.354.550,00	2.689.150,00	(1.665.400,00)	61,75		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.354.550,00	2.689.150,00	(1.665.400,00)	61,75		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.354.550,00	2.689.150,00	(1.665.400,00)	61,75		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.526.000,00	6.306.000,00	(220.000,00)	96,63		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.526.000,00	6.306.000,00	(220.000,00)	96,63		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.526.000,00	6.306.000,00	(220.000,00)	96,63		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.526.000,00	6.306.000,00	(220.000,00)	96,63		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	6.308.000,00	(227.000,00)	98,53		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.484.100,00	2.258.050,00	(206.050,00)	91,54		
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.484.100,00	2.258.050,00	(206.050,00)	91,54		
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisan Negara Republik Indonesia	2.484.100,00	2.258.050,00	(206.050,00)	91,54		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.484.100,00	2.258.050,00	(206.050,00)	91,54		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.484.100,00	2.258.050,00	(206.050,00)	91,54		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.939.000,00	3.825.800,00	(113.200,00)	97,13		
06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.939.000,00	3.825.800,00	(113.200,00)	97,13		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.939.000,00	3.825.800,00	(113.200,00)	97,13		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	3.939.000,00	3.825.800,00	(113.200,00)	97,13		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.939.000,00	3.825.800,00	(113.200,00)	97,13		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.134.717.188,00)	(4.834.339.288,60)	500.377.899,40	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(5.134.717.188,00)	(4.834.339.288,60)	500.377.899,40	0		


 P. BUPATI KLUNGKUNG

 NYOMAN HENDRIKA

KECAMATAN NUSA PENIDA



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Nusa Penida

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.380.513.788,00	4.978.794.153,40	(401.719.614,60)	92,53		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.951.534.418,00	4.571.354.058,40	(380.180.359,60)	92,32		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.522.950,00	12.548.590,00	(974.360,00)	92,79		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.453.850,00	7.639.380,00	(814.470,00)	90,37		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.453.850,00	7.639.380,00	(814.470,00)	90,37		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.453.850,00	7.639.380,00	(814.470,00)	90,37		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.069.100,00	4.909.210,00	(159.890,00)	96,85		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.069.100,00	4.909.210,00	(159.890,00)	96,85		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.069.100,00	4.909.210,00	(159.890,00)	96,85		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.649.967.973,00	2.640.183.364,00	(9.804.609,00)	99,63		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.644.929.623,00	2.635.264.664,00	(9.664.939,00)	99,63		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.644.929.623,00	2.635.264.664,00	(9.664.939,00)	99,63		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.644.929.623,00	2.635.264.664,00	(9.664.939,00)	99,63		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.038.350,00	4.898.680,00	(139.670,00)	97,23		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.038.350,00	4.898.680,00	(139.670,00)	97,23		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.038.350,00	4.898.680,00	(139.670,00)	97,23		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	274.638.106,00	272.497.227,00	(2.140.879,00)	99,22		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	274.638.106,00	272.497.227,00	(2.140.879,00)	99,22		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	274.638.106,00	272.497.227,00	(2.140.879,00)	99,22		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.638.106,00	272.497.227,00	(2.140.879,00)	99,22		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.013.405.389,00	1.846.144.877,40	(367.260.511,60)	81,76		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.011.849.089,00	1.844.851.277,40	(366.997.811,60)	81,77		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	291.929.089,00	282.750.720,00	(9.178.369,00)	96,86		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.929.089,00	282.750.720,00	(9.178.369,00)	96,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	1.719.720.000,00	1.362.100.557,40	(357.619.442,60)	79,20		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.720.000,00	20.600.000,00	(120.000,00)	99,42		
01.2.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.699.000.000,00	1.341.500.557,40	(357.499.442,60)	78,96		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.756.300,00	1.293.800,00	(462.700,00)	73,65		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.756.300,00	1.293.800,00	(462.700,00)	73,65		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.756.300,00	1.293.800,00	(462.700,00)	73,65		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	374.292.150,00	358.013.640,00	(16.278.510,00)	95,12		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	367.120.350,00	349.167.482,00	(17.952.868,00)	95,11		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	334.783.450,00	320.539.910,00	(14.243.540,00)	95,75		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	322.103.450,00	309.269.910,00	(12.813.540,00)	96,02		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.103.450,00	309.269.910,00	(12.813.540,00)	96,02		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	12.680.000,00	11.250.000,00	(1.430.000,00)	88,72		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.680.000,00	11.250.000,00	(1.430.000,00)	88,72		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.336.900,00	28.627.572,00	(3.709.328,00)	88,53		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.336.900,00	28.627.572,00	(3.709.328,00)	88,53		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.336.900,00	28.627.572,00	(3.709.328,00)	88,53		
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.862.000,00	5.793.420,00	(68.580,00)	98,49		
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.862.000,00	5.793.420,00	(68.580,00)	98,49		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.862.000,00	5.793.420,00	(68.580,00)	98,49		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.862.000,00	5.793.420,00	(68.580,00)	98,49		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.289.800,00	1.052.738,00	(237.062,00)	81,62		
02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.289.800,00	1.052.738,00	(237.062,00)	81,62		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.289.800,00	1.052.738,00	(237.062,00)	81,62		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.289.800,00	1.052.738,00	(237.062,00)	81,62		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.686.100,00	13.660.005,00	(26.095,00)	99,81		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.686.100,00	13.660.005,00	(26.095,00)	99,81		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.686.100,00	13.660.005,00	(26.095,00)	99,81		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.686.100,00	13.660.005,00	(26.095,00)	99,81		



KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.686.100,00	13.680.005,00	(26.095,00)	99,81		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.834.300,00	1.911.950,00	(1.922.350,00)	49,86		
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.834.300,00	1.911.950,00	(1.922.350,00)	49,86		
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kapolisian Negara Republik Indonesia	3.834.300,00	1.911.950,00	(1.922.350,00)	49,86		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.834.300,00	1.911.950,00	(1.922.350,00)	49,86		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.834.300,00	1.911.950,00	(1.922.350,00)	49,86		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.555.950,00	20.750.900,00	(805.050,00)	96,27		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.555.950,00	20.750.900,00	(805.050,00)	96,27		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.555.950,00	20.750.900,00	(805.050,00)	96,27		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	21.555.950,00	20.750.900,00	(805.050,00)	96,27		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.555.950,00	20.750.900,00	(805.050,00)	96,27		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.610.850,00	15.103.600,00	(507.250,00)	96,75		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.610.850,00	15.103.600,00	(507.250,00)	96,75		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.610.850,00	15.103.600,00	(507.250,00)	96,75		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	15.610.850,00	15.103.600,00	(507.250,00)	96,75		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.610.850,00	15.103.600,00	(507.250,00)	96,75		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.380.513.768,00)	(4.978.794.153,40)	401.719.614,60	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.380.513.768,00)	(4.978.794.153,40)	401.719.614,60	0		



PJ. BUPATI KLUNGKUNG

[Signature]
UNYOMAN JENDEKA



KECAMATAN DAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Dawan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.082.937.620,00	4.562.426.770,73	(520.508.848,27)	89,58		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.529.219.870,00	2.495.269.813,00	(33.930.057,00)	98,66		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.624.450,00	5.159.000,00	(465.450,00)	91,72		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.196.800,00	2.892.300,00	(304.500,00)	90,47		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.196.800,00	2.892.300,00	(304.500,00)	90,47		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.196.800,00	2.892.300,00	(304.500,00)	90,47		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.427.650,00	2.266.700,00	(160.950,00)	93,37		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.427.650,00	2.266.700,00	(160.950,00)	93,37		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.427.650,00	2.266.700,00	(160.950,00)	93,37		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.977.569.956,00	1.956.100.267,00	(22.469.689,00)	98,86		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.971.367.608,00	1.949.169.367,00	(22.198.241,00)	98,87		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.971.367.608,00	1.949.169.367,00	(22.198.241,00)	98,87		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.971.367.608,00	1.949.169.367,00	(22.198.241,00)	98,87		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.202.350,00	5.930.900,00	(271.450,00)	95,62		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.202.350,00	5.930.900,00	(271.450,00)	95,62		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.202.350,00	5.930.900,00	(271.450,00)	95,62		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	344.178.902,00	343.507.468,00	(671.434,00)	99,80		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	344.178.902,00	343.507.468,00	(671.434,00)	99,80		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	344.178.902,00	343.507.468,00	(671.434,00)	99,80		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.178.902,00	343.507.468,00	(671.434,00)	99,80		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.846.560,00	191.623.078,00	(10.223.482,00)	94,89		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.253.050,00	189.012.678,00	(10.240.382,00)	94,86		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	199.253.050,00	189.012.678,00	(10.240.382,00)	94,86		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.253.050,00	189.012.678,00	(10.240.382,00)	94,86		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	80.930.000,00	80.930.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.930.000,00	80.930.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	2.583.500,00	2.510.400,00	(83.100,00)	96,80		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.583.500,00	2.510.400,00	(83.100,00)	96,80		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.583.500,00	2.510.400,00	(83.100,00)	96,80		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.529.583.850,00	2.033.613.557,73	(495.970.292,27)	80,39		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.919.050,00	5.415.350,00	(3.503.700,00)	60,72		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.891.250,00	3.387.550,00	(3.503.700,00)	49,16		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.891.250,00	3.387.550,00	(3.503.700,00)	49,16		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.891.250,00	3.387.550,00	(3.503.700,00)	49,16		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.027.800,00	2.027.800,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.027.800,00	2.027.800,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.027.800,00	2.027.800,00	0,00	100,00		
02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.517.297.400,00	2.024.922.907,73	(492.374.492,27)	80,44		
02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.517.297.400,00	2.024.922.907,73	(492.374.492,27)	80,44		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.297.400,00	25.754.000,00	(543.400,00)	97,93		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.297.400,00	25.754.000,00	(543.400,00)	97,93		
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	2.491.000.000,00	1.999.168.907,73	(491.831.092,27)	80,26		
02.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.491.000.000,00	1.999.168.907,73	(491.831.092,27)	80,26		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.367.400,00	3.275.300,00	(92.100,00)	97,26		
02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.367.400,00	3.275.300,00	(92.100,00)	97,26		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.367.400,00	3.275.300,00	(92.100,00)	97,26		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.367.400,00	3.275.300,00	(92.100,00)	97,26		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.244.200,00	5.205.200,00	(39.000,00)	99,26		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.244.200,00	5.205.200,00	(39.000,00)	99,26		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.244.200,00	5.205.200,00	(39.000,00)	99,26		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.244.200,00	5.205.200,00	(39.000,00)	99,26		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.244.200,00	5.205.200,00	(39.000,00)	99,26		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.443.700,00	3.413.700,00	(30.000,00)	99,13		
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.443.700,00	3.413.700,00	(30.000,00)	99,13		
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.443.700,00	3.413.700,00	(30.000,00)	99,13		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.443.700,00	3.413.700,00	(30.000,00)	99,13		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.443.700,00	3.413.700,00	(30.000,00)	99,13		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.252.400,00	13.190.900,00	(61.500,00)	99,54		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	13.252.400,00	13.190.900,00	(61.500,00)	99,54		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.252.400,00	13.190.900,00	(61.500,00)	99,54		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	13.252.400,00	13.190.900,00	(61.500,00)	99,54		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.252.400,00	13.190.900,00	(61.500,00)	99,54		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.193.600,00	11.715.600,00	(478.000,00)	96,08		
06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.193.600,00	11.715.600,00	(478.000,00)	96,08		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.193.600,00	11.715.600,00	(478.000,00)	96,08		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	12.193.600,00	11.715.600,00	(478.000,00)	96,08		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.193.600,00	11.715.600,00	(478.000,00)	96,08		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.092.937.620,00)	(4.562.428.770,73)	530.508.849,27	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.092.937.620,00)	(4.562.428.770,73)	530.508.849,27	0		



P. BUPATI KLUNGKUNG



NYOMAN JENDRIKA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

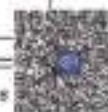


PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	19.369.897.758,00	19.120.023.245,00	(249.874.513,00)	98,71		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.687.494.228,00	3.600.893.229,00	(86.600.999,00)	97,65		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.376.900,00	17.380.640,00	(3.996.060,00)	81,31		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.677.500,00	1.498.500,00	(181.000,00)	89,21		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.677.500,00	1.498.500,00	(181.000,00)	89,21		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.500,00	1.498.500,00	(181.000,00)	89,21		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.699.400,00	15.884.340,00	(3.815.060,00)	80,63		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	19.699.400,00	15.884.340,00	(3.815.060,00)	80,63		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.699.400,00	15.884.340,00	(3.815.060,00)	80,63		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.286.727.646,00	3.242.989.891,00	(43.737.755,00)	98,61		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.282.769.346,00	3.237.781.491,00	(44.987.855,00)	98,63		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.282.769.346,00	3.237.781.491,00	(44.987.855,00)	98,63		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.282.769.346,00	3.237.781.491,00	(44.987.855,00)	98,63		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.958.300,00	5.208.400,00	(749.900,00)	87,41		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.958.300,00	5.208.400,00	(749.900,00)	87,41		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.958.300,00	5.208.400,00	(749.900,00)	87,41		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.841.562,00	166.221.767,00	(1.419.795,00)	99,15		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	167.841.562,00	166.221.767,00	(1.419.795,00)	99,15		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	167.841.562,00	166.221.767,00	(1.419.795,00)	99,15		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.841.562,00	166.221.767,00	(1.419.795,00)	99,15		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.748.120,00	173.300.731,00	(35.447.389,00)	83,10		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.819.120,00	173.217.731,00	(35.401.389,00)	83,03		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	164.043.120,00	129.387.801,00	(34.655.519,00)	78,87		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.043.120,00	129.387.801,00	(34.655.519,00)	78,87		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	44.576.000,00	43.830.130,00	(745.870,00)	98,33		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.576.000,00	43.830.130,00	(745.870,00)	98,33		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.129.000,00	1.083.000,00	(46.000,00)	95,93		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.129.000,00	1.083.000,00	(46.000,00)	95,93		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.129.000,00	1.083.000,00	(46.000,00)	95,93		
02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.155.941.850,00	1.106.165.075,00	(49.776.775,00)	95,87		
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.155.941.850,00	1.106.165.075,00	(49.776.775,00)	95,87		
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.094.902.800,00	1.051.043.235,00	(43.859.565,00)	95,99		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.094.902.800,00	1.051.043.235,00	(43.859.565,00)	95,99		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.902.800,00	1.051.043.235,00	(43.859.565,00)	95,99		
02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	61.039.050,00	57.121.840,00	(3.917.210,00)	93,58		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	61.039.050,00	57.121.840,00	(3.917.210,00)	93,58		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.039.050,00	57.121.840,00	(3.917.210,00)	93,58		
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	13.501.360.795,00	13.499.243.795,00	(2.117.000,00)	99,98		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	13.501.360.795,00	13.499.243.795,00	(2.117.000,00)	99,98		
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.482.317.345,00	13.481.219.345,00	(1.098.000,00)	99,99		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.482.317.345,00	13.481.219.345,00	(1.098.000,00)	99,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.937.900,00	47.839.900,00	(1.098.000,00)	97,76		
03.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	13.433.379.445,00	13.433.379.445,00	0,00	100,00		
03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.043.450,00	18.024.450,00	(1.019.000,00)	94,65		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.043.450,00	18.024.450,00	(1.019.000,00)	94,65		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.043.450,00	18.024.450,00	(1.019.000,00)	94,65		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	18.777.450,00	18.289.450,00	(488.000,00)	97,40		
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.777.450,00	18.289.450,00	(488.000,00)	97,40		
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18.777.450,00	18.289.450,00	(488.000,00)	97,40		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.777.450,00	18.289.450,00	(488.000,00)	97,40		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.777.450,00	18.289.450,00	(488.000,00)	97,40		
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	92.204.950,00	90.742.971,00	(1.461.979,00)	98,41		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	92.204.950,00	90.742.971,00	(1.461.979,00)	98,41		
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penegakan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	92.204.950,00	90.742.971,00	(1.461.979,00)	98,41		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	92.204.950,00	90.742.971,00	(1.461.979,00)	98,41		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.204.950,00	90.742.971,00	(1.461.979,00)	98,41		
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	914.118.485,00	802.686.725,00	(111.429.760,00)	87,81		
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	914.118.485,00	802.686.725,00	(111.429.760,00)	87,81		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.04	Peleaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	204.086.050,00	200.581.590,00	(3.504.460,00)	98,28		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	204.086.050,00	200.581.590,00	(3.504.460,00)	98,28		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.086.050,00	200.581.590,00	(3.504.460,00)	98,28		
06.2.01.05	Peleaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	710.032.435,00	602.107.135,00	(107.925.300,00)	84,80		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	710.032.435,00	602.107.135,00	(107.925.300,00)	84,80		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.801.700,00	180.878.400,00	(107.925.300,00)	62,83		
06.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	421.230.735,00	421.230.735,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(19.359.897.758,00)	(19.120.023.245,00)	249.874.513,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(19.359.897.758,00)	(19.120.023.245,00)	249.874.513,00	0		



 BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN HENDRIKS



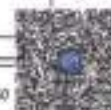
LAMPIRAN I.4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

**Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan dan sub
kegiatan**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
 Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	658.907.121.199,00	115.808.790.934,00	0,00	0,00
		630.690.109.383,50	82.482.227.735,04	0,00	0,00
1.01	PENDIDIKAN	253.234.430.321,00	17.869.555.250,00	0,00	0,00
		245.421.745.676,00	16.766.057.345,13	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	208.651.941.897,00	375.290.000,00	0,00	0,00
		202.450.152.782,00	334.430.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.984.800,00	0,00	0,00	0,00
		34.770.023,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.449.800,00	0,00	0,00	0,00
		19.307.617,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.535.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.462.408,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	206.377.772.277,00	0,00	0,00	0,00
		200.069.462.649,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	206.312.928.927,00	0,00	0,00	0,00
		200.004.836.999,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ SKPD	64.543.350,00	0,00	0,00	0,00
		64.622.650,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.760.845.532,00	0,00	0,00	0,00
		1.748.972.654,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.760.845.532,00	0,00	0,00	0,00
		1.748.972.654,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	578.339.488,00	375.290.000,00	0,00	0,00
		596.947.426,00	334.430.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	689.795.288,00	375.290.000,00	0,00	0,00
		588.403.228,00	334.430.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	8.544.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.544.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	44.301.110.524,00	17.494.265.250,00	0,00	0,00
		42.891.844.714,00	16.431.627.345,13	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	19.718.879.112,00	8.442.786.316,00	0,00	0,00
		19.119.705.472,00	7.713.465.745,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0,00	1.879.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.037.580.859,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90.442.800,00	609.091.000,00	0,00	0,00
		82.365.363,00	608.118.114,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0,00	579.800.000,00	0,00	0,00
		0,00	565.540.168,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	403.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		376.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	675.205.050,00	0,00	0,00	0,00
		665.385.050,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	400.000,00	249.600.000,00	0,00	0,00
		400.000,00	165.100.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.252.400,00	0,00	0,00	0,00
		9.196.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	286.642.600,00	0,00	0,00	0,00
		214.507.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.511.119.778,00	34.242.000,00	0,00	0,00
		5.382.530.832,00	33.744.888,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	39.753.800,00	0,00	0,00	0,00
		8.181.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12.690.246.654,00	4.893.853.316,00	0,00	0,00
		12.368.748.927,00	5.103.381.918,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.591.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.591.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.591.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.591.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.211.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.190.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.804.567.598,00	7.576.777.844,00	0,00	0,00
		13.267.367.542,00	7.249.908.629,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0,00	1.529.488.200,00	0,00	0,00
		0,00	1.182.024.750,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	0,00	2.732.888.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.732.874.850,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	206.000.000,00	1.097.000.000,00	0,00	0,00
		206.006.000,00	1.096.985.196,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	333.832.800,00	0,00	0,00	0,00
		322.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	142.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peralatan Siswa	200.000,00	124.800.000,00	0,00	0,00
		200.000,00	82.550.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.993.345.740,00	0,00	0,00	0,00
		3.673.722.172,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.116.168.556,00	2.092.601.444,00	0,00	0,00
		8.721.357.870,00	2.155.474.257,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.46	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.591.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.551.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.551.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.551.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.106.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.221.794.316,00	1.474.701.290,00	0,00	0,00
		10.325.931.136,00	1.468.252.777,13	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	113.720.700,00	815.435.640,00	0,00	0,00
		104.410.700,00	605.737.491,13	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	158.800.000,00	0,00	0,00
		0,00	158.227.935,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.942.784.064,00	0,00	0,00	0,00
		3.877.974.907,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.458.011.802,00	0,00	0,00	0,00
		1.451.530.802,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.928.639.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.774.249.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.782.734.350,00	400.465.850,00	0,00	0,00
		2.739.833.064,00	404.287.351,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	734.500,00	0,00	0,00	0,00
		484.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.826.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.826.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	13.542.800,00	0,00	0,00	0,00
		13.326.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	555.869.500,00	0,00	0,00	0,00
		178.820.564,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	149.980.500,00	0,00	0,00	0,00
		145.841.564,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	362.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.687.763,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	43.199.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.779.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	74.905.900,00	0,00	0,00	0,00
		73.246.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.815.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.790.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.815.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.790.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	66.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.488.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	66.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.488.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	6.772.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.700.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.772.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.106.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.566.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02	KESEHATAN	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	348.066.374.216,00	13.562.793.953,00	0,00	0,00
		330.122.401.752,50	12.356.130.407,91	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	268.034.503.699,00	8.688.057.821,00	0,00	0,00
		257.069.120.910,50	7.656.874.289,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.992.600,00	0,00	0,00	0,00
		30.320.065,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.432.600,00	0,00	0,00	0,00
		24.381.053,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.936.012,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.973.584.385,00	0,00	0,00	0,00
		74.655.706.616,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.967.401.535,00	0,00	0,00	0,00
		74.639.582.516,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.182.650,00	0,00	0,00	0,00
		16.124.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.664.390,00	0,00	0,00	0,00
		52.501.512,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52.664.390,00	0,00	0,00	0,00
		52.501.512,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.334.810,00	52.798.700,00	0,00	0,00
		318.892.508,00	50.100.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	405.320.360,00	52.798.700,00	0,00	0,00
		314.006.158,00	50.100.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.014.450,00	0,00	0,00	0,00
		4.886.350,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	188.558.927.414,00	8.635.258.921,00	0,00	0,00
		182.001.700.209,50	7.805.774.286,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	188.558.927.414,00	8.635.258.921,00	0,00	0,00
		182.001.700.209,50	7.805.774.286,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	70.886.220.371,00	4.874.736.042,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	64.324.354.371,00	4.499.256.121,91	0,00	0,00
		5.814.123.009,00	4.342.387.214,00	0,00	0,00
		4.833.767.429,00	4.028.821.121,91	0,00	0,00
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	2.260.561.064,00	0,00	0,00
		0,00	2.260.561.064,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.753.200,00	1.631.600.000,00	0,00	0,00
		1.474.500,00	1.389.054.617,91	0,00	0,00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.063.100,00	394.160.000,00	0,00	0,00
		919.100,00	330.180.440,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.292.000,00	17.439.950,00	0,00	0,00
		3.511.500,00	10.570.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.888.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.192.261.262,00	38.626.200,00	0,00	0,00
		1.851.904.766,00	38.256.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.079.367.727,00	0,00	0,00	0,00
		2.529.262.175,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	262.660.700,00	0,00	0,00	0,00
		212.851.736,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	212.695.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.965.050,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.533.347.812,00	434.159.000,00	0,00	0,00
		58.161.010.736,00	430.660.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	539.041.000,00	0,00	0,00	0,00
		487.538.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.527.150,00	0,00	0,00	0,00
		3.767.550,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.732.050,00	0,00	0,00	0,00
		6.605.550,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	266.524.750,00	0,00	0,00	0,00
		247.458.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	274.394.800,00	0,00	0,00	0,00
		268.399.600,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	470.148.100,00	36.360.000,00	0,00	0,00
		421.580.800,00	36.360.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	188.197.600,00	0,00	0,00	0,00
		188.321.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.531.250,00	0,00	0,00	0,00
		531.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	177.238.000,00	0,00	0,00	0,00
		154.170.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	81.035.400,00	0,00	0,00	0,00
		81.805.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	793.826.050,00	0,00	0,00	0,00
		205.370.950,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	423.592.850,00	0,00	0,00	0,00
		381.116.462,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	102.848.700,00	0,00	0,00	0,00
		44.427.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.024.928.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.077.203.450,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	201.747.000,00	0,00	0,00	0,00
		182.821.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	335.474.900,00	301.799.000,00	0,00	0,00
		293.732.150,00	298.850.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	710.685.000,00	0,00	0,00	0,00
		663.816.035,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.099.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.099.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	179.106.200,00	0,00	0,00	0,00
		151.079.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	81.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		254.850.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.324.563.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.873.437.120,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	46.285.967.462,00	0,00	0,00	0,00
		44.133.114.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	119.505.150,00	0,00	0,00	0,00
		111.215.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.599.823.400,00	96.000.000,00	0,00	0,00
		5.411.783.962,00	94.450.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.869.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.148.964.057,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.942.850,00	0,00	0,00	0,00
		1.267.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	244.290.050,00	0,00	0,00	0,00
		193.599.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	49.443.900,00	0,00	0,00	0,00
		48.430.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	55.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.550.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	8.861.750,00	0,00	0,00	0,00
		8.796.850,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8.861.750,00	0,00	0,00	0,00
		8.796.850,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.529.887.800,00	98.189.825,00	0,00	0,00
		1.320.779.355,00	39.975.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.529.887.800,00	98.189.825,00	0,00	0,00
		1.320.779.355,00	39.975.000,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.175.406.295,00	0,00	0,00	0,00
		7.825.362.521,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.391.349.795,00	0,00	0,00	0,00
		7.047.802.409,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.329.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.261.450,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7.270.617.895,00	0,00	0,00	0,00
		6.945.212.209,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119.402.400,00	0,00	0,00	0,00
		101.328.750,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	784.098.500,00	0,00	0,00	0,00
		777.580.112,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	784.098.500,00	0,00	0,00	0,00
		777.580.112,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	426.003.750,00	0,00	0,00	0,00
		372.816.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.717.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.357.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7.088.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.946.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	73.631.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.411.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.939.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.942.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.939.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.942.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27.493.750,00	0,00	0,00	0,00
		27.455.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27.493.750,00	0,00	0,00	0,00
		27.455.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	181.854.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.062.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	181.854.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.062.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	554.240.200,00	0,00	0,00	0,00
		540.747.450,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.872.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	59.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.872.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.124.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.066.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6.124.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.066.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	488.486.200,00	0,00	0,00	0,00
		488.808.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	488.486.200,00	0,00	0,00	0,00
		488.808.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.118.186.690,00	82.618.959.221,00	0,00	0,00
		24.032.064.544,00	51.818.388.982,00	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.947.955.653,00	32.920.000,00	0,00	0,00
		10.605.007.181,00	32.544.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.710.099,00	0,00	0,00	0,00
		12.076.010,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.470.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.113.060,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.239.299,00	0,00	0,00	0,00
		6.962.950,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.266.247.424,00	0,00	0,00	0,00
		10.082.205.387,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.263.867.424,00	0,00	0,00	0,00
		10.077.950.387,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.255.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.734.653,00	0,00	0,00	0,00
		22.005.614,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.734.653,00	0,00	0,00	0,00
		22.005.614,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.922.638,00	32.920.000,00	0,00	0,00
		212.587.089,00	32.944.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.438.288,00	32.920.000,00	0,00	0,00
		208.512.839,00	32.544.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.084.250,00	0,00	0,00	0,00
		3.054.250,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Bersang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.740.939,00	0,00	0,00	0,00
		277.153.081,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	388.740.939,00	0,00	0,00	0,00
		277.153.081,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.122.202.678,00	540.000.000,00	0,00	0,00
		1.016.021.915,00	333.695.400,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.074.500,00	424.000.000,00	0,00	0,00
		67.420.541,00	217.987.500,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	55.213.500,00	24.000.000,00	0,00	0,00
		54.769.144,00	18.787.500,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	8.042.500,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		7.954.869,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	4.818.500,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		4.696.528,00	199.200.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.054.128.178,00	116.000.000,00	0,00	0,00
		948.601.374,00	115.707.900,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	67.678.750,00	6.585.000,00	0,00	0,00
		67.010.832,00	6.515.100,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	436.216.328,00	109.435.000,00	0,00	0,00
		428.335.702,00	109.182.800,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	560.233.100,00	0,00	0,00	0,00
		453.254.840,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	75.597.018,00	157.440.000,00	0,00	0,00
		75.541.818,00	156.395.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	75.597.018,00	157.440.000,00	0,00	0,00
		75.541.818,00	156.395.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.401.800,00	57.440.000,00	0,00	0,00
		2.379.500,00	56.945.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	71.884.118,00	0,00	0,00	0,00
		71.884.118,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.311.400,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		1.293.400,00	99.750.000,00	0,00	0,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	9.746.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.126.722,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	9.746.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.126.722,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	9.746.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.126.722,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.701.919.906,00	0,00	0,00	0,00
		2.701.445.406,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.701.919.906,00	0,00	0,00	0,00
		2.701.445.406,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.627.650,00	0,00	0,00	0,00
		5.592.650,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.695.892.058,00	0,00	0,00	0,00
		2.695.852.758,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	430.261.250,00	0,00	0,00	0,00
		427.447.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	430.261.250,00	0,00	0,00	0,00
		427.447.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	26.248.750,00	0,00	0,00	0,00
		25.964.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	404.012.500,00	0,00	0,00	0,00
		401.483.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	659.131.812,00	12.085.219.221,00	0,00	0,00
		371.358.168,00	9.689.217.999,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	659.131.812,00	12.085.219.221,00	0,00	0,00
		371.358.168,00	9.689.217.999,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	21.143.400,00	349.071.677,00	0,00	0,00
		21.116.500,00	349.071.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	637.988.412,00	11.716.147.544,00	0,00	0,00
		350.241.668,00	9.340.146.999,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	8.409.596.527,00	89.823.380.000,00	0,00	0,00
		8.131.083.381,00	41.806.436.583,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.408.598.527,00	69.823.380.000,00	0,00	0,00
		8.131.063.381,00	41.606.438.583,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	783.025.457,00	3.154.535.000,00	0,00	0,00
		777.774.095,00	2.095.532.129,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	382.279.780,00	37.438.345.000,00	0,00	0,00
		223.827.248,00	13.978.132.386,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	0,00	15.210.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	12.897.381.479,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	6.875.291.310,00	12.507.500.000,00	0,00	0,00
		6.743.168.880,00	11.135.884.894,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	0,00	1.515.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.499.705.709,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	388.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		386.313.158,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	53.282.350,00	0,00	0,00	0,00
		30.316.195,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	42.548.400,00	0,00	0,00	0,00
		19.910.345,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	42.548.400,00	0,00	0,00	0,00
		19.910.345,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.422.550,00	0,00	0,00	0,00
		2.387.850,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	2.422.550,00	0,00	0,00	0,00
		2.387.850,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	8.211.400,00	0,00	0,00	0,00
		8.018.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	8.211.400,00	0,00	0,00	0,00
		8.018.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	708.892.896,00	0,00	0,00	0,00
		683.714.008,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	186.281.620,00	0,00	0,00	0,00
		157.141.450,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	186.281.620,00	0,00	0,00	0,00
		157.141.450,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	530.498.886,00	0,00	0,00	0,00
		496.515.368,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	530.498.886,00	0,00	0,00	0,00
		496.515.368,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	10.132.190,00	0,00	0,00	0,00
		10.067.190,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10.132.190,00	0,00	0,00	0,00
		10.067.190,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	158.784.800,00	0,00	0,00	0,00
		58.013.700,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	101.488.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.475.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	101.488.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.475.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	101.488.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.475.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	50.659.400,00	0,00	0,00	0,00
		49.982.900,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.659.400,00	0,00	0,00	0,00
		49.982.900,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	50.659.400,00	0,00	0,00	0,00
		49.982.900,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.827.300,00	0,00	0,00	0,00
		6.545.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Usaha Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.827.300,00	0,00	0,00	0,00
		6.545.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.827.300,00	0,00	0,00	0,00
		6.545.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.033.220.472,00	1.742.482.600,00	0,00	0,00
		20.389.602.018,00	1.527.849.000,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.082.727.834,00	234.982.600,00	0,00	0,00
		15.807.745.947,00	25.641.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.429.348,00	0,00	0,00	0,00
		122.966.008,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.317.548,00	0,00	0,00	0,00
		116.161.008,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.111.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.805.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.975.316.756,00	0,00	0,00	0,00
		14.810.392.110,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.932.626.936,00	0,00	0,00	0,00
		14.767.981.991,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42.689.819,00	0,00	0,00	0,00
		42.410.119,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.170.422,00	0,00	0,00	0,00
		170.656.129,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	171.170.422,00	0,00	0,00	0,00
		170.656.129,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.811.308,00	234.982.800,00	0,00	0,00
		703.729.700,00	25.641.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	805.975.109,00	234.982.800,00	0,00	0,00
		699.180.800,00	25.641.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.836.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.546.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.661.651.241,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		2.595.800.532,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.339.529.755,00	0,00	0,00	0,00
		2.299.682.646,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	146.093.052,00	0,00	0,00	0,00
		144.851.128,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Peta dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.109.879.679,00	0,00	0,00	0,00
		2.078.703.156,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.853.250,00	0,00	0,00	0,00
		9.797.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	69.703.774,00	0,00	0,00	0,00
		68.331.162,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	322.121.486,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		295.917.886,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	69.662.762,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		57.760.762,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	252.458.724,00	0,00	0,00	0,00
		238.157.124,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	870.339.657,00	0,00	0,00	0,00
		749.748.062,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	15.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.334.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	15.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.334.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	64.909.850,00	0,00	0,00	0,00
		20.508.580,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	38.480.750,00	0,00	0,00	0,00
		14.150.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	26.428.900,00	0,00	0,00	0,00
		6.788.080,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	777.730.207,00	0,00	0,00	0,00
		713.292.077,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	11.827.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.383.185,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	751.099.207,00	0,00	0,00	0,00
		702.862.040,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.804.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.036.862,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11.893.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.183.005,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	11.893.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.183.005,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.418.501.740,00	1.504.000.000,00	0,00	0,00
		1.238.507.477,00	1.502.208.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.055.348.040,00	0,00	0,00	0,00
		1.024.166.277,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.055.348.040,00	0,00	0,00	0,00
		1.024.166.277,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	363.153.700,00	1.504.000.000,00	0,00	0,00
		212.342.200,00	1.502.208.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	363.153.700,00	1.504.000.000,00	0,00	0,00
		212.342.200,00	1.502.208.000,00	0,00	0,00
1.05	SOSIAL	11.278.124.700,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		10.566.281.393,00	14.802.000,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.782.797.780,00	0,00	0,00	0,00
		4.838.828.475,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.620.112,00	0,00	0,00	0,00
		34.023.312,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.695.162,00	0,00	0,00	0,00
		27.401.962,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.924.950,00	0,00	0,00	0,00
		6.621.350,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.362.159.139,00	0,00	0,00	0,00
		4.249.818.064,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.350.181.339,00	0,00	0,00	0,00
		4.238.916.684,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.977.800,00	0,00	0,00	0,00
		10.901.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.930.750,00	0,00	0,00	0,00
		3.890.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.930.750,00	0,00	0,00	0,00
		3.890.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.087.759,00	0,00	0,00	0,00
		351.096.329,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.518.895,00	0,00	0,00	0,00
		306.255.505,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	46.568.864,00	0,00	0,00	0,00
		45.830.824,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.170.878.320,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		4.929.233.358,00	14.802.000,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	734.130.234,00	0,00	0,00	0,00
		581.442.123,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	734.130.234,00	0,00	0,00	0,00
		581.442.123,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4.436.748.086,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		4.347.791.235,00	14.802.000,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.138.948.500,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		4.058.092.751,00	14.802.000,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelompok Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	297.799.586,00	0,00	0,00	0,00
		288.698.484,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	635.271.896,00	0,00	0,00	0,00
		523.144.186,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	387.094.500,00	0,00	0,00	0,00
		358.200.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	333.475.800,00	0,00	0,00	0,00
		310.974.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	53.618.700,00	0,00	0,00	0,00
		48.225.950,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	248.177.195,00	0,00	0,00	0,00
		183.943.935,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	106.929.774,00	0,00	0,00	0,00
		93.260.774,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.247.422,00	0,00	0,00	0,00
		70.583.162,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	267.027.224,00	0,00	0,00	0,00
		266.328.574,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	267.027.224,00	0,00	0,00	0,00
		266.328.574,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	109.528.100,00	0,00	0,00	0,00
		109.431.050,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	157.399.124,00	0,00	0,00	0,00
		156.897.524,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	442.149.700,00	0,00	0,00	0,00
		208.746.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	442.149.700,00	0,00	0,00	0,00
		208.746.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	442.149.700,00	0,00	0,00	0,00
		208.746.800,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	221.617.575.834,00	8.450.410.219,00	0,00	0,00
		213.291.790.640,94	6.973.488.418,00	0,00	0,00
2.07	TENAGA KERJA	5.248.017.544,00	19.721.900,00	0,00	0,00
		4.653.824.597,00	19.073.500,00	0,00	0,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.854.532.035,00	19.721.900,00	0,00	0,00
		3.595.572.447,00	19.073.500,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.361.200,00	0,00	0,00	0,00
		6.211.700,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.718.400,00	0,00	0,00	0,00
		4.626.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.542.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.584.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.345.281.129,00	0,00	0,00	0,00
		3.298.326.272,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.299.800.039,00	0,00	0,00	0,00
		3.253.142.280,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.481.090,00	0,00	0,00	0,00
		45.186.012,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.861.198,00	0,00	0,00	0,00
		86.627.948,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	86.861.198,00	0,00	0,00	0,00
		86.627.948,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.028.508,00	19.721.900,00	0,00	0,00
		202.404.527,00	19.073.500,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.406.708,00	19.721.900,00	0,00	0,00
		200.079.727,00	19.073.500,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.10	Penstausahan Arsp Dinamis pada SKPD	2.621.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.324.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	618.030.600,00	0,00	0,00	0,00
		595.832.600,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	92.890.850,00	0,00	0,00	0,00
		86.862.600,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	92.890.850,00	0,00	0,00	0,00
		86.862.600,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.138.750,00	0,00	0,00	0,00
		508.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	525.138.750,00	0,00	0,00	0,00
		508.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	909.812.159,00	0,00	0,00	0,00
		416.586.900,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	880.187.059,00	0,00	0,00	0,00
		388.627.100,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	880.187.059,00	0,00	0,00	0,00
		388.627.100,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	17.919.250,00	0,00	0,00	0,00
		16.530.750,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	17.919.250,00	0,00	0,00	0,00
		16.530.750,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.695.850,00	0,00	0,00	0,00
		11.429.050,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.695.850,00	0,00	0,00	0,00
		11.429.050,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	63.842.850,00	0,00	0,00	0,00
		46.632.650,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.106.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.326.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	35.196.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.326.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	28.446.850,00	0,00	0,00	0,00
		23.306.450,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.269.150,00	0,00	0,00	0,00
		11.958.450,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	16.177.700,00	0,00	0,00	0,00
		11.346.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	258.655.810,00	6.060.000,00	0,00	0,00
		213.809.605,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	91.688.180,00	0,00	0,00	0,00
		71.610.625,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	16.638.700,00	0,00	0,00	0,00
		12.532.575,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	16.638.700,00	0,00	0,00	0,00
		12.532.575,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	74.749.450,00	0,00	0,00	0,00
		59.076.050,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	74.749.450,00	0,00	0,00	0,00
		59.076.050,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	63.444.600,00	6.060.000,00	0,00	0,00
		63.539.600,00	0,00	0,00	0,00



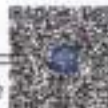
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	23.000.100,00	0,00	0,00	0,00
		13.242.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	23.000.100,00	0,00	0,00	0,00
		13.242.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60.444.500,00	6.060.000,00	0,00	0,00
		50.297.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.444.500,00	6.060.000,00	0,00	0,00
		50.297.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	12.746.750,00	0,00	0,00	0,00
		12.416.370,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.746.750,00	0,00	0,00	0,00
		12.416.370,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	12.746.750,00	0,00	0,00	0,00
		12.416.370,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	57.487.960,00	0,00	0,00	0,00
		52.994.260,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	37.958.180,00	0,00	0,00	0,00
		34.520.380,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	37.958.180,00	0,00	0,00	0,00
		34.520.380,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.529.800,00	0,00	0,00	0,00
		18.473.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.529.800,00	0,00	0,00	0,00
		18.473.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	13.388.350,00	0,00	0,00	0,00
		13.248.650,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	13.388.350,00	0,00	0,00	0,00
		13.248.650,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.05.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	13.388.350,00	0,00	0,00	0,00
		13.248.650,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PANGAN	5.445.189.421,00	11.978.000,00	0,00	0,00
		5.066.102.132,00	11.978.000,00	0,00	0,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.219.214.371,00	11.978.000,00	0,00	0,00
		4.966.745.682,00	11.978.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.708.300,00	0,00	0,00	0,00
		4.606.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.251.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.458.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.886.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.464.895.287,00	0,00	0,00	0,00
		4.318.744.971,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.462.366.487,00	0,00	0,00	0,00
		4.316.459.171,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.496.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.285.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	288.448.768,00	0,00	0,00	0,00
		247.211.144,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	288.448.768,00	0,00	0,00	0,00
		247.211.144,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.191.016,00	11.978.000,00	0,00	0,00
		398.182.867,00	11.978.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	459.029.016,00	11.978.000,00	0,00	0,00
		397.020.867,00	11.978.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.10	Penastusahaan Aspek Dinamis pada SKPD	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.162.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	86.623.250,00	0,00	0,00	0,00
		81.714.750,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyekuran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	64.274.550,00	0,00	0,00	0,00
		57.799.450,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	60.544.300,00	0,00	0,00	0,00
		54.482.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3.730.350,00	0,00	0,00	0,00
		3.316.750,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	24.348.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	23.915.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5.155.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02		5.005.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02		19.193.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	18.910.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	124.241.450,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.694.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.01		124.241.450,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.01		2.694.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	13.090.350,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12.948.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	13.090.350,00	0,00	0,00	0,00
2.10	PERTANAHAN	12.948.800,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.793.009.517,00	221.153.810,00	0,00	0,00
2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.440.907.765,00	11.458.000,00	0,00	0,00
2.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.670.719.893,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.10.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.329.478.341,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.042.324,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.953.974,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47.830.224,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.769.474,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05		1.212.100,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05		1.184.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05		10.830.938.309,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05		10.665.517.054,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05		10.825.329.259,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05		10.659.908.004,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05		5.609.050,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05		5.609.050,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05		1.331.475.400,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05		1.324.448.536,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.10.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.331.475.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.324.446.536,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.263.860,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		290.580.777,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	459.263.860,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		290.580.777,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	122.289.624,00	211.153.810,00	0,00	0,00
		111.429.424,00	1.458.000,00	0,00	0,00
2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.289.624,00	211.153.810,00	0,00	0,00
		111.429.424,00	1.458.000,00	0,00	0,00
2.10.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.603.212,00	211.153.810,00	0,00	0,00
		80.342.512,00	1.458.000,00	0,00	0,00
2.10.07.2.01.03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	32.686.412,00	0,00	0,00	0,00
		31.086.912,00	0,00	0,00	0,00
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	11.906.642.288,00	6.555.294.000,00	0,00	0,00
		11.483.440.684,00	5.382.607.310,00	0,00	0,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	106.111.950,00	0,00	0,00	0,00
		100.536.200,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	106.111.950,00	0,00	0,00	0,00
		100.536.200,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	106.111.950,00	0,00	0,00	0,00
		100.536.200,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	247.521.848,00	1.468.294.000,00	0,00	0,00
		224.766.048,00	1.378.000.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	66.934.624,00	1.468.294.000,00	0,00	0,00
		45.214.624,00	1.378.000.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	66.934.624,00	1.468.294.000,00	0,00	0,00
		45.214.624,00	1.378.000.000,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	180.587.024,00	0,00	0,00	0,00
		179.540.224,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi/Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	146.043.312,00	0,00	0,00	0,00
		145.511.512,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	34.543.712,00	0,00	0,00	0,00
		34.028.712,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.579.898.714,00	0,00	0,00	0,00
		1.577.894.394,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.579.898.714,00	0,00	0,00	0,00
		1.577.894.394,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.579.898.714,00	0,00	0,00	0,00
		1.577.894.394,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	224.890.020,00	0,00	0,00	0,00
		220.999.020,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	224.890.020,00	0,00	0,00	0,00
		220.999.020,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	224.890.020,00	0,00	0,00	0,00
		220.999.020,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.844.219.756,00	5.087.000.000,00	0,00	0,00
		9.359.456.222,00	4.004.607.310,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	9.844.219.756,00	5.087.000.000,00	0,00	0,00
		9.359.456.222,00	4.004.607.310,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1.498.855.352,00	0,00	0,00	0,00
		1.412.031.111,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.903.539.128,00	24.000.000,00	0,00	0,00
		3.871.826.191,00	23.840.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.812.198.872,00	0,00	0,00	0,00
		1.800.871.752,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.586.216.630,00	5.053.000.000,00	0,00	0,00
		2.431.111.394,00	3.980.767.310,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	45.609.774,00	0,00	0,00	0,00
		43.615.774,00	0,00	0,00	0,00
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.700.040.934,00	20.720.000,00	0,00	0,00
		6.381.285.100,00	19.980.000,00	0,00	0,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.447.896.934,00	20.720.000,00	0,00	0,00
		5.182.420.700,00	19.980.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.712.250,00	0,00	0,00	0,00
		4.952.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.628.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.356.400,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.084.250,00	0,00	0,00	0,00
		2.806.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.598.203.156,00	0,00	0,00	0,00
		4.470.897.707,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.592.285.806,00	0,00	0,00	0,00
		4.485.186.357,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.917.350,00	0,00	0,00	0,00
		5.509.350,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227.411.718,00	0,00	0,00	0,00
		203.238.378,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	227.411.718,00	0,00	0,00	0,00
		203.238.378,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.389.810,00	20.720.000,00	0,00	0,00
		503.522.015,00	19.980.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	613.743.810,00	20.720.000,00	0,00	0,00
		501.311.115,00	19.980.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.825.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.210.900,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	6.797.550,00	0,00	0,00	0,00
		6.304.850,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6.797.550,00	0,00	0,00	0,00
		6.304.850,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2.554.150,00	0,00	0,00	0,00
		2.388.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.084.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.841.900,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.159.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.074.450,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.176.695.450,00	0,00	0,00	0,00
		1.126.424.350,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	4.507.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.335.850,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.037.850,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2.409.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.297.900,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.172.187.550,00	0,00	0,00	0,00
		1.122.088.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1.172.187.550,00	0,00	0,00	0,00
		1.122.088.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	68.851.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.136.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	65.090.200,00	0,00	0,00	0,00
		62.564.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	63.140.600,00	0,00	0,00	0,00
		60.621.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1.949.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.943.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.760.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.570.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.03	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.760.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.570.800,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.821.245.427,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		9.861.990.118,00	8.935.000,00	0,00	0,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.716.888.123,00	0,00	0,00	0,00
		4.548.578.187,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.219.600,00	0,00	0,00	0,00
		7.343.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.604.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.603.400,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.615.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.740.100,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.200.789.701,00	0,00	0,00	0,00
		4.073.472.588,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.191.954.101,00	0,00	0,00	0,00
		4.064.656.988,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.815.600,00	0,00	0,00	0,00
		8.815.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.065.415,00	0,00	0,00	0,00
		50.470.415,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	51.065.415,00	0,00	0,00	0,00
		50.470.415,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.833.407,00	0,00	0,00	0,00
		417.291.684,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	454.833.407,00	0,00	0,00	0,00
		417.291.684,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	9.706.802,00	0,00	0,00	0,00
		9.671.950,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01	Facilitasi Kerja Sama antar Desa	9.706.802,00	0,00	0,00	0,00
		9.671.950,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01.02	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	9.706.802,00	0,00	0,00	0,00
		9.671.950,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.129.737.818,00	0,00	0,00	0,00
		1.082.609.930,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.129.737.818,00	0,00	0,00	0,00
		1.082.609.930,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.01	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.657.550,00	0,00	0,00	0,00
		6.373.450,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	651.627.432,00	0,00	0,00	0,00
		648.496.794,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	241.422.636,00	0,00	0,00	0,00
		227.739.686,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.964.912.684,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		3.921.130.051,00	8.935.000,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelekatnya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.964.912.684,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		3.921.130.051,00	8.935.000,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.860.766.074,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		2.832.307.910,00	8.935.000,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.06	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	41.394.950,00	0,00	0,00	0,00
		37.220.700,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.062.751.660,00	0,00	0,00	0,00
		1.051.601.441,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.832.546.416,00	188.580.000,00	0,00	0,00
		2.744.172.972,00	184.860.000,00	0,00	0,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	164.696.600,00	0,00	0,00	0,00
		162.941.360,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	164.895.800,00	0,00	0,00	0,00
		162.941.380,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	9.895.800,00	0,00	0,00	0,00
		8.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.939.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	72.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.012.380,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.853.470.774,00	188.580.000,00	0,00	0,00
		959.449.094,00	184.890.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	607.659.774,00	0,00	0,00	0,00
		518.556.894,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	101.209.774,00	0,00	0,00	0,00
		97.743.974,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.182.600,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	144.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.696.420,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.684.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	997.311.000,00	188.580.000,00	0,00	0,00
		200.709.100,00	184.860.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.949.900,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	932.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		141.583.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	18.021.000,00	188.580.000,00	0,00	0,00
		18.765.000,00	164.860.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.411.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pembertdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	86.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.183.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.433.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP/K di Kampung KB	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.790.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.814.882.042,00	0,00	0,00	0,00
		1.531.782.518,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.814.882.042,00	0,00	0,00	0,00
		1.531.782.518,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	98.384.574,00	0,00	0,00	0,00
		97.174.574,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		235.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.001.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.001.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	30.710.400,00	0,00	0,00	0,00
		27.420.400,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	323.907.068,00	0,00	0,00	0,00
		270.207.944,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PERHUBUNGAN	28.584.191.846,00	237.500.000,00	0,00	0,00
		27.208.844.434,00	229.702.000,00	0,00	0,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.712.265.006,00	10.360.000,00	0,00	0,00
		10.509.861.943,00	10.200.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.551.840,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.842.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.602.140,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.024.500,00	0,00	0,00	0,00
		949.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.650.459.501,00	0,00	0,00	0,00
		8.507.187.285,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.650.640.301,00	0,00	0,00	0,00
		8.502.386.215,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.819.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.601.050,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.630.400,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.630.400,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.050.238.505,00	10.360.000,00	0,00	0,00
		1.998.492.638,00	10.200.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.048.298.505,00	10.360.000,00	0,00	0,00
		1.995.580.638,00	10.200.000,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	942.000,00	0,00	0,00	0,00
		932.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.255.665.431,00	202.920.000,00	0,00	0,00
		8.323.287.125,00	195.661.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	55.191.980,00	0,00	0,00	0,00
		53.853.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	55.191.980,00	0,00	0,00	0,00
		53.853.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.390.754.560,00	202.920.000,00	0,00	0,00
		4.078.205.659,00	195.661.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.920.946.300,00	202.920.000,00	0,00	0,00
		3.614.699.808,00	195.661.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	469.808.260,00	0,00	0,00	0,00
		463.506.151,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	123.503.950,00	0,00	0,00	0,00
		91.357.150,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	122.811.250,00	0,00	0,00	0,00
		91.189.450,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	692.700,00	0,00	0,00	0,00
		197.700,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	590.149.900,00	0,00	0,00	0,00
		400.093.966,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	539.638.100,00	0,00	0,00	0,00
		350.486.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	50.511.800,00	0,00	0,00	0,00
		49.607.366,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.324.860,00	0,00	0,00	0,00
		11.923.409,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.324.860,00	0,00	0,00	0,00
		11.923.409,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.776.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.776.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	3.217.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.947.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1.049.500,00	0,00	0,00	0,00
		279.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.167.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.867.700,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.075.644.001,00	0,00	0,00	0,00
		3.684.127.341,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.075.532.201,00	0,00	0,00	0,00
		3.684.015.541,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	111.800,00	0,00	0,00	0,00
		111.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8.616.260.209,00	24.220.000,00	0,00	0,00
		8.375.695.365,00	23.841.000,00	0,00	0,00
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	8.021.424.759,00	0,00	0,00	0,00
		7.951.656.258,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	8.021.424.759,00	0,00	0,00	0,00
		7.951.656.258,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	31.459.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.013.250,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.459.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.013.250,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	563.375.950,00	24.220.000,00	0,00	0,00
		393.025.858,00	23.841.000,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	279.500,00	0,00	0,00	0,00
		279.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	167.700,00	0,00	0,00	0,00
		167.700,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	306.399.250,00	24.220.000,00	0,00	0,00
		147.662.058,00	23.841.000,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	256.529.500,00	0,00	0,00	0,00
		244.896.600,00	0,00	0,00	0,00
2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	8.743.094.201,00	432.000.000,00	0,00	0,00
		8.208.675.330,00	392.000.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.121.360.967,00	0,00	0,00	0,00
		3.973.820.030,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.829.700,00	0,00	0,00	0,00
		12.895.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.409.800,00	0,00	0,00	0,00
		8.392.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.419.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.412.600,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.726.831.793,00	0,00	0,00	0,00
		3.630.255.471,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.724.101.893,00	0,00	0,00	0,00
		3.627.536.871,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.730.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.728.600,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.087.668,00	0,00	0,00	0,00
		96.053.168,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	96.087.668,00	0,00	0,00	0,00
		96.053.168,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.611.806,00	0,00	0,00	0,00
		234.495.891,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.282.244,00	0,00	0,00	0,00
		212.257.129,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	22.329.582,00	0,00	0,00	0,00
		22.238.762,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.234.674.050,00	0,00	0,00	0,00
		1.213.682.295,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.234.674.050,00	0,00	0,00	0,00
		1.213.682.295,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	41.816.400,00	0,00	0,00	0,00
		32.029.945,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.06	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.095.999.250,00	0,00	0,00	0,00
		1.085.016.200,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.08	Pelayanan Informasi Publik	96.858.400,00	0,00	0,00	0,00
		96.636.150,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.387.059.184,00	432.000.000,00	0,00	0,00
		3.021.373.005,00	392.000.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.387.059.184,00	432.000.000,00	0,00	0,00
		3.021.373.005,00	392.000.000,00	0,00	0,00



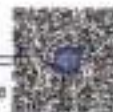
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	767.188.400,00	352.000.000,00	0,00	0,00
		675.675.752,00	348.000.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.317.381.834,00	80.000.000,00	0,00	0,00
		1.188.810.985,00	44.000.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.302.488.950,00	0,00	0,00	0,00
		1.158.886.268,00	0,00	0,00	0,00
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.419.078.860,00	351.467.109,00	0,00	0,00
		9.184.380.171,00	345.837.638,00	0,00	0,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.812.546.354,00	0,00	0,00	0,00
		7.825.817.827,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.701.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.229.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.478.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.215.400,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.222.900,00	0,00	0,00	0,00
		3.014.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.178.509.820,00	0,00	0,00	0,00
		7.149.483.929,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.171.570.920,00	0,00	0,00	0,00
		7.142.647.929,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	6.938.900,00	0,00	0,00	0,00
		6.816.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.372.850,00	0,00	0,00	0,00
		1.279.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.372.850,00	0,00	0,00	0,00
		1.279.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	725.952.484,00	0,00	0,00	0,00
		668.844.748,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	724.732.984,00	0,00	0,00	0,00
		667.879.748,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.229.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.165.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.127.650,00	0,00	0,00	0,00
		24.617.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.127.650,00	0,00	0,00	0,00
		24.617.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.02.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.127.650,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	24.617.300,00	0,00	0,00	0,00
		148.091.480,00	0,00	0,00	0,00
		144.836.712,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	148.091.480,00	0,00	0,00	0,00
		144.836.712,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	148.091.480,00	0,00	0,00	0,00
		144.836.712,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	5.733.400,00	0,00	0,00	0,00
		5.703.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.733.400,00	0,00	0,00	0,00
		5.703.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.733.400,00	0,00	0,00	0,00
		5.703.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	474.946.000,00	0,00	0,00	0,00
		468.142.750,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	211.546.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.930.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	211.546.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.930.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	263.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		260.212.150,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	263.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		260.212.150,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	225.394.400,00	0,00	0,00	0,00
		221.745.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.394.400,00	0,00	0,00	0,00
		221.745.600,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	222.333.000,00	0,00	0,00	0,00
		219.011.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	3.061.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.733.800,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	56.254.550,00	0,00	0,00	0,00
		27.101.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	56.254.550,00	0,00	0,00	0,00
		27.101.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	33.838.050,00	0,00	0,00	0,00
		11.099.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	22.416.500,00	0,00	0,00	0,00
		16.002.200,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	570.985.046,00	351.467.109,00	0,00	0,00
		468.414.882,00	345.837.638,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	570.985.046,00	351.467.109,00	0,00	0,00
		468.414.882,00	345.837.638,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	570.985.046,00	351.467.109,00	0,00	0,00
		468.414.882,00	345.837.638,00	0,00	0,00
2.18	PENANAMAN MODAL	5.644.783.184,00	0,00	0,00	0,00
		5.279.523.443,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.676.812.162,00	0,00	0,00	0,00
		4.399.316.069,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.691.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.221.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.263.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.148.360,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.428.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.073.300,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.384.158.297,00	0,00	0,00	0,00
		4.129.687.266,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.380.758.997,00	0,00	0,00	0,00
		4.126.326.616,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.399.300,00	0,00	0,00	0,00
		3.399.300,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.328.860,00	0,00	0,00	0,00
		110.299.660,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	110.328.860,00	0,00	0,00	0,00
		110.299.660,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.633.205,00	0,00	0,00	0,00
		154.107.483,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	176.633.205,00	0,00	0,00	0,00
		154.107.483,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	179.273.762,00	0,00	0,00	0,00
		173.908.812,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.105.662,00	0,00	0,00	0,00
		70.114.512,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	48.239.700,00	0,00	0,00	0,00
		45.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	26.866.962,00	0,00	0,00	0,00
		24.814.512,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	104.167.100,00	0,00	0,00	0,00
		103.794.300,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	104.167.100,00	0,00	0,00	0,00
		103.794.300,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	161.406.900,00	0,00	0,00	0,00
		154.415.952,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	161.406.900,00	0,00	0,00	0,00
		154.415.952,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	668.200,00	0,00	0,00	0,00
		507.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	160.738.700,00	0,00	0,00	0,00
		153.908.752,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	175.016.348,00	0,00	0,00	0,00
		170.349.198,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	175.016.348,00	0,00	0,00	0,00
		170.349.198,00	0,00	0,00	0,00



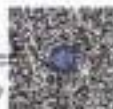
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	159.064.748,00	0,00	0,00	0,00
		155.534.598,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	11.475.600,00	0,00	0,00	0,00
		11.408.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.406.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	421.467.050,00	0,00	0,00	0,00
		351.006.250,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	421.467.050,00	0,00	0,00	0,00
		351.006.250,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10.916.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.748.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	315.196.050,00	0,00	0,00	0,00
		250.003.850,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.355.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.254.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30.786.952,00	0,00	0,00	0,00
		30.527.162,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.786.952,00	0,00	0,00	0,00
		30.527.162,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.786.952,00	0,00	0,00	0,00
		30.527.162,00	0,00	0,00	0,00
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.813.414.300,00	137.630.800,00	0,00	0,00
		15.419.873.240,94	136.973.520,00	0,00	0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.623.084.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.413.743.432,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.623.084.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.413.743.432,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.623.084.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.413.743.432,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.190.329.400,00	137.630.800,00	0,00	0,00
		14.006.129.808,94	136.973.520,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.628.774.900,00	0,00	0,00	0,00
		13.537.159.510,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERDUGA	TRANSFER
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	13.626.774.900,00	0,00	0,00	0,00
		13.537.159.510,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	561.554.500,00	137.830.800,00	0,00	0,00
		468.970.298,94	136.973.520,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	561.554.500,00	137.830.800,00	0,00	0,00
		468.970.298,94	136.973.520,00	0,00	0,00
2.20	STATISTIK	2.854.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.370.630,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.854.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.370.630,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.854.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.370.630,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1.757.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.393.330,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	1.097.400,00	0,00	0,00	0,00
		977.200,00	0,00	0,00	0,00
2.21	PERSANDIAN	13.954.813,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		13.512.354,00	19.700.000,00	0,00	0,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	13.954.813,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		13.512.354,00	19.700.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.954.813,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		13.512.354,00	19.700.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13.954.813,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		13.512.354,00	19.700.000,00	0,00	0,00
2.22	KEBUDAYAAN	99.948.003.989,00	83.058.000,00	0,00	0,00
		91.787.626.241,00	81.996.450,00	0,00	0,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.999.821.503,00	83.058.000,00	0,00	0,00
		4.930.097.810,00	81.996.450,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.907.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.838.250,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.630.800,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.242.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.207.650,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.543.736.824,00	0,00	0,00	0,00
		4.494.826.514,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.543.486.624,00	0,00	0,00	0,00
		4.494.577.514,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		248.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.390.584,00	0,00	0,00	0,00
		144.290.584,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	144.390.584,00	0,00	0,00	0,00
		144.290.584,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.786.595,00	83.058.000,00	0,00	0,00
		285.143.482,00	81.996.450,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.786.795,00	83.058.000,00	0,00	0,00
		283.189.672,00	81.996.450,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.953.490,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	12.793.422.374,00	0,00	0,00	0,00
		12.611.554.134,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.391.861.400,00	0,00	0,00	0,00
		10.362.701.315,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	10.391.861.400,00	0,00	0,00	0,00
		10.362.701.315,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.401.760.974,00	0,00	0,00	0,00
		2.248.852.819,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.220.049.212,00	0,00	0,00	0,00
		2.070.163.882,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	181.711.762,00	0,00	0,00	0,00
		178.666.937,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	74.496.420.706,00	0,00	0,00	0,00
		72.934.730.031,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.496.420.706,00	0,00	0,00	0,00
		72.934.730.031,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	442.284.024,00	0,00	0,00	0,00
		429.177.424,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	73.954.954.682,00	0,00	0,00	0,00
		72.449.537.137,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	71.152.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.015.470,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	80.710.090,00	0,00	0,00	0,00
		72.979.120,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	36.632.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.881.570,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	36.632.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.881.570,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	44.077.550,00	0,00	0,00	0,00
		41.097.550,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	32.764.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.784.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	11.313.550,00	0,00	0,00	0,00
		11.313.550,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.275.629.338,00	0,00	0,00	0,00
		1.238.265.148,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.275.629.338,00	0,00	0,00	0,00
		1.238.265.148,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	412.128.512,00	0,00	0,00	0,00
		398.428.792,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	745.846.824,00	0,00	0,00	0,00
		722.182.384,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	117.654.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.654.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23	PERPUSTAKAAN	3.722.862.204,00	41.006.600,00	0,00	0,00
		3.630.161.475,00	40.075.000,00	0,00	0,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.619.027.218,00	33.506.600,00	0,00	0,00
		3.636.067.483,00	32.675.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.149.912,00	0,00	0,00	0,00
		25.108.812,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.831.812,00	0,00	0,00	0,00
		22.815.512,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.518.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.493.300,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.178.191.510,00	0,00	0,00	0,00
		3.123.048.842,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.173.705.010,00	0,00	0,00	0,00
		3.118.619.842,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	4.488.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.425.800,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.734.524,00	0,00	0,00	0,00
		42.702.524,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42.734.524,00	0,00	0,00	0,00
		42.702.524,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	372.951.272,00	33.506.600,00	0,00	0,00
		345.240.505,00	32.575.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.476.272,00	33.506.600,00	0,00	0,00
		343.784.505,00	32.575.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.456.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	103.954.986,00	7.500.000,00	0,00	0,00
		94.083.992,00	7.500.000,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.005.600,00	0,00	0,00	0,00
		8.293.366,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.084.100,00	0,00	0,00	0,00
		7.376.656,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	921.500,00	0,00	0,00	0,00
		916.700,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.949.386,00	7.500.000,00	0,00	0,00
		85.770.636,00	7.500.000,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	85.949.386,00	7.500.000,00	0,00	0,00
		85.770.636,00	7.500.000,00	0,00	0,00
2.24	KEARSIPAN	22.598.400,00	116.240.000,00	0,00	0,00
		11.490.349,00	110.490.000,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	22.598.400,00	116.240.000,00	0,00	0,00
		11.490.349,00	110.490.000,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	18.584.950,00	0,00	0,00	0,00
		6.084.400,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	17.535.900,00	0,00	0,00	0,00
		7.076.750,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.029.050,00	0,00	0,00	0,00
		1.005.650,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	4.033.450,00	116.240.000,00	0,00	0,00
		3.405.949,00	110.490.000,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	4.033.450,00	116.240.000,00	0,00	0,00
		3.405.949,00	110.490.000,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39.756.792.008,00	96.454.077.475,00	0,00	0,00
		36.636.141.366,00	87.732.145.020,00	0,00	0,00
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	630.652.016,00	4.097.614.000,00	0,00	0,00
		545.110.211,00	218.326.940,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	41.008.416,00	23.000.000,00	0,00	0,00
		24.631.066,00	19.700.000,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	41.008.416,00	23.000.000,00	0,00	0,00
		24.631.066,00	19.700.000,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	41.008.416,00	23.000.000,00	0,00	0,00
		24.631.066,00	19.700.000,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	548.796.800,00	4.074.614.000,00	0,00	0,00
		479.982.145,00	198.826.940,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	296.591.990,00	4.062.614.000,00	0,00	0,00
		233.426.887,00	188.497.219,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	296.591.990,00	4.062.614.000,00	0,00	0,00
		233.426.887,00	188.497.219,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	252.204.810,00	12.000.000,00	0,00	0,00
		246.555.258,00	10.129.721,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	252.204.810,00	12.000.000,00	0,00	0,00
		246.555.258,00	10.129.721,00	0,00	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	40.846.800,00	0,00	0,00	0,00
		40.497.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.846.800,00	0,00	0,00	0,00
		40.497.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.846.800,00	0,00	0,00	0,00
		40.497.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PARIWISATA	14.489.330.918,00	14.588.468.075,00	0,00	0,00
		13.242.582.582,00	11.119.109.500,00	0,00	0,00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.173.844.050,00	110.428.300,00	0,00	0,00
		6.996.624.239,00	104.430.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.526.100,00	0,00	0,00	0,00
		4.577.900,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.727.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.683.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	898.300,00	0,00	0,00	0,00
		894.900,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.479.126.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.339.700.038,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.479.630.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.331.576.239,00	0,00	0,00	0,00



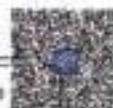
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.496.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.123.800,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	489.315.280,00	0,00	0,00	0,00
		489.521.524,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	489.315.280,00	0,00	0,00	0,00
		489.521.524,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.776.070,00	110.428.300,00	0,00	0,00
		167.824.776,00	104.430.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.400.270,00	110.428.300,00	0,00	0,00
		167.453.576,00	104.430.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	375.800,00	0,00	0,00	0,00
		371.200,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.520.233.670,00	14.714.229.775,00	0,00	0,00
		2.997.403.715,00	10.958.399.100,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.191.354.278,00	14.714.229.775,00	0,00	0,00
		2.774.071.065,00	10.958.399.100,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	103.587.500,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		101.669.741,00	98.943.457,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	132.962.300,00	4.735.310.775,00	0,00	0,00
		128.396.500,00	3.451.618.773,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.438.707.652,00	9.768.919.000,00	0,00	0,00
		1.204.480.298,00	7.304.140.670,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.100.703.728,00	110.000.000,00	0,00	0,00
		967.034.680,00	103.696.200,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	415.393.100,00	0,00	0,00	0,00
		372.490.848,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	326.879.392,00	0,00	0,00	0,00
		223.332.650,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	240.452.160,00	0,00	0,00	0,00
		145.979.160,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	88.427.232,00	0,00	0,00	0,00
		77.353.490,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.274.087.448,00	38.310.000,00	0,00	0,00
		2.019.797.030,00	34.526.400,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.274.087.448,00	38.310.000,00	0,00	0,00
		2.019.797.030,00	34.526.400,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.265.580.096,00	38.310.000,00	0,00	0,00
		2.012.917.690,00	34.526.400,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4.782.350,00	0,00	0,00	0,00
		4.192.640,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.676.700,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	63.086.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.319.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	63.086.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.319.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	63.086.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.319.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.458.079.750,00	25.500.000,00	0,00	0,00
		1.206.748.198,00	21.750.000,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.458.079.750,00	25.500.000,00	0,00	0,00
		1.206.748.198,00	21.750.000,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	4.586.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.795.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.308.229.100,00	25.500.000,00	0,00	0,00
		1.083.710.158,00	21.750.000,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	145.293.900,00	0,00	0,00	0,00
		123.243.040,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PERTANIAN	13.830.049.257,00	0,00	0,00	0,00
		13.359.702.699,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.923.417.606,00	0,00	0,00	0,00
		11.702.656.838,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.788.700,00	0,00	0,00	0,00
		5.788.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.814.200,00	0,00	0,00	0,00
		3.814.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.954.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.954.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.123.913.845,00	0,00	0,00	0,00
		10.949.541.275,00	0,00	0,00	0,00



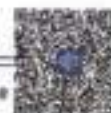
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.122.000.385,00	0,00	0,00	0,00
		10.847.828.025,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.913.250,00	0,00	0,00	0,00
		1.913.250,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	909.500,00	0,00	0,00	0,00
		909.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	909.500,00	0,00	0,00	0,00
		909.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	792.825.781,00	0,00	0,00	0,00
		748.437.184,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	791.975.411,00	0,00	0,00	0,00
		745.586.814,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.10	Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD	850.350,00	0,00	0,00	0,00
		850.350,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	778.528.554,00	0,00	0,00	0,00
		651.082.418,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	114.798.150,00	0,00	0,00	0,00
		39.088.150,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	72.359.100,00	0,00	0,00	0,00
		5.534.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	42.439.050,00	0,00	0,00	0,00
		33.534.050,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pangan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	661.730.414,00	0,00	0,00	0,00
		612.014.268,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	652.874.114,00	0,00	0,00	0,00
		604.782.988,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	6.856.300,00	0,00	0,00	0,00
		7.231.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	490.880.812,00	0,00	0,00	0,00
		472.144.612,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	141.540.700,00	0,00	0,00	0,00
		141.354.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.988.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	11.540.700,00	0,00	0,00	0,00
		11.385.700,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	327.430.750,00	0,00	0,00	0,00
		309.430.750,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.104.750,00	0,00	0,00	0,00
		3.104.750,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	2.390.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.390.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	200.111.800,00	0,00	0,00	0,00
		200.111.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Partit	182.100,00	0,00	0,00	0,00
		182.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	66.700,00	0,00	0,00	0,00
		66.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	73.900,00	0,00	0,00	0,00
		73.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	111.800,00	0,00	0,00	0,00
		111.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	121.408.800,00	0,00	0,00	0,00
		103.408.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	21.709.362,00	0,00	0,00	0,00
		21.359.362,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.03.02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	21.709.362,00	0,00	0,00	0,00
		21.359.362,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	549.970.475,00	0,00	0,00	0,00
		445.813.830,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menurut Dalam daerah Kabupaten/Kota	212.648.475,00	0,00	0,00	0,00
		165.995.494,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	212.648.475,00	0,00	0,00	0,00
		165.995.494,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	158.532.099,00	0,00	0,00	0,00
		135.728.536,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	158.532.099,00	0,00	0,00	0,00
		135.728.536,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.101.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.101.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	30.214.900,00	0,00	0,00	0,00
		17.788.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30.214.900,00	0,00	0,00	0,00
		17.788.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	59.451.800,00	0,00	0,00	0,00
		59.205.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	59.451.800,00	0,00	0,00	0,00
		59.205.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	50.117.300,00	0,00	0,00	0,00
		49.723.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18.580.500,00	0,00	0,00	0,00
		18.095.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.378.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.328.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	17.375.500,00	0,00	0,00	0,00
		17.057.900,00	0,00	0,00	0,00
3.28	KEHUTANAN	10.853.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.202.400,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	10.853.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.202.400,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	10.853.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.202.400,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.2.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Perutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	10.853.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.202.400,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PERDAGANGAN	10.263.990.805,00	77.487.965.400,00	0,00	0,00
		9.090.100.516,00	76.394.712.580,00	0,00	0,00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	39.138.950,00	0,00	0,00	0,00
		31.159.725,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	39.138.950,00	0,00	0,00	0,00
		31.159.725,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	39.138.950,00	0,00	0,00	0,00
		31.159.725,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	9.803.151.001,00	77.487.965.400,00	0,00	0,00
		8.748.707.321,00	76.394.712.580,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	143.398.300,00	76.504.633.500,00	0,00	0,00
		86.722.187,00	76.386.831.580,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	143.398.300,00	76.504.633.500,00	0,00	0,00
		86.722.187,00	76.386.831.580,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	9.659.752.701,00	963.361.900,00	0,00	0,00
		8.660.985.134,00	7.881.000,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9.659.752.701,00	963.361.900,00	0,00	0,00
		8.660.985.134,00	7.881.000,00	0,00	0,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	52.126.250,00	0,00	0,00	0,00
		15.825.400,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	49.548.250,00	0,00	0,00	0,00
		14.686.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	49.548.250,00	0,00	0,00	0,00
		14.686.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.578.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.159.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	2.578.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.159.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	203.242.500,00	0,00	0,00	0,00
		202.756.250,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	203.242.500,00	0,00	0,00	0,00
		202.756.250,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	203.242.500,00	0,00	0,00	0,00
		202.756.250,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	166.332.104,00	0,00	0,00	0,00
		90.660.820,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	166.332.104,00	0,00	0,00	0,00
		90.660.820,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	166.332.104,00	0,00	0,00	0,00
		90.660.820,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PERINDUSTRIAN	524.983.512,00	0,00	0,00	0,00
		382.361.978,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	524.983.512,00	0,00	0,00	0,00
		382.361.978,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	524.983.512,00	0,00	0,00	0,00
		382.361.978,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	46.078.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.385.100,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	79.542.350,00	0,00	0,00	0,00
		71.798.600,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	399.303.182,00	0,00	0,00	0,00
		281.180.278,00	0,00	0,00	0,00
3.32	TRANSMIGRASI	8.931.600,00	0,00	0,00	0,00
		7.772.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	8.931.600,00	0,00	0,00	0,00
		7.772.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.931.600,00	0,00	0,00	0,00
		7.772.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.931.600,00	0,00	0,00	0,00
		7.772.000,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	91.600.910.418,00	2.390.551.690,00	0,00	0,00
		84.560.831.247,00	1.884.761.995,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	41.458.749.544,00	2.054.263.690,00	0,00	0,00
		36.736.357.466,00	1.556.890.200,00	0,00	0,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.681.227.122,00	1.947.263.690,00	0,00	0,00
		33.507.954.184,00	1.449.760.500,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.795.900,00	0,00	0,00	0,00
		13.083.550,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.293.500,00	0,00	0,00	0,00
		8.801.750,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.502.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.281.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.142.156.832,00	0,00	0,00	0,00
		17.229.932.520,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.110.269.532,00	0,00	0,00	0,00
		17.203.376.020,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	31.887.300,00	0,00	0,00	0,00
		26.566.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	560.192.812,00	0,00	0,00	0,00
		558.942.312,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560.192.812,00	0,00	0,00	0,00
		558.942.312,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.920.209.263,00	1.374.785.690,00	0,00	0,00
		7.274.565.838,00	987.942.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.563.788.323,00	1.374.785.890,00	0,00	0,00
		2.980.824.348,00	987.942.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	931.223.000,00	0,00	0,00	0,00
		885.307.960,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.357.293.140,00	0,00	0,00	0,00
		3.578.017.142,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.915.800,00	0,00	0,00	0,00
		18.915.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.568.337.173,00	250.278.000,00	0,00	0,00
		1.400.750.771,00	206.748.500,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.568.337.173,00	250.278.000,00	0,00	0,00
		1.400.750.771,00	206.748.500,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	901.223.872,00	0,00	0,00	0,00
		824.837.578,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	901.223.872,00	0,00	0,00	0,00
		824.837.578,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.691.026.974,00	0,00	0,00	0,00
		1.223.123.805,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.003.426.974,00	0,00	0,00	0,00
		636.123.805,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		570.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	840.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		759.845.942,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		482.115.942,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		297.730.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	102.736.800,00	250.000.000,00	0,00	0,00
		91.119.134,00	248.500.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.817.150,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TOK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20.546.800,00	0,00	0,00	0,00
		17.616.825,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	65.740.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
		59.685.159,00	248.500.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.977.547.696,00	72.200.000,00	0,00	0,00
		4.131.942.934,00	6.570.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Facilitasi Keptokolan	394.900.012,00	0,00	0,00	0,00
		320.347.474,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	3.560.855.284,00	0,00	0,00	0,00
		2.979.091.810,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.021.792.400,00	72.200.000,00	0,00	0,00
		832.503.890,00	6.570.000,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.823.516.982,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		2.513.967.657,00	29.936.700,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	69.607.700,00	0,00	0,00	0,00
		54.872.692,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	65.194.700,00	0,00	0,00	0,00
		44.887.192,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	13.911.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.718.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	10.502.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.267.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.877.836.686,00	0,00	0,00	0,00
		1.784.654.687,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.852.430.474,00	0,00	0,00	0,00
		1.783.376.687,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	22.047.512,00	0,00	0,00	0,00
		1.278.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.356.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	771.835.166,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		595.962.778,00	29.936.700,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	249.667.022,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		219.162.104,00	29.936.700,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Facilitasi Bantuan Hukum	474.693.532,00	0,00	0,00	0,00
		321.373.132,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	47.844.612,00	0,00	0,00	0,00
		45.427.542,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	84.237.400,00	0,00	0,00	0,00
		77.477.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	83.728.500,00	0,00	0,00	0,00
		77.477.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	293.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	215.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	952.005.470,00	77.000.000,00	0,00	0,00
		714.435.625,00	76.993.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	79.798.612,00	0,00	0,00	0,00
		54.770.974,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8.932.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.540.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	56.546.012,00	0,00	0,00	0,00
		50.160.974,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	337.738.710,00	0,00	0,00	0,00
		286.835.711,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	92.212.500,00	0,00	0,00	0,00
		67.838.551,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	70.819.400,00	0,00	0,00	0,00
		50.468.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	174.708.810,00	0,00	0,00	0,00
		166.527.560,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	347.946.386,00	77.000.000,00	0,00	0,00
		290.063.440,00	76.993.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	226.907.962,00	0,00	0,00	0,00
		186.177.977,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	49.904.262,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		47.519.501,00	6.993.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	69.134.162,00	70.000.000,00	0,00	0,00
		56.365.962,00	70.000.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam	186.521.762,00	0,00	0,00	0,00
		82.775.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	186.521.762,00	0,00	0,00	0,00
		82.775.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02	SEKRETARIAT DPRD	50.144.160.874,00	336.288.000,00	0,00	0,00
		47.814.273.781,00	328.071.795,00	0,00	0,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.161.723.410,00	336.288.000,00	0,00	0,00
		30.889.808.378,00	328.071.795,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	776.497.798,00	0,00	0,00	0,00
		705.596.427,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.421.348,00	0,00	0,00	0,00
		82.762.248,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	691.076.450,00	0,00	0,00	0,00
		622.834.179,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.382.284.541,00	0,00	0,00	0,00
		3.275.007.403,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.367.718.341,00	0,00	0,00	0,00
		3.272.587.803,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.566.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.419.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	919.235.018,00	0,00	0,00	0,00
		887.247.622,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	919.235.018,00	0,00	0,00	0,00
		887.247.622,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.655.143.368,00	237.960.000,00	0,00	0,00
		1.266.783.745,00	230.360.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.567.049.518,00	237.960.000,00	0,00	0,00
		1.206.504.783,00	230.360.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	86.093.850,00	0,00	0,00	0,00
		60.278.982,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.066.374.797,00	98.328.000,00	0,00	0,00
		798.991.421,00	97.711.795,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	389.103.801,00	0,00	0,00	0,00
		224.320.876,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	679.270.996,00	98.328.000,00	0,00	0,00
		574.670.543,00	97.711.795,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.190.043.892,00	0,00	0,00	0,00
		23.622.526.266,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.861.167.260,00	0,00	0,00	0,00
		23.322.252.124,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakian Dinas dan Atribut DPRD	248.876.632,00	0,00	0,00	0,00
		225.076.632,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	80.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.197.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	170.143.998,00	0,00	0,00	0,00
		123.455.504,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	170.143.998,00	0,00	0,00	0,00
		123.455.504,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.982.437.464,00	0,00	0,00	0,00
		17.124.865.403,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	995.019.336,00	0,00	0,00	0,00
		830.825.493,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	995.019.336,00	0,00	0,00	0,00
		830.825.493,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.808.803.750,00	0,00	0,00	0,00
		5.790.624.384,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	5.808.803.750,00	0,00	0,00	0,00
		5.790.624.384,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.088.196.798,00	0,00	0,00	0,00
		9.539.504.090,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	6.978.636.750,00	0,00	0,00	0,00
		6.631.870.072,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.728.682.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.563.718.220,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.380.875.948,00	0,00	0,00	0,00
		1.143.915.798,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.090.417.580,00	0,00	0,00	0,00
		963.711.436,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reres	1.090.417.580,00	0,00	0,00	0,00
		963.711.436,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	35.548.441.246,00	1.719.458.800,00	3.825.721.728,00	124.139.185.483,00
		30.354.939.550,00	1.494.320.730,00	2.940.474.524,26	122.594.344.451,00
5.01	PERENCANAAN	5.779.282.430,00	150.518.000,00	0,00	0,00
		5.099.792.544,00	147.913.700,00	0,00	0,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.968.242.718,00	50.518.000,00	0,00	0,00
		4.633.513.835,00	48.913.700,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.598.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.817.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.475.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.873.850,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00
		943.350,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.650.678.790,00	0,00	0,00	0,00
		4.358.785.158,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.646.511.390,00	0,00	0,00	0,00
		4.353.168.908,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.165.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.616.250,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.906.262,00	0,00	0,00	0,00
		21.329.262,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.906.262,00	0,00	0,00	0,00
		21.329.262,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.388.374,00	60.518.000,00	0,00	0,00
		34.925.037,00	48.913.700,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.708.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.197.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.710.000,00	60.518.000,00	0,00	0,00
		7.820.000,00	48.913.700,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.428.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.894.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45.518.124,00	0,00	0,00	0,00
		24.014.037,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.725.040,00	0,00	0,00	0,00
		156.249.388,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.884.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.336.048,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.041.040,00	0,00	0,00	0,00
		96.913.340,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.999.752,00	0,00	0,00	0,00
		60.407.792,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.999.752,00	0,00	0,00	0,00
		59.432.792,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		975.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	312.355.600,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		287.267.740,00	99.000.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	239.332.500,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		220.551.300,00	99.000.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299.332.500,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		220.551.300,00	99.000.000,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	27.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.896.340,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	27.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.896.340,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	45.603.100,00	0,00	0,00	0,00
		41.820.100,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	38.559.700,00	0,00	0,00	0,00
		35.611.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	7.043.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.206.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	496.684.112,00	0,00	0,00	0,00
		179.010.966,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	112.136.800,00	0,00	0,00	0,00
		105.311.826,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.394.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.136.700,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.438.700,00	0,00	0,00	0,00
		76.059.226,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32.305.300,00	0,00	0,00	0,00
		28.115.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	66.750.612,00	0,00	0,00	0,00
		60.378.143,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.216.200,00	0,00	0,00	0,00
		38.158.131,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.534.412,00	0,00	0,00	0,00
		22.220.012,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	319.794.700,00	0,00	0,00	0,00
		13.321.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	319.794.700,00	0,00	0,00	0,00
		13.321.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	10.833.974.040,00	876.853.600,00	3.825.721.728,00	124.139.165.483,00
		18.241.170.538,00	862.232.080,00	2.940.474.524,28	122.594.344.451,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.376.001.822,00	678.853.600,00	0,00	0,00
		9.949.760.839,00	484.232.080,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.689.862,00	0,00	0,00	0,00
		34.133.674,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.416.412,00	0,00	0,00	0,00
		28.554.674,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.273.450,00	0,00	0,00	0,00
		5.579.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.480.910.435,00	0,00	0,00	0,00
		9.208.636.979,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.403.363.435,00	0,00	0,00	0,00
		9.156.201.179,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	57.547.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.438.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.613.724,00	0,00	0,00	0,00
		53.618.648,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	86.613.724,00	0,00	0,00	0,00
		53.618.648,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	792.787.601,00	678.853.600,00	0,00	0,00
		653.388.338,00	484.232.080,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	770.060.580,00	678.853.600,00	0,00	0,00
		632.906.826,00	484.232.080,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.727.012,00	0,00	0,00	0,00
		20.461.512,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.046.158.053,00	0,00	3.825.721.728,00	124.139.165.483,00
		4.228.721.257,00	0,00	2.940.474.524,28	122.594.344.451,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	436.708.800,00	0,00	0,00	0,00
		355.457.140,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	200.580.800,00	0,00	0,00	0,00
		160.322.120,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	95.076.800,00	0,00	0,00	0,00
		62.033.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	141.037.200,00	0,00	0,00	0,00
		133.101.920,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.397.891.053,00	0,00	0,00	0,00
		3.723.708.623,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	46.438.300,00	0,00	0,00	0,00
		27.701.750,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4.242.254.703,00	0,00	0,00	0,00
		3.634.561.523,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	109.198.050,00	0,00	0,00	0,00
		61.445.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	211.550.200,00	0,00	0,00	0,00
		149.555.494,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	40.558.050,00	0,00	0,00	0,00
		24.022.050,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18.447.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.520.360,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.451.300,00	0,00	0,00	0,00
		25.886.984,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	96.607.950,00	0,00	0,00	0,00
		69.161.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	21.495.900,00	0,00	0,00	0,00
		16.964.750,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	3.825.721.728,00	124.139.195.483,00
		0,00	0,00	2.940.474.524,26	122.594.344.451,00
5.02.02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	107.138.345.000,00
		0,00	0,00	0,00	107.138.345.000,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	3.825.721.728,00	0,00
		0,00	0,00	2.940.474.524,26	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKD TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	17.000.820.483,00
		0,00	0,00	0,00	15.455.999.451,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	629.978.482,00	0,00	0,00	0,00
		538.999.840,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	629.978.482,00	0,00	0,00	0,00
		538.999.840,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	60.555.100,00	0,00	0,00	0,00
		54.912.834,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	377.459.800,00	0,00	0,00	0,00
		343.046.350,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	191.963.582,00	0,00	0,00	0,00
		141.040.656,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.881.835.903,00	198.000.000,00	0,00	0,00
		1.523.688.800,00	198.000.000,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.881.835.903,00	198.000.000,00	0,00	0,00
		1.523.688.800,00	198.000.000,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	199.280.500,00	198.000.000,00	0,00	0,00
		94.907.400,00	198.000.000,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	86.269.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.041.816,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	114.175.300,00	0,00	0,00	0,00
		93.774.710,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8.827.750,00	0,00	0,00	0,00
		7.793.150,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	529.501.490,00	0,00	0,00	0,00
		503.229.253,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	819.805.163,00	0,00	0,00	0,00
		642.357.595,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	124.171.700,00	0,00	0,00	0,00
		107.585.076,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	6.625.892.872,00	132.636.000,00	0,00	0,00
		5.419.880.272,00	124.850.950,00	0,00	0,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.131.170.572,00	122.636.000,00	0,00	0,00
		4.972.983.408,00	115.110.700,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.298.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.674.450,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.973.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.724.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.324.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.949.950,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.920.778.820,00	0,00	0,00	0,00
		4.795.579.458,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.920.778.820,00	0,00	0,00	0,00
		4.795.579.458,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.406.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.076.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.406.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.076.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.687.252,00	122.836.000,00	0,00	0,00
		168.633.500,00	115.110.700,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.196.752,00	122.836.000,00	0,00	0,00
		168.012.050,00	115.110.700,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.490.500,00	0,00	0,00	0,00
		621.450,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.494.522.300,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		448.916.894,00	9.740.250,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	870.084.400,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		55.017.880,00	9.740.250,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	854.886.600,00	0,00	0,00	0,00
		43.444.474,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4.598.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.153.616,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.619.400,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		9.419.770,00	9.740.250,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	337.409.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.296.240,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Penilaian Pangkat ASN	35.293.800,00	0,00	0,00	0,00
		30.422.440,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	302.115.200,00	0,00	0,00	0,00
		119.873.800,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	287.028.900,00	0,00	0,00	0,00
		241.802.764,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	78.902.400,00	0,00	0,00	0,00
		78.385.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	65.534.650,00	0,00	0,00	0,00
		47.570.144,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	142.581.850,00	0,00	0,00	0,00
		117.848.820,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.256.465.896,00	0,00	0,00	0,00
		2.054.891.707,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.256.465.896,00	0,00	0,00	0,00
		2.054.891.707,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.256.465.896,00	0,00	0,00	0,00
		2.054.891.707,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.256.465.896,00	0,00	0,00	0,00
		2.054.891.707,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.953.026.008,00	559.451.000,00	0,00	0,00
		1.539.454.491,00	549.324.000,00	0,00	0,00
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.026.197.658,00	399.451.000,00	0,00	0,00
		665.852.541,00	390.480.000,00	0,00	0,00
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.689.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.329.250,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.318.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.982.200,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	372.100,00	0,00	0,00	0,00
		347.050,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	951.504.110,00	0,00	0,00	0,00
		825.938.044,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	946.707.760,00	0,00	0,00	0,00
		824.389.894,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.796.380,00	0,00	0,00	0,00
		1.548.150,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	791.400,00	0,00	0,00	0,00
		675.600,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	791.400,00	0,00	0,00	0,00
		675.600,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.933.700,00	399.451.000,00	0,00	0,00
		1.375.000,00	390.480.000,00	0,00	0,00
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.300.000,00	399.451.000,00	0,00	0,00
		0,00	390.480.000,00	0,00	0,00
5.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.633.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.375.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.05.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.852.850,00	0,00	0,00	0,00
		10.237.147,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.533.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.210.597,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.419.350,00	0,00	0,00	0,00
		7.026.550,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.326.598,00	0,00	0,00	0,00
		25.097.500,00	0,00	0,00	0,00
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.326.598,00	0,00	0,00	0,00
		25.097.500,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	526.828.350,00	160.000.000,00	0,00	0,00
		873.751.950,00	158.844.000,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	71.256.800,00	0,00	0,00	0,00
		65.246.040,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	71.256.800,00	0,00	0,00	0,00
		65.246.040,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	172.472.300,00	0,00	0,00	0,00
		170.381.050,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	61.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.401.450,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	121.377.300,00	0,00	0,00	0,00
		119.979.600,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	127.009.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.450.600,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	52.009.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.450.600,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	556.090.250,00	160.000.000,00	0,00	0,00
		512.874.250,00	158.844.000,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Repikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	4.803.800,00	160.000.000,00	0,00	0,00
		2.811.000,00	158.844.000,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	547.374.650,00	0,00	0,00	0,00
		507.330.250,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	3.911.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.533.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
0	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.167.673.821,00	931.543.000,00	0,00	0,00
		8.554.283.011,00	555.756.265,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT	13.167.673.821,00	931.543.000,00	0,00	0,00
		8.554.283.011,00	555.756.265,00	0,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.552.738.173,00	931.543.000,00	0,00	0,00
		6.926.445.845,00	555.756.265,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.000.812,00	0,00	0,00	0,00
		29.676.712,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.542.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.284.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.458.012,00	0,00	0,00	0,00
		23.394.112,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.263.750.326,00	0,00	0,00	0,00
		6.277.823.497,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.272.233.226,00	0,00	0,00	0,00
		6.267.224.497,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.517.100,00	0,00	0,00	0,00
		10.599.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.669.965.620,00	0,00	0,00	0,00
		311.610.144,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.669.965.620,00	0,00	0,00	0,00
		311.610.144,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.021.415,00	931.543.000,00	0,00	0,00
		309.333.492,00	555.756.265,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	563.784.015,00	931.543.000,00	0,00	0,00
		306.404.492,00	555.756.265,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.237.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.929.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.224.141.324,00	0,00	0,00	0,00
		1.606.592.642,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.695.264.312,00	0,00	0,00	0,00
		791.460.862,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4.119.250,00	0,00	0,00	0,00
		2.631.350,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	462.630.656,00	0,00	0,00	0,00
		51.904.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	2.693.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.643.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	7.920.800,00	0,00	0,00	0,00
		7.885.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	835.783.412,00	0,00	0,00	0,00
		444.205.512,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	361.916.700,00	0,00	0,00	0,00
		272.191.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.528.877.012,00	0,00	0,00	0,00
		727.131.980,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.528.877.012,00	0,00	0,00	0,00
		727.131.980,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	390.794.324,00	0,00	0,00	0,00
		117.244.524,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	390.794.324,00	0,00	0,00	0,00
		117.244.524,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56.308.812,00	0,00	0,00	0,00
		25.730.812,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.529.212,00	0,00	0,00	0,00
		50.497.812,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	213.956.300,00	0,00	0,00	0,00
		41.016.100,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	21.422.834.133,00	5.486.988.036,00	0,00	0,00
		20.677.714.332,00	5.204.047.903,73	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	21.422.834.133,00	5.486.988.036,00	0,00	0,00
		20.677.714.332,00	5.204.047.903,73	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.210.049.573,00	2.060.004.000,00	0,00	0,00
		17.683.080.424,00	1.686.782.450,40	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.431.502,00	0,00	0,00	0,00
		142.715.632,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.576.150,00	0,00	0,00	0,00
		22.066.730,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.755.352,00	0,00	0,00	0,00
		120.648.902,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.706.622.007,00	0,00	0,00	0,00
		15.400.380.873,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.682.411.107,00	0,00	0,00	0,00
		15.376.532.343,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.210.900,00	0,00	0,00	0,00
		23.848.530,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	827.914.970,00	0,00	0,00	0,00
		910.018.273,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	827.914.970,00	0,00	0,00	0,00
		910.018.273,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.385.081.094,00	2.060.004.000,00	0,00	0,00
		1.229.965.646,00	1.686.782.450,40	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.351.647.082,00	2.060.004.000,00	0,00	0,00
		1.199.248.734,00	1.686.782.450,40	0,00	0,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.434.012,00	0,00	0,00	0,00
		30.716.912,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	529.335.200,00	4.205.860.036,00	0,00	0,00
		480.322.940,00	3.297.970.825,33	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	422.320.100,00	12.680.000,00	0,00	0,00
		379.484.532,00	11.250.000,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	372.867.200,00	12.680.000,00	0,00	0,00
		342.636.580,00	11.250.000,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.452.900,00	0,00	0,00	0,00
		38.847.972,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	96.799.550,00	4.193.200.036,00	0,00	0,00
		93.158.420,00	3.286.720.825,33	0,00	0,00
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	96.799.550,00	4.193.200.036,00	0,00	0,00
		93.158.420,00	3.286.720.825,33	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	10.245.550,00	0,00	0,00	0,00
		7.679.988,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.245.550,00	0,00	0,00	0,00
		7.679.988,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.571.448.110,00	221.104.000,00	0,00	0,00
		2.412.391.068,00	219.294.628,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.642.950,00	0,00	0,00	0,00
		26.272.855,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.642.950,00	0,00	0,00	0,00
		26.272.855,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.542.803.160,00	221.104.000,00	0,00	0,00
		2.386.118.213,00	219.294.628,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	182.581.350,00	85.104.000,00	0,00	0,00
		175.905.650,00	83.577.428,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TKK TERDUGA	TRANSFER
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.181.296.640,00	156.000.000,00	0,00	0,00
		1.054.329.775,00	155.717.200,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	1.178.925.170,00	0,00	0,00	0,00
		1.145.882.788,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.231.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.648.850,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.742.100,00	0,00	0,00	0,00
		7.583.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.742.100,00	0,00	0,00	0,00
		7.583.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	5.488.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.062.950,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.488.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.062.950,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.439.700,00	0,00	0,00	0,00
		51.237.150,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.439.700,00	0,00	0,00	0,00
		51.237.150,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	55.439.700,00	0,00	0,00	0,00
		51.237.150,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.332.550,00	0,00	0,00	0,00
		39.036.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.332.550,00	0,00	0,00	0,00
		39.036.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	41.332.550,00	0,00	0,00	0,00
		39.036.100,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	19.325.321.758,00	44.576.000,00	0,00	0,00
		19.076.193.115,00	43.830.130,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.325.321.758,00	44.576.000,00	0,00	0,00
		19.076.193.115,00	43.830.130,00	0,00	0,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.542.918.228,00	44.576.000,00	0,00	0,00
		3.557.063.099,00	43.830.130,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.376.900,00	0,00	0,00	0,00
		17.380.840,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.677.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.496.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.899.400,00	0,00	0,00	0,00
		15.884.340,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.288.727.646,00	0,00	0,00	0,00
		3.242.889.891,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.282.789.348,00	0,00	0,00	0,00
		3.237.781.491,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.958.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.208.400,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.641.562,00	0,00	0,00	0,00
		188.221.787,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	187.641.562,00	0,00	0,00	0,00
		188.221.787,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.172.120,00	44.578.000,00	0,00	0,00
		130.470.601,00	43.830.130,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.043.120,00	44.578.000,00	0,00	0,00
		129.387.601,00	43.830.130,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.083.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.155.941.850,00	0,00	0,00	0,00
		1.108.185.075,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.155.941.850,00	0,00	0,00	0,00
		1.108.185.075,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.094.902.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.051.043.235,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	61.039.050,00	0,00	0,00	0,00
		57.121.840,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	13.501.360.795,00	0,00	0,00	0,00
		13.499.243.795,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	13.501.360.795,00	0,00	0,00	0,00
		13.499.243.795,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.482.317.345,00	0,00	0,00	0,00
		13.481.219.345,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.043.450,00	0,00	0,00	0,00
		18.024.450,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	18.777.450,00	0,00	0,00	0,00
		18.289.450,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.777.450,00	0,00	0,00	0,00
		18.289.450,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18.777.450,00	0,00	0,00	0,00
		18.289.450,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	92.204.950,00	0,00	0,00	0,00
		90.742.971,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	92.204.950,00	0,00	0,00	0,00
		90.742.971,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	92.204.950,00	0,00	0,00	0,00
		90.742.971,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	914.118.485,00	0,00	0,00	0,00
		802.688.725,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	914.118.485,00	0,00	0,00	0,00
		802.688.725,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	204.086.050,00	0,00	0,00	0,00
		200.581.590,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.06.2.01.00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lambaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelangkaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	710.032.435.00	0.00	0.00	0.00
		802.107.135.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		1.101.348.870.417.00	232.296.365.954.00	3.625.721.728.00	124.138.165.483.00
		1.043.731.802.665.44	156.380.506.186.17	2.940.474.524.25	122.594.344.451.00



 Pj. BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN JENDRA



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF. CALK	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	55.767.166.012,36	60.501.462.502,98
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	55.767.166.012,36	60.507.389.166,98
Subtotal		0,00	(5.926.664,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SLIPA/SIKPA)	5.2.3	70.792.572.920,22	55.767.166.012,36
Subtotal		70.792.572.920,22	55.767.166.012,36
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	40.873.695,28	0,00
Lain - Lain	5.2.5	0,00	5.926.664,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.6	70.833.446.615,50	55.767.166.012,36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI KLUNGKUNG



NYOMAN JENDRIKA

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 4 September 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1				
PENDAPATAN	5.4.1.1	1.361.162.002.219,85	1.063.393.322.675,70	297.768.679.544,15	28,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1.1	352.487.319.593,85	262.702.807.133,70	89.784.512.460,15	34,18
Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	114.851.828.908,50	67.084.006.138,75	47.767.822.769,75	71,21
Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	48.150.209.357,64	32.344.838.034,38	15.805.371.323,26	48,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	7.602.949.070,93	7.035.424.452,66	567.524.618,27	8,07
Lain - lain PAD yang Sah	5.4.1.1.1.4	181.882.332.256,78	156.238.538.507,91	25.643.793.748,87	16,41
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		352.487.319.593,85	262.702.807.133,70	89.784.512.460,15	34,18
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.1.2	1.001.719.073.325,00	794.643.714.220,00	207.075.359.105,00	26,06
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.4.1.1.2.1	768.819.632.913,00	696.287.844.115,00	72.531.788.798,00	10,42
Dana Perimbangan	5.4.1.1.2.1.1	743.345.086.913,00	675.033.462.115,00	68.311.624.798,00	10,12
Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.1.2.1.2	25.474.546.000,00	21.254.382.000,00	4.220.164.000,00	19,86
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	5.4.1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	5.4.1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	5.4.1.1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.4.1.1.2.2	232.899.440.412,00	98.355.870.105,00	134.543.570.307,00	136,79
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.1.2.2.1	112.594.707.847,00	91.998.519.132,00	20.596.188.715,00	22,76
Bantuan Keuangan	5.4.1.1.2.2.2	119.964.732.565,00	6.357.350.973,00	113.607.381.592,00	1.787,02
Jumlah Pendapatan Transfer		1.001.719.073.325,00	794.643.714.220,00	207.075.359.105,00	26,06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.1.3	6.955.609.301,00	6.046.801.322,00	908.807.979,00	15,03
Pendapatan Hibah	5.4.1.1.3.1	6.948.351.206,00	5.974.509.488,00	973.841.718,00	16,30
Pendapatan Dana Darurat	5.4.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	5.4.1.1.3.3	7.258.095,00	72.291.834,00	(65.033.739,00)	(889,96)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		6.955.609.301,00	6.046.801.322,00	908.807.979,00	15,03
JUMLAH PENDAPATAN		1.361.162.002.219,85	1.063.393.322.675,70	297.768.679.544,15	28,00
BEBAN	5.4.1.2	1.270.338.328.610,16	1.164.734.848.937,19	105.603.479.672,97	9,07
BEBAN OPERASI	5.4.1.2.1	1.195.100.500.916,16	1.096.165.971.258,19	98.934.529.657,97	9,03
Beban Pegawai	5.4.1.2.1.1	537.845.100.163,00	526.896.656.057,20	10.948.444.105,80	2,08
Beban Barang dan Jasa	5.4.1.2.1.2	393.006.496.679,52	365.732.389.560,82	27.274.109.118,70	7,46
Beban Bunga	5.4.1.2.1.3	3.432.910.119,00	1.834.470.783,00	1.598.439.336,00	87,13
Beban Subsidi	5.4.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	5.4.1.2.1.5	113.776.483.855,00	81.570.701.337,00	32.205.782.518,00	39,48
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.6	4.570.130.500,00	5.551.732.700,00	(981.602.200,00)	(17,68)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.7	2.530.664.335,17	878.183.617,29	1.652.480.717,88	188,17
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.1.8	139.938.713.264,47	112.046.075.287,20	27.892.637.977,27	24,89
Beban Lain-Lain	5.4.1.2.1.9	0,00	1.855.761.915,68	(1.855.761.915,68)	(100,00)
BEBAN TRANSFER	5.4.1.2.2	75.237.827.694,00	68.568.877.679,00	6.668.950.015,00	9,73
Beban Bagi Hasil	5.4.1.2.2.1	15.942.739.694,00	9.584.421.965,00	6.358.317.729,00	66,34
Beban Bantuan Keuangan	5.4.1.2.2.2	59.295.088.000,00	58.984.455.714,00	310.632.286,00	0,53
JUMLAH BEBAN		1.270.338.328.610,16	1.164.734.848.937,19	105.603.479.672,97	9,07
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1.3	90.823.673.609,69	(101.341.526.261,49)	192.165.199.871,18	(189,62)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL	5.4.2.3	(1.607.511.416,13)	(2.957.739.237,00)	1.350.227.820,87	(45,65)
SURPLUS NON-OPERASIONAL	5.4.2.1	1.943.282.432,00	0,00	1.943.282.432,00	
Serplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Serplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Serplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.2.1.3	1.943.282.432,00	0,00	1.943.282.432,00	
DEFISIT NON-OPERASIONAL	5.4.2.2	(1.950.793.848,13)	(2.957.739.237,00)	(593.054.611,13)	20,05
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.2.2.1	(2.068.141.182,13)	0,00	(2.068.141.182,13)	
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.2.2.2	0,00	0,00	0,00	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.2.2.3	(1.482.652.666,02)	(2.957.739.237,00)	1.475.086.570,98	(49,87)
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL		(1.607.511.416,13)	(2.957.739.237,00)	1.350.227.820,87	(45,65)

URAIAN	KODE CALAK	2021	2022	REKAPITULASI/ (PENJURUAN)	%
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		89.218.182.198,56	(104.299.265.498,49)	193.515.427.692,05	(185,54)
POS LUAR BIASA	5.4.3	(2.940.474.534,36)	(6.511.272.257,00)	3.570.797.732,74	(54,84)
Pendapatan Luar Biasa	5.4.3.1	0,00	0,00	0,00	
Beban Luar Biasa	5.4.3.2	2.940.474.534,36	6.511.272.257,00	(3.570.797.732,74)	(54,84)
SURPLUS/(DEFISIT) - LQ	5.4.4	86.275.687.664,20	(110.810.537.755,49)	197.086.225.424,79	(177,86)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan sebagai keseluruhan



**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF. CALK	2023	2022
Ekuitas Awal	5.6.1	1.044.463.769.071,29	1.152.454.000.011,76
Surplus/(Defisit) LO	5.6.2	86.275.687.669,30	(310.810.537.755,49)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendaur-	5.6.3.1	25.219.962.460,75	2.830.297.815,02
Koreksi Ekuitas - Kas dan Setara Kas		40.873.695,28	5.926.664,00
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah		1.606.534.329,00	1.511.818,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi Daerah		(74.509.476,40)	(144.081.289,00)
Koreksi Ekuitas - Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain - lain PAD yang Sah		221.060.994,11	2.003.761.545,60
Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Lainnya		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		386.871.293,93	(823.004.416,58)
Koreksi Ekuitas - Setoran Dibayar Dimuka		264.444.444,44	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan		85.062.957,46	820.762,28
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang Permanen		(221.504.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergilir		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Tanah		0,00	1.112.506.780,00
Koreksi Ekuitas - Perlatan dan Mesin		6.110.230.294,00	2.862.490.698,82
Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan		16.651.239.346,51	2.724.766.477,09
Koreksi Ekuitas - Jalan, Jembatan, dan Irigasi		739.752.387,08	296.566.000,42
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya		(0,51)	(1.599.999,68)
Koreksi Ekuitas - Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan AT		(3.399.803.057,19)	(5.102.716.655,30)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Dana Cadangan		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Komitmen dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tidak Berwujud		(7.975.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lain - lain		1.830.584.000,00	(114.800.000,00)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		1.595.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		2.998.439.410,81	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKK)		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Sungs		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Rasio Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Belanja		(1.762.906.757,00)	(1.860.368,72)
Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Ekuitas Akhir	5.6.4	1.155.959.419.201,34	1.044.463.769.071,29

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan beserta penjelasannya

BUPATI KLUNGKUNG
NYOMAR SINDRILA

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET	5.3.1	1.284.903.124.166,53	1.142.481.227.334,21
ASET LANCAR	5.3.1.1	159.304.329.722,99	116.400.825.830,98
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	70.843.993.715,50	55.767.186.811,36
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	40.986.604.681,79	14.745.063.214,37
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	2.564.505.424,80	237.596.243,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	140.208,24
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	25.248.409.256,63	40.292.233.321,75
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.5	0,00	488.140.066,00
Kas BOP PAUD	5.3.1.1.1.5	0,00	3.992.959,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	10.547.100,00	20.799,00
Setara Kas	5.3.1.1.1.7	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.8	399.593.536,28	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.9	1.634.333.716,00	0,00
Piutang :	5.3.1.1.2	66.300.293.128,80	32.842.369.810,74
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	39.656.547.844,25	36.904.393.352,25
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	7.990.893.346,44	7.339.970.801,40
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.3.1.1.2.3	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.3.1.1.2.4	6.086.164.914,00	5.539.748.106,74
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.6	48.787.409.517,00	17.139.604.502,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.7	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.2.8	(36.220.722.492,89)	(34.081.346.951,65)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.3	718.589.826,86	182.083.218,24
Persediaan	5.3.1.1.4	21.441.453.051,83	27.609.185.990,64
Jumlah Aset Lancar		159.304.329.722,99	116.400.825.830,98
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	80.375.556.016,40	78.724.695.084,40
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	176.340.000,00	247.257.500,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	80.199.216.016,40	78.477.437.584,40
Jumlah Investasi Jangka Panjang		80.375.556.016,40	78.724.695.084,40
ASET TETAP	5.3.1.3	1.016.937.285.173,38	911.589.977.564,10
Tanah	5.3.1.3.1	94.739.077.245,00	95.059.717.855,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	516.224.822.314,16	487.397.821.848,83
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	747.470.966.423,81	615.092.451.796,92
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	937.483.897.594,16	853.734.916.082,66
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	39.003.873.406,18	34.846.059.641,69
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	8.824.593.674,26	13.886.842.835,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.326.809.945.484,19)	(1.188.427.832.496,00)
Jumlah Aset Tetap		1.016.937.285.173,38	911.589.977.564,10
DANA CADANGAN	5.3.1.4	0,00	0,00
Dana Cadangan	5.3.1.4	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5	21.843.005.921,76	35.765.728.854,73

URAIAN	REFF CALK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	2.351.695.692,86	2.351.695.692,86
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	651.702.686,40	446.703.793,20
Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	16.698.174.542,50	30.644.843.158,67
Dana TDF -DBH	5.3.1.5.6	2.141.433.000,00	2.322.486.210,00
Jumlah Aset Lainnya		21.843.005.921,76	35.765.728.854,73
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6	6.442.947.332,00	0,00
Properti Investasi Tanah	5.3.1.6	2.061.264.360,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6	5.220.618.928,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6	(838.935.956,00)	0,00
Jumlah Properti Investasi		6.442.947.332,00	0,00
JUMLAH ASET		1.284.903.124.166,53	1.142.481.227.334,21
KEWAJIBAN	5.3.2	128.943.704.965,19	98.017.458.262,92
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	78.479.011.479,19	42.118.104.993,92
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	5.434.659.783,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	290.413.164,42	329.760.447,92
Utang Belanja	5.3.2.1.4	72.458.443.158,42	41.788.323.747,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	295.495.373,35	20.799,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		78.479.011.479,19	42.118.104.993,92
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	50.464.693.486,00	55.899.353.269,00
Utang Kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	50.464.693.486,00	55.899.353.269,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		50.464.693.486,00	55.899.353.269,00
JUMLAH KEWAJIBAN		128.943.704.965,19	98.017.458.262,92
EKUITAS	5.3.3	1.155.959.419.201,34	1.044.463.769.071,29
EKUITAS	5.3.3	1.155.959.419.201,34	1.044.463.769.071,29
Ekuitas	5.3.3	1.155.959.419.201,34	1.044.463.769.071,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.284.903.124.166,53	1.142.481.227.334,21

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PL BUPATI KLUNGKUNG

 NYOMAN HENDRIKS

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 4 September 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		113.695.107.806,00	66.962.734.049,00
Penerimaan Retribusi Daerah		47.649.857.636,55	31.578.996.300,38
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.602.949.070,93	7.035.424.452,66
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah		181.200.613.082,85	203.493.753.767,77
Penerimaan Dana Perimbangan		745.272.915.389,00	674.518.732.905,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DiD)		25.474.546.000,00	21.254.382.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		47.843.257.000,00	45.857.734.000,00
Penerimaan Bagi Hasil		103.794.221.756,00	90.357.255.218,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		97.457.413.641,00	6.357.350.973,00
Penerimaan Hibah		199.960.479,00	995.628,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		7.258.095,00	72.291.834,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.370.198.099.956,33	1.147.489.651.127,81
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		532.237.023.471,00	547.933.902.006,20
Pembayaran Barang dan Jasa		390.939.219.129,44	351.182.651.334,91
Pembayaran Bunga		3.432.910.119,00	1.160.435.668,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		112.552.519.446,00	53.221.636.678,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.570.130.500,00	5.471.791.500,00
Pembayaran Tak Terduga		2.940.474.524,26	6.615.770.807,00
Pembayaran Bagi Hasil		15.455.999.451,00	7.901.892.982,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		107.138.345.000,00	104.842.189.714,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.169.266.621.640,70	1.078.330.270.690,11
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		200.931.478.315,63	69.159.380.437,70
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		387.984.789,00	391.549.865,00
Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		387.984.789,00	391.549.865,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		1.458.000,00	2.179.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		19.547.281.141,00	52.122.546.755,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		119.708.395.962,77	38.249.152.175,32
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		42.368.269.276,00	38.233.177.115,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.917.785.979,00	2.266.226.681,00
Perolehan Aset Lainnya		817.365.838,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		186.360.556.196,77	130.873.281.726,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(185.972.571.407,77)	(130.481.731.861,32)

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	55.899.353.269,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		66.500.000,00	682.775.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		66.500.000,00	56.582.128.269,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		66.500.000,00	56.582.128.269,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		104.277.050.100,12	95.485.990.843,00
Kas Lainnya di Bend. Pengeluaran		10.547.100,00	0,00
Kirim Uang Masuk		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		104.287.597.200,12	95.485.990.843,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		104.277.050.100,12	95.485.990.843,00
Kas Lainnya di Bend. Pengeluaran		20.799,00	36.404.300,00
Kirim Uang Keluar		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		104.277.070.899,12	95.522.395.143,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		10.520.501,00	(36.404.300,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	15.035.933.208,86	(4.776.627.454,62)
Saldo Awal Kas		55.767.186.811,36	60.537.866.802,98
Koreksi SILPA Tahun Lalu		40.873.695,28	5.926.664,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK		0,00	20.799,00
Saldo Akhir Kas		70.843.993.715,50	55.767.186.811,36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN (CALK)**

BAB I

Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam target APBD.

Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka Kepala Daerah harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran (TA) 2023 disusun dengan maksud:

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama satu periode pelaporan; dan
- e. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan TA 2023 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD);
- f. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- h. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- j. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

- k. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- l. Permendagri Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penatausahaan BMD;
- m. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klungkung;
- r. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- s. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; dan
- t. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 3.3 Ikhtisar *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, yaitu (minimal):

- Tingkat Kemiskinan sebesar 6,07%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,96%;
- Gini Ratio sebesar 0,3510%;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,55%;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,12%;
- Tingkat Inflasi sebesar 2,54%; dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar 3,12%.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Berikut akan disajikan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Klungkung tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Klungkung (%)	5,64	6,07	5,61	-7,58
2	Kabupaten Klungkung (Ribu Orang)	10,19	10,89	10,22	-6,15
3	Provinsi Bali (%)	4,53	4,57	4,25	-7,00
4	Nasional (%)	10,14	9,54	9,36	-1,89
5	Peringkat Provinsi	7	7	7	0,00
6	Peringkat Nasional	81	106	92	-13,21

Persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021 sebesar 5,64% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin naik menjadi 6,07%, sedangkan Tahun 2023 turun menjadi 5,61 dan diharapkan pada Tahun 2024 akan terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung masih diatas provinsi dan dibawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Klungkung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Klungkung	0,82	0,53	0,58	9,43
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,68	0,62	0,55	-11,29
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,79	1,59	1,53	-3,77
4	Peringkat Provinsi	9	3	7	133,34
5	Peringkat Nasional	100	35	58	65,71

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Tingkat Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2023 sebesar 0,58 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 0,53.

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klungkung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klungkung	0,25	0,08	0,09	12,50
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali	0,15	0,13	0,10	23,08
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	0,38	-2,56
4	Peringkat Provinsi	9	3	8	166,67
5	Peringkat Nasional	176	24	37	54,17

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Tingkat Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2023 adalah sebesar 0,09 meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,08.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2023 adalah sebesar 1,29%, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung (%)	5,35	1,96	1,29	-34,18
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,37	4,80	2,69	-43,96
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	8,49	5,86	5,32	-9,22
4	Peringkat Provinsi	5	2	2	0,00
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klungkung Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,29%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,96%, atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan adanya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi *Covid-19* yang berangsur membaik, menyebabkan sektor usaha bangkit kembali dan berpengaruh pada turunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT Kabupaten Klungkung masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali sebesar 2,69% dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 5,32%.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Klungkung Tahun 2023 adalah sebesar 0,3380 poin, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Klungkung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Klungkung	0,3460	0,3510	0,3380	-3,70
2	Tingkat Provinsi Bali	0,378	0,3830	0,3620	-0,28
3	Tingkat Nasional	0,401	0,38	0,39	2,63
4	Peringkat Provinsi	8	8	7	-12,50
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2023 adalah sebesar 73,11 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Klungkung	71,75	72,55	73,11	0,77
2	Provinsi Bali	75,50	75,69	77,10	0,86
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	73,55	0,88
4	Peringkat Provinsi	7	7	7	0,00
5	Peringkat Nasional	175	170	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Klungkung

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2023 adalah sebesar 73,11 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 72,55 poin mengalami kenaikan sebesar 0,80 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan atau harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 0,42 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8 tahun dengan harapan lama sekolah 13 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp11.500,00 atau meningkat Rp213,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Klungkung 73,11 pada saat ini berada pada urutan 7 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali dan Tahun 2022 berada pada urutan 170 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu, sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung

No.	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023 (Triliun)	Tahun 2023 (Triliun)
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	5.595.883,9	5.770.481,9	6.041.650	159,45	12.301,4
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,27	3,12	4,70	5,71	5,05
3	Peringkat Provinsi	1	4	4	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Selama kurun waktu tahun 2021-2023, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung adalah sebesar 2,52%. Perlu diketahui bahwa pada periode tahun 2018-2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung sebesar 5,42%, kemudian pada kurun waktu tahun 2019-2020 menurun hingga mencapai -6,38%. Kondisi tersebut kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2020-2021 sehingga mencapai angka sebesar -0,27%, disusul kemudian pada tahun 2021-

2022 mencapai angka sebesar 3,12%, dan pada kurun waktu tahun 2022-2023 semakin membaik dengan capaian angka sebesar 4,70%. Dalam skala provinsi, laju pertumbuhan Kabupaten Klungkung tahun 2023 menempati urutan 4 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali, sedangkan untuk skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung diperoleh sumber data untuk dapat disajikan.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Klungkung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Gallop ing Inflation*), dimana untuk tingkat inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*), dimana kategori inflasi ini termasuk yang berat, yaitu mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*), dimana untuk jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Tingkat Inflasi Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 2,54% sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Klungkung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Klungkung (%)	-	-	-	-
2	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	6,44	2,54	-60,56
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	-52,63
4	Peringkat Provinsi	-	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung
 *data inflasi Kab Klungkung tidak tersedia

Tingkat inflasi Provinsi Bali Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, menurun dibandingkan dengan tingkat inflasi pada Tahun 2022 sebesar 6,44%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Klungkung

Struktur perekonomian Kabupaten Klungkung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.946.865,2	2.026.791,8	2.195.486,7
2	Pertambangan dan Penggalian	257.303,6	279.591,7	295.100,5
3	Industri Pengolahan	831.797,4	903.301,6	951.523,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.453,8	10.932,9	12.862,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.663,8	17.999,0	19.316,4

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
6	Konstruksi	910.109,3	979.637,5	1.007.661,2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	713.518,0	804.462,8	873.010,4
8	Transportasi dan Pergudangan	177.018,8	200.722,7	255.309,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	751.304,8	923.818,7	1.207.561,8
10	Informasi dan Komunikasi	874.940,8	878.961,4	913.977,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	351.455,4	417.884,7	474.210,8
12	Real Estate	210.352,8	223.019,0	232.428,1
13	Jasa Perusahaan	84.122,1	94.767,6	103.802,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533.140,5	527.576,5	553.753,8
15	Jasa Pendidikan	224.908,8	229.617,3	230.940,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	440.604,6	458.999,7	484.075,4
17	Jasa Lainnya	199.873,3	234.323,9	269.463,8
18	Jumlah	8.534.433,00	9.210.208,60	10.080.215,4
19	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8.534.432,9	9.210.208,5	10.080.215,4
20	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	8.534.432,9	9.210.208,5	10.080.215,4
21	PDRB Provinsi	220,47 (Triliun)	245,24 (Triliun)	274,36 (Triliun)
22	PDRB Nasional	16.976,8 (Triliun)	19.588,1 (Triliun)	20.892,4 (Triliun)
23	Peringkat Provinsi	8	8	8
24	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai pemantapan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui beberapa prioritas pembangunan daerah, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- Terpenuhinya skala dan lingkungan kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya;
- Agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian; dan
- Tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.

Penyusunan agenda pembangunan Kabupaten Klungkung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional serta pembangunan Provinsi Bali. Oleh karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Pembangunan merupakan salah satu kegiatan utama bagi pemerintah daerah disamping pelayanan dan operasional internal birokrasi. Sementara ini, otonomi daerah telah diterapkan bagi pemerintah daerah. Konsekuensi dari penerapan otonomi ialah adanya kemandirian bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatannya. Dalam membangun, pemerintah dituntut untuk melaksanakannya dengan efektif. Artinya, harus tepat sasaran dengan target yang jelas dan bisa diukur hasil dan dampaknya. Selain itu dalam membangun harus tertib administrasi dan keuangan, sehingga sebagai dampak akhir pembangunan akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2023 terdiri dari:

- a. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2023 ini telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Bali sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan.

Untuk mencapai target pertumbuhan di tahun 2023, maka arah kebijakan yang diperlukan adalah untuk mempercepat pengeluaran pemerintah di tahun 2023 sehingga mampu memberi stimulus keuangan di masyarakat. Pemulihan ekonomi khususnya sektor pariwisata perlu didorong percepatannya karena akan menjadi pendorong bagi tumbuhnya lapangan usaha lainnya.

Hasil analisis atas kondisi ekonomi tahun 2023 kondisinya tidak jauh berbeda dengan tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2023 diperkirakan akan mulai mengalami masa pemulihan. Meskipun demikian, dalam APBD diketahui bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan karena turunnya penerimaan pendapatan daerah tahun 2022, DAK dan DAU. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan tetapi sangat kecil dan inflasi sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 karena masyarakat hanya fokus pada kebutuhan primer saja. Pendapatan daerah tahun 2023 didominasi oleh sektor pertanian dan pariwisata yang baru mulai mengalami masa pemulihan.

Tantangan ekonomi tahun 2023 masih cukup berat dihadapi oleh Kabupaten Klungkung, karena terpuruknya sektor riil dan pariwisata, dimana tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dengan demikian, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah bagaimana memulihkan kondisi ekonomi dan pariwisata dengan melalui pemasaran pariwisata secara masif melalui media daring.

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah selama ini telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2023 ditetapkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- c. Meningkatkan pengawasan melalui peningkatan peran tim intensifikasi pajak dan retribusi daerah dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengawasan untuk menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah; dan
- d. Penataan obyek dan daya tarik wisata di kawasan wisata Nusa Penida.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi;
- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi;
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata;
- f. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah; dan
- g. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2023, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber-sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikan insentif dan kemudahan terhadap masuknya investasi;
- b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- c. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan efektifitas;
- d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah; dan
- e. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dan melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaannya.

Khusus dalam penetapan PAD, penyusunannya masih berpedoman pada Manual Administrasi Pendapatan Daerah (Mapatda) yaitu dengan pertimbangan realisasi tahun lalu, perkembangan obyek penerimaan daerah, kebijakan pemerintah dan situasi ekonomi masa mendatang. Dalam kaitan dengan rencana pencapaian target PAD beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan untuk dipecahkan adalah:

- a. Pengkomunikasian kepada masyarakat tentang kebijaksanaan dan peraturan pajak daerah, retribusi daerah dan kewajiban iuran lainnya; dan
- b. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat (wajib pajak/retribusi daerah) tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah, untuk membayar pajak, retribusi, dan iuran daerah lainnya.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah Kabupaten Klungkung diprioritaskan untuk mendanai prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2023.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja daerah pada APBD tahun 2023 diarahkan untuk mencapai kerangka ekonomi makro sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2023 dan disesuaikan dengan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).

Berdasarkan RKPD Tahun 2023 arah kebijakan pembangunan dijabarkan dalam Empat (4) Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas 1 : Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
- Prioritas 2 : Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Prioritas 3 : Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif; dan
- Prioritas 4 : Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun

program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah serta penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Struktur pembiayaan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun 2023 dianggarkan berdasarkan estimasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2022, yaitu sebesar Rp55.767.166.012,36 dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp58.500.000,00.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Klungkung tahun 2023 lebih ditekankan pada penggunaan anggaran pembiayaan berimbang. Artinya, pengeluaran pembiayaan akan dibiayai dari penerimaan pembiayaan secara proporsional, sehingga tidak membebani surplus/defisit antara Pendapatan dan Belanja. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Perkembangan APBD dalam setiap periode waktunya dapat diketahui dari angka-angka yang dilaporkan dalam laporan realisasi APBD. Melalui Laporan Realisasi APBD juga dapat diketahui pencapaian target kinerja keuangan dilihat dari sisi realisasi keuangan dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Secara garis besar kinerja APBD Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu:

- a. Realisasi dan rencana kinerja keuangan,
- b. Perbandingan realisasi antar periode; dan
- c. Derajat kemandirian.

2.3.1 Realisasi dan rencana kinerja keuangan

Ringkasan perbandingan realisasi dengan anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan	1.405.774.287.570,00	1.370.586.084.745,33	(35.188.202.824,67)
2	Belanja dan Transfer	1.461.599.953.582,00	1.355.627.177.837,47	(105.972.775.744,53)
	Surplus/Defisit	(55.825.666.012,00)	14.958.806.907,86	70.784.572.919,86
3	Pembiayaan			
a	Penerimaan	55.825.666.012,00	55.833.666.012,36	8.000.000,36
b	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	55.825.666.012,00	55.833.666.012,36	8.000.000,36
	Koreksi Silpa Tahun Lalu	0,00	40.873.695,28	40.873.695,28
	SILPA	0,00	70.833.446.615,50	70.833.446.615,50

Perbandingan rencana kinerja pada APBD induk dan perubahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Perbandingan APBD TA 2023 Induk dengan Perubahan APBD

No.	Uraian	Anggaran Induk 2023 (Rp)	Anggaran Perubahan 2023 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan	1.207.836.791.826,00	1.405.774.287.570,00	197.937.495.744,00
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	261.525.239.087,00	352.325.957.788,00	90.800.718.701,00
	Pendapatan Transfer	946.311.552.739,00	1.053.248.934.803,00	106.938.382.064,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	188.394.979,00	188.394.979,00
2	Belanja	1.391.014.394.183,00	1.461.599.953.582,00	70.585.559.399,00
	Belanja Operasi	1.042.186.335.737,00	1.100.952.727.487,00	58.766.391.750,00
	Belanja Modal	227.548.863.446,00	232.286.395.954,00	4.737.532.508,00
	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	1.461.599.953.582,00	1.456.599.953.582,00
	Belanja transfer	116.279.195.000,00	124.139.165.483,00	7.859.970.483,00
	Surplus/Defisit	(183.177.602.357,00)	(55.825.666.012,00)	127.351.936.345,00
3	Pembiayaan			
a	Penerimaan	183.177.602.357,00	55.825.666.012,00	(127.410.436.345,00)
b	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	183.177.602.357,00	55.825.666.012,00	(127.410.436.345,00)
	SILPA	0,00	0,00	0,00

Target pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah disusun dengan asumsi berlalunya pandemi *Covid-19*, dan memang dalam perkembangannya ternyata pendapatan mengalami tren positif atau meningkat. Selain PAD, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi khususnya terkait transfer ke daerah juga sangat mempengaruhi kondisi APBD Tahun 2023.

Secara keseluruhan, terlihat terjadi peningkatan PAD, baik pada jenis pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD yang sah. Tren positif akibat berlalunya Pandemi *Covid-19* terhadap realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah sangat terlihat dampaknya pada realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah. Berikut perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.

Tabel 2.12 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	34.670.921.791,00	12.882.633.137,00	947.073.617,00	4.017.460.593,00

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
2	Pajak Restoran	36.528.728.221,00	11.946.640.405,00	1.153.162.608,00	3.392.964.887,00
3	Pajak Hiburan	683.787.863,00	240.832.580,00	77.904.721,00	52.413.607,00
4	Pajak Reklame	192.488.750,00	238.428.875,00	345.783.520,00	220.394.819,00
5	Pajak Penerangan Jalan	16.937.476.841,00	13.993.105.022,00	11.511.958.498,00	12.464.117.933,00
6	Pajak Parkir	54.827.228,00	52.927.389,00	23.921.601,00	23.156.360,00
7	Pajak Air Tanah	449.775.497,00	290.190.094,00	143.358.969,00	198.989.860,00
8	PBB-P2	2.867.033.925,00	3.523.216.865,00	3.208.461.729,00	2.490.655.847,00
9	Pajak BPHTB	21.310.067.690,00	23.794.759.682,00	24.520.712.700,00	18.991.505.171,00
	Jumlah	113.695.107.806,00	66.962.734.049,00	41.932.337.963,00	41.851.859.057,00

Dalam perubahan APBD 2023, pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap anggaran belanja daerah dengan tetap berpedoman pada sumber dana serta program kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi dalam pembangunan masyarakat Klungkung yang unggul dan sejahtera.

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Perkembangan APBD dalam setiap periode waktunya dapat diketahui dari angka-angka yang dilaporkan dalam laporan realisasi APBD. Melalui Laporan Realisasi APBD juga dapat diketahui pencapaian target kinerja keuangan dilihat dari sisi realisasi keuangan dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Secara garis besar kinerja APBD Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu realisasi dan rencana kinerja keuangan, perbandingan realisasi antar periode, dan derajat kemandirian.

a. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan realisasi dengan anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Ringkasan APBD Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan	1.405.774.287.570,00	1.370.586.084.745,33	(35.188.202.824,67)
2	Belanja	1.337.460.788.099,00	1.233.032.833.386,47	(104.427.954.712,53)
3	Transfer	124.139.165.483,00	122.594.344.451,00	(1.544.821.032,00)
	Surplus/Defisit	(55.825.666.012,00)	14.958.906.907,86	70.784.572.919,86
3	Pembiayaan			
a	Penerimaan	55.825.666.012,00	55.833.666.012,36	8.000.000,36
b	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	55.825.666.012,00	55.833.666.012,36	8.000.000,36
	Koreksi SILPA	0,00	40.873.695,28	40.873.695,28
	SILPA	0,00	70.833.446.615,50	70.833.446.615,50

b. Perbandingan Realisasi Antar Periode

Berikut ringkasan realisasi pendapatan dan belanja selama 4 (empat) tahun terakhir:

Tabel 3.2 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja 2020-2023

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
I	Pendapatan	1.370.586.084.745,33	1.147.881.200.992,81	1.146.023.938.454,93	1.104.882.392.581,69
II	Belanja	1.233.032.833.386,47	1.096.459.469.720,43	1.032.346.446.671,90	952.973.040.576,50
III	Transfer	122.594.344.451,00	112.744.082.696,00	121.843.707.620,00	123.834.958.519,00
	Surplus/Defisit (I)	14.958.906.907,86	(61.322.351.423,62)	(8.166.215.836,97)	28.074.393.486,19
IV	Pembiayaan				
1	Penerimaan	55.833.666.012,36	117.089.517.435,98	68.667.678.339,95	40.549.559.853,76
2	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto (II)	55.833.666.012,36	117.089.517.435,98	68.667.678.339,95	40.549.559.853,76
	Koreksi SILPA	40.873.695,28	0,00	0,00	0,00
	SILPA (I + II + Koreksi SILPA)	70.833.446.615,50	55.767.166.012,36	60.501.462.502,98	68.623.953.339,95

1) Pendapatan Daerah

Berdasarkan data di atas terdapat kecenderungan kenaikan realisasi pendapatan dari tahun ke tahun. Gambaran realisasi PAD selama kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi PAD tahun 2020-2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pajak Daerah	113.895.107.808,00	66.962.734.049,00	41.932.337.963,00	41.851.859.057,00
2	Retribusi Daerah	47.649.857.636,55	31.582.851.300,38	21.903.986.884,37	28.022.861.162,30
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.602.949.070,93	7.035.424.452,66	8.105.470.875,52	9.035.624.225,76
4	Lain-lain PAD yang sah	181.588.597.871,85	203.881.448.632,77	182.552.700.456,61	141.981.530.673,93
Jumlah		350.536.512.385,33	309.462.458.434,81	254.494.496.179,50	220.891.875.118,99

Pajak Daerah dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan khususnya pajak hotel dan restoran pajak hiburan serta Pajak Air Tanah yang merupakan sumber pendapatan pajak daerah di kawasan wisata Nusa Penida. Akibat pemulihan ekonomi dan berlalunya pandemi *Covid-19* kondisi ekonomi yang berangsur membaik menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat drastis. Sedangkan PBB-P2 serta BPHTB realisasinya tidak mencapai yang ditetapkan

2) Belanja Daerah

Gambaran realisasi belanja dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan belanja terkait. Secara ringkas uraian realisasi belanja selama 4 tahun terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Belanja 2020-2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.043.731.802.665,44	958.970.417.187,11	938.286.447.194,87	847.851.445.584,50
2	Belanja Modal	188.380.556.196,77	130.873.281.726,32	88.144.468.384,03	69.180.295.589,00
3	Belanja Tak Terduga	2.940.474.524,26	6.615.770.807,00	7.915.531.093,00	35.941.299.403,00
4	Belanja Transfer	122.594.344.451,00	112.744.082.696,00	121.843.707.620,00	123.834.958.519,00
Jumlah		1.355.627.177.837,47	1.209.203.552.416,43	1.154.190.154.291,90	1.076.807.999.095,50

Tabel diatas menunjukkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami kenaikan setiap tahun, dimana hal ini telah sesuai dengan keputusan/kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan belanja modal dan belanja tak terduga berfluktuasi setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya dana.

3) Pembiayaan

Ringkasan realisasi pembiayaan dalam empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan 2020-2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penerimaan	55.833.666.012,36	117.089.517.435,98	68.667.678.339,95	40.549.559.853,76
2	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Bersih		55.833.666.012,36	117.089.517.435,98	68.667.678.339,95	40.549.559.853,76

Pada Tahun Anggaran 2023 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp55.833.666.012,36 dari yang dirancang sebesar Rp55.825.666.012,00. Realisasinya terdiri dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp55.767.166.012,36 dan penerimaan kembali pinjaman daerah dalam bentuk pengembalian penyertaan modal yang sudah jatuh tempo sebesar Rp66.500.000,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak dirancang dan tidak ada realisasi.

c. Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

1) PAD terhadap Belanja

Perbandingan PAD terhadap jumlah Belanja (selain Belanja Transfer) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja (Tanpa Transfer)}} = \frac{350.536.512.385,33}{1.233.032.833.386,47} \times 100\% = 28,43\%$$

Capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung hanya mampu mendanai belanja selain Belanja Transfer sebesar 28,43%. Dengan demikian sisanya atau sebesar 71,57% dibiayai dari Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Capaian nilai perbandingan tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 yang hanya mencapai 24,22%.

2) PAD terhadap Belanja dan Transfer

Perbandingan PAD terhadap jumlah Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja + Transfer}} = \frac{350.536.512.385,33}{1.355.627.177.837,47} \times 100\% = 25,86\%$$

Capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung hanya mampu mendanai Belanja dan Transfer sebesar 25,86%. Dengan demikian sisanya atau sebesar 74,14% dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Capaian nilai perbandingan Tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 yang hanya mencapai 25,59%.

3) PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{350.536.512.385,33}{1.043.731.802.665,44} \times 100\% = 33,58\%$$

Capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung hanya mampu mendanai Belanja Operasi sebesar 33,58%. Dengan demikian sisanya atau sebesar 66,42% dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini berarti bahwa PAD belum dapat mencukupi kebutuhan kegiatan Belanja Operasi pelaksanaan pemerintahan. Capaian nilai

perbandingan Tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 yang hanya mencapai 32,27%.

4) PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah Belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + BHP+BHBP}}{\text{Belanja}} = \frac{454.330.734.141,33}{1.355.627.177.837,47} \times 100\% = 33,51\%$$

Capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan Belanja sebesar 33,51%. Dengan demikian sisanya atau sebesar 66,49% dibiayai dari Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Klungkung baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Capaian nilai perbandingan Tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 yang hanya mencapai 27,49%.

5) PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah Belanja Operasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + BHP + BHBP}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{454.330.734.141,33}{1.043.731.802.665,44} \times 100\% = 43,53\%$$

Capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu untuk memenuhi Belanja Operasi sebesar 43,53%. Dengan demikian sisanya atau sebesar 56,47% dibiayai dari Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Klungkung baik yang dipungut sendiri maupun melalui Pemerintah Pusat belum dapat memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah. Capaian nilai perbandingan tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 yang hanya mencapai 34,66%.

Berdasarkan seluruh perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi masih cukup besar. Akan tetapi, hal positif yang dapat diperoleh adalah bahwa ada kemampuan PAD terhadap belanja daerah dari tahun-tahun sebelumnya, di Tahun 2023 ini sudah mengalami kenaikan.

Dengan melihat kondisi kemampuan keuangan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung dari tahun ke tahun berusaha terus meningkatkan upaya-upaya intensifikasi serta ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar semakin mandiri. Selain itu juga untuk menentukan arah kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka mendukung tercapainya upaya tersebut.

d. Capaian Kinerja Keuangan TA 2023

Berikut capaian kinerja keuangan atas belanja langsung yang dituangkan melalui program kegiatan, anggaran, dan realisasi program dalam APBD tahun

2023 dapat dirangkum dalam ringkasan capaian realisasi keuangan program berikut ini:

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Keuangan atas Belanja Langsung pada APBD Tahun 2023

No.	Uraian Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	734.480.498.552,00	701.272.544.881,90	(33.207.953.670,10)	95,48
2	Program Pengelolaan Pendidikan	61.795.375.774,00	59.323.272.059,13	(2.472.103.714,87)	96,00
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.623.084.900,00	1.413.743.432,00	(209.341.468,00)	87,10
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.327.960.200,00	14.143.103.328,94	(184.856.871,06)	98,71
5	Program Pengembangan Kurikulum	74.605.900,00	73.248.500,00	(1.357.400,00)	98,18
6	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	6.772.000,00	6.700.000,00	(72.000,00)	98,94
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75.760.956.413,00	68.823.610.492,91	(6.937.345.920,09)	90,84
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.175.406.296,00	7.825.362.521,00	(350.043.775,00)	95,72
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	426.003.750,00	372.816.500,00	(53.187.250,00)	87,51
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	584.240.200,00	540.747.450,00	(23.492.750,00)	95,84
11	Program Pengembangan Perumahan	101.498.100,00	1.475.200,00	(100.022.900,00)	1,45
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.662.202.678,00	1.349.717.315,00	(312.485.363,00)	81,20
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	233.037.018,00	231.936.818,00	(1.100.200,00)	99,53
14	Program Kawasan Permukiman	50.659.400,00	49.992.900,00	(666.500,00)	98,68
15	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	9.746.800,00	9.128.722,00	(618.078,00)	93,66
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.701.519.906,00	2.701.445.406,00	(74.500,00)	100,00
17	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	6.627.300,00	6.545.600,00	(81.700,00)	98,77
18	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	430.261.250,00	427.447.750,00	(2.813.500,00)	99,35
19	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	12.724.351.033,00	10.060.576.167,00	(2.663.774.866,00)	79,07
20	Program Penyelenggaraan Jalan	78.232.976.527,00	49.737.519.964,00	(28.495.456.563,00)	63,58
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	53.282.350,00	30.316.195,00	(22.966.155,00)	56,90
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	706.892.696,00	663.714.008,00	(43.178.688,00)	93,89
23	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.685.151.241,00	2.595.600.532,00	(89.550.709,00)	97,39
24	Program Penanggulangan Bencana	870.339.657,00	749.748.062,00	(120.591.595,00)	86,14
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.922.501.740,00	2.738.715.477,00	(183.786.263,00)	93,71
26	Program Pemberdayaan Sosial	5.185.878.320,00	4.944.035.358,00	(241.842.962,00)	95,34
27	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	91.588.150,00	71.610.625,00	(19.977.525,00)	78,19
28	Program Perlindungan Perempuan	89.504.600,00	63.539.600,00	(25.965.000,00)	70,99

No.	Uraian Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
29	Program Rehabilitasi Sosial	635.271.696,00	523.144.186,00	(112.127.510,00)	82,35
30	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	12.746.750,00	12.416.370,00	(330.380,00)	97,41
31	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	267.027.224,00	266.328.574,00	(698.650,00)	99,74
32	Program Pemenuhan Hak Anak (Pna)	57.487.960,00	52.994.260,00	(4.493.700,00)	92,18
33	Program Penanganan Bencana	442.149.700,00	208.746.800,00	(233.402.900,00)	47,21
34	Program Perlindungan Khusus Anak	13.388.350,00	13.248.650,00	(139.700,00)	98,96
35	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	8.931.600,00	7.772.000,00	(1.159.600,00)	87,02
36	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	618.030.800,00	595.832.600,00	(22.198.000,00)	96,41
37	Program Penempatan Tenaga Kerja	909.812.159,00	416.586.900,00	(493.225.259,00)	45,79
38	Program Hubungan Industrial	63.642.850,00	45.632.650,00	(18.010.200,00)	71,70
39	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	88.623.250,00	81.714.750,00	(6.908.500,00)	92,20
40	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	64.008.416,00	44.331.066,00	(19.677.350,00)	69,26
41	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.623.410.800,00	678.609.085,00	(3.944.801.715,00)	14,66
42	Program Penanganan Kerawanan Pangan	124.241.450,00	2.694.900,00	(121.546.550,00)	2,17
43	Program Pengawasan Keamanan Pangan	13.090.350,00	12.946.800,00	(143.550,00)	98,90
44	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	40.846.800,00	40.497.000,00	(349.800,00)	99,14
45	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	109.111.950,00	100.536.200,00	(8.575.750,00)	92,14
46	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.715.815.848,00	1.602.755.048,00	(113.060.800,00)	93,41
47	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.679.698.714,00	1.577.694.394,00	(102.204.320,00)	93,92
48	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	10.853.900,00	8.202.400,00	(2.651.500,00)	75,57
49	Program Penetapan Tanah Ulayat	333.443.434,00	112.887.424,00	(220.556.010,00)	33,86
50	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	224.890.020,00	220.999.020,00	(3.891.000,00)	98,27
51	Program Pengelolaan Persampahan	14.731.219.756,00	13.364.063.532,00	(1.367.156.224,00)	90,72
52	Program Pendaftaran Penduduk	6.797.550,00	6.304.850,00	(492.700,00)	92,75
53	Program Pencatatan Sipil	1.176.695.450,00	1.126.424.350,00	(50.271.100,00)	95,73
54	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	68.851.000,00	66.135.200,00	(2.715.800,00)	96,06
55	Program Pengendalian Penduduk	164.695.600,00	152.941.360,00	(11.754.240,00)	92,86
56	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.042.050.774,00	1.124.309.094,00	(917.741.680,00)	55,06
57	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	9.706.802,00	9.671.950,00	(34.852,00)	99,64
58	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.814.682.042,00	1.631.762.518,00	(182.899.524,00)	89,92
59	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.129.737.818,00	1.082.609.930,00	(47.127.888,00)	95,83
60	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.972.912.684,00	3.928.065.051,00	(44.847.633,00)	98,87
61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	9.458.586.431,00	8.518.948.125,00	(939.638.306,00)	90,07

No.	Uraian Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
62	Program Pengelolaan Pelayaran	8.640.480.209,00	8.399.536.366,00	(240.943.843,00)	97,21
63	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.864.800,00	2.370.530,00	(494.270,00)	82,75
64	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.234.674.050,00	1.213.682.295,00	(20.991.755,00)	98,30
65	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	33.954.813,00	33.212.354,00	(742.459,00)	97,81
66	Program Aplikasi Informatika	3.819.059.184,00	3.413.373.005,00	(405.686.179,00)	89,38
67	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	524.983.512,00	382.361.978,00	(142.621.534,00)	72,83
68	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	25.127.650,00	24.617.300,00	(510.350,00)	97,97
69	Program Penzinan Dan Pendaftaran Perusahaan	39.138.950,00	31.159.725,00	(7.979.225,00)	79,61
70	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	148.091.460,00	144.836.712,00	(3.254.748,00)	97,80
71	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	87.271.146.401,00	85.144.419.901,00	(2.126.726.500,00)	97,56
72	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	52.126.250,00	15.625.400,00	(36.300.850,00)	30,36
73	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	5.733.400,00	5.703.500,00	(29.900,00)	99,48
74	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	474.946.000,00	466.142.750,00	(8.803.250,00)	98,15
75	Program Pengembangan Ekspor	203.242.500,00	202.756.250,00	(486.250,00)	99,76
76	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	166.332.104,00	90.660.820,00	(75.671.284,00)	54,51
77	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	225.394.400,00	221.745.500,00	(3.648.900,00)	98,38
78	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	56.254.550,00	27.101.700,00	(29.152.850,00)	48,18
79	Program Pengembangan Umkm	922.452.155,00	814.052.520,00	(108.399.635,00)	88,25
80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	179.273.762,00	173.908.812,00	(5.364.950,00)	97,01
81	Program Promosi Penanaman Modal	161.406.900,00	154.415.952,00	(6.990.948,00)	95,67
82	Program Pelayanan Penanaman Modal	175.016.348,00	170.349.198,00	(4.667.150,00)	97,33
83	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	421.467.050,00	351.006.250,00	(70.460.800,00)	83,28
84	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	30.786.962,00	30.527.162,00	(259.800,00)	99,16
85	Program Pengembangan Kebudayaan	12.793.422.374,00	12.611.554.134,00	(181.868.240,00)	98,58
86	Program Pembinaan Sejarah	74.498.420.706,00	72.934.730.031,00	(1.563.690.675,00)	97,90
87	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	80.710.050,00	72.979.120,00	(7.730.930,00)	90,42
88	Program Pengelolaan Permuseuman	1.275.629.336,00	1.238.265.146,00	(37.364.190,00)	97,07
89	Program Pembinaan Perpustakaan	111.454.986,00	101.563.992,00	(9.890.994,00)	91,13
90	Program Pengelolaan Arsip	138.838.400,00	121.960.349,00	(16.858.051,00)	87,86
91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	18.234.463.445,00	13.955.802.815,00	(4.278.660.630,00)	76,54
92	Program Pemasaran Pariwisata	2.312.397.448,00	2.054.313.430,00	(258.084.018,00)	88,84
93	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	63.086.000,00	18.319.400,00	(44.766.600,00)	29,04
94	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi	1.483.579.750,00	1.230.498.198,00	(253.081.552,00)	82,94

No.	Uraian Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Kreatif				
95	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	776.528.564,00	651.082.418,00	(125.446.146,00)	83,85
96	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	490.680.812,00	472.144.612,00	(18.536.200,00)	96,22
97	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	549.970.475,00	445.613.830,00	(104.356.645,00)	81,03
98	Program Penyuluhan Pertanian	89.451.800,00	88.205.200,00	(1.246.600,00)	98,61
99	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.853.516.952,00	2.543.904.357,00	(309.612.595,00)	89,15
100	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.029.005.470,00	791.428.625,00	(237.576.845,00)	76,91
101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	17.982.437.464,00	17.124.665.403,00	(857.772.061,00)	95,23
102	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	412.355.600,00	386.267.740,00	(26.087.860,00)	93,67
103	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	498.684.112,00	179.010.969,00	(319.673.143,00)	35,90
104	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	133.011.045.264,00	129.783.540.232,26	(3.247.505.031,74)	97,56
105	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	629.978.462,00	538.999.840,00	(90.978.622,00)	85,56
106	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.079.835.903,00	1.721.688.800,00	(358.147.103,00)	82,78
107	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.256.465.896,00	2.054.691.707,00	(201.774.189,00)	91,06
108	Program Kepegawaian Daerah	1.504.522.300,00	456.657.114,00	(1.047.865.186,00)	30,35
109	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.086.828.350,00	1.032.595.950,00	(54.232.400,00)	95,01
110	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.224.141.324,00	1.508.592.642,00	(2.715.548.682,00)	35,71
111	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	390.794.324,00	117.244.524,00	(273.549.800,00)	30,00
112	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.735.215.236,00	3.778.293.765,33	(956.921.470,67)	79,79
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.792.550.110,00	2.631.685.896,00	(160.864.414,00)	94,24
114	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.231.000,00	11.646.650,00	(3.584.350,00)	76,47
115	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.439.700,00	51.237.150,00	(4.202.550,00)	92,42
116	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.332.550,00	39.036.100,00	(2.296.450,00)	94,44
117	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	1.155.941.850,00	1.108.165.075,00	(47.776.775,00)	95,87
118	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	13.501.360.795,00	13.499.243.795,00	(2.117.000,00)	99,98
119	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.777.450,00	18.289.450,00	(488.000,00)	97,40
120	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	92.204.950,00	90.742.971,00	(1.461.979,00)	98,41
121	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	914.118.485,00	802.688.725,00	(111.429.760,00)	87,81
TOTAL		1.461.599.963.582,00	1.355.627.177.837,47	(105.972.776.744,53)	92,75

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- a. Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 terealisasi sebesar 97,50%. Apabila dilihat per jenis pendapatan, dapat diketahui bahwa hampir seluruh target pendapatan dapat terealisasi bahkan ada yang realisasinya melebihi target anggaran. Hal ini disebabkan karena mulai bangkitnya sektor pariwisata setelah berakhirnya pandemi *Covid-19*, diantaranya meningkatnya kunjungan wisatawan khususnya ke Pulau Nusa Penida yang menyumbang pemenuhan capaian realisasi pendapatan terutama pajak hotel dan restoran bahkan sampai melebihi target yang dianggarkan. Meskipun demikian, masih ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi target pendapatan, yaitu belum tertibnya pelaku usaha dalam melaporkan hasil penjualan/usahanya dengan alasan masih merasakan dampak dari pandemi *Covid-19* tahun-tahun sebelumnya.
- b. Belanja Daerah selama tahun 2023 telah mampu memperoleh capaian realisasi sebesar 92,75% dari anggaran, dengan uraian sebagian besar mampu terealisasi hingga mencapai 90% lebih, dan masih ada yang realisasinya di bawah 75%, yaitu:

1. Belanja Modal (BM) Tanah, dengan capaian realisasi hanya sebesar 0,47%. Belanja Modal Tanah yang dianggarkan adalah belanja dalam rangka tertib administrasi pengelolaan aset daerah melalui proses pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Klungkung yang diajukan ke BPN. Tahun 2023 Belanja modal tanah salah satunya dianggarkan di DLHP, yaitu pengajuan proses sertifikat atas tanah jalan baru dari kegiatan TMMD di Kecamatan Dawan dan Banjarangkan. Akan tetapi, dalam realisasinya pembukaan jalan baru tersebut masih terkendala pembebasan lahan milik warga sehingga proses pengusulan sertifikat belum terealisasi.

Selain di DLHP, terdapat juga anggaran BM Tanah pada DPUPRKP, yaitu anggaran untuk biaya appraisal atas pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Lembongan – Ceningan. Akan tetapi, anggaran sebesar Rp100.000.000,00 tersebut tidak terealisasi karena ternyata biaya appraisal yang harus dibayarkan berburengan dengan biaya pengadaan tanahnya, sedangkan pada APBD tahun 2023 biaya pengadaan tanah tersebut belum dianggarkan.

2. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi hanya mampu terealisasi sebesar 49,87%. Rendahnya capaian realisasi keuangan ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang menggunakan sumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali yang belum bisa dibayarkan karena dana BKK Provinsi Bali ditunda pembayarannya ke Kabupaten dan dialokasikan kembali di tahun 2024, sebagaimana sesuai surat dari Pj. Gubernur Bali Nomor: B.13.900/7359/PADFE/BPKAD tanggal 20 September 2023. Padahal, secara fisik kegiatan tersebut sudah selesai 100%, namun karena pembayaran keuangannya belum bisa dilakukan 100%, maka sisa yg belum terbayar dicatat sebagai utang belanja di tahun 2023.

3.3 Ikhtisar *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

3.3.1 Bidang Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah untuk kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, serta pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional 57 PAUD Negeri, 133 SD Negeri/Inpres, 22 SMP Negeri, 1 pendidikan kesetaraan dan 1 Perpustakaan Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung. Juga berdampak kepada tenaga pendidik meliputi guru 2.300 orang dan jumlah peserta didik sebanyak 29.651 siswa.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Induk TA 2023 Kabupaten Klungkung dialokasikan sebesar Rp395.774.672.674,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp1.391.014.394.183,00 atau 28,45%

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Klungkung dialokasikan senilai Rp396.795.592.726,00 dari nilai belanja daerah Rp1.461.599.953.582,00 atau 27,15%.

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang pendidikan TA 2023:

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

Komponen Perhitungan		Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
a	Urusan Bidang Pendidikan:	287.055.030.671,00	277.744.650.082,07
	1) Belanja Operasi:	269.047.844.621,00	261.116.432.316,94
	a. Belanja pegawai,	206.312.928.927,00	200.004.839.999,00
	b. Belanja barang dan jasa,	48.006.275.694,00	46.319.317.061,94
	c. Belanja hibah,	13.918.440.000,00	13.996.775.266,00
	d. Belanja bantuan sosial,	810.200.000,00	795.500.000,00
	2) Belanja Modal:	18.007.186.050,00	16.628.217.765,13
b	Urusan Bidang Kebudayaan:	93.678.061.969,00	91.869.622.691,00
	1) Belanja Operasi:	93.595.003.969,00	91.787.628.241,00
	a. Belanja pegawai,	4.543.486.824,00	4.494.577.514,00
	b. Belanja barang dan jasa,	7.266.667.145,00	6.958.198.727,00
	c. Belanja hibah,	81.794.850.000,00	80.334.850.000,00
	d. Belanja bantuan sosial,	0,00	
	2) Belanja Modal:	83.058.000,00	81.996.450,00
c	Urusan Bidang Perpustakaan	111.454.986,00	111.454.986,00
	1 Belanja Operasi	103.954.986,00	103.954.986,00
	a. Belanja pegawai		
	b. Belanja barang dan jasa,	103.954.986,00	103.954.986,00
	c. Belanja hibah,		
	d. Belanja bantuan sosial,		
	2) Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00
d	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.951.045.100,00	15.556.846.760,49
	1) Belanja Operasi	15.813.414.300,00	15.419.873.240,94
	a. Belanja pegawai		
	b. Belanja barang dan jasa	3.563.414.300,00	3.169.873.240,94
	c. Belanja Hibah	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00
	d. Belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	137.630.800,00	136.973.520,00
Total Fungsi Pendidikan (a+b)		396.795.592.726,00	385.282.574.520,01
Total Belanja Daerah		1.461.599.953.582,00	1.355.627.202.837,47

Komponen Perhitungan	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	27,15 %	
Persentase realisasi fungsi Pendidikan		28,42%

3.3.2 Bidang Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Daerah dan Puskesmas, pembangunan gedung baru RSUD Daerah, rehabilitasi dan renovasi gedung puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD Daerah dan Puskesmas.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional 2 RSUD, 9 Puskesmas, 20 Puskesmas pembantu, 16 klinik pratama, 4 Pos Kesehatan Desa. Tenaga kesehatan meliputi dokter 168 orang, dokter gigi 32 orang, perawat 560 orang, perawat gigi 24 orang, bidan 245 orang, dan petugas kesehatan lainnya sebanyak 255 orang.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Induk TA 2023 Kabupaten Klungkung dialokasikan sebesar Rp322.143.472.286,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp1.097.976.960.257,00 atau 29,34%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Klungkung dialokasikan sebesar Rp365.820.269.413,00 dari nilai Belanja Daerah diluar Gaji ASN sebesar Rp1.170.536.278.843,00 atau 31,25%.

Peningkatan alokasi anggaran belanja fungsi kesehatan disebabkan adanya peningkatan anggaran belanja pegawai dan belanja lainnya sebagai akibat kenaikan target pendapatan BLUD serta penggunaan SiLPA BLUD Tahun Anggaran sebelumnya.

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang kesehatan TA 2023:

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan TA 2023

No.	Komponen Perhitungan		Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan:	361.649.167.879,00	342.477.532.160,41
		1) Belanja Operasi:	348.086.374.216,00	330.122.401.752,50
		a. Belanja pegawai:	145.268.960.336,00	139.279.462.759,00
		b. Belanja barang dan jasa:	201.401.579.880,00	189.427.104.993,50
		c. Belanja hibah:	1.415.834.000,00	1.415.834.000,00
		d. Belanja bantuan sosial:	0,00	0,00
		2) Belanja Modal:	13.562.793.663,00	12.355.130.407,91
	b.	Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	4.171.101.534,00	3.133.783.895,00
		1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1 Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	18.000.000,00	14.012.360,00
		2 Sub Kegiatan Pembinaan dan	64.200.000,00	58.839.000,00

No.	Komponen Perhitungan		Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
		pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga		
	3	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	101.209.774,00	97.743.974,00
	4	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	130.182.800,00
	5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	52.000.000,00	39.700.000,00
	6	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	144.450.000,00	113.696.420,00
	7	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	60.684.000,00
	8	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28.800.000,00	25.949.900,00
	9	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	932.790.000,00	141.583.000,00
	10	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000,00	76.550.000,00
	11	Sub Kegiatan Pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitasi kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	17.700.000,00	16.411.200,00
	12	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	77.500.000,00	69.750.000,00
	13	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00
	14	Sub Kegiatan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	360.000.000,00	235.280.000,00
	15	Sub Kegiatan Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1.062.751.760,00	1.051.601.441,00
	2)	Belanja Tidak Terduga		
2	Total Fungsi Kesehatan (a+b)		366.820.269.413,00	345.611.316.056,41
3	Total Belanja Daerah		1.461.599.953.582,00	1.335.627.177.837,47
4	Gaji ASN		291.063.674.739,00	277.039.384.358,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1.170.536.278.843,00	1.058.587.793.479,47
6	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		31,25 %	
7	Persentase realisasi fungsi Kesehatan			32,65%

3.3.3 Bidang Infrastruktur

Dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).

Belanja infrastruktur daerah Kabupaten Klungkung dialokasikan pada beberapa program yang menunjang percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi terutama terkait dengan infrastruktur pada fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur penunjang destinasi pariwisata baik yang ada di Kepulauan Nusa Penida maupun di Klungkung daratan, infrastuktur fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi, persampahan

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang infrastruktur TA 2023:

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur TA 2023

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BELANJA MODAL				
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	RSUD Gema Santi Nusa Penida	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	394.160.000,00	330.180.440,00
		Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.631.600.000,00	1.389.054.618,00
		Rumah Sakit Umum Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.260.561.064,00	2.260.561.064,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	12.065.219.221,00	9.689.217.999,00
		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	9.268.422.840,00	8.062.186.799,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.062.614.000,00	188.497.219,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Program Pengelolaan Persampahan	5.060.000.000,00	3.980.767.310,00
		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	86.100.000,00	86.100.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustri	Program Pengembangan Ummk	221.007.109,00	219.714.338,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	63.600.000,00	0,00
		Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	14.541.029.775,00	10.792.129.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustri	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	77.409.633.500,00	76.497.936.458,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	209.328.800,00	0,00
		Bagian Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79.712.000,00	0,00
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98.328.000,00	97.711.795,00
		Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.752.925,00

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Kelurahan Semarapura Kangin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.362.843,00
		Kecamatan Nusa Penida	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.699.000.000,00	1.341.500.557,00
		RSUD Gema Santi Nusa Penida	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	167.000.000,00	5.844.150,00
		Rumah Sakit Umum Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.491.097.000,00	1.490.951.000,00
		Kecamatan Banjarangkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.698.200.038,00	1.283.651.918,00
		Kecamatan Dawan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.491.000.000,00	1.999.168.908,00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Kelurahan Semarapura Kaja	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	26.000.000,00	24.623.812,00
		Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	39.104.000,00	38.953.816,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	157.440.000,00	156.395.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Program Pengelolaan Persampahan	3.000.000,00	0,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	540.000.000,00	333.695.400,00
		RSUD Gema Santi Nusa Penida	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000,00	2.838.825,00
		UPTD Puskesmas Klungkung I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.000.000,00	16.943.040,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Penyelenggaraan Jalan	69.723.380.000,00	41.606.436.583,00
		Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	192.920.000,00	188.383.000,00
II	BELANJA PEMELIHARAAN				
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Dinas Kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah	85.000.000,00	74.900.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	98.880.000,00	97.516.927,00
		Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	1.460.000,00	1.460.000,00
		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	88.594.879,00	0,00
		Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Pemuseuman	3.280.000,00	53.280.000,00
		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	114.800.000,00	113.779.923,00
		Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	8.880.000,00	8.880.000,00
		Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	411.520.000,00	341.590.282,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustri	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.931.752.082,00	1.719.860.737,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	18.025.290,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	0,00
		Bagian Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	651.921.769,00	622.373.227,00
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	106.000.000,00	105.173.471,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	888.000,00	0,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.427.100,00	48.865.704,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	54.791.998,00
		Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.800.000,00	0,00
		Kecamatan Klungkung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.320.000,00	0,00
		Kecamatan Nusa Penida	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000,00	5.300.000,00
		Kelurahan Semarapura Kauh	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.400.000,00	10.400.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69.160.000,00	65.619.360,00
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	639.270.996,00	558.703.543,00
2	Jalan/Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Penyelenggaraan Jalan	5.858.410.210,00	5.835.531.366,00
		Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	290.000.000,00	285.790.751,00
3	Fasilitas Irigasi/Air Limbah/Sanitasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	424.000.000,00	421.219.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.000.000,00	1.000.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	223.700.000,00	222.918.000,00
		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	20.000.000,00	19.819.300,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustri	Program Pengembangan Umkm	45.000.000,00	44.955.000,00
		Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	29.000.000,00	0,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustri	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000,00	34.842.927,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.900.000,00	4.566.500,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00
		Bagian Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83.000.000,00	63.633.500,00
		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	15.967.000,00
4	Fasilitas Lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	Program Kepegawaian Daerah	170.000.000,00	169.413.195,00
		Dinas Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	4.380.000,00	4.380.000,00

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalia	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	6.897.360,00	6.890.381,00
		Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	188.038.360,00	94.810.514,00
		RSUD Gema Santi Nusa Penida	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	260.000.000,00	217.308.928,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	152.000.000,00	45.288.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	37.600.000,00	18.573.600,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	30.000.000,00	0,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.500.000,00	1.500.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	24.190.000,00	12.700.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	28.994.720,00	28.585.250,00
		Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	2.438.650.000,00	2.423.164.069,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	55.500.000,00	4.920.000,00
		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	41.489.879,00	0,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	990.000,00	990.000,00
		Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	66.870.000,00	66.870.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Program Pengelolaan Persampahan	405.961.690,00	367.201.100,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.290.000,00	0,00
		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	61.300.000,00	59.300.000,00
		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.700.000,00	4.060.000,00
		Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	59.904.720,00	38.396.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustri	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	139.766.800,00	90.083.650,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.413.752,00	23.256.500,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.634.720,00	31.230.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	71.726.594,00	50.845.470,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	141.017.325,00	136.405.977,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.163.752,00	26.442.292,00
		Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.326.598,00	0,00
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.000.000,00	26.000.000,00

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Bagian Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	456.291.681,00	301.588.845,00
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	71.096.800,00	70.935.000,00
		Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.497.771,00	35.497.771,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.737.360,00	34.062.000,00
		Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94.624.160,00	52.830.050,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.182.080,00	32.341.500,00
		Dinas Ketenagakerjaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.487.360,00	20.281.735,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.244.720,00	19.569.750,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.954.308,00	47.798.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.997.360,00	46.260.710,00
		Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.684.720,00	30.940.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	167.040.308,00	121.038.681,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79.337.211,00	70.480.000,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.012.855,00	15.741.042,00
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	103.489.440,00	96.460.000,00
		Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64.036.771,00	63.078.000,00
		Dinas Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.260.237,00	32.815.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.992.635,00	73.347.534,00
		Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	132.179.203,00	76.436.050,00
		Kecamatan Banjarangkan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.167.771,00	21.532.000,00
		Kecamatan Dawan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.527.360,00	20.520.000,00
		Kecamatan Klungkung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.915.131,00	33.116.236,00
		Kecamatan Nusa Penida	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.984.514,00	38.322.198,00
		Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.831.233,00	45.380.000,00
		Saluran Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	91.582.253,00	82.737.831,00
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	249.428.801,00	113.450.890,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	Program Penyelenggaraan Jalan	16.860.000,00	16.827.600,00

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	192.242.080,00	187.001.725,00
		Kecamatan Banjarangkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.960.000,00	3.960.000,00
		Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	15.000.000,00	0,00
		Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	10.800.000,00	10.000.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	17.277.154,00	745.900,00
III	BELANJA HIBAH				
1	Fasilitas lainnya	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	9.501.000.000,00	9.481.000.000,00
		Dinas Kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah	68.845.850.000,00	68.845.850.000,00
IV	BELANJA BANTUAN SOSIAL				
1	Gedung dan bangunan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Program Pemberdayaan Sosial	3.850.000.000,00	3.774.630.500,00
V	BELANJA BANTUAN KEUANGAN				
1	Gedung dan bangunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Wajib Yang Bersumber Dari DTU Yang Ditetapkan Sesuai Arah Kebijakan Penggunaan DTU Dalam UU Mengenai APBN Tahun Anggaran Berkenaan				307.870.701.928,00	261.973.512.097,00
Presentase Belanja Wajib Yang Bersumber Dari DTU Yang Ditetapkan Sesuai Arah Kebijakan Penggunaan DTU Dalam UU Mengenai APBN Tahun Anggaran Berkenaan				23,02%	
Presentase Realisasi Belanja Wajib Yang Bersumber Dari DTU					85,08%

3.3.4 Bidang Pengawasan

Mulai Tahun Anggaran 2020 telah diberlakukan batas minimal alokasi anggaran untuk pengawasan internal atau inspektorat di pemerintah daerah (Pemda). Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pengalokasian anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat APIP melalui program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan sehingga dapat memaksimalkan pengawasan di internal Pemerintah Daerah.

Untuk pemerintah kabupaten/kota dengan nilai APBD di atas Rp1 triliun sampai dengan Rp2 triliun maka anggaran pengawasan ditetapkan sebesar minimal 0,75% dari total belanja.

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang pengawasan TA 2023:

Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Pengawasan TA 2023

Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Pengawasan		Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada Inspektorat	6.440.296.872,00	4.440.679.065,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.000.812,00	29.678.712,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.239.766.025,00	3.234.300.452,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	1.669.965.620,00	311.610.144,00

Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Pengawasan		Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Perangkat Daerah		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.499.584.415,00	865.089.757,00
b	Program Penyelenggaraan Pengawasan Pada Inspektorat	4.224.141.324,00	1.508.592.642,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.695.264.312,00	781.460.662,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.528.877.012,00	727.131.980,00
c	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	390.794.324,00	117.244.524,00
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	390.794.324,00	117.244.524,00
Jumlah Fungsi Pengawasan		11.055.232.520,00	6.066.516.231,00
Jumlah Anggaran Belanja		1.461.599.953.582,00	1.335.627.177.837,47
Persentase Anggaran Belanja Pengawasan		0,76 %	
Persentase Realisasi Belanja Pengawasan			0,45%

3.3.5 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Permendagri 27 tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan APBD TA 2023 maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia tersebut diatur untuk digunakan dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim), pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta penyelenggaraan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang pengembangan Sumber Daya Manusia TA 2023:

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pengembangan SDM TA 2023

No.	Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
a	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.253.806.572,00	5.089.564.608,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.298.000,00	6.674.450,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.920.778.820,00	4.795.579.458,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.406.500,00	2.076.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.323.252,00	285.234.700,00
b	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.504.522.300,00	456.657.114,00
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	880.084.400,00	64.758.110,00
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	337.409.000,00	150.296.240,00
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	287.028.900,00	241.602.764,00
c	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.256.465.896,00	2.054.691.707,00
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.256.465.896,00	2.054.691.707,00
Jumlah Belanja Pengembangan SDM		9.014.794.768,00	7.600.913.429,00
Jumlah Belanja Daerah		1.461.599.953.582,00	1.335.627.177.837,47
Persentase Anggaran Belanja Pengembangan SDM		0,62 %	
Persentase Realisasi Belanja Pengembangan SDM			0,57%

3.4 Ikhtisar Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan *Inflasi* Tahun 2023

Dalam rangka upaya penanganan inflasi sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 maka pemerintah daerah harus mengalokasikan Belanja Wajib sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.

Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:

- Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
- Penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
- Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil kebijakan dengan mengalokasikan anggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Penanganan Dampak Inflasi 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		42.268.250,00	14.666.200,00
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	42.268.250,00	14.666.200,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		45.059.650,00	38.364.450,00
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.059.650,00	38.364.450,00
Total		87.327.900,00	53.030.650,00

3.5 Ikhtisar Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan *Stunting* Tahun 2023

Untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023, dengan rincian kegiatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Penanganan *Stunting* TA 2023

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olah Raga Kabupaten Klungkung	13.542.800,00	13.326.800,00	98,41
	Program Pengelolaan Pendidikan	13.542.800,00	13.326.800,00	98,40
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.542.800,00	13.326.800,00	98,40
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	13.542.800,00	13.326.800,00	98,40
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung	2.031.288.100,00	1.077.203.450,00	53,03
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.031.288.100,00	1.077.203.450,00	53,03
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.031.288.100,00	1.077.203.450,00	53,03
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan	2.031.288.100,00	1.077.203.450,00	53,03

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kesehatan Gizi Masyarakat			
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung	2.857.609.656,00	2.856.017.778,00	99,94
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	101.311.400,00	101.043.400,00	99,74
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	101.311.400,00	101.043.400,00	99,74
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	101.311.400,00	101.043.400,00	99,74
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sisten Air Limbah	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00	100
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00	100
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00	99,99
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	9.746.800,00	9.128.722,00	93,66
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	9.746.800,00	9.128.722,00	93,66
	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	9.746.800,00	9.128.722,00	93,66
	Program Kawasan Permukiman	50.659.400,00	49.992.900,00	98,68
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.659.400,00	49.992.900,00	98,68
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	50.659.400,00	49.992.900,00	98,68
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	157.399.124,00	156.897.524,00	99,68
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	157.399.124,00	156.897.524,00	99,68
	Keg pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota, sub kegiatannya	157.399.124,00	156.897.524,00	99,68
	Sub Kegiatannya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	157.399.124,00	156.897.524,00	99,68
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung	66.195.400,00	64.412.300,00	98,80
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	40.846.800,00	40.497.000,00	99,14
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.846.800,00	40.497.000,00	99,14
	Program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	24.348.600,00	23.915.300,00	98,22
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	24.348.600,00	23.915.300,00	98,22
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5.155.500,00	5.005.200,00	97,08
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	19.193.100,00	18.910.100,00	98,53
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung	2.185.699.774,00	1.371.209.574,00	62,74

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	100
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Daerah Kabupaten/Kota	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	100
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	251.209.774,00	227.926.574,00	90,73
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	251.209.774,00	227.926.574,00	90,73
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	130.182.600,00	86,79
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	101.209.774,00	97.743.974,00	96,58
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	932.790.000,00	141.583.000,00	15,18
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	932.790.000,00	141.583.000,00	15,18
	Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	932.790.000,00	141.583.000,00	15,18
7	Kecamatan Klungkung	645.456.910,00	645.456.910,00	100
	Kelurahan Semarapura Kaja	97.200.610,00	97.200.610,00	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	97.200.610,00	97.200.610,00	100
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	97.200.610,00	97.200.610,00	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.200.610,00	97.200.610,00	100
	Kelurahan Semarapura Tengah	56.878.370,00	56.878.370,00	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	56.878.370,00	56.878.370,00	100
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	56.878.370,00	56.878.370,00	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	56.878.370,00	56.878.370,00	100
	Kelurahan Semarapura Kangin			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	119.391.640,00	119.391.640,00	100
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	119.391.640,00	119.391.640,00	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119.391.640,00	119.391.640,00	100
	Kelurahan Semarapura Klod	185.833.550,00	185.833.550,00	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	185.833.550,00	185.833.550,00	100
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	185.833.550,00	185.833.550,00	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	185.833.550,00	185.833.550,00	100
	Kelurahan Semarapura Kauh	6.651.000,00	6.651.000,00	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.651.000,00	6.651.000,00	100
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.651.000,00	6.651.000,00	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.651.000,00	6.651.000,00	100
	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	179.501.740,00	179.501.740,00	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	179.501.740,00	179.501.740,00	100

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	179.501.740,00	179.501.740,00	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	179.501.740,00	179.501.740,00	100
	TOTAL	7.956.191.764,00	6.184.524.336,00	77,73%

3.6 Ikhtisar Dana Desa Tahun 2023

Tahun 2023 Dana Desa diterima oleh 53 Desa di Kabupaten Klungkung dengan total realisasi penerimaan sebesar Rp47.843.257.000,00 yang diterima langsung di rekening Desa masing-masing.

Realisasi penerimaan Dana Desa sebesar Rp47.843.257.000,00 diantaranya dialokasikan penggunaannya untuk BLT Desa serta Program Ketahanan Pangan dan Hewani dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Penerimaan Dana Desa

No.	Uraian	Total Nilai (Rp)
1	Alokasi Dana Desa Untuk BLT Desa	7.175.000.000
2	Alokasi Dana Desa Untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani	11.598.676.589,60

Rincian penyaluran dan penggunaan dana desa masing-masing desa dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

3.7 Ikhtisar Dana BOSP Tahun 2023

Dana BOS

Selama Tahun 2023 Dana BOS diterima oleh sebanyak 136 Sekolah Dasar Negeri dan 22 Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan total realisasi penerimaan Dana BOS sebesar Rp28.795.594.047,00, dengan mekanisme transfer langsung dari pusat ke rekening Dana BOS masing-masing sekolah. Dari nilai penerimaan tersebut, telah digunakan sebesar Rp28.348.962.670,00. Berikut informasi mengenai realisasi penyaluran dan penggunaan Dana BOS Tahun 2023:

Tabel 3.8 Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS Tahun 2023

No.	Nama Sekolah	Realisasi Penyaluran Dana BOS TA 2023 (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana BOS TA 2023 (Rp)	Pengembalian <i>Regrouping</i> (Rp)	Sisa Dana BOS TA 2023 (Rp)
1	Sekolah Dasar (136 SD)	17.583.533.141,00	17.472.130.543,00	48.583.500,00	62.819.098,00
2	Sekolah Menengah Pertama (22 SMP)	11.212.060.906,00	10.876.832.127,00	0,00	335.228.779,00
	Jumlah Dana BOS SD dan SMP	28.795.594.047,00	28.348.962.670,00	48.583.500,00	398.047.877,00

Rincian Realisasi Penerimaan dan penggunaan Dana BOS masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Dana BOP

Tahun 2023 Dana BOP diterima oleh sebanyak 38 Sekolah PAUD dan 1 Sekolah PAUD Kesetaraan dengan total realisasi penerimaan Dana BOP PAUD sebesar Rp1.327.200.000,00 yang diterima langsung di rekening Dana BOP PAUD masing-masing sekolah dan telah digunakan sebesar Rp1.323.207.041,00. Berikut informasi mengenai realisasi penyaluran dan penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2023:

Tabel 3.9 Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2023

No.	Nama Sekolah	Realisasi Penyaluran Dana (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Sisa Kas (Rp)
1	BOP PAUD (38 PAUD)	1.651.834.787,00	1.654.772.912,00	1.545.658,28
2	BOP Kesetaraan (1 - UPTD SPNF SKB Kabupaten Klungkung	105.060.000,00	105.060.000,00	1,00
Total BOP PAUD dan Kesetaraan		1.756.894.787,00	1.759.832.912,00	1.545.659,28

Rincian Realisasi Penerimaan dan penggunaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berkewajiban untuk menyusun konsolidasi laporan keuangan entitas akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung TA 2023.

4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 38 Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- 9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 11) Dinas Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15) Dinas Kebudayaan;
- 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 17) Dinas Pariwisata;
- 18) Dinas Pertanian;
- 19) Dinas Ketenagakerjaan;
- 20) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan;
- 21) Bagian Hukum;
- 22) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- 23) Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 24) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 25) Bagian Umum;
- 26) Bagian Organisasi;
- 27) Sekretariat DPRD;
- 28) Kecamatan Klungkung;
- 29) Kecamatan Banjarangkan;
- 30) Kecamatan Nusa Penida;
- 31) Kecamatan Dawan;
- 32) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 33) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 34) Inspektorat;
- 35) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- 36) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 37) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- 38) Badan Riset dan Inovasi Daerah.

4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung maka pada tahun 2022 ada penambahan unit BLUD dari seluruh puskesmas di Kabupaten Klungkung, yaitu sebanyak 9 Puskesmas. Badan Layanan Umum Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 adalah:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung;
- 2) UPTD RSUD Gema Santi di Kecamatan Nusa Penida;
- 3) UPTD Puskesmas Klungkung I;
- 4) UPTD Puskesmas Klungkung II;

- 5) UPTD Puskesmas Banjarangkan I;
- 6) UPTD Puskesmas Banjarangkan II;
- 7) UPTD Puskesmas Dawan I;
- 8) UPTD Puskesmas Dawan II;
- 9) UPTD Puskesmas Nusa Penida I;
- 10) UPTD Puskesmas Nusa Penida II; dan
- 11) UPTD Puskesmas Nusa Penida III.

BLUD sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sebagai bahan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU Paragraf 4 menyatakan bahwa secara umum, Standar Akuntansi BLU mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecuali diatur tersendiri dalam PSAP. Dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga menganut prinsip antara lain Konsistensi yang menghendaki adanya perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal), sehingga BLUD menggunakan kebijakan akuntansi Kabupaten Klungkung.

4.1.4 Perusahaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki 2 perusahaan daerah yaitu:

- a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Panca Mahottama

Perumda Air Minum Panca Mahottama bertujuan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Klungkung. Penyertaan modal pada PDAM berdasarkan Perda Pendirian PDAM Kabupaten Klungkung yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Hak kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung adalah 100.

- b. Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK)

PDNKK dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73/M/Ek/II.a/124/74 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala. Sesuai Perda pendirian, PD Nusa Kertha Kosala merupakan perusahaan yang bergerak dalam segala bidang usaha antara lain perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, eksploitasi, jasa perdagangan, dan lain sebagainya. PDNKK 100 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menggunakan delapan prinsip yaitu:

- a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah basis akrual (*accrual basis*) untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada laporan keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas (*cash basis*), sehingga penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

b. Prinsip nilai historis (*historical cost*)

Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi (*realization*)

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*)

Informasi laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas (*periodicity*)

Periode akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah tahunan, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

f. Prinsip konsistensi

Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan prinsip konsistensi dalam bentuk perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Namun, tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam CALK.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- d. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- e. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- f. Pengungkapan pendapatan-LRA pada CaLK memuat penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- c. Belanja diakui pada saat:
 - 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- d. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- e. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- f. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan dijelaskan dalam CaLK.
- g. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- h. Pengungkapan belanja perlu mengungkapkan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- b. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;

- c. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- e. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- f. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- g. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- i. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer pada CaLK perlu menjelaskan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya, penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya, penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- c. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- g. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- h. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
- i. Pengungkapan pembiayaan memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan dan penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- a. Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Kebijakan akuntansi ini mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- c. Pengakuan kas dan setara kas pada saat penyusunan laporan keuangan yaitu kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang penetapan nomor rekening bendahara PD. Sedangkan setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.
- d. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e. Seluruh uang yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Klungkung dilaporkan dalam Neraca, dan dapat disajikan dalam kelompok aset lancar dan aset non lancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiurnya.
- d. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada seseorang dan/atau korporasi dan/entitas, yaitu pada saat:
 - 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi; dan
 - 3) Terdapat kelebihan pembayaran yg dilakukan Pemerintah Daerah kepada Pihak lain.
- e. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - 2) Jumlah Piutang dapat diukur.
- f. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - 3) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- g. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi yaitu kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
- h. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang tak tertagih piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang bukan pajak selain retribusi sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Pajak	< 1 tahun	Lancar	0,50%
	1-2 tahun	Kurang Lancar	10,00%

	2-5 tahun	Diragukan	50,00%
	> 5 tahun	Macet	100,00%
Retribusi	0-1 bulan	Lancar	0,50%
	1-3 bulan	Kurang Lancar	10,00%
	3-12 bulan	Diragukan	50,00%
	> 12 bulan	Macet	100,00%
Bukan Pajak Selain Retribusi	< jatuh tempo	Lancar	0,50%
	> 1 bulan surat tagihan pertama	Kurang Lancar	10,00%
	> 1 bulan surat tagihan kedua	Diragukan	50,00%
	> 1 bulan surat tagihan ketiga	Macet	100,00%

- i. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- j. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.
- c. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
 - 3) Pengakuan Beban Persediaan.
- d. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- e. Persediaan disajikan sebesar Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- f. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using perlu diungkapkan dalam CaLK.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- c. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

- d. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
- e. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya.
- f. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- g. Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi, jenis investasi, perubahan harga pasar, penurunan nilai investasi yang signifikan, investasi dinilai dengan nilai wajar, dan perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya.
- c. Aset tetap diakui:
 - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - 3) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - e) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara, kecuali Buku; dan
 - f) Memiliki nilai sebesar batas kapitalisasi ke atas.
 - 4) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat kekuasaannya berpindah.

- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unit dan atau nilai satuannya sebagai berikut:
- 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
 - 2) Aset tetap lainnya diatur sebagai berikut:
 - a) Barang bercorak budaya/kesenian sebesar Rp1.000.000,00 ke atas;
 - b) Hewan ternak sebesar Rp500.000,00 ke atas;
 - c) Tanaman sebesar Rp500.000,00 ke atas.
- e. Alat-Alat Kesehatan dan Buku tidak diberlakukan nilai minimum kapitalisasi, sepanjang memenuhi kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap.
- f. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.
- g. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.
- h. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- i. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan:
- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar 10 dari nilai perolehan aset tetap sebelumnya;
 - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa alat angkutan dan alat berat sebesar Rp5.000.000,00;
 - 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp3.500.000,00.
- j. Penambahan masa manfaat dari kapitalisasi pada tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Pemeliharaan dari Nilai Perolehan (%)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan	> 0 - 50	2
		> 50 - 100	5
		> 100	25
Jalan, irigasi, jaringan	Pemeliharaan	> 0 - 30	2
		> 30 - 45	5
		> 45 - 100	10
Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat	Pemeliharaan	> 0 - 25	1
		> 25 - 50	2
		> 50 - 75	5
		> 75 - 100	10
Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan	> 25 - 50	1
		> 50 - 75	3
		> 75 - 100	5

- k. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali untuk tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.
- l. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa memperhitungkan nilai residu. Dengan metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu

(berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai aset yang dapat disusutkan.

- m. Perhitungan beban penyusutan pada tahun perolehan aset dilakukan dengan mengakui penyusutan bulanan atas aset bersangkutan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan aset.
- n. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat 10 tahun.
 - 2) Peralatan dan Mesin Lainnya 5 tahun.
 - 3) Gedung dan Bangunan 25 tahun.
 - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 10 tahun.
 - 5) Aset tetap lainnya 5 tahun.
- o. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- p. Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.
- q. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap, harus direklasifikasi ke pos aset lainnya, sebelum ada SK Penghapusan, dengan nilai tercatatnya (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dan diungkapkan dalam CaLK.
- r. Pengungkapan aset tetap pada CaLK memuat dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, informasi penyusutan, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos KDP, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- b. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- d. Konstruksi Dalam Pengerjaan perlu mengungkap rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak dan konstruksi dan sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, Uang muka kerja yang diberikan, dan retensi.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b. Aset lainnya terdiri dari tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.
- c. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- d. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- e. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.
- g. Aset Tidak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- h. Aset Tidak Berwujud diakui jika:
 - 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas;
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- i. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- j. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
- k. Masa manfaat/umur ekonomis ditetapkan selama 5 tahun dan amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.
- l. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Aset Tidak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- m. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dan dalam proses penghapusan, dihentikan penyusutannya sejak direklasifikasi dari aset tetap.

- n. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

- a. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
- b. Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:
 - 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - 3) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
- c. Properti investasi diakui sebagai aset jika:
 - 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- d. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- e. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- f. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- g. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- h. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- i. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi *Treasury Deposit Facility* – Transfer Ke Daerah

- a. *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
- b. DBH dan/atau DAU serta remunerasi yang akan diterima secara nontunai melalui fasilitas TDF diakui sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur DBH dan/atau DAU serta remunerasi melalui fasilitas TDF.
- c. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, maka dicatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
- d. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah dari Rekening TDF-TKD dan telah disalurkan ke RKUD, maka dicatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).
- e. Ketika pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, TKD-TDF disajikan sebagai Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU-LO pada Laporan Operasional dan Aset Lainnya - Dana Transfer TDF pada Neraca.
- f. Ketika pokok DBH/DAU telah ditarik dari Rekening TKD-TDF dan telah disalurkan ke RKUD, TKD-TDF disajikan sebagai bagian Aset Lancar (Kas) serta Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran.
- g. Remunerasi atas DBH/DAU yang belum ditarik dan ditransfer ke RKUD disajikan sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF pada Neraca dan Lain-lain PAD yang Sah (Remunerasi Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum TDF-LO pada Laporan Operasional).

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- d. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- e. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PEK) adalah pungutan/potongan PEK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.

- f. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- g. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- h. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- i. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- j. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
- k. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- l. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- m. Bagian Lancar utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- n. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- o. Utang Beban, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- p. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- q. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
- r. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- s. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- t. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- u. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- v. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- w. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- x. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- y. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- z. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- aa. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.
- bb. Pengungkapan kewajiban meliputi saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

4.4.15 Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Peraturan Bupati dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar.
- b) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- d. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- e. Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- f. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.16 Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- d. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

- c. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- f. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- g. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- h. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- i. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- j. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- k. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.
- l. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- m. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- n. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada - harus diungkapkan pada CaLK.
- o. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena

itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

BAB V

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pada TA 2023.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.405.774.287.570,00 terealisasi sebesar Rp1.370.586.084.745,33 atau 97,50%, lebih rendah Rp35.188.202.824,67 dari anggarannya. Realisasi Tahun 2023 lebih tinggi Rp222.704.883.752,52 atau meningkat 19,40% dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2022.

Rincian realisasi pendapatan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	352.325.957.788,00	350.536.512.385,33	99,49	309.462.458.434,81
2	Pendapatan Transfer	1.053.249.934.803,00	1.019.842.353.786,00	96,83	838.345.455.096,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	198.394.979,00	207.218.574,00	104,45	73.287.462,00
	Jumlah	1.405.774.287.570,00	1.370.586.084.745,33	97,50	1.147.881.200.992,81

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan seluruh jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah yaitu dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2023 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada TA 2023 realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebesar Rp350.536.512.385,33 telah mencapai 99,49% lebih rendah Rp1.789.445.402,67 dari anggaran sebesar Rp352.325.957.788,00. Realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp41.074.053.950,52 atau 13,27% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp309.462.458.434,81, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Daerah – LRA	98.607.836.827,00	113.695.107.808,00	115,30	66.962.734.049,00
2	Retribusi Daerah – LRA	46.080.714.238,00	47.649.857.636,55	103,41	31.578.996.300,38
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.602.949.071,00	7.602.949.070,93	100,00	7.035.424.452,66
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	200.034.457.652,00	181.588.597.671,85	90,78	203.885.303.632,77
	Jumlah	352.325.957.788,00	350.536.512.385,33	99,49	309.462.458.434,81

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah TA 2023 sebesar Rp113.695.107.806,00 lebih tinggi Rp15.087.270.979,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp98.607.836.827,00 atau 115,30%.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2022 maka realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan 69,79% yaitu sebesar Rp46.732.373.757,00. Hal tersebut dipengaruhi akibat mulai pulihnya sektor pariwisata khususnya di Nusa Penida. Meningkatnya kunjungan wisatawan berkontribusi atas capaian realisasi pajak hotel dan pajak restoran Tahun 2023.

Pendapatan pajak daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	25.997.026.325,00	34.670.921.791,00	133,36	12.882.633.137,00
2	Pajak Restoran	26.196.394.249,00	36.528.728.221,00	139,44	11.946.640.405,00
3	Pajak Hiburan	343.692.450,00	683.787.663,00	199,55	240.832.580,00
4	Pajak Reklame	308.957.200,00	192.488.750,00	62,30	238.428.875,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.013.752.628,00	16.937.476.841,00	99,55	13.993.105.022,00
6	Pajak Parkir	76.548.600,00	54.827.228,00	71,62	52.927.380,00
7	Pajak Air Tanah	327.269.075,00	449.775.497,00	137,43	290.190.094,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.823.483.600,00	2.867.033.925,00	74,98	3.523.216.885,00
9	Pajak BPHTB	24.520.712.700,00	21.310.067.690,00	86,91	23.794.759.682,00
	Jumlah	98.607.836.827,00	113.695.107.806,00	115,30	66.962.734.049,00

Berikut informasi atas dasar hukum setiap jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung:

No.	Jenis Pajak	Dasar Hukum
1	Pajak Hotel	- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel - Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
2	Pajak Restoran	- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran - Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan	- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, - Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame - Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame - Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan - Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Parkir	- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir - Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
7	Pajak Air Tanah	- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah - Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah

No.	Jenis Pajak	Dasar Hukum
8	Pajak PBB-P2	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
9	Pajak BPHTB	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan - Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan - Peraturan Bupati Klungkung Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp98.607.836.827,00 dengan realisasi melebihi target yang dianggarkan, yaitu mencapai Rp113.695.107.806,00. Meskipun demikian, masih ada realisasi pajak daerah tahun 2023 yang tidak mencapai target/anggaran. Berikut akan disajikan uraian capaian pendapatan pajak daerah.

- Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, serta Pajak Air Tanah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran. Hal ini disebabkan pandemi *Covid-19* yang sudah berakhir sehingga mendorong minat masyarakat untuk berekreasi berwisata keluar daerah, salah satunya ke Pulau Nusa Penida. Selain itu telah dilakukan juga berbagai upaya untuk mencapai target realisasi agar sesuai dengan anggarannya, diantaranya melalui peningkatan intensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah dilakukan melalui pemeriksaan ke wajib pajak secara ui petik melalui kegiatan rutin ke lapangan bersama Tim intendisikadi pajak daerah. Tim ini di dalam kegiatannya juga melibatkan pihak kejaksaan, Kodim, Polres, Satpol PP dan anggota lainnya. Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah dengan memasang stiker menunggak pajak atas WP yang tidak patuh pajak dan stiker taat pajak atas WP yang sudah patuh.
- Realisasi Pajak PBB-P2, Pajak BPHTB, Pajak Reklame dan Pajak Parkir lebih rendah dari yang anggaran karena melesetnya perkiraan anggaran. Pada awalnya ada pemikiran optimisme dalam menentukan anggaran mengingat telah berlalunya pandemi *Covid-19*, dimana diperkirakan hal ini akan berdampak positif pada transaksi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di Kabupaten Klungkung. Selain itu untuk pendapatan PBB-P2 juga belum sesuai dengan anggaran diantaranya karena data ketetapan/WP hasil pelimpahan KPP Pratama yang belum menggambarkan senyatanya.
- Realisasi Pajak Penerangan Jalan lebih rendah dari anggaran karena tergantung dari realisasi setoran PPJ dari PLN serta pemanfaatan penggunaan listrik yang belum sepenuhnya dimanfaatkan pelaku usaha.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp47.649.857.636,55 lebih tinggi Rp1.569.143.398,55 dari yang dianggarkan sebesar Rp46.080.714.238,00 atau 103,41%.

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2022 sebesar Rp31.578.996.300,38 mengalami kenaikan sebesar Rp16.070.861.336,17 atau 50,89%

Pendapatan retribusi daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	206.940.000,00	198.237.000,00	95,79	205.872.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	312.000.000,00	256.742.000,00	82,29	190.334.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	3.636.160.000,00	3.604.698.000,00	93,97	3.700.676.002,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – Los	3.808.440.000,00	3.673.245.773,80	96,45	3.585.264.565,19
5	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	1.891.758.400,00	1.791.699.680,00	94,71	1.949.446.055,19
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	199.610.000,00	130.759.000,00	65,51	155.378.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	6.618.900,00	6.743.500,00	101,88	4.716.400,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	93.600.000,00	92.900.800,00	99,25	75.520.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	25.771.200,00	26.104.060,00	109,05	221.802.287,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah	809.444.046,00	665.192.160,95	82,18	7.281.100,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan	18.750.000,00	21.875.250,00	116,67	18.468.251,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	78.350.000,00	138.650.000,00	176,96	84.400.000,00
13	Retribusi Tempat Penyediaan Pelelangan	57.200.000,00	37.685.000,00	65,88	34.960.000,00
14	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000.000,00	148.543.000,00	74,27	172.390.000,00
15	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	14.880.000,00	14.880.000,00	100,00	15.390.000,00
16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.320.626.000,00	2.661.142.000,00	80,14	2.648.365.000,00
17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	54.000.000,00	26.400.000,00	48,89	10.950.000,00
18	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	7.200.000,00	9.600.000,00	133,33	7.200.000,00
19	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	2.100.000.000,00	2.432.631.059,00	115,84	2.146.500.580,00
20	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.613.050.000,00	20.522.595.000,00	110,26	8.205.430.000,00
21	Retribusi Penyeberangan Orang	594.000.000,00	750.957.910,00	126,42	580.928.125,00
22	Retribusi Penyeberangan Barang	7.116.476.000,00	7.283.831.644,00	102,35	6.620.635.859,00
23	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	17.400.000,00	22.545.000,00	129,57	16.440.000,00
24	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	78.075.000,00	37.015.000,00	47,41	24.245.000,00
25	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.200.000.000,00	2.517.786.051,00	114,44	844.046.076,00
26	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	129.500.000,00	114.000.000,00	88,23	68.750.000,00
27	Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.100.000,00	2.780.000,00	132,38	3.606.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
28	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	288.764.692,00	458.618.748,00	158,82	0,00
	Jumlah	46.080.714.238,00	47.649.857.636,55	103,41	31.578.996.300,38

Berikut informasi atas dasar hukum setiap jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung:

No.	Jenis Retribusi	Dasar Hukum
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
3	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
4	Retribusi Pelayanan Pasar – Los	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
5	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
8	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah	
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan	
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
13	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan

No.	Jenis Retribusi	Dasar Hukum
		atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan. - Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
14	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal. - Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal.
15	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	
16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. - Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.
17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. - Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa.
18	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. - Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
19	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. - Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. - Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
20	Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. - Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
21	Retribusi Penyeberangan Orang	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air. - Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penyeberangan di Air - Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air.
22	Retribusi Penyeberangan Barang	
23	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah. - Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
24	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	
25	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. - Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
26	Retribusi Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek. - Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek.
27	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
28	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Capaian realisasi anggaran masing-masing jenis Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi Retribusi secara total telah mencapai anggaran, namun masih terdapat beberapa jenis retribusi yang tidak dapat mencapai target anggaran yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah, Retribusi Tempat Penyediaan Pelelangan, Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan, dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- b. Tahun 2023 Penerimaan pendapatan dari penyewaan tanah dianggarkan pada rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Penyewaan Tanah dan untuk Tahun 2024 dianggarkan pada rekening Lain-lain PAD yang sah - Hasil Sewa BMD.
- c. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp458.618.748,00 atau 158,82% karena kondisi ekonomi yang membaik sedangkan tahun 2022 tidak ada realisasi karena tidak ada perpanjangan ataupun penambahan tenaga asing baru.
- d. Pendapatan retribusi yang dapat direalisasikan melebihi target anggaran adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Kendaraan Bermotor, yaitu mencapai 176,96% karena meningkatnya penyewaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 adalah sebesar Rp7.602.949.070,93, 100% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.602.949.071,00. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 mengalami kenaikan 8,07% atau sebesar Rp567.524.618,27 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp7.035.424.452,66.

Berikut rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD					
1	PT Bank BPD Bali	7.593.337.659,00	7.593.337.658,93	100,00	7.028.575.712,66
2	PT Jamkrida Bali Mandara	9.611.412,00	9.611.412,00	100,00	6.848.740,00
3	Perumda Air Minum Panca Mahottama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PD Nusa Kertha Kosala	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	7.602.949.071,00	7.602.949.070,93	100,00	7.035.424.452,66

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara yang diterima Tahun 2023 sesuai dengan nilai pada Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BPD Bali tanggal 22 Februari 2023 dan Akta Nomor 4 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Bali Mandara tanggal 3 Maret 2023.

Sedangkan dividen untuk Tahun 2022 sudah sesuai dengan nilai Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BPD Bali tanggal 18 Februari 2022 dan Akta Nomor 3 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT

Jamkrida Bali Mandara tanggal 11 Maret 2022. Realisasi ini tergantung pada kinerja keuangan PT Bank BPD Bali dan pada Jamkrida, serta proporsi (%) penyertaan modal pemerintah daerah.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp181.588.597.871,85 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp200.034.457.652,00 atau 90,78% lebih rendah Rp18.445.859.780,15 dari target anggaran.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 ini mengalami penurunan sebesar Rp22.296.705.760,92 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp203.885.303.632,77.

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	387.984.789,00	387,98	391.549.885,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	324.866.000,00	296.740.500,00	91,34	197.161.000,00
3	Jasa Giro	950.000.000,00	1.296.222.110,95	136,44	1.068.350.534,78
4	Pendapatan Bunga	51.991.955,00	0,00	0,00	-
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	541.853.186,00	813.422.637,90	150,12	85.640.920,22
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	231.787.484,77
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	37.959.268.468,00	144.239.347,00	0,38	461.880.534,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	47.736.000,00	90.491.553,16	189,57	6.498.000,00
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	Pendapatan Dari Pengembelian	500.305.366,00	1.417.948.337,34	283,42	21.454.477,00
11	Pendapatan BLUD	159.548.642.342,00	177.078.328.395,50	110,99	201.388.755.817,00
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	9.794.355,00	6.250.000,00	63,81	32.125.000,00
13	Ramunerasi	0,00	56.970.201,00	0,00	0,00
	Jumlah	200.034.457.652,00	181.588.597.871,85	90,78	203.885.303.632,77

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut adalah:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp387.984.789,00 melebihi anggarannya sebesar Rp100.000.000,00, karena ada realisasi atas penjualan kendaraan roda empat yaitu Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati yang sudah berakhir masa jabatannya sementara yang dianggarkan hanya sebesar rencana lelang aset rusak berat berupa kendaraan roda dua.
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp296.740.500,00 lebih rendah dari anggarannya sebesar Rp324.866.000,00. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa sewa Kios di area Goa Lawah, Devil's Tear Nusa Lembongan dan sewa kantin daerah. Realisasinya tergantung dari jumlah BMD yang disewa oleh pihak ketiga.
- Jasa Giro terealisasi sebesar Rp1.296.222.110,95 melebihi anggarannya sebesar Rp950.000.000,00. Realisasinya tergantung dari jumlah kas milik

Pemerintah Kabupaten Klungkung yang mengendap dan mendapatkan jasa giro dari Bank.

- d. Pendapatan Bunga dianggarkan sebesar Rp51.991.955,00 untuk penerimaan pendapatan remunerasi Dana TDF sementara realisasinya dicatat pada akun Remunerasi yaitu sebesar Rp56.970.201,00.
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi di Tahun 2022. Untuk Tahun 2023 dicatat pada akun Pendapatan Dari Pengembalian - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- f. Pendapatan Denda pajak daerah mencapai realisasi sebesar 0,38% dari target karena adanya stimulus penghapusan denda PBB-P2 di tahun 2023.
- g. Pendapatan Denda retribusi daerah terealisasi sebesar Rp90.491.553,16 atau 189,57% dari anggarannya yang terdiri dari realisasi Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar, Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- h. Pendapatan Dari Pengembalian mencapai realisasi sebesar Rp1.417.948.337,34 termasuk didalamnya Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- i. Hasil pengelolaan dana bergulir hanya mencapai realisasi sebesar 63,81% dari target karena pendapatan yang diterima bergantung dari nilai kontribusi yang diberikan atas penyertaan modal pada Koperasi dan LPD.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp1.019.842.353.786,00 atau sebesar 96,83%, lebih rendah Rp33.407.581.017,00 dari anggarannya sebesar Rp1.053.249.934.803,00.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 lebih tinggi Rp181.496.898.690,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp838.345.455.096,00, hal ini disebabkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan yang cukup signifikan dari bantuan keuangan baik dari Provinsi Bali maupun dari Kabupaten Badung.

Rincian Pendapatan Transfer TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat :					
I. Dana Perimbangan :					
1	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	13.371.902.000,00	15.685.103.135,00	117,30	20.611.015.077,00
2	Dana Alokasi Umum	516.451.973.000,00	516.451.973.000,00	100,00	494.287.735.000,00
3	Dana Alokasi Khusus – Fisik	104.582.406.000,00	102.526.224.590,00	98,03	56.367.235.732,00
4	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	111.130.489.000,00	110.609.614.664,00	99,53	103.252.747.096,00
	Jumlah	745.536.770.000,00	745.272.915.389,00	99,96	674.518.732.905,00
II	Dana Penyesuaian (DID)	25.474.546.000,00	25.474.546.000,00	100,00	21.254.382.000,00
III	Dana Desa	47.843.257.000,00	47.843.257.000,00	100,00	45.857.734.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat (I + II + III)	818.854.573.000,00	818.590.718.389,00	99,97	741.630.848.905,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah :					
1	Pendapatan Bagi Hasil	106.697.251.606,00	103.794.221.756,00	95,49	90.357.255.218,00
2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	62.787.962.912,00	24.547.266.356,00	46,50	6.104.550.973,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.910.147.285,00	72.910.147.285,00	100,00	252.800.000,00
	Jumlah	234.396.361.803,00	201.251.635.397,00	85,86	96.714.606.191,00
	Total Pendapatan Transfer	1.053.249.934.803,00	1.019.842.353.786,00	96,83	838.346.455.096,00

5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat selama TA 2023 sebesar Rp15.685.103.135,00, lebih besar Rp2.313.201.135,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.371.902.000,00 atau sebesar 117,30%.

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat selama TA 2023 lebih kecil Rp4.925.911.942,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp20.611.015.077,00.

Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil tersebut dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	386.903.000,00	928.630.090,00	240,02	5.571.246.598,00
2	DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh)	10.235.544.000,00	11.677.749.351,00	114,09	11.658.903.000,00
3	DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29/WP PERANGKAT DAERAH	700.595.000,00	799.006.201,00	114,05	1.173.840.792,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	206.335.000,00	225.433.984,00	109,26	248.664.687,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.000,00	12.298,00	175,69	49.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.842.518.000,00	2.054.271.211,00	111,49	1.958.311.000,00
	Jumlah	13.371.902.000,00	15.685.103.135,00	117,30	20.611.015.077,00

Penetapan target pendapatan bagi hasil adalah berdasarkan Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian APBN 2023. Realisasi penerimaan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan di tingkat Pemerintah Pusat, sehingga pencapaian target tersebut diluar kontrol pemerintah daerah

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 adalah sebesar Rp516.451.973.000,00, tercapai 100% dari jumlah yang dianggarkan, yaitu Rp516.451.973.000,00.

Penerimaan DAU TA 2023 meningkat sebesar Rp22.164.238.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp494.287.735.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus – Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 adalah sebesar Rp102.526.224.590,00 atau tercapai 98,03% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp104.582.406.000,00.

Jumlah realisasi DAK TA 2023 mengalami peningkatan 46.158.988.858,00 jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2022 sebesar Rp56.367.235.732,00. Penerimaan DAK Fisik, secara lebih rinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
DAK Fisik					
1	DAK Bidang Pendidikan (Reguler PAUD+SD+SMP)	5.731.483.000,00	5.601.122.772,00	97,73	13.355.153.708,00
2	DAK Bidang Kesehatan dan KB (Reguler KB+Pengendalian Penyakit)	508.400.000,00	481.475.000,00	94,70	9.911.408.755,00
3	DAK Bidang Jalan	12.157.500.000,00	11.270.265.300,00	92,70	12.023.075.000,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	0,00	3.778.845.000,00
5	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian – Penugasan – Lingkungan Hidup	1.634.694.000,00	1.547.000.000,00	94,64	1.575.182.600,00
6	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	315.000.000,00
7	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	6.902.710.669,00
8	DAK Bidang Pariwisata	9.550.329.000,00	8.645.213.370,00	90,52	4.349.360.000,00
9	DAK Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	4.156.500.000,00
10	DAK Bidang Perdagangan – Penugasan	75.000.000.000,00	74.981.148.148,00	99,97	0,00
	Jumlah DAK Fisik	104.582.406.000,00	102.526.224.590,00	98,03	56.367.235.732,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 adalah sebesar Rp110.609.614.664,00 atau tercapai 99,53% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp111.130.489.000,00.

Jumlah realisasi DAK TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.356.867.568,00 jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2022 sebesar Rp103.252.747.096,00. Penerimaan DAK Non Fisik, secara lebih rinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
DAK Non Fisik					
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	58.878.493.000,00	58.878.491.000,00	100,00	56.437.781.160,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.029.000.000,00	1.106.750.000,00	107,56	893.000.000,00
3	BOS Reguler	26.949.890.000,00	26.373.487.611,00	97,86	27.021.630.936,00
4	BOS Kinerja	1.845.000.000,00	1.845.000.000,00	100,00	800.000.000,00
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.163.200.000,00	3.140.982.290,00	99,30	2.961.557.000,00
6	Bantuan Operasional Kesehatan	13.065.179.000,00	13.065.179.000,00	100,00	9.360.783.000,00
7	Jaminan Persalinan	-	-	-	56.555.000,00
8	Pengawasan Obat dan Makanan	468.140.000,00	468.140.000,00	0,00	420.134.000,00
9	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.250.740.000,00	3.250.740.000,00	100,00	2.146.842.000,00
10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan	362.690.000,00	362.687.763,00	100,00	173.400.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pendidikan Kesetaraan				
11	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya - Museum	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	700.000.000,00
12	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	457.770.000,00	457.770.000,00	100,00	492.400.000,00
13	Dana Pelayanan Kepariwisata	1.726.912.000,00	1.726.912.000,00	100,00	1.261.090.000,00
14	Fasilitasi Penanaman Modal	406.900.000,00	406.900.000,00	100,00	379.174.000,00
15	Dana Ketahanan Pangan dan Perikanan	326.575.000,00	326.575.000,00	100,00	348.400.000,00
	Jumlah DAK Non Fisik	111.130.489.000,00	110.609.614.664,00	99,53	103.252.747.096,00

- Pendapatan DAK Non Fisik Dana BOSP- BOS Reguler dan Kinerja Tahun 2023 adalah penerimaan dana BOSP dari Pemerintah Pusat yang diterima langsung oleh Sekolah-sekolah (SD dan SMP) Negeri di Kabupaten Klungkung pada rekening milik masing-masing sekolah.
- Pendapatan DAK Non Fisik Dana BOSP- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD juga diterima langsung oleh Sekolah-sekolah TK dan Pendidikan Kesetaraan yang ada di Kabupaten Klungkung pada rekening milik masing-masing sekolah.
- DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas Tahun 2023 diterima langsung oleh Puskesmas yang ada di Kabupaten Klungkung pada rekening BOK masing-masing Puskesmas.

5.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Jumlah realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 sebesar Rp25.474.546.000,00 atau 100% dari nilai yang dianggarkan.

Realisasi dana penyesuaian Tahun 2023 meningkat 19,86% atau sebesar Rp4.220.164.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp21.254.382.000,00, secara lebih rinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	25.474.546.000,00	25.474.546.000,00	100,00	21.254.382.000,00

Adapun realisasi penggunaan dan sisa DID di RKUD TA 2023 sebagai berikut:

- Sisa di RKUD per 31 Desember 2022 Rp1.916.911.616,00
- Nilai Alokasi 2023 yang Diterima di RKUD Rp25.474.546.000,00
- Nilai yang Digunakan Rp21.721.198.526,00
- Sisa di RKUD per 31 Desember 2023 Rp5.670.259.090,00

5.1.1.2.3 Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp47.843.257.000,00 atau 100% dari nilai yang dianggarkan, dan meningkat Rp1.985.523.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp45.857.734.000,00.

Tahun 2023 Dana Desa diterima oleh sebanyak 53 Desa di Kabupaten Klungkung dengan total realisasi penerimaan Dana Desa sebesar Rp47.843.257.000,00 yang diterima langsung di rekening Desa masing-masing. Realisasi penerimaan Dana

Desa sebesar Rp47.843.257.000,00 diantaranya dialokasikan penggunaannya untuk:

No.	Uraian	Total Nilai (Rp)
1	Alokasi Dana Desa Untuk BLT Desa	7.176.000.000
2	Alokasi Dana Desa Untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani	11.596.676.589,60

Rincian penyaluran dan penggunaan desa dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.2.4 Pendapatan Transfer antar Daerah

5.1.1.2.4.1 Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 adalah sebesar Rp103.794.221.756,00, lebih rendah sebesar Rp4.903.029.850,00 dari anggarannya sebesar Rp108.697.251.606,00 atau hanya mencapai 95,49%.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 meningkat 14,87% atau sebesar Rp13.436.966.538,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp90.357.255.218,00.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	42.672.567.701,00	37.892.972.412,00	88,33	38.968.113.343,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.585.908.196,00	27.422.181.893,00	103,15	15.876.477.666,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.267.412.759,00	22.910.403.776,00	102,89	18.392.804.298,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	112.401.219,00	106.361.381,00	94,63	97.566.636,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	17.058.961.731,00	15.662.302.294,00	91,81	19.000.293.275,00
	Jumlah	108.697.251.606,00	103.794.221.756,00	95,49	90.357.255.218,00

Penetapan anggaran pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi adalah berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengenai pagu bagi hasil pajak provinsi, kewajiban bagi hasil pajak provinsi, sedangkan realisasi penerimaan oleh pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak tersebut di tingkat Pemerintah Provinsi, sehingga pencapaian target diluar kontrol pemerintah daerah.

5.1.1.2.4.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp97.457.413.641,00, lebih rendah Rp28.240.696.556,00 dari anggarannya sebesar Rp125.698.110.197,00 atau mencapai 77,53%.

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2023 meningkat 1432,99% atau sebesar Rp91.100.062.668,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.357.350.973,00.

Bantuan Keuangan TA 2023 dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	52.787.962.912,00	24.547.266.356,00	46,50	6.104.550.973,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	72.910.147.285,00	72.910.147.285,00	100,00	252.800.000,00
	Jumlah	125.698.110.197,00	97.457.413.641,00	77,53	6.357.350.973,00

1) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Bantuan Keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Bali. Penetapan anggaran bantuan keuangan ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengenai bantuan keuangan, sedangkan realisasi penerimaan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah Provinsi dalam merealisasikannya sehingga pencapaian target diluar kontrol pemerintah daerah. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp24.547.266.356,00 meningkat 302,11% atau sebesar Rp18.442.715.383,00 jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.6.104.550.973,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penyedia Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.276.342.912,00	5.123.885.600,00	97,11	4.435.845.120,00
2	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	500.000.000,00
3	Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	1.291.620.000,00	1.148.121.208,00	88,89	648.705.853,00
4	Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	520.000.000,00
5	Infrastruktur	45.000.000.000,00	17.055.279.548,00	37,90	0,00
	Jumlah	52.787.962.912,00	24.547.266.356,00	46,50	6.104.550.973,00

2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Badung. Penetapan anggaran bantuan keuangan adalah berdasarkan surat Bupati Badung mengenai bantuan keuangan. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp72.910.147.285,00 atau mencapai 100,00% dari jumlah yang dianggarkan Rp72.910.147.285,00 dan meningkat 28.741,04% atau sebesar Rp72.657.347.285,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp252.800.000,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 sebesar Rp207.218.574,00 atau 104,45% dari anggaran sebesar Rp198.394.979,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 mengalami kenaikan 182,75% atau sebesar Rp133.930.952,00 jika dibandingkan dengan realisasinya pada TA 2022 sebesar Rp73.287.462,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	198.394.979,00	199.960.479,00	100,79	995.628,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan	0,00	7.258.095,00	-	72.291.834,00
	Jumlah	198.394.979,00	207.218.574,00	104,45	73.287.462,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 sebesar Rp199.960.479,00 atau 100,79% dari anggaran sebesar Rp198.394.979,00. Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasinya pada TA 2022 sebesar Rp995.628,00. Rincian Pendapatan Hibah TA 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	198.000.000,00	198.000.000,00	100,00	0,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga	394.979,00	1.960.479,00	496,35	995.628,00
	Jumlah	198.394.979,00	199.960.479,00	100,79	995.628,00

5.1.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Tahun 2023 sebesar Rp198.000.000,00 merupakan Hibah dari Bank BPD Bali Berupa *Software Smartgove* Pajak Daerah.

5.1.1.3.1.2 Sumbangan Pihak Ketiga

Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.960.479,00 dan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp995.628,00, yaitu penerimaan pendapatan yang masuk ke Kas Daerah yang belum dapat ditelusuri penyeter dan penerimaan pendapatan yang direalisasikan melebihi ketentuan.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 sebesar Rp7.258.095,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasinya pada TA 2022 sebesar Rp72.291.834,00,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan atas Pengembalian Dana Hibah	0,00	7.258.095,00	0,00	72.291.834,00
	Jumlah	0,00	7.258.095,00	0,00	72.291.834,00

Pendapatan atas pengembalian dana hibah Tahun 2023 sebesar Rp7.258.095,00 merupakan realisasi atas setoran pengembalian Belanja Hibah KONI TA 2022 sebesar Rp6.258.095,00 dan pengembalian dana Bantuan Sosial - BSM pada Sekolah Dasar Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000,00.

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.461.599.953.582,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.355.627.177.837,47 atau sebesar 92,75% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja TA 2023 tersebut termasuk Belanja Transfer.

Belanja Daerah TA 2023 mengalami peningkatan 12,11% atau sebesar Rp146.423.625.421,04 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.209.203.552.416,43, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.101.348.670.417,00	1.043.731.802.665,44	94,77	958.970.417.187,11
2	Belanja Modal	232.286.395.954,00	186.360.556.196,77	80,23	130.873.261.726,32
3	Belanja Tidak Terduga	3.825.721.728,00	2.940.474.524,26	76,86	6.615.770.807,00
4	Transfer	124.139.165.483,00	122.594.344.451,00	98,76	112.744.082.696,00
	Jumlah	1.461.599.953.582,00	1.355.627.177.837,47	92,75	1.209.203.552.416,43

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Klungkung menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp1.101.348.670.417,00 dengan realisasi sebesar Rp1.043.731.802.665,44 atau sebesar 94,77%,

Belanja Operasi TA 2023 mengalami peningkatan 8,84% atau Rp84.761.385.478,33 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp958.970.417.187,11 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	550.857.552.385,00	532.237.023.471,00	96,62	547.933.902.006,20
2	Belanja Barang dan Jasa	427.976.043.177,00	390.939.219.129,44	91,35	351.182.651.334,91
3	Belanja Bunga	3.902.690.675,00	3.432.910.119,00	87,96	1.160.435.666,00
4	Belanja Hibah	113.952.184.180,00	112.552.519.446,00	98,77	53.221.636.678,00
5	Belanja Bantuan Sosial	4.660.200.000,00	4.570.130.500,00	98,07	5.471.791.500,00
	Jumlah	1.101.348.670.417,00	1.043.731.802.665,44	94,77	958.970.417.187,11

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2023 dianggarkan sebesar Rp550.857.552.385,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp532.237.023.471,00 atau sebesar 96,62% dari anggarannya. Belanja Pegawai TA 2023 menurun -2,86% atau sebesar Rp15.696.878.535,20 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp547.933.902.006,20.

Realisasi belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	291.063.674.739,00	277.039.384.368,00	95,18	281.587.562.430,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	109.697.206.272,00	107.761.796.102,00	98,24	116.137.665.808,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.449.366.900,00	59.082.329.157,00	99,38	59.078.872.720,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.659.567.260,00	23.120.652.124,00	97,72	23.087.433.174,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.003.426.974,00	638.123.805,00	63,59	495.176.734,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	771.600.000,00	96,28	801.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	65.182.710.240,00	63.823.137.925,00	97,91	66.745.591.140,20
	Total Belanja Pegawai	550.857.562.385,00	532.237.023.471,00	96,62	547.933.902.006,20

Rincian Belanja Pegawai per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp427.976.043.177,00 dengan realisasi sebesar Rp390.939.219.129,44 atau sebesar 91,35%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 meningkat 11,32% atau sebesar Rp39.756.567.794,53 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp351.182.651.334,91, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	45.111.001.808,00	37.138.959.370,00	82,33	31.292.846.665,00
2	Belanja Barang Tidak Pakai Habis	2.000.000,00	1.951.000,00	97,55	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	111.761.827.839,00	102.667.614.698,00	91,86	96.565.185.098,70
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	51.594.721.358,00	49.288.851.828,00	95,53	47.009.168.574,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.025.517.100,00	2.745.218.060,00	68,20	713.520.000,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	764.789.820,00	591.496.500,00	77,34	599.080.000,00
7	Belanja Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.000.000,00	12.850.000,00	80,31	0,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	37.700.000,00	37.700.000,00	100,00	24.600.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.314.200.000,00	1.298.180.758,00	98,78	924.771.105,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.086.155.000,00	1.684.777.738,00	80,76	1.379.110.779,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.896.885.996,00	3.257.909.076,00	83,60	2.283.959.500,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	192.151.843,00	61.998.500,00	32,28	80.409.099,00
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	195.300.000,00	181.834.370,00	93,11	0,00
14	Belanja Pemeliharaan	18.590.644.583,00	16.921.117.337,94	91,02	9.103.264.118,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	37.367.308.416,00	30.184.672.612,00	80,78	26.299.561.979,13
16	Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	5.835.187.000,00	5.595.420.500,00	95,89	6.512.936.250,00
17	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	21.808.435.240,00	21.090.106.497,00	96,71	19.993.090.389,00
18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	123.376.217.174,00	118.178.562.284,50	95,79	106.401.149.778,08
	Jumlah	427.976.043.177,00	390.939.219.129,44	91,35	351.182.651.334,91

Rincian Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran 3.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Belanja Bunga merupakan Belanja Bunga Pinjaman kepada Pemerintah Pusat TA 2023 yang dianggarkan Rp3.902.690.675,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.432.910.119,00 atau 87,96% dari anggarannya. Sedangkan realisasi TA 2022 adalah sebesar Rp1.160.435.668,00. Belanja Bunga ini merupakan bunga pinjaman PEN selama Tahun 2023.

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bunga Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	3.902.690.675,00	3.432.910.119,00	87,96	1.160.435.668,00
	Jumlah	3.902.690.675,00	3.432.910.119,00	87,96	1.160.435.668,00

Realisasi Belanja Bunga Pinjaman kepada Pemerintah Pusat merupakan pembayaran bunga atas Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp55.899.353.269,00 dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19% per tahun serta masa *grace period* selama 2 tahun yang tertuang pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-237/SML/1221 tanggal 30 Desember 2021 yang telah diubah dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-021/SML/0322 tanggal 8 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp113.952.184.180,00 dengan realisasi sebesar Rp112.552.519.446,00 atau sebesar 98,77% dari anggarannya.

Realisasi belanja hibah TA 2023 mengalami kenaikan Rp59.330.882.768,00 atau 111,48% dari realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp53.221.636.678,00, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.210.988.535,00	13.210.988.535,00	100,00	1.769.695.075,00
a	Hibah Uang Kepada BAWASLU Kab Klungkung dalam rangka PILKADA 2024	2.948.084.800,00	2.948.084.800,00	100,00	0,00
b	Hibah Uang Kepada KPU dalam rangka PILKADA Tahun 2024	9.841.673.000,00	9.841.673.000,00	100,00	0,00
c	Pembangunan Kantor Kodim 1610 Klungkung	421.230.735,00	421.230.735,00	100,00	1.769.695.075,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari :	100.097.574.000,00	98.697.909.266,00	98,60	50.786.595.318,00
a	Belanja Hibah Uang kepada BOP PAUD Swasta	1.420.710.000,00	1.489.147.503,00	104,82	1.679.357.000,00
b	Belanja Hibah Uang kepada BOP PAUD Kesetaraan Swasta	247.730.000,00	257.627.763,00	104,00	128.400.000,00
c	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	13.665.834.000,00	13.665.834.000,00	100,00	7.441.371.518,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (DPD KNPi, KONI, PMI, YKI, PPTI, PKTP, Gerakan Pramuka, Program KPA)				
d	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Kelompok Masyarakat, Banjar, Pembangunan Pura Dadia, Pura Paibon)	84.435.300.000,00	82.975.300.000,00	98,27	38.205.200.000,00
e	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Kepada Kelompok Tani Desa Tojan dan desa Selisihan)	120.000.000,00	102.000.000,00	85,00	3.332.266.800,00
f	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	208.000.000,00	208.000.000,00	100,00	-
3	Belanja Hibah kepada Partai Politik	643.621.645,00	643.621.645,00	100,00	665.346.285,00
	Jumlah	113.952.184.180,00	112.552.519.446,00	98,77	53.221.636.678,00

Rincian Belanja Hibah per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

1) Belanja Hibah kepada Partai Politik

Berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 220/26/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Nilai dan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023, jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Nilai per Suara (Rp)	Jumlah Bantuan per Tahun (Rp)	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	PDIP	38.890,00	5.815,00	226.145.350,00	226.145.350,00	226.145.350,00
2	Golkar	13.724,00	5.815,00	79.805.060,00	79.805.060,00	79.805.060,00
3	Demokrat	7.769,00	5.815,00	45.176.735,00	45.176.735,00	45.176.735,00
4	Hanura	9.280,00	5.815,00	53.963.200,00	53.963.200,00	53.963.200,00
5	Gerindra	27.719,00	5.815,00	161.185.985,00	161.185.985,00	161.185.985,00
6	Nasdem	9.209,00	5.815,00	53.550.335,00	53.550.335,00	53.550.335,00
7	PKPI	3.736,00	5.815,00	21.724.840,00	0,00	0,00
8	Perindo	4.092,00	5.815,00	23.794.980,00	23.794.980,00	23.794.980,00
	Jumlah	114.419,00		665.346.485,00	643.621.645,00	643.621.645,00

Penetapan besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2023 sebesar Rp665.346.485,00 dan telah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp643.621.645,00. Nilai tersebut dapat terealisasi 100%. Perlu diketahui bahwa di Tahun 2023, terdapat hibah kepada 1 (satu) Partai Politik yang tidak dianggarkan pemberian Bantuan Keuangan Partai Politiknya, yaitu PKPI karena Ketua Partai PKPI mundur sebagai ketua dan telah menyampaikan surat pernyataan tidak meminta anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dianggarkan sebesar Rp4.660.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.570.130.500,00 atau sebesar 98,07%.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 mengalami penurunan -16,48% atau Rp901.661.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp5.471.791.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	810.200.000,00	795.500.000,00	98,19	2.319.850.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.850.000.000,00	3.774.830.500,00	98,04	3.151.941.500,00
Total Belanja Bantuan Sosial		4.660.200.000,00	4.570.130.500,00	98,07	5.471.791.500,00

- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu disalurkan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada siswa miskin di SD dan SMP Kabupaten Klungkung.

Penyaluran BLT kepada siswa miskin SD diberikan sesuai SK Bupati Klungkung Nomor 402/07/HK/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 294/07/HK/2023 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Kepada Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.

Penyaluran BLT kepada siswa miskin SMP diberikan sesuai SK Bupati Klungkung Nomor 403/07/HK/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 295/07/HK/2023 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Kepada Siswa Miskin Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.

- b. Belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada individu berupa swakelola Bedah Rumah bagi penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial di desa-desa yang ada di Kabupaten Klungkung berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 380/05/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 74/05/HK/2023 tentang Penetapan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Bantuan Bedah Rumah dan Rehab Rumah Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Rincian Belanja Bantuan Sosial per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp232.286.395.954,00 dengan realisasi sebesar Rp186.360.556.196,77 atau sebesar 80,23%, lebih rendah Rp45.925.839.757,23.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 meningkat 42,40% atau Rp55.487.274.470,45 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp130.873.281.726,32, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal – Tanah	311.153.810,00	1.458.000,00	0,47	2.179.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	2.179.000,00
	- Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	211.153.810,00	1.458.000,00	0,69	0,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Jalan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin, terdiri dari:	21.143.897.804,00	19.547.281.141,00	92,45	52.122.546.755,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	- Belanja Modal Alat Besar	13.300.000,00	13.100.000,00	98,50	2.337.362.620,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan	3.040.890.000,00	2.823.453.340,00	92,85	1.909.185.200,00
	- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.436.805.000,00	1.394.511.000,00	97,06	241.722.085,00
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.964.927.510,00	5.257.494.412,00	92,81	4.667.115.210,00
	- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	697.926.364,00	523.315.910,00	74,98	1.289.618.690,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.455.832.677,00	3.270.559.447,00	94,64	30.958.553.154,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium	396.516.962,00	390.416.907,00	98,46	2.671.499.208,00
	- Belanja Modal Komputer	6.363.805.391,00	5.903.308.225,00	91,19	7.781.800.468,00
	- Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
	- Belanja Modal Rambu-Rambu	18.250.000,00	15.478.000,00	84,81	0,00
	- Belanja Modal Peralatan Olahraga	55.643.900,00	55.643.900,00	100,00	57.590.100,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	135.147.613.345,00	119.708.395.962,77	88,58	38.249.152.175,32
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	133.805.762.545,00	118.575.973.962,77	88,62	38.249.152.175,32
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	209.328.800,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.132.522.000,00	1.132.422.000,00	99,99	0,00
4	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri dari:	70.958.844.000,00	42.368.269.276,00	59,71	38.233.177.115,00
	- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	69.788.484.000,00	41.670.014.011,00	59,71	32.975.995.585,00
	- Belanja Modal Bangunan air	540.000.000,00	333.695.400,00	61,80	0,00
	- Belanja Modal Instalasi	377.440.000,00	159.233.825,00	42,19	4.447.474.730,00
	- Belanja Modal Jaringan	252.920.000,00	205.326.040,00	81,18	809.706.800,00
5	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya, terdiri dari:	3.672.644.995,00	3.917.785.979,00	106,67	2.266.226.681,00
	- Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.207.394.995,00	3.466.455.085,00	108,08	1.918.019.681,00
	- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	300.250.000,00	286.888.884,00	95,55	9.435.000,00
	- Belanja Modal Tanaman	15.000.000,00	14.802.000,00	98,68	0,00
	- Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	150.000.000,00	149.840.000,00	99,76	194.472.000,00
	- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	144.300.000,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya, terdiri dari:	1.052.242.000,00	817.365.838,00	77,68	0,00
	- Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.052.242.000,00	817.365.838,00	77,68	0,00
	Total Belanja Modal	232.286.395.954,00	186.360.556.196,77	80,23	130.873.281.726,32

- Tahun 2023 terjadi peningkatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2022.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan cukup besar nilainya dengan sumber dana DAK Fisik pada di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yaitu pembangunan Gedung Pasar Semarapura yang bernilai Rp76.342.043.080,00 serta di Dinas Pariwisata sebesar Rp20.452.486.999,00 yaitu berupa Pembangunan Fasilitas Umum di beberapa obyek wisata seperti Pembangunan Tempat Parkir serta Plaza/Area Pengunjung di Pantai Goa

Lawah, Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman di *Stage* Ceningan serta Pembangunan *Tool Gate* dan Pagar di Pantai Batu Belek Lembongan.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada **Lampiran 6 s.d. Lampiran 11**.

5.1.2.1 Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Klungkung TA 2023 menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.825.721.728,00 dengan realisasi sebesar Rp2.940.474.524,26 atau 76,86% dari anggarannya. Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2023 merupakan dana yang dialokasikan dalam rangka pengembalian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2022 yang oleh Pemerintah Pusat dijadikan perhitungan dan dipotong langsung pada saat penyaluran dana DAK Non Fisik Tahun 2023.

Rincian realisasi BTT Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi BTT (Rp)
1	Pemotongan DAK Non Fisik - PK2UKM 2023 sebagai penyelesaian SiLPA TA 2022	7.964.400,00
2	Pemotongan DAK Non Fisik - BOK 2023 sebagai penyelesaian SiLPA TA 2022	1.428.742.644,00
3	Pemotongan DAK Non Fisik - BOKB 2023 sebagai penyelesaian SiLPA TA 2022	1.021.448.106,00
4	Pemotongan DAK Non Fisik - Dana Kepariwisata 2023 sebagai penyelesaian SiLPA TA 2022	347.528.524,00
5	Pemotongan DAK Non Fisik - BOP Museum 2023 sebagai penyelesaian SiLPA TA 2022	8.627.850,00
6	Pemotongan DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan Pertanian 2023 sebagai penyelesaian SiLPA TA 2022	365.000,00
7	Pemotongan DAK Non Fisik - Dana Fasilitas Penanaman Modal 2023 sebagai penyelesaian SiLPA TA 2022	124.098.000,00
8	Kelebihan pengembalian DAK Non Fisik ke RKUN - dana BOP TK Dewa Kumara karena regrouping dan berubah status menjadi TKN Desa Tangkas	0,26
9	Pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2022	1.700.000,00
Total Realisasi BTT		2.940.474.524,26

5.1.2.2 Transfer

Pengalokasian dan tata cara pengalokasian Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp124.139.165.483,00 dengan realisasi sebesar Rp122.594.344.451,00 atau sebesar 98,76%, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 meningkat 8,74% atau Rp9.850.261.755,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Transfer					
	Belanja Bagi Hasil	17.000.820.483,00	15.455.999.451,00	90,91	7.901.892.982,00
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	11.569.747.179,00	10.719.729.677,00	92,65	5.303.113.322,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	5.431.073.304,00	4.736.269.774,00	87,21	2.598.779.660,00
	Belanja Bantuan Keuangan	107.138.345.000,00	107.138.345.000,00	100,00	104.842.189.714,00
1	Belanja Bantuan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada	52.982.388.000,00	52.982.388.000,00	100,00	51.419.757.656,00

	Desa				
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	54.155.957.000,00	54.155.957.000,00	100,00	53.422.432.058,00
	Total Transfer	124.139.165.483,00	122.594.344.451,00	98,76	112.744.082.696,00

Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Bagi Hasil merupakan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tanggal 8 Agustus 2016 yang diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp17.000.820.483,00 dengan realisasi sebesar Rp15.455.999.451,00 atau sebesar 90,91%, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 meningkat 8,74% atau Rp9.850.261.755,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	11.569.747.179,00	10.719.729.677,00	92,65	5.303.113.322,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	5.431.073.304,00	4.736.269.774,00	87,21	2.598.779.660,00
	Total	17.000.820.483,00	15.455.999.451,00	90,91	7.901.892.982,00

5.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp11.569.747.179,00 dengan realisasi sebesar Rp10.719.729.677,00 atau sebesar 92,65% dari anggarannya.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2023 mengalami kenaikan 102,14% atau Rp5.416.616.355,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.303.113.322,00.

5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp5.431.073.304,00 dengan realisasi sebesar Rp4.736.269.774,00 atau sebesar 87,21% dari anggarannya.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2023 mengalami kenaikan 82,25% atau Rp2.137.490.114,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.598.779.660,00.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp107.138.345.000,00 dengan realisasi sebesar 100% dari anggarannya.

Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 mengalami kenaikan 2,19% atau Rp2.296.155.286,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp104.842.189.714,00.

Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.982.388.000,00	52.982.388.000,00	100,00	51.419.757.656,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	54.155.957.000,00	54.155.957.000,00	100,00	53.422.432.058,00
	Total	107.138.345.000,00	107.138.345.000,00	100,00	104.842.189.714,00

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 diatur melalui :

- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2023
- Keputusan Bupati Nomor 92/08/HK/2023 tanggal 20 Pebruari 2023 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Untuk Hadiah Juara Lomba Desa Terpadu Tahun 2021.
- Keputusan Bupati Nomor 248/11/HK/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 97/11/HK/2023 Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Desa Adat, Subak dan Subak Abian Tahun 2023.
- Keputusan Bupati Nomor 375/08/HK/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Penghasilan Tetap Perbekel Dan Perangkat Desa Tahun 2023.

5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp52.982.388.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.982.388.000,00 atau sebesar 100,00%, merupakan penyaluran Dana ADD Tahun 2023.

5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp54.155.957.000,00 dengan realisasi sebesar Rp54.155.957.000,00 atau sebesar 100,00%. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2023 diberikan untuk Hadiah Juara Lomba Desa Terpadu Tahun 2021, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Desa Adat, Subak dan Subak Abian Tahun 2023 serta Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa Tahun 2023.

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus dan menutup defisit yang timbul dari selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp55.825.666.012,00 dengan realisasi sebesar Rp55.833.666.012,36 atau sebesar 100,01%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	55.825.666.012,00	55.833.666.012,36	100,01	117.089.517.435,98
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan	55.825.666.012,00	55.833.666.012,36	100,01	117.089.517.435,98

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp55.825.666.012,00 dengan realisasi Rp55.833.666.012,36 atau sebesar 100,01%. Rincian Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	55.767.166.012,00	55.767.166.012,36	100,00	60.507.389.166,98
2	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	55.899.353.269,00
3	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	58.500.000,00	66.500.000,00	113,68	682.775.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	55.825.666.012,00	55.833.666.012,36	100,01	117.089.517.435,98

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Jumlah Penggunaan SiLPA adalah sebesar SiLPA Tahun 2022 yaitu Rp55.767.166.012,36 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di Kas Daerah	14.745.063.214,37
Kas di Bendahara Penerimaan	237.596.243,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	140.208,24
Kas di BLUD	40.292.233.321,75
Kas di Bendahara BOS	488.140.066,00
Kas di Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan	3.992.959,00
Kas Dana Kapitasi JKN	0,00
Jumlah	55.767.166.012,36

5.1.3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri:	0,00	0,00	0,00	55.899.353.269,00
	- Penerimaan PEN	0,00	0,00	0,00	55.899.353.269,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	55.899.353.269,00

- Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp55.899.353.269,00 merupakan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2022 dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19% per tahun serta masa *grace period* selama 2 tahun yang tertuang pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-237/SMI/1221 tanggal 30 Desember 2021 yang telah

diubah dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-021/SMI/0322 tanggal 8 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

- b. Total nilai pinjaman PEN Daerah adalah Rp62.184.639.061,00, sedangkan nilai kontrak pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menggunakan dana pinjaman PEN Daerah adalah sebesar Rp55.899.353.271,00. Terdapat selisih Rp2,00 antara nilai kontrak dengan realisasi penerimaan pinjaman PEN.
- c. Pinjaman PEN Daerah digunakan untuk pembiayaan sektor infrastruktur jalan sebesar Rp19.311.073.655,00 dan untuk sektor infrastruktur kesehatan sebesar Rp36.588.279.616,00.

5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Merupakan penerimaan kembali atas Investasi Non Permanen berupa penyertaan modal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Koperasi yang telah jatuh tempo sebesar Rp66.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Koperasi	
KUD Artha Wiguna	9.000.000,00
Jumlah Koperasi	9.000.000,00
Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	
LPD Desa Adat Penarukan	34.000.000,00
LPD Desa Adat Kutampi	23.500.000,00
Jumlah LPD	57.500.000,00
Jumlah Koperasi dan LPD	66.500.000,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan dalam APBD TA 2023 maupun TA 2022.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) LRA TA 2023 sebesar Rp70.833.446.615,50. Jumlah SiLPA LRA TA 2023 sebesar Rp70.833.446.615,50 sama dengan nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir di LPSAL, Kas dan Setara Kas di Neraca, dan Saldo Akhir Kas di LAK. Posisi SiLPA Tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	40.986.604.681,79	14.745.063.214,37
Kas di Bendahara Penerimaan	2.564.505.424,80	237.586.243,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	140.208,24
Kas di BLUD	25.248.409.256,63	40.292.233.321,75
Kas di Bendahara BOS	0,00	488.140.068,00
Kas Dana BOSP	399.593.536,28	3.992.959,00
Kas BOK	1.634.333.716,00	0,00
Jumlah	70.833.446.615,50	55.767.166.012,36

SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.833.446.615,50 diantaranya merupakan dana-dana terikat dengan peruntukan dan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
DAK Non Fisik	2.882.504.445,00
DAK Fisik	5.138.011.214,00
DBH CHT	428.705.363,00
DID	5.670.259.090,00
DAU Bidang Kesehatan	4.001.361.936,00
DAU Bidang Pendidikan	1.735.649.380,00
DAU Bidang PU	2.480.360.860,00
DAU Kelurahan	158.139.752,00
DAU PPPK	7.308.682.178,00
BKK Badung yang Tidak Dilaksanakan	6.121.111.800,00
BKK Badung SILPA	7.871.738.978,00
Jumlah	43.796.524.992,00

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan kumpulan SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Klungkung (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2023 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	14.745.063.214,37	30.411.565.317,98
Kas di Bendahara Penerimaan	237.596.243,00	73.744.753,12
Kas di Bendahara Pengeluaran	140.208,24	0,00
Kas di BLUD	40.292.233.321,75	28.230.422.204,92
Kas di Bendahara BOS	488.140.066,00	1.446.150.884,00
Kas di Bendahara BOSP PAUD dan Kesetaraan	3.992.959,00	0,00
Kas Dana Kapitasi JKN	0,00	339.579.342,96
Jumlah	55.767.166.012,36	60.501.462.502,98

Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2023 berbeda dengan nilai saldo Kas dan Setara Kas Tahun 2022 dan menimbulkan selisih sebesar Rp20.799,00, yaitu sebesar nilai saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo dibawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	55.767.166.012,36	60.507.389.166,98

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai Penerimaan Pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2023 dan 2022. Untuk saldo SiLPA TA 2022, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2023 karena adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2022 sebagaimana diungkapkan dalam catatan poin 5.2.5 dibawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo dibawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022, yaitu:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	70.833.446.615,50	55.767.166.012,36

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2023 dan 2022 yang akan dialokasikan sebagai Penerimaan Pembiayaan pada TA 2022 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada poin 5.1.4. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5.2.6 di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2023 terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yaitu koreksi atas kesalahan pembukuan Dana BOSP pada beberapa sekolah SD dan SMP Tahun 2022 sebesar Rp. 40.873.695,28.

5.2.5 Lain-lain

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Lain-Lain Tahun 2023 dan 2022 yaitu yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Koreksi perhitungan SiLPA BOSP	0,00	5.928.684,00

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 sebesar Rp70.833.446.615,50 yang jumlahnya sama dengan SILPA LRA 31 Desember 2023. Jumlah Saldo Anggaran Lebih TA 2023, terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	40.986.604.681,79	14.745.063.214,37
2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.564.505.424,80	237.596.243,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	140.208,24
4	Kas di BLUD	25.248.409.256,63	40.292.233.321,75
5	Kas di Bendahara BOS	0,00	488.140.066,00
6	Kas di Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan	0,00	3.992.959,00
7	Kas Dana BOSP	399.593.536,28	0,00
8	Kas BOK Puskesmas	1.634.333.716,00	0,00
	Jumlah Kas dan Setara Kas	70.833.446.615,50	55.767.166.012,36

SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.833.446.615,50 diantaranya merupakan dana-dana terikat dengan peruntukan dan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
DAK Non Fisik	2.882.504.445,00
DAK Fisik	5.138.011.214,00
DBH CHT	428.705.363,00
DID	5.670.259.090,00
DAU Bidang Kesehatan	4.001.361.936,00
DAU Bidang Pendidikan	1.735.649.380,00
DAU Bidang PU	2.480.360.860,00
DAU Kelurahan	158.139.752,00
DAU PPPK	7.308.682.176,00
BKK Badung yang Tidak Dilaksanakan	6.121.111.800,00
BKK Badung SiLPA	7.871.738.976,00
Jumlah	43.796.524.992,00

5.3 Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung mengenai aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1 Aset	Rp1.284.914.842.860,53	Rp1.142.481.227.334,21

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Penjelasan untuk Pos Aset per tanggal Neraca adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lancar	159.304.351.016,99	116.400.825.830,98	42.903.525.186,01	36,86
Investasi Jangka Panjang	80.375.558.016,40	78.724.895.084,40	1.650.660.932,00	2,10
Aset Tetap	1.016.937.285.173,38	911.589.977.564,10	105.347.307.609,28	11,56
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	21.854.703.321,78	35.785.728.854,73	(13.911.025.532,97)	(38,89)
Properti Investasi	6.442.947.332,00	0,00	6.442.947.332,00	0,00
Jumlah Aset	1.284.914.842.860,53	1.142.481.227.334,21	142.433.615.526,32	12,47

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1 Aset Lancar	Rp159.304.351.016,99	Rp116.400.825.830,98

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	70.843.993.715,50	55.767.186.811,36	15.076.806.904,14	27,04
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang	102.521.015.621,69	66.923.716.762,39	35.597.298.859,30	53,19
Penyisihan Piutang	(36.220.701.198,88)	(34.081.346.951,65)	(2.139.354.145,78)	6,28
Beban Dibayar Dimuka	718.589.826,86	182.083.218,24	536.506.608,62	294,65
Persediaan	21.441.453.051,83	27.609.185.990,64	(6.167.732.938,81)	(22,34)
Jumlah Aset Lancar	159.304.351.016,99	116.400.825.830,98	42.903.525.287,47	36,86

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	Rp70.843.993.715,50	Rp55.767.186.811,36

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
1	Kas di Kas Daerah	40.986.604.681,79	14.745.063.214,37	26.241.541.467,42	177,97
2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.584.505.424,80	237.596.243,00	2.326.909.181,80	979,35
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	140.208,24	(140.208,24)	(100,00)
4	Kas di BLUD	25.248.409.256,63	40.292.233.321,75	(15.043.824.065,12)	(37,34)
5	Kas di Bendahara BOS	0,00	488.140.066,00	(488.140.066,00)	(100,00)

6	Kas di BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kas Lainnya	10.547.100,00	20.799,00	10.526.301,00	50609,65
8	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kas Dana BOSP	399.593.636,28	3.992.959,00	395.600.677,28	9907,5
10	Kas BOK Puskesmas	1.634.333.716,00	0,00	1.634.333.716,00	0,00
	Jumlah Kas dan Setara Kas	70.843.993.715,50	55.767.186.811,36	15.076.806.904,14	27,04

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	Rp40.986.604.681,79	Rp14.745.063.214,37

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp40.986.604.681,79 dan Rp14.745.063.214,37. Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.986.604.681,79 berada di rekening giro Nomor 021.01.00.00001-0 pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Klungkung atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Rp2.564.505.424,80	Rp237.596.243,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.564.505.424,80 dan Rp237.596.243,00, merupakan penerimaan pendapatan pada saat cuti bersama (Bank Tutup) akhir Tahun 2023 sehingga belum bisa disetor ke Kas Daerah, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	86.077.249,00	22.481.559,00
2. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSGS	5.266.300,00	0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	106.053.857,00	87.666.683,00
4. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	48.949.714,80	27.843.000,00
5. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata	336.765.000,00	99.615.000,00
6. Kas di Bendahara Penerimaan BPKPD	1.975.564.926,00	0,00
7. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan	0,00	1,00
8. Kas di Bendahara Penerimaan DPUPRKP	5.828.378,00	0,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	2.564.505.424,80	237.596.243,00

Masing-masing saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 telah disetor ke Kas Daerah. Bendahara Penerimaan BLUD (RSUD) telah menyetor tanggal 2 Januari 2024 ke Kas BLUD, Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, BPKPD, DPUPRKP, dan Dinas Pariwisata telah menyetor ke Kas Daerah tanggal 2 Januari 2024 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00	Rp140.208,24

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp140.208,24. Kas di Bendahara

Pengeluaran per 31 Desember 2022 merupakan Jasa Giro pada rekening penerimaan bantuan bencana Covid-19 di Bendahara Pengeluaran BPBD dan sudah disetorkan ke Kas Daerah serta telah dilakukan penutupan rekening pada tanggal 12 April 2023 karena rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD	Rp25.248.409.256,63	Rp40.292.233.321,75

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp25.248.409.256,63 dan Rp40.292.233.321,75. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.248.409.256,63 merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Klungkung, seluruh Puskesmas se-Kabupaten Klungkung dan RSUD Gema Santi Nusa Penida yang berada pada:

No.	Uraian	Nomor Rekening	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	Rekening giro Nomor 021.01.00.00113-0 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	17.092.803.305,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	Rekening giro Nomor 145-00-4446444-0 pada PT Bank Mandiri	3.582.202.191,04
3	RSUD Gema Santi Nusa Penida	Rekening giro Nomor 023.01.05.00009-8 pada PT Bank BPD Bali Cabang Pembantu Nusa Penida	3.460.173.228,72
4	RSUD Gema Santi Nusa Penida	Rekening giro Nomor 011.40.10.0126030-5 pada PT Bank BRI	47.608.367,32
5	UPTD Puskesmas Klungkung I	Rekening giro Nomor 021.01.05.00174-7 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	158.774.780,54
6	UPTD Puskesmas Klungkung II	Rekening giro Nomor 021.01.05.00240-4 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	240.506.226,03
7	UPTD Puskesmas Dawan I	Rekening giro Nomor 021.01.05.00172-3 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	133.551.881,63
8	UPTD Puskesmas Dawan II	Rekening giro Nomor 021.01.05.00177-3 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	72.583.342,68
9	UPTD Puskesmas Banjarangkan I	Rekening giro Nomor 021.01.05.00176-0 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	163.156.330,08
10	UPTD Puskesmas Banjarangkan II	Rekening giro Nomor 021.01.05.00173-5 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	118.233.522,85
11	UPTD Puskesmas Nusa Penida I	Rekening giro Nomor 023.01.05.00068-4 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	15.038.767,47
12	UPTD Puskesmas Nusa Penida II	Rekening giro Nomor 023.01.05.00067-2 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	122.945.909,43
13	UPTD Puskesmas Nusa Penida III	Rekening giro Nomor 023.01.05.00069-6 pada PT Bank BPD Bali Cabang Klungkung	30.831.403,84
	Jumlah Kas di BLUD		25.248.409.256,63

Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS	Rp0,00	Rp488.140.066,00
Kas di Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan	Rp0,00	Rp3.992.959,00

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
• Kas di Bendahara BOS	0,00	488.140.066,00
• Kas di Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan	0,00	3.992.959,00
Jumlah	0,00	492.133.025,00

Saldo Kas per 31 Desember 2023 di Bendahara BOSP untuk SD dan SMP sebesar Rp398.047.877,00 serta Kas di Bendahara BOSP PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp1.545.658,28 dicatat pada akun rekening Saldo Kas Dana BOSP (Calk 5.3.1.1.1.8).

Sementara untuk Tahun 2022 masih disajikan pada akun rekening Kas di Bendahara BOS dan Kas di Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya	Rp10.547.100,00	Rp20.799,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal neraca 31 Desember 2023. Atas saldo Tahun 2022 sebesar Rp20.799,00 telah dibayar kepada pihak ketiga. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Dana pihak ketiga yang belum ditarik dari Bendahara Pengeluaran BOS Dinas Pendidikan	0,00	20.799,00
2. Pengembalian saldo kas BOSP dari sekolah ke rekening kas BOSP SMPN 1 Batukandik	10.547.100,00	0,00
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	10.547.100,00	20.799,00

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.1.7 Setara Kas	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak memiliki setara kas baik pada Tahun 2023 maupun Tahun 2022.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.1.8 Kas Dana BOSP	Rp399.593.536,28	Rp0,00

Tahun 2022 Kas di Bendahara BOSP untuk SD dan SMP serta Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan masih disajikan pada akun rekening Kas di Bendahara BOS dan Kas di Bendahara BOSP PAUD (CaLK 5.3.1.1.1.5). Sedangkan Tahun 2023 disajikan pada akun rekening Kas Dana BOSP.

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Kas Dana BOSP	31 Desember 2023 (Rp)
• Kas di Bendahara BOSP SD dan SMP	398.047.877,00
• Kas di Bendahara BOSP PAUD	1.545.658,28
• Kas di Bendahara BOSP Kesetaraan	1,00
Jumlah Kas Dana BOSP	399.593.536,28

Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 yaitu Kas Dana BOSP SD & SMP dan Kas Dana BOSP PAUD dan Kesetaraan dapat dilihat pada Lampiran 16 dan 17.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.1.9 Kas Dana BOK Puskesmas	Rp1.634.333.716,00	Rp0,00

Mulai tahun 2023 seluruh puskesmas di Kabupaten Klungkung menerima Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Dana Non Fisik - BOK yang di transfer langsung ke rekening masing-masing puskesmas. Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Dana BOK Puskesmas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.634.333.716,00 yang berada pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Klungkung. Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.2 Piutang	Rp66.300.314.422,80	Rp32.842.369.810,74

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp66.300.314.422,80 dan Rp32.842.369.810,74. Saldo Piutang tersebut merupakan piutang bersih setelah dikurangi Penyisihan Piutang tak tertagih untuk masing-masing jenis piutang. Rincian piutang sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
1	Piutang Pajak Daerah	39.656.547.844,25	36.904.393.352,25	2.752.154.492,00	7,46
2	Piutang Retribusi Daerah	7.990.893.346,44	7.339.970.801,40	650.922.545,04	8,87
3	Piutang Lain-lain PAD yang sah	6.086.164.914,00	5.539.748.106,74	546.416.807,26	9,86
4	Piutang Transfer Antar Daerah	48.787.409.517,00	17.139.804.502,00	31.647.605.015,00	184,65
5	Penyisihan Piutang	(36.220.701.198,89)	(34.081.346.951,65)	(2.139.354.247,24)	6,28
	Jumlah	66.300.314.422,80	32.842.369.810,74	33.457.944.612,06	101,87

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah	Rp39.656.547.844,25	Rp36.904.393.352,25

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Daerah tidak termasuk denda, yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 (tidak termasuk denda) masing-masing sebesar Rp39.656.547.844,25 dan Rp36.904.393.352,25. Piutang pajak per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
a. Piutang Pajak Hotel	3.150.746.737,09	2.952.249.555,09	198.497.182,00	6,72
b. Piutang Pajak Restoran	2.802.751.377,16	2.352.145.004,16	450.606.373,00	19,16
c. Piutang Pajak Reklame	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
d. Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.315.686.598,00	0,00	1.315.686.598,00	0,00
e. Piutang Pajak Air Tanah	78.253.363,00	60.459.845,00	17.793.518,00	29,43
f. Piutang PBB-P2	31.903.139.869,00	31.123.951.148,00	779.188.721,00	2,50
g. Piutang BPHTB	405.219.900,00	414.837.800,00	(9.617.900,00)	(2,32)
Jumlah Piutang Pajak	39.656.547.844,25	36.904.393.352,25	2.752.154.492,00	7,46

Penjelasan:

- Piutang Pajak Hotel dan Restoran merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 yang sudah

diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak namun belum terbayar.

- b. Piutang Pajak Reklame merupakan tunggakan Pajak Reklame dari satu (1) Wajib Pajak atas nama Eva Media Pratama/Kuswari di Semarang sejak Tahun 2016 dan belum diselesaikan hingga Tahun 2023.
- c. Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan nilai Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 yang diterima Tahun 2024.
- d. Piutang Pajak Air Tanah merupakan nilai Pajak yang dikenakan atas penggunaan air bawah tanah (sumur) pada hotel/ restoran yang tertunggak hingga 31 Desember 2023.
- e. Piutang BPHTB sebesar Rp405.219.900,00 merupakan sisa piutang BPHTB yang masih menjadi tunggakan hingga 31 Desember 2023 berdasarkan Temuan BPK Tahun 2011 dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas PAD dan Belanja Bansos. Pada Tahun 2023 telah dilakukan upaya konfirmasi kembali serta penagihan kepada beberapa Wajib Pajak yang berhasil ditemukan alamatnya dan diperoleh pembayaran dengan total sebesar Rp9.617.900,00.
- f. Piutang PBB-P2 yang disajikan adalah piutang yang didalamnya termasuk piutang hasil penyerahan dari KPP Pratama Gianyar sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor BA-25/WPJ.17/KP/07/2014 tanggal 27 Januari 2014.
- g. Nilai Piutang PBB sesuai BAST adalah sebesar Rp22.186.287.986,00. Dalam berita acara disebutkan juga bahwa Piutang PBB yang dialihkan tersebut terdapat nilai penerimaan yang belum terekam dalam SISMIOP sebesar Rp66.332.329,00. Namun, saldo Rp66.332.329,00 berdasarkan hasil validasi atas data piutang tersebut diketahui bahwa nilai pembayaran atas piutang yang belum dimasukkan ke dalam BAST sebesar Rp50.909.343,00. Selain itu terdapat bukti pelunasan pajak sebesar Rp323.666.589,00 yang belum dimasukkan ke dalam BAST.
- h. Piutang PBB-P2 yang diserahkan oleh KPP Pratama Gianyar pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023 telah divalidasi sebesar Rp14.515.287.381 atau 65,42% dengan rincian hasil validasi sebagai berikut:

Data	Jumlah (Rp)
Piutang dari KPP sesuai BAST	22.186.287.986
Hasil Validasi:	
Pembayaran tunggakan	6.145.453.977
Rekapitulasi bukti pembayaran PBB-P2 (s tahun 2013) yang belum terekam di SISMIOP	323.666.589
Konfirmasi langsung dengan wajib pajak dari tahun 2015 sampai dengan 29 Desember 2023	8.046.166.815
Total Hasil Validasi	14.515.287.381
Hasil validasi	65,42%

Rincian data Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah	Rp7.990.893.346,44	Rp7.339.970.801,40

Saldo Piutang Retribusi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (tidak termasuk denda), masing-

masing sebesar Rp7.990.893.346,44 dan Rp7.339.970.801,40 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan/ (Penurunan) Rp	%
a. Piutang Retribusi Sewa Kios/Los Pasar	1.354.040.000,00	1.532.677.341,00	(178.637.341,00)	(11,66)
b. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :				
1) Piutang Retribusi Sewa Tanah Dana Bukti	0,00	74.509.476,40	(74.509.476,40)	(100,00)
2) Piutang Retribusi Sewa Tanah Toko	2.530.698.224,00	2.045.387.704,00	485.310.520,00	23,73
3) Piutang Retribusi Tempat tinggal	21.838.056,00	24.511.260,00	(2.673.204,00)	(10,91)
4) Piutang Retribusi Sewa Tanah di Desa Jungutbatu	1.606.599.396,44	1.150.800.000,00	455.799.396,44	39,61
5) Piutang sewa Kantin Daerah	23.423.400,00	23.423.400,00	0,00	0,00
c. Piutang Retribusi Sewa Kios Terminal	714.240,00	1.065.600,00	(351.360,00)	(32,97)
d. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	11.924.010,00	0,00	11.924.010,00	
e. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	2.411.816.020,00	2.441.816.020,00	(30.000.000,00)	(1,23)
f. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	840.000,00	10.280.000,00	(9.440.000,00)	(91,83)
g. Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	29.000.000,00	35.500.000,00	(6.500.000,00)	(18,31)
Jumlah Piutang Retribusi	7.990.893.346,44	7.339.970.801,40	650.922.545,04	8,87

Rincian data piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp0,00	Rp0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp6.086.164.914,00	Rp5.539.748.106,74

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.086.164.914,00 dan Rp5.539.748.106,74. Saldo Piutang Lain - lain PAD yang Sah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 merupakan Piutang Bunga (Kontribusi) dari Koperasi dan LPD, serta Piutang BLUD. Rincian saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Piutang Pendapatan BLUD		

1	Piutang BLUD-RSUD	2.002.002.304,00	1.528.715.487,80
2	Piutang BLUD-RS Gema Santi-Dinkes	42.539.600,00	964.500.255,00
3	Piutang BLUD-Puskesmas Klungkung 1	6.855.000,00	5.310.000,00
4	Piutang BLUD-Puskesmas Klungkung 2	0,00	0,00
5	Piutang BLUD-Puskesmas Banjarangkan 1	0,00	30.378.000,00
6	Piutang BLUD-Puskesmas Banjarangkan 2	0,00	0,00
7	Piutang BLUD-Puskesmas Dawan 1	0,00	1.795.000,00
8	Piutang BLUD-Puskesmas Dawan 2	2.650.000,00	2.170.000,00
9	Piutang BLUD-Puskesmas Nusa Penida 1	0,00	2.850.000,00
10	Piutang BLUD-Puskesmas Nusa Penida 2	0,00	24.600.000,00
11	Piutang BLUD-Puskesmas Nusa Penida 3	0,00	0,00
	Jumlah Piutang Pendapatan BLUD	2.054.046.904,00	2.560.318.742,80
b. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			
1	Piutang Bunga (Kontribusi) dari Koperasi	295.625.000,00	261.875.000,00
2	Piutang Bunga (Kontribusi) dari LPD	4.875.000,00	4.125.000,00
	Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.500.000,00	266.000.000,00
	c. Piutang Remunerasi dana transfer TDF – TKD BI	20.291,07	563.273,54
	d. Piutang Denda Pajak Daerah	971.007.511,00	843.701.546,00
	e. Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah	261.663.310,73	0,00
	f. Piutang Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	2.408.914.579,20	1.758.107.534,40
	g. Piutang Denda Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	8.265.000,00	5.780.000,00
	h. Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	81.747.318,00	105.277.010,00
	Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.086.164.914,00	5.539.748.106,74

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada Lampiran 19.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Rp0,00	Rp0,00
		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.2.6	Piutang Transfer Antar Daerah	Rp48.787.409.517,00	Rp17.139.604.502,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp48.787.409.517,00 dan Rp17.139.604.502,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Provinsi Bali sesuai Surat Sekda Provinsi Bali Nomor B.13.900/684/PADFE/BPKAD tanggal 30 Januari 2024 dan Berita Acara Konfirmasi Nomor B.31.900.1.6.3/2708/Set/BPKAD Tahun 2024 tentang pengakuan Utang Pendapatan Transfer kepada Pemkab Klungkung, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.528.502.598,00	8.768.950.741,00
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.875.863.444,00	4.260.631.724,00
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.842.690.007,00	4.090.577.561,00
d. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP)	32.034.544,00	19.444.476,00
e. Pajak Rokok	0,00	0,00
f. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	22.507.318.924,00	0,00
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	48.787.409.517,00	17.139.604.502,00

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.2.7 Piutang Lainnya	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.2.8 Penyisihan Piutang	Rp(36.220.722.492,89)	Rp(34.081.346.951,65)

Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.

Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp(36.220.722.492,89) dan Rp(34.081.346.951,65), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Penyisihan Piutang Pajak :	(25.250.063.839,89)	(24.818.221.298,38)
a. Piutang Pajak Hotel	(839.490.915,14)	(1.123.124.682,62)
b. Piutang Pajak Restoran	(767.851.145,46)	(989.579.090,78)
c. Piutang Pajak Reklame – BPKPD	(750.000,00)	(750.000,00)
d. Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	(8.578.433,00)	(0,00)
e. Piutang Pajak Air Tanah – BPKPD	(15.862.896,70)	(16.962.899,43)
f. Piutang PBB P2 – BPKPD	(23.214.310.547,39)	(22.272.966.825,55)
g. Piutang BPHTB – BPKPD	(405.219.900,00)	(414.837.800,00)
2. Penyisihan Piutang Retribusi	(7.315.866.283,16)	(6.821.892.370,09)
a. Piutang Retribusi Tanah Bukti	(0,00)	(74.509.476,40)
b. Piutang Retribusi Sewa Tanah Toko	(2.384.742.072,00)	(2.043.249.648,00)
c. Piutang Retribusi Kios Terminal	(298.728,00)	(475.286,40)
d. Piutang Retribusi Tempat Tinggal	(21.574.806,86)	(23.067.714,00)
e. Piutang Retribusi Sewa Tanah Pemerintah di Desa Jungutbatu	(1.253.944.485,25)	(1.025.500.000,00)
f. Sewa Kartin Daerah	(19.185.894,00)	(14.948.388,00)
g. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (sewa kios/ los pasar)	(1.198.188.407,00)	(1.171.615.837,29)
h. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	(59.620,05)	(0,00)
i. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	(2.411.816.020,00)	(2.441.816.020,00)
j. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	(420.000,00)	(5.140.000,00)
k. Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	(25.636.250,00)	(21.570.000,00)
3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(0,00)	(0,00)
4. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.410.855.322,46)	(2.355.535.260,66)
a. Piutang Pendapatan BLUD	(642.439.186,12)	(548.203.033,22)
b. Piutang kontribusi PM Koperasi & LPD	(291.723.750,00)	(261.273.750,00)
c. Piutang Remunerasi dana TDF - TKD	(101,48)	(2.816,37)
d. Piutang Denda Pajak Hotel	(150.674.399,40)	(118.712.009,59)
e. Piutang Denda Pajak Restoran	(212.663.411,56)	(200.505.171,61)
f. Piutang Denda Pajak Hiburan	(47.261.665,76)	(47.207.919,52)
g. Piutang Denda Pajak Parkir	(28.697,93)	(1.581,83)
h. Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	(595.319,68)	(305.749,80)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
i. Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah Toko	(8.526.390,19)	(0,00)
j. Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah Pemerintah di Desa Jungutbatu	(245.017.894,73)	(0,00)
k. Piutang Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	(1.761.361.569,63)	(1.175.001.868,82)
l. Piutang Denda Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	(8.220.000,00)	(3.794.975,00)
m. Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	(44.342.936,00)	(526.385,00)
5. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(243.937.047,59)	(86.698.022,62)
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(36.220.722.492,89)	(34.081.346.951,65)

Perhitungan Penyisihan Piutang Tahun 2023 :

Saldo Awal	(34.081.346.951,65)
Beban Penyisihan Piutang	(2.530.664.335,17)
Koreksi Ekuitas- Penyisihan piutang menurun	386.871.293,93
Beban penyisihan Dana bergulir	4.417.500,00
Saldo Akhir	(36.220.722.492,89)

Secara lebih rinci, data Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka	Rp718.589.826,86	Rp182.083.218,24

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp718.589.826,86 dan Rp182.083.218,24.

Beban Dibayar Dimuka ini merupakan nilai asuransi dibayar dimuka atas asuransi Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.569.972,50, asuransi Kendaraan Dinas pada Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp173.908.743,25 dan sewa tempat parkir Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp491.111.111,11. Akun Asuransi Dibayar dimuka dan Sewa Dibayar Dimuka belum ditampung dalam Bagan Akun Standar dan kode rekening sub rincian obyek belum tersedia pada Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (FMIS) sehingga dicatat pada sub rincian obyek Beban Dibayar di Muka.

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.1.4 Persediaan	Rp21.441.453.051,83	Rp27.609.185.990,64

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp21.441.453.051,83 dan Rp27.609.185.990,64, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	455.900,00	1.256.500,00
2	Dinas Kesehatan :		
	- Dinas Kesehatan	5.472.661.276,59	5.341.123.220,36
	- Puskesmas Klungkung I	277.547.980,69	278.616.953,37

No.	Perangkat Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	- Puskesmas Klungkung II	308.036.205,46	304.333.352,80
	- Puskesmas Dawan I	313.633.687,66	322.789.092,87
	- Puskesmas Dawan II	182.273.573,67	332.289.794,15
	- Puskesmas Banjarangkan I	209.075.617,65	229.299.771,60
	- Puskesmas Banjarangkan II	273.431.633,54	199.368.927,44
	- Puskesmas Nusa Penida I	498.055.475,62	412.240.159,22
	- Puskesmas Nusa Penida II	271.584.540,96	165.875.101,79
	- Puskesmas Nusa Penida III	211.170.786,21	173.798.675,11
	- RS Gema Santi Nusa Penida	960.637.939,66	1.379.173.972,93
3	Rumah Sakit Umum Daerah	10.116.066.049,12	13.943.091.242,47
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.252.800,00	422.773.600,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.463.646,00	19.960.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.106.830,00	9.424.200,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.367.450,00	920.500,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	23.891.500,00	8.131.789,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	189.898.165,00	49.596.325,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	376.141.472,00	300.501.782,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.557.324,00	36.590.563,00
12	Dinas Perhubungan	538.161.842,00	493.212.186,10
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.062.650,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	313.812.156,00	287.225.158,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.083.000,00	911.000,00
16	Dinas Kebudayaan	5.935.085,00	338.685,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00
18	Dinas Pariwisata	13.087.050,00	108.619.975,43
19	Dinas Pertanian	65.550.465,00	171.068.275,00
20	Dinas Ketenagakerjaan	985.000,00	1.185.000,00
21	Bagian Pemerintahan & Kesra	7.039.900,00	20.028.400,00
22	Bagian Hukum	100.000,00	60.000,00
23	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	985.500,00	267.500,00
24	Bagian Administrasi Pembangunan & Perekonomian SDA	1.311.600,00	4.467.525,00
25	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	21.759.150,00	33.216.250,00
26	Bagian Umum (Setda)	290.100.400,00	252.367.358,00
27	Bagian Organisasi	2.382.160,00	3.015.740,00
28	Sekretariat DPRD	155.219.550,00	253.886.000,00
29	Kecamatan Klungkung	967.900,00	3.137.450,00
30	Kecamatan Banjarangkan	1.481.150,00	492.350,00
31	Kecamatan Nusa Penida	607.213,00	518.750,00
32	Kecamatan Dawan	0,00	0,00
33	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.766.400,00	1.778.697.475,00
34	Inspektorat	12.004.550,00	20.676.700,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.670.990,00	10.635.185,00
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	153.725.657,00	231.038.175,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	642.900,00	1.762.680,00
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah	25.763.600,00	0,00
	Jumlah Persediaan Seluruh Perangkat Daerah	21.441.453.051,83	27.609.185.990,64

Nilai persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh pengurus barang PD pada akhir tahun yang didokumentasikan

dalam Berita Acara *Stock Opname*. Berikut daftar jenis persediaan Tahun 2023 dan 2022:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan, terdiri dari:	2.325.002.082,20	7.460.104.155,68
	- Bahan Lainnya	1.006.462.082,20	6.258.332.555,68
	- Bahan Bakar dan Pelumas	1.318.540.000,00	1.201.231.600,00
	- Isi Tabung Gas	0,00	540.000,00
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, terdiri dari:	1.789.757.857,00	1.875.061.565,56
	- Alat Tulis Kantor	845.520.449,28	837.932.709,66
	- Bahan Cetak	533.472.085,55	538.324.255,10
	- Alat Listrik	372.887.122,17	481.692.250,80
	- Benda Pos	29.579.000,00	32.472.000,00
	- Perabot Kantor	6.319.200,00	4.640.350,00
	- Suvenir/Cinderamata	1.680.000,00	0,00
3	Obat-obatan, terdiri dari:	17.278.828.387,63	16.058.442.204,40
	- Obat	17.278.828.387,63	15.968.917.179,40
	- Obat-obatan lainnya	0,00	89.525.025,00
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan, terdiri dari:	0,00	2.190.718.675,00
	-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	2.190.718.675,00
5	Natura dan Pakan, terdiri dari:	47.864.725,00	24.859.390,00
	- Natura	27.849.925,00	20.222.550,00
	- Pakan	20.014.800,00	4.636.840,00
Jumlah Persediaan		21.441.453.051,83	27.609.185.990,64

Rincian Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

1) Persediaan Kadaluwarsa

Tahun 2023 terdapat persediaan kadaluwarsa sebesar Rp1.482.652.666,02 berupa obat, karcis dan materai yang dicatat sebagai Defisit Non Operasional pada Perangkat Daerah berikut ini:

No.	Perangkat Daerah	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan :	
	- Dinas Kesehatan	636.940.023,89
	- Puskesmas Klungkung I	23.033.772,50
	- Puskesmas Klungkung II	2.344.052,53
	- Puskesmas Dawan I	6.147.379,45
	- Puskesmas Dawan II	8.691.920,82
	- Puskesmas Banjarangkan I	-
	- Puskesmas Banjarangkan II	2.586.556,55
	- Puskesmas Nusa Penida I	6.448.849,03
	- Puskesmas Nusa Penida II	14.252.939,04
	- Puskesmas Nusa Penida III	4.129.264,83
	- RS Gema Santi Nusa Penida	173.644.632,71
2	Rumah Sakit Umum Daerah OBAT	593.050.703,87
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	726.667,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	2.253.420,00
5	Dinas Pariwisata	7.152.984,00
6	Dinas Pertanian	1.249.500,00
Jumlah Persediaan Kadaluwarsa		1.482.652.666,02

Rincian Persediaan kadaluwarsa dapat dilihat pada **Lampiran 21.1**.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	Rp80.375.556.016,40	Rp78.724.695.084,40

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp80.375.556.016,40 dan Rp78.724.695.084,40. Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung berupa Investasi Non Permanen Lainnya dan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Rp176.340.000,00	Rp247.257.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp176.340.000,00 dan Rp247.257.500,00. Investasi Non Permanen diberikan melalui mekanisme Penyertaan Modal yang ditetapkan dengan Perda dan diberikan kepada Koperasi dan LPD dengan jangka waktu 5 Tahun. Saldo Investasi Non Permanen dicatatkan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah dikurangi penyisihan.

Berikut daftar Investasi Non Permanen Tahun 2023:

Uraian	Tahun Penyertaan	Nilai Investasi Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan (Rp)	Nilai Bersih Investasi Tahun 2023 (Rp)
a. KSU Mandiri	2006	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
b. KSU Dharma Arta	2008	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
c. KSU Artha Buana	2009	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
d. Kopwan Sri Artha	2011	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
e. KUD Arta Wiguna	2017	118.000.000,00	580.000,00	115.420.000,00
f. LPD DP Dawan Kolod	2015	50.000.000,00	5.000.000,00	45.000.000,00
g. LPD Desa Pekraman Penarukan	2017	16.000.000,00	80.000,00	15.920.000,00
Jumlah		612.000.000,00	435.660.000,00	176.340.000,00

Secara lebih rinci Investasi Non Permanen Lainnya kepada Koperasi dan LPD dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.2.1.1	Dana Bergulir	Rp612.000.000,00	Rp678.500.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp612.000.000,00 dan Rp678.500.000,00. Investasi Non Permanen Lainnya berupa penyertaan modal pemerintah kepada Koperasi dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dengan Perda Penyertaan Modal saat Investasi tersebut diluncurkan dengan jangka waktu 5 tahun. Pada tahun kelima, penyertaan modal pemerintah harus dikembalikan ke Kas Daerah. Penyertaan modal pemerintah kepada Koperasi dan LPD lebih bersifat pemberian pinjaman dan mewajibkan Koperasi dan LPD untuk menyetorkan kontribusi sebesar 6% dan 3% per tahun, namun penyetorannya wajib dilakukan setiap bulan.

Uraian	Tahun Penyertaan	Nilai Investasi Tahun 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Nilai Investasi Tahun 2023 (Rp)
a. KSU Mandiri	2006	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
b. KSU Dharma Arta	2008	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
c. KSU Artha Buana	2009	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00
d. Kopwan Sri Artha	2011	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
e. KUD Arta Wiguna	2017	125.000.000,00	0,00	9.000.000,00	116.000.000,00
f. LPD DP Kutampi	2015	23.500.000,00		23.500.000,00	0,00
g. LPD DP Dawan Kolod	2015	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
h. LPD Desa Pekraman Penarukan	2017	50.000.000,00	0,00	34.000.000,00	16.000.000,00
Jumlah		678.500.000,00	0,00	66.500.000,00	612.000.000,00

Secara lebih rinci Investasi Non Permanen Lainnya kepada Koperasi dan LPD dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir	Rp(435.660.000,00)	Rp(431.242.500,00)

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Klungkung, penilaian Investasi Non Permanen dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan agar dapat menggambarkan nilai wajar atas Investasi Non Permanen tersebut. Jumlah Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya kepada Koperasi dan LPD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp(435.660.000,00) dan Rp(431.242.500,00). Rincian Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	Rp80.199.216.016,40	Rp78.477.437.584,40

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp80.199.216.016,40 dan Rp78.477.437.584,40.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.2.2.1 Penyertaan Pemerintah Modal	Rp80.199.015.815,00	Rp78.477.237.383,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada BUMD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	<u>31 Desember 2023 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2022 (Rp)</u>
h. PT Bank BPD Bali	31.423.000.000,00	31.423.000.000,00
i. PT Jamkrda Bali Mandara	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
j. Perumda Air Minum Panca Mahottama	47.660.455.075,00	45.936.676.644,00
k. PD Nusa Kertha Kosala	115.560.739,00	115.560.739,00
Jumlah Penyertaan Modal	80.199.015.815,00	78.477.237.383,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada BUMD diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT Bank BPD Bali sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp31.423.000.000,00 dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT Bank BPD Bali sebesar 1,62 (kepemilikan kurang dari 20). Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada BPD Bali sebesar Rp31.423.000.000,00 dalam bentuk saham sebanyak 31.423 lembar saham dengan nilai per lembar sahamnya sebesar Rp1.000.000,00.
- b. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT Jamkrida Bali Mandara per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar 0,62 (kepemilikan kurang dari 20).
- c. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Perumda Air Minum Panca Mahottama per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.881.959.076,00 dinilai berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) dikarenakan persentase kepemilikan pada Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Perumda Air Minum Panca Mahottama sebesar 100 (kepemilikan lebih dari 20). Pada Tahun Buku 2023, Perumda Air Minum Panca Mahottama membukukan laba sebesar Rp1.943.282.432,00 dan terakumulasi dengan laba/(rugi) tahun sebelumnya menjadi saldo rugi ditahan sebesar (12.698.949.818,00) yang diakui mengurangi saldo Investasi Kabupaten Klungkung pada Perumda Air Minum Panca Mahottama.

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan Perda No. 2 Tahun 2023 untuk menetapkan status penyertaan modal berupa aset dan nilai aset dengan total keseluruhan sebesar Rp20.000.600.428,00 sehingga penyertaan modal pada Perumda Air Minum Panca Mahottama yang telah ditetapkan statusnya dengan perda sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp40.164.386.821,00. Nilai aset yang tercatat pada perda sebesar Rp887.609.000,00 adalah nilai kontrak awal, dimana yang seharusnya dicatat dalam perda adalah sebesar nilai kontrak adendum kedua, yaitu sebesar Rp666.105.000,00 dan telah dilakukan koreksi kurang atas nilai investasi permanen pada Perumda Air Minum Panca Mahottama sebesar Rp221.504.000,00, sehingga nilai investasi yang semula Rp47.881.959.076,00 menjadi Rp47.660.455.076,00.

Pada Laporan Keuangan BUMD Perumda Air Minum Panca Mahottama per 31 Desember 2023 Audited nilai Ekuitas masih tercatat sebesar Rp47.881.959.076,00, belum dilakukan koreksi atas selisih nilai yang ditetapkan dalam Perda No. 2 Tahun 2023.

Tahun 2023 masih terdapat modal Perumda Air Minum Panca Mahottama yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp20.416.522.073,00. Atas modal yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp19.915.322.422,00 dicatat pada laporan keuangan Perumda Air Minum berdasarkan pada nilai yang tercantum dalam kontrak/Surat Perjanjian pengadaan barang tersebut.

- d. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PD Nusa Kertha Kosala per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.560.739,00. Saldo tersebut sama dengan saldo penyertaan modal TA 2018. Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali menyajikan dengan angka tahun sebelumnya dikarenakan adanya pembekuan usaha PD Nusa Kertha Kosala

pada Tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 223/01.4/HK/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pembekuan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala Kabupaten Klungkung. Sampai dengan Tahun 2020, PD Nusa Kertha Kosala tidak melakukan kegiatan dan pelaporan operasional usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat pada Tahun 2014 atas PD Nusa Kertha Kosala Tahun Buku 2013 ditemukan adanya Aset Tanah di Desa Jumpai Kecamatan Klungkung seluas 72.880 m2 berupa hak pengelolaan No. 2, namun PDNKK tidak menyimpan buku tanah yang asli. Pemeriksaan khusus tersebut juga mengungkap pengakuan piutang dan utang PDNKK yang perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan audit laporan keuangan PD Nusa Kertha Kosala Tahun Buku 2018 oleh Auditor Independen. Laporan Auditor Independen Nomor 00127/2.0526/AU.2/11/0595-1/1/XII/2019 menyatakan Opini Tidak Menyatakan Pendapat atas Laporan Keuangan PD Nusa Kertha Kosala yang berakhir 31 Desember 2018.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.2.2.2	Penyertaan Modal PT Bank BPD Bali Belum Disahamkan	Rp200.201,40	Rp200.201,40

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal PT Bank BPD Bali yang Belum Disahamkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp200.201,40. Belum dapat disahamkan karena nilai nominalnya dibawah harga per lembar saham.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.3	Aset Tetap	Rp1.016.937.285.173,38	Rp911.589.977.564,10

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.016.937.285.173,38 dan Rp911.589.977.564,10 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
a. Tanah	94.739.077.245,00	95.059.717.855,00	(320.640.610,00)	(0,34)
b. Peralatan dan Mesin	516.224.822.314,16	487.397.821.848,83	28.827.000.465,33	5,91
c. Gedung dan Bangunan	747.470.968.423,81	815.092.451.796,92	132.378.514.626,89	21,52
d. Jalan Irigasi dan Jaringan	937.483.897.594,16	853.734.916.082,66	83.748.981.511,50	9,81
e. Aset Tetap Lainnya	39.003.873.406,18	34.846.059.841,89	4.157.813.764,49	11,93
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.824.593.674,26	13.886.842.835,00	(5.062.249.160,74)	(36,45)
g. Akumulasi Penyusutan	(1.326.809.945.484,19)	(1.188.427.832.496,00)	(138.382.112.988,19)	11,64
Jumlah Aset Tetap	1.016.937.285.173,38	911.589.977.564,10	105.347.307.609,28	11,56

Tahun 2023 juga terdapat aset tetap dengan nilai dibawah batas kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset Ekstrakomptabel	Saldo Tahun 2023		Saldo Tahun 2022	
	Harga Perolehan (Rp)	Jumlah Unit	Harga Perolehan (Rp)	Jumlah Unit
a. Peralatan dan Mesin	13.726.327.055,82	56.522	16.702.458.243,86	73.503
b. Gedung dan Bangunan	3.254.457.527,00	724	3.384.991.822,00	732
c. Jalan Irigasi dan Jaringan	3.853.353.474,17	983	5.202.341.545,17	1.193
d. Aset Tetap Lainnya	560.264.677,12	5.711	723.602.147,12	6.170
Jumlah Aset Ekstrakomptabel	21.394.402.734,11	63.940	26.013.393.758,15	81.598

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**

5.3.1.3.1 Tanah **Rp94.739.077.245,00** **Rp95.059.717.855,00**

Aset Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp94.739.077.245,00 dan Rp95.059.717.855,00, rincian mutasi tanah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	95.059.717.855,00
Mutasi Tambah:	
• Belanja Modal	1.458.000,00
1. DLHP berupa Biaya Pengukuran Tanah	1.458.000,00
• Mutasi antar Perangkat Daerah	1.045.280.500,00
• Hibah	1.917.462.500,00
1. DPUPRPKP	
- Hibah Tanah dari Developer Pesona Lembang	435.360.000,00
- Hibah Tanah dari Negara	56.000.000,00
2. PPKD	
- Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Bali	1.426.102.500,00
Mutasi Kurang:	
• Mutasi antar Perangkat Daerah	(1.045.280.500,00)
• Hibah ke Luar Perangkat Daerah	(178.296.750,00)
1. Hibah dari PPKD ke BNN	(3.575.000,00)
2. Hibah dari PPKD ke Desa	(174.721.750,00)
• Properti Investasi	(2.061.264.360,00)
Saldo Akhir Tanah	94.739.077.245,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

Berdasarkan data KIB A SIMDA BMD Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 memiliki 1.025 bidang tanah, sebanyak 757 bidang tanah diantaranya telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung, sedangkan 268 bidang tanah sedang dalam proses pensertifikatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin **Rp516.224.822.314,16** **Rp487.397.821.848,83**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp516.224.822.314,16 dan Rp487.397.821.848,83, rincian mutasi aset Peralatan Mesin tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal	487.397.821.848,83
Mutasi Tambah:	
• Belanja Modal	19.547.281.141,00

• Mutasi antar Perangkat Daerah	4.847.258.905,00
• Hibah	4.383.545.363,60
1. Dinas Kesehatan: Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa alat Kesehatan	2.522.435.838,60
2. RSUD : Hibah dari PT. Citra Dian Pratama berupa kursi roda	2.000.000,00
3. Satpol PP : Hibah dari Kementerian Dalam Negeri berupa Sepeda Motor	45.234.525,00
4. DKPP : Hibah dari Bapenas berupa Papan Pengumuman	12.350.000,00
5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan : Hibah dari Perpustakaan RI (POCADI)	192.075.000,00
6. BPBD : Hibah dari BPBD Provinsi Bali berupa Peralatan Bencana Kekeringan	1.609.450.000,00
• Koreksi pencatatan	3.909.676.799,00
1. Dinas Kesehatan: Koreksi catat atas Hibah dari Kemenkes tahun 2022 berupa alat Kesehatan dan dari Yayasan BUMN tahun 2022 berupa alat kesehatan	1.667.332.999,00
2. Rumah Sakit Gema Santi: Koreksi catat atas Hibah dari Kementerian PUPR tahun 2021 berupa meubelair	934.700.000,00
3. Dinas Perhubungan : Koreksi catat atas Hibah dari Bank BPD Bali	27.565.000,00
4. BPBD : Koreksi catat atas Hibah dari BNPB tahun 2017 berupa Alat – Alat Kebencanaan dan Hibah tahun 2022 berupa Peralatan Komputer	889.337.800,00
5. BPKPD: Koreksi catat hasil inventarisasi berupa sepeda motor	390.941.000,00
• Reklas dari Gedung dan Bangunan	4.421.305.335,35
1. Dinas Pendidikan : Reklas berupa meja dan kursi	11.115.000,00
2. DPUPR/PPK: Reklas berupa meubelair, AC, CCTV	2.260.919.623,00
3. DLHP: Reklas berupa Papan nama TOS, AC, TV	25.619.915,00
4. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan : Reklas berupa monitor/tv, ac, kursi, meja	2.094.790.797,35
5. Dinas Pariwisata : Reklas berupa Tenda Stand Retribusi	28.860.000,00
• Reklas dari Aset Tetap Lainnya	55.069.999,00
1. Dinas Pendidikan: Reklas berupa alat studio	55.069.999,00
• Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	93.285.000,00
1. Dinas Kesehatan: Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD berupa Kursi Rapat	18.750.000,00
2. Dinas Pariwisata : Reklas dari Belanja Bahan – bahan bangunan/konstruksi berupa papan peringatan	74.535.000,00
Mutasi Kurang:	
• Mutasi antar Perangkat Daerah	(4.847.258.905,00)
• Koreksi Pencatatan	(3,95)
1. Koreksi pembulatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	(0,35)
2. Koreksi pembulatan Dinas Kesehatan	(3,60)
• Hibah ke Luar Perangkat Daerah	(232.040.750,00)
1. Hibah dari PPKD berupa kendaraan ke Polres dan Desa Adat	(232.040.750,00)
• Reklas ke Gedung dan Bangunan	(55.000.000,00)
1. DLHP berupa Gedung pelindung alat air otomatis	(55.000.000,00)
• Reklas ke Aset Tetap Lainnya	(149.300.000,00)
1. Dinas Pendidikan: Reklas berupa alat musik	(149.300.000,00)
• Reklas ke Aset RB/Lain-Lain	(2.753.377.207,67)
1. Dinas Pendidikan	(48.011.000,00)
2. Dinas Kesehatan	(972.723.175,00)
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(72.608.000,00)
4. Dinas Komunikasi dan Informatika	(185.539.500,00)
5. Dinas Pertanian	(57.816.000,00)
6. Bagian Umum	(1.138.571.640,00)
7. Sekretariat DPRD	(131.038.666,67)
8. Kecamatan Dawan	(39.984.800,00)
9. Inspektorat	(65.635.260,00)
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(19.459.166,00)
11. BPKPD	(18.150.000,00)
12. BKPSDM	(3.840.000,00)
• Reklas ke Beban	(118.282.500,00)
1. Dinas Kesehatan : reklas belanja modal ke Puskesmas berupa reagen sanitarian kit	(118.282.500,00)
• Reklas ke Aset Ekstrakomptabel	(269.176.883,00)
1. Dinas Pendidikan berupa meja dan kursi	(15.698.000,00)
2. Puskesmas Banjarangkan I berupa kursi rapat	(18.750.000,00)
3. Puskesmas Nusa Penida I berupa heating set	(12.000.000,00)
4. Rumah Sakit Gema Santi berupa meubelair	(85.864.533,00)
5. DPUPR/PPK berupa kursi	(38.113.901,00)
6. Dinas Koperasi berupa kursi dan pot tanaman	(75.450.449,00)

7. BPBD berupa velbed	(23.300.000,00)
• Penghapusan	(6.185.828,00)
1. Dinas Kesehatan	(2.185.828,00)
2. Dinas PUPRKP	(4.000.000,00)
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin	516.224.822.314,16

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Rp747.470.966.423,81	Rp615.092.451.796,92

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp747.470.966.423,81 dan Rp615.092.451.796,92, dengan rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal	615.092.451.796,92
Mutasi Tambah:	
• Belanja Modal	119.708.396.962,77
• Mutasi antar Perangkat Daerah	3.243.391.298,65
• Hibah	1.225.707.679,00
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan: Hibah dari Bapenas berupa menara pantau di hutan mangrove Lembongan	1.225.707.679,00
• Koreksi Pencatatan	16.651.210.149,69
1. Rumah Sakit Gema Santi, Hibah dari Kementerian PUPR tahun 2022 berupa gedung rusunawa	14.734.300.000,00
2. RSUD, Hibah tahun 2007 dari Provinsi Bali berupa gedung farmasi lantai 2 dan biaya perencanaan pagar RSUD	1.842.252.655,00
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, koreksi catat biaya perencanaan	74.657.490,00
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, koreksi pembulatan	4,02
5. Kecamatan Banjarangkan, koreksi pembulatan	0,40
6. Kecamatan Dawan, koreksi pembulatan	0,27
• Reklas dari Peralatan dan Mesin	55.000.000,00
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, berupa gedung penutup mesin pengukur kadar air	55.000.000,00
	11.623.550.105,00
• Reklas dari KDP	
1. Puskesmas Banjarangkan I	22.110.000,00
2. Puskesmas Nusa Penida I	7.447.000,00
3. Rumah Sakit Gema Santi	6.974.000,00
4. RSUD	10.855.576.186,00
5. DPUPRKP	332.693.750,00
6. Dinas Koperasi, UKMP	317.461.643,00
7. Sekretariat DPRD	10.760.229,00
8. Kecamatan Banjarangkan	50.571.372,00
9. Kecamatan Nusa Penida	19.955.925,00
• Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	237.987.986,00
1. Dinas Sosial, PP dan PA berupa Pelinggih di Rumah Deret	35.000.000,00
2. Sekretariat DPRD	202.987.986,00
	2.376.000.001,00
• Utang Belanja Modal	2.376.000.001,00
1. Dinas PUPRKP	
Mutasi Kurang:	
• Mutasi antar Perangkat Daerah	(3.243.391.298,65)
• Hibah ke Luar Perangkat Daerah	(236.346.000,00)
1. Hibah dari PPKD ke BNN berupa Gedung	(236.346.000,00)
• Koreksi Pencatatan	(3,18)
1. Dinas Pendidikan koreksi pembulatan	(1,13)

2. Puskesmas Banjarangkan I koreksi pembulatan	(0,15)
3. Puskesmas Nusa Penida I koreksi pembulatan	(0,50)
4. DPUPRPKP koreksi pembulatan	(1,00)
5. Kecamatan Nusa Penida koreksi pembulatan	(0,40)
• Reklas ke Peralatan dan Mesin	(4.421.305.335,00)
1. Dinas Pendidikan berupa meja dan kursi	(11.115.000,00)
2. DPUPRPKP berupa meubelair, AC dan CCTV	(2.280.919.623,00)
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan berupa ac dan monitor tv	(25.619.915,00)
4. Dinas Koperasi, UKMP berupa monitor tv, ac, kursi, meja	(2.094.790.797,00)
5. Dinas Pariwisata berupa tenda stand retribusi	(28.860.000,00)
• Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan	(1.511.802.929,00)
1. DPUPRPKP	(352.353.305,00)
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan berupa jalan lingk di TPA	(1.159.449.624,00)
• Reklas ke Aset Tetap Lainnya	(292.612.777,00)
1. DPUPRPKPPKP berupa tanaman	(23.342.531,00)
2. Dinas Koperasi, UKMP berupa tanaman	(269.270.246,00)
• Reklas ke KDP	(5.182.150.903,26)
1. Dinas Pendidikan berupa biaya perencanaan, pengawasan dan pembangunan ruang kelas SDN Manduang	(1.037.580.659,00)
2. Dinas Kesehatan berupa rehabilitasi Pustu Ceningan	(825.089.069,26)
3. Rumah Sakit Gema Santi berupa perencanaan dan pembangunan kanofi dan ground tank	(5.644.150,00)
4. Dinas Koperasi, UKMP	(99.107.460,00)
5. Dinas Pariwisata	(3.285.433.797,00)
6. Kecamatan Klungkung biaya perencanaan gedung kantor	(49.362.843,00)
7. Inspektorat berupa biaya perencanaan gedung kantor	(99.752.925,00)
• Reklas ke Aset Lainnya	(647.811.172,11)
1. Dinas Pendidikan berupa gedung TK Gema Santi	(125.000.000,00)
2. Dinas Kesehatan berupa Pustu Ceningan	(419.118.652,11)
3. DPUPRPKP, reklas ke ATB antrean	(53.613.206,00)
4. Dinas Koperasi, UKMP, reklas ke ATB	(50.079.314,00)
• Reklas ke Ekstrakomtabel	(54.546.373,02)
1. Dinas Sosial berupa bangunan tempat ibadah	(15.000.000,00)
2. Dinas Koperasi, UKM berupa bangunan tempat ibadah	(12.925.373,02)
3. Dinas Pariwisata berupa papan tulisan bahasa bali	(26.620.000,00)
• Reklas ke Properti Investasi	(5.220.618.928,00)
1. Dinas Pariwisata	(4.905.618.928,00)
2. PPKD	(315.000.000,00)
• Reklas ke Beban Barang dan Jasa	(47.578.182,00)
1. Dinas Pendidikan berupa beban pemeliharaan gedung	(2.411.308,00)
2. DLHP berupa beban pemeliharaan gedung	(45.166.874,00)
• Penghapusan	(1.884.565.654,00)
1. RSUD berupa bale berigong	(150.868.000,00)
2. Dinas PUPRPKP berupa bangunan gedung kantor	(363.766.440,00)
3. Dinas Koperasi, UKMP berupa pemusnahan Pasar Semarapura	(1.369.931.214,00)
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan	747.470.966.423,81

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp937.483.897.594,16	Rp853.734.916.082,66
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31		

Desember 2022 masing-masing sebesar Rp937.483.897.594,16 dan Rp853.734.916.082,66, dengan rincian mutasi tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal	853.734.916.082,66
Mutasi Tambah:	
• Belanja Modal	42.368.269.276,00
• Hibah	930.385.000,00
1. Dinas PUPRPKP, hibah dari Developer Pesona Lembang	930.385.000,00
• Koreksi Pencatatan	739.752.387,50
1. Dinas PUPRPKP berupa koreksi biaya perencanaan dari belanja barang dan jasa tahun sebelumnya, biaya aset induk ekstrakomptabel dan kapitalisasi jembatan	535.602.612,50
2. Dinas Perhubungan berupa kapitalisasi belanja Tahun 2021	204.149.775,00
• Reklas dari Gedung dan Bangunan	1.159.449.624,00
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan berupa jalan lingkar di TPA	1.159.449.624,00
• Reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan	442.395.665,00
1. Dinas PUPRPKP berupa biaya perencanaan jalan kabupaten	435.383.560,00
2. Dinas Perhubungan	7.012.005,00
• Utang Belanja Modal	21.771.696.586,42
1. Dinas PUPRPKP	21.771.696.586,42
• Reklas dari Aset Lain Lain	18.225.035.068,00
Dinas PUPRPKP	18.225.035.068,00
Mutasi Kurang:	
• Koreksi Pencatatan	(0,42)
1. Dinas PUPRPKP	(0,42)
• Reklas ke KDP	(106.976.325,00)
1. Rumah Sakit Gema Santi berupa perencanaan pembangunan kanopi dan groundtank	(2.838.825,00)
2. Dinas PUPRPKP berupa jalan kabupaten	(104.137.500,00)
• Reklas ke Aset Lainnya	(209.274.294,00)
1. Dinas PUPRPKP berupa aset jalan	(209.274.294,00)
• Reklas Belanja Modal ke Ekstrakomptabel	(1.363.165.376,00)
1. Puskesmas Klungkung I berupa jaringan listrik dibawah kapitalisasi	(16.943.040,00)
2. Dinas PUPRPKP berupa JIJ	(15.278.457,00)
3. Dinas perhubungan berupa lampu penerangan jalan umum	(1.296.654.000,00)
4. Kecamatan Klungkung berupa JIJ	(34.289.879,00)
• Penghapusan	(208.586.000,00)
1. Dinas Koperasi UKMP berupa jalan di lingkungan pasar semarapura	(208.586.000,00)
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan	937.483.897.594,16

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Rp39.003.873.406,18	Rp34.846.059.641,69
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp39.069.948.066,69 dan Rp34.846.059.641,69, dengan rincian mutasi aset tetap lainnya tahun 2023 sebagai berikut:		
Saldo Awal	34.846.059.641,69	
Mutasi Tambah:		
• Belanja Modal	3.917.785.979,00	

• Hibah	41.512.200,00
1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa buku siap layan Pojok Baca Digital dari Perpustakaan RI (POCADI)	41.512.200,00
• Reklas dari Peralatan dan Mesin	149.300.000,00
1. Dinas Pendidikan berupa alat musik	149.300.000,00
• Reklas dari Gedung dan Bangunan	292.612.777,00
1. Dinas PUPR/PPK berupa tanaman	23.342.531,00
2. Dinas Koperasi	269.270.246,00
Mutasi Kurang:	
• Koreksi Pencatatan	(0,51)
1. Dinas Pendidikan	(0,51)
• Reklas ke Peralatan dan Mesin	(55.069.999,00)
1. Dinas Pendidikan berupa alat studio	(55.069.999,00)
• Reklas ke Ekstrakomptabel	(188.327.192,00)
1. Dinas Pendidikan berupa alat drumband	(182.970.624,00)
2. Dinas PUPR/PPK	(676.568,00)
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(4.680.000,00)
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	39.003.873.406,18

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran 28.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp8.824.593.674,26	Rp13.886.842.835,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp8.824.593.674,26 dan Rp13.886.842.835,00, dengan rincian mutasi Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal	13.886.842.835,00
Mutasi Tambah:	
• Reklas dari Gedung dan Bangunan	6.544.366.879,26
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.037.580.659,00
2. Dinas Kesehatan	630.913.219,26
3. Dinas Pariwisata	4.827.649.773,00
4. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	99.107.460,00
5. Kecamatan Klungkung	49.362.843,00
6. Inspektorat	99.752.925,00
• Reklas dari Jalan Irigasi dan Jaringan	106.976.325,00
1. Dinas PUPR/PPK	104.137.500,00
2. Dinas Kesehatan	2.838.825,00
Mutasi Kurang:	
• Reklas ke Gedung dan Bangunan	(11.623.550.105,00)
1. Dinas Kesehatan	(36.531.000,00)
2. RSUD	(10.655.576.186,00)
3. DPUPR/PPK	(332.693.750,00)
4. Dinas Koperasi, UKMP	(317.461.643,00)
5. Kecamatan Banjarangkan	(50.571.372,00)
6. Kecamatan Nusa Penida	(19.955.925,00)
7. Sekretariat DPRD	(10.760.229,00)
• Reklas ke Jalan Jaringan dan Irigasi	(90.042.260,00)
1. Dinas PUPR/PPK	(83.030.255,00)
2. Dinas Perhubungan	(7.012.005,00)
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.824.593.674,26

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	Rp(1.326.809.945.484,19)	Rp(1.188.427.832.496,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp(1.326.809.945.484,19) dan Rp(1.188.427.832.496,00).

Akumulasi penyusutan per jenis aset disajikan pada tabel berikut.

No.	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Peralatan dan Mesin	(399.075.761.901,83)	(353.697.918.765,00)	(45.377.843.136,83)	12,83
2	Gedung dan Bangunan	(245.625.637.499,35)	(219.570.898.375,00)	(26.054.739.124,35)	(11,87)
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	(662.108.546.083,00)	(615.159.015.356,00)	(66.949.530.727,00)	0,19
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.326.809.945.484,19)	(1.188.427.832.496,00)	(138.382.112.988,18)	11,64

Kenaikan/penurunan nilai akumulasi penyusutan karena:

Saldo Awal	(1.188.427.832.496,00)
Mutasi Tambah:	
• Beban Penyusutan	(139.576.533.799,67)
• Koreksi Ekuitas – Koreksi Penyusutan akibat mutasi masuk maupun keluar aset tetap antar OPD, hibah serta koreksi pencatatan aset	(3.399.801.057,19)
Mutasi Kurang:	
• Reklas ke Aset Lain-lain	2.634.124.108,67
• Reklas ke Properti Investasi	838.935.956,00
• Penghapusan aset tetap	1.121.161.804,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	(1.326.809.945.484,19)

Rincian Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.4 Dana Cadangan	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tidak membentuk dana cadangan.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.5 Aset Lainnya	Rp21.843.005.921,76	Rp35.765.728.854,73

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp21.843.005.921,76 dan Rp35.765.728.854,73, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Tagihan Jangka Panjang	2.351.695.692,86	2.351.695.692,86
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
c. Aset Tidak Berwujud	3.929.955.304,00	3.364.371.946,00

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
d. Amortisasi	(3.278.252.617,60)	(2.917.688.152,80)
e. Aset Lain-lain	39.417.304.169,84	56.636.698.026,17
f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(22.719.129.627,34)	(25.991.854.867,50)
g. Dana Transfer Treasury Deposit Facility	2.141.433.000,00	2.322.486.210,00
Jumlah Aset Lainnya	21.843.005.921,76	35.765.728.854,73

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	Rp2.351.695.692,86	Rp2.351.695.692,86

Jumlah tersebut merupakan saldo Tagihan Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.351.695.692,86 dan Rp2.351.695.692,86. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran	Rp51.936.000,00	Rp51.936.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp51.936.000,00 dan Rp51.936.000,00. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan penerimaan pendapatan atas tagihan penjualan barang milik daerah dalam bentuk penjualan kios yang dikelola pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember 2023 belum dilakukan pelunasan. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.5.1.2 Tuntutan Ganti Rugi	Rp2.299.759.692,86	Rp2.299.759.692,86

Jumlah tersebut merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.299.759.692,86 dan Rp2.299.759.692,86. Nilai Tuntutan Ganti Rugi tersebut berasal dari Laporan Pemantauan Kerugian Negara per 31 Desember 2023. Angka tersebut berasal dari hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp2.201.532.636,19 dan hasil pemeriksaan APIP sebesar Rp98.227.056,67. Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tidak memiliki aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud	Rp651.702.686,40	Rp446.703.793,20

Jumlah tersebut merupakan saldo neto Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022 masing-masing sebesar Rp651.702.686,40 dan Rp446.703.793,20 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Aset Tidak Berwujud (Bruto)	3.929.955.304,00	3.364.371.946,00
b. Amortisasi Tidak Berwujud	(3.278.252.617,60)	(2.917.668.152,80)
Jumlah Aset Tidak Berwujud (Neto)	651.702.686,40	446.703.793,20

Aset Tidak Berwujud tersebut seluruhnya berupa *software*. Rincian Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.5.4 Aset Lain-lain	Rp16.698.174.542,50	Rp30.644.843.158,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp16.698.174.542,50 dan Rp30.644.843.158,67 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Aset Rusak Berat	1.445.121.855,50	1.502.322.279,67
b. Aset Tetap Akan Dihilangkan	13.790.006.144,00	27.679.474.336,00
c. Aset Tanah Provinsi dalam proses hibah ke Kabupaten	0,00	0,00
d. Aset di Pinjam Pakai Pihak ketiga	1.463.046.543,00	1.463.046.543,00
Jumlah Aset Lain-lain	16.698.174.542,50	30.644.843.158,67

Aset Lain – lain Pemerintah Kabupaten Klungkung terdiri dari aset tetap rusak berat dan aset tetap yang akan dihilangkan. Aset tetap rusak berat berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya dengan kondisi rusak berat dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan atau dalam pelayanan kepada masyarakat yang direklasifikasi ke Aset Lain-lain sesuai nilai buku aplikasi SIMDA BMD. Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.5.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) – Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp2.141.433.000,00	Rp2.322.486.210,00

Jumlah Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) tersebut merupakan Penerimaan Pendapatan Dana Transfer Tahun 2023 dalam bentuk Non Tunai/ *Treasury Deposit Facilities* (TDF TKD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.141.433.000,00 yang berada di Rekening BI dengan Nomor Rekening :519000549980 atas nama Rek Lain BI TDF TKD Kab Klungkung, berdasarkan

PMK Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas TDF.

Dana TDF Tahun 2022 termasuk nilai remunerasi telah dicairkan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 11 April 2023 sebesar Rp28.384.059,00, tanggal 14 April 2023 sebesar Rp1.147.052.000,00 dan tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.147.050.151,00.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.6	Properti Investasi	Rp6.442.947.332,00	Rp0,00

Jumlah Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.442.947.332,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Tanah	2.061.264.360,00	0,00
2. Gedung dan Bangunan	5.220.618.828,00	0,00
3. Akumulasi Penyusutan	(838.935.956,00)	0,00
Jumlah Properti Investasi	6.442.947.332,00	0,00

- Tanah yang dicatat dalam Properti Investasi adalah Tanah Bangunan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga baik itu masyarakat maupun investor yang dimanfaatkan sebagai Bangunan Pertokoan di Jalan Nakula dan Jalan Diponegoro Komplek Pasar semarapura, serta tanah di Nusa Penida yang yang dimanfaatkan dalam pembangunan sarana pariwisata.
- Gedung dan Bangunan yang dicatat dalam Properti Investasi adalah Bangunan Gedung Pertokoan yang dimanfaatkan sebagai Pertokoan Koppas Inti Srinadi (ex Tragia) di Jalan Batukaru Semarapura, Bangunan Plaza Kuliner di Goa Lawah dan Lembongan, Stage Ceningan serta Gedung Graha Penginapan Sang Graha.

Rincian Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada **Lampiran 35a dan Lampiran 35b**.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.2	Kewajiban	Rp128.943.704.965,19	Rp98.017.458.262,92

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jumlah Kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp128.943.704.965,19 dan Rp98.017.458.262,92.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	Rp78.479.011.479,19	Rp42.118.104.993,92

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp78.479.011.479,19 dan Rp42.118.104.993,92, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.434.659.783,00	0,00
c. Pendapatan Diterima Dimuka	290.413.164,42	329.760.447,92
d. Utang Beban	72.458.443.158,42	41.786.323.747,00
e. Utang Jangka Pendek Lainnya	295.485.373,35	20.799,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	78.479.011.479,19	42.118.104.993,92

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp5.434.659.783,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung berupa jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman PEN mulai tanggal 30 Juni 2024 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.434.659.783,00 dan Rp0,00.

Tanggal Jatuh Tempo Tahun 2024	Nilai Utang (Rp)
Pinjaman PEN:	
a. 30 Juni 2024	776.379.969,00
b. 31 Juli 2024	776.379.969,00
c. 31 Agustus 2024	776.379.969,00
d. 30 September 2024	776.379.969,00
e. 31 Oktober 2024	776.379.969,00
f. 30 Nopember 2024	776.379.969,00
g. 31 Desember 2024	776.379.969,00
Jumlah	5.434.659.783,00

- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp5.434.659.783,00 merupakan bagian dari Saldo Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Klungkung yang jatuh tempo pada tahun 2024.
- Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat tersebut berupa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2022 sebesar Rp55.899.353.269,00 dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19 per tahun serta masa grace period selama 2 tahun. Pinjaman tersebut tertuang pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-237/SMI/1221 tanggal 30 Desember 2021 yang telah diubah dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-021/SMI/0322 tanggal 8 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 290.413.164,42	Rp329.760.447,92

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang diterima Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 290.413.164,42 dan Rp329.760.447,92.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Pendapatan Reklame Diterima Dimuka	86.766.847,75	131.974.031,25
b. Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka	96.528.750,00	122.269.750,00

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
c. Pendapatan sewa tempat ATM (RSUD Gema Santi Nussa Penida-BLUD)	51.300.900,00	0,00
d. Pendapatan sewa tempat ATM (RSUD-BLUD)	55.816.886,67	75.516.886,67
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	290.413.164,42	329.760.447,92

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

5.3.2.1.4 Utang Belanja **31 Desember 2023**
Rp72.458.443.158,42 **31 Desember 2022**
Rp41.788.323.747,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp72.458.443.158,42 dan Rp41.788.323.747,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Belanja Pegawai		
a. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
Utang Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai	8.192.770.093,00	7.842.804.142,00
b. Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.763.360.042,00	0,00
c. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.594.642.472,00	1.896.841.641,00
d. Utang Pegawai BLUD	1.009.336.418,00	8.619.299.829,00
e. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		
• Utang Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi	223.191.852,00	253.371.516,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		
a. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		
• Utang BLUD RSUD, RS Gema Santi dan Puskesmas	17.307.797.923,00	19.661.450.532,00
b. Utang Belanja Jasa		
• Utang Telepon, Internet, Air, Listrik dan Surat Kabar	741.126.675,00	777.946.221,00
• Utang Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN	42.516.294,00	262.247.226,00
• Utang Jasa Tenaga Administrasi	54.574.100,00	53.295.980,00
• Utang Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0,00	0,00
• Utang Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	36.721.585,00
• Utang Jasa Pelayanan Umum	510.000,00	32.747.500,00
• Utang Jasa Pengolahan Sampah	0,00	3.880.580,00
• Utang Jasa Pengolahan Air Limbah	0,00	15.772.212,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi		
a. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.161.964.829,00	1.708.963.179,00
b. Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	856.739.897,00	823.001.304,00
Utang Belanja Modal		0,00
• DPUPRKP	24.147.696.587,42	
• Dinas Pariwisata	1.362.215.976,00	
Jumlah Utang Belanja	72.458.443.158,42	41.788.323.747,00

- a. Utang Belanja yang nilainya cukup besar adalah utang belanja modal yang merupakan proyek fisik pembangunan Mall Pelayanan Publik serta Jalan yang menggunakan sumber dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Provinsi Bali yang hingga akhir tahun 2023 belum sepenuhnya disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Klungkung.

b. Pengakuan nilai Utang Belanja akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

Saldo Awal	41.788.323.747,00
Mutasi Tambah:	
▪ Pengakuan Beban Tahun 2023	70.685.536.401,42
▪ Koreksi Saldo awal Utang Iuran Jaminan Kesehatan /BPJS TPG	1.763.380.042,00
Mutasi Kurang:	
▪ Koreksi Utang Insentif	(453.285,00)
▪ Pembayaran Utang	(41.787.870.462,00)
Saldo Akhir	72.458.443.158,42

Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 37.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 295.495.373,35	Rp20.799,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung berupa Pengembalian saldo Kas BOSP SMPN 1 Batukandik atas temuan pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Klungkung sebesar Rp10.547.100,00 serta Utang kelebihan penerimaan PAD Tahun 2023 sebesar Rp284.948.273,35. Sedangkan Tahun 2022 merupakan dana pihak ketiga yang belum ditarik dari Bendahara Pengeluaran BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.799,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
a. Utang Pengembalian Dana BOS	10.547.100,00	0,00
b. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel	34.042.985,00	0,00
c. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah	63.460,00	0,00
d. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Denda Air Bawah Tanah	20.528,00	0,00
e. Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	250.821.300,35	0,00
f. Utang Pihak ketiga pada Bendahara BOS	0,00	20.799,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	295.495.373,35	20.799,00

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	Rp50.464.693.486,00	Rp55.899.353.269,00

Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 memiliki Kewajiban Jangka Panjang masing-masing sebesar Rp50.464.693.486,00 dan Rp55.899.353.269,00.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.2.2.1	Utang kepada Pemerintah Pusat	Rp50.464.693.486,00	Rp55.899.353.269,00
	<p>a. Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp50.464.693.486,00 dan Rp55.899.353.269,00.</p> <p>b. Saldo tersebut merupakan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2022 sebesar Rp55.899.353.269,00 dikurangi dengan Bagian Utang jangka Panjang yang jatuh tempo Tahun 2024 dan disajikan pada rekening Bagian lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp5.434.659.783,00.</p> <p>c. Utang kepada Pemerintah Pusat tersebut berupa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2022 dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19 per tahun serta masa grace period selama 2 tahun. Pinjaman tersebut tertuang pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-237/SMI/1221 tanggal 30 Desember 2021 yang telah diubah dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-021/SMI/0322 tanggal 8 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung.</p> <p>d. Total nilai pinjaman PEN Daerah adalah Rp62.184.639.061,00, dan telah terealisasi Tahun 2022 sebesar Rp55.899.353.269,00. Nilai kontrak pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menggunakan dana pinjaman PEN Daerah tahun 2022 totalnya sebesar Rp55.899.353.271,00 selisih Rp2,00 dengan realisasi pinjaman karena pembulatan.</p> <p>e. Dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp55.899.353.271,00 digunakan oleh Dinas PUPRKP untuk pembiayaan pembangunan sektor infrastruktur jalan sebesar Rp19.311.073.655,00 dan RSUD Kabupaten Klungkung untuk pembangunan sektor infrastruktur kesehatan sebesar Rp36.588.279.616,00.</p>		
5.3.3	Ekuitas	Rp1.155.959.419.201,34	Rp1.044.463.769.071,29
	<p>Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.155.971.137.895,34 dan Rp1.044.463.769.071,29. Saldo Ekuitas di Neraca 31 Desember 2023 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (Lihat CaLK 5.6.4).</p>		

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam laporan Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 Kegiatan Operasional

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.1 Pendapatan-LO	Rp1.361.162.002.219,85	Rp1.063.393.322.675,70

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	352.487.319.593,85	262.702.807.133,70
b. Pendapatan Transfer-LO	1.001.719.073.325,00	794.643.714.220,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	6.955.609.301,00	6.046.801.322,00
Jumlah Pendapatan-LO	1.361.162.002.219,85	1.063.393.322.675,70

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp352.487.319.593,85	Rp262.702.807.133,70

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pajak Daerah-LO	114.851.828.908,50	67.084.006.138,75
b. Pajak Retribusi Daerah-LO	48.150.209.357,64	32.344.838.034,38
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.602.949.070,93	7.035.424.452,66
d. Lain-lain PAD yang Sah-LO	181.882.332.256,78	156.238.538.507,91
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	352.487.319.593,85	262.702.807.133,70

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.1.1.1 Pajak Daerah-LO	Rp114.851.828.908,50	Rp67.084.006.138,75

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pajak Hotel	34.831.626.210,00	13.092.873.984,00
b. Pajak Restoran	36.968.607.619,00	11.714.514.502,00
c. Pajak Hiburan	683.787.863,00	92.332.180,00
d. Pajak Reklame	237.695.933,50	288.406.966,75
e. Pajak Penerangan Jalan	16.661.180.318,00	13.993.105.022,00
f. Pajak Parkir	54.827.228,00	52.927.389,00
g. Pajak Air Tanah	467.431.301,00	267.676.044,00
h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.646.222.646,00	3.787.410.369,00
i. Pajak BPHTB	21.300.449.790,00	23.794.759.682,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO	114.851.828.908,50	67.084.006.138,75

Pengakuan nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 berbeda dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Pendapatan Pajak Daerah-LO	114.851.828.908,50
• Pendapatan Pajak Daerah-LRA	113.695.107.808,00
Selisih LO dan LRA	1.156.721.102,50
Penjelasan selisih:	
• Pembayaran piutang Pajak Hotel TA 2022	(862.377.903,00)
• Penambahan piutang Pajak Hotel TA 2023	1.057.125.307,00
• Pembayaran piutang Pajak Restoran TA 2022	(913.457.536,00)
• Penambahan piutang Pajak Restoran TA 2023	1.353.336.834,00
• Pajak Reklame Diterima dimuka TA 2022	131.974.031,25
• Pajak Reklame Diterima dimuka TA 2023	(86.768.847,75)
• Pembayaran piutang Pajak Penerangan Jalan TA 2022	(1.591.983.121,00)
• Penambahan piutang Pajak Penerangan Jalan TA 2023	1.315.686.598,00
• Pajak Hotel Diterima dimuka TA 2023	(34.042.985,00)
• Pajak Air Bawah Tanah Diterima dimuka TA 2023	(63.480,00)
• Pembayaran piutang Pajak Air Bawah Tanah TA 2022	(28.982.733,00)
• Penambahan piutang Pajak Air Bawah Tanah TA 2023	48.701.997,00
• Pembayaran piutang PBB TA 2022	(1.319.482.617,00)
• Penambahan piutang PBB TA 2023	2.098.671.338,00
• Pembayaran piutang pajak BPHTB TA 2022	(9.617.900,00)
Jumlah	1.156.721.102,50

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Rp48.150.209.357,64

Rp32.344.838.034,38

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	198.237.000,00	205.872.000,00
b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	256.742.000,00	190.334.000,00
c. Retribusi Pelayanan Pasar	8.891.006.112,60	9.491.979.562,38
d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	130.759.000,00	155.378.000,00
e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	6.743.500,00	4.716.400,00
f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	83.460.800,00	83.320.000,00
g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.817.847.823,39	778.695.680,00
h. Retribusi Tempat Pelelangan	37.685.000,00	34.960.000,00
i. Retribusi Terminal	163.423.000,00	187.780.000,00
j. Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.661.142.000,00	2.648.365.000,00
k. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa	26.400.000,00	10.950.000,00
l. Retribusi Rumah Potong Hewan	9.600.000,00	7.200.000,00
m. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.444.555.089,00	2.146.500.580,00
n. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	20.492.595.000,00	8.175.430.000,00
o. Retribusi Penyebrangan di Air	8.034.789.554,00	7.181.563.984,00
p. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	59.560.000,00	40.685.000,00
q. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	844.048.076,00
r. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	107.500.000,00	56.000.000,00
s. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.780.000,00	3.605.000,00
t. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.517.786.051,00	0,00
u. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	97.454.572,00
v. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	207.797.447,65	0,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO	48.150.209.357,64	32.344.838.034,38

Pengakuan nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 berbeda dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Pendapatan Retribusi Daerah-LO	48.150.209.357,64
• Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	47.649.857.636,55

Selisih LO dan LRA **500.351.721,09**

Penjelasan selisih:

• Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022	(397.998.166,00)
• Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023	219.380.825,00
• Pembayaran Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022	(334.773.224,84)
• Penambahan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023	940.950.777,28
• Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	331.907.800,00
• Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan TA 2023	11.924.010,00
• Pembayaran Piutang Retribusi Tempat Rekreasi TA 2022	(30.000.000,00)
• Pembayaran Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022	(10.280.000,00)
• Penambahan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023	840.000,00
• Pembayaran Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol TA 2022	(10.000.000,00)
• Penambahan Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol TA 2023	3.500.000,00
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka TA 2022 (BPKPD sewa tanah PT Microcell)	122.269.750,00
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka TA 2023 (BPKPD sewa tanah PT Microcell)	(98.528.750,00)
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Diterima Dimuka TA 2023	(250.821.300,35)

Jumlah **500.351.721,09**

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**

5.4.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO **Rp7.602.949.070,93** **Rp7.035.424.452,66**

Pengakuan nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 sama dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp7.602.949.070,93.

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**

5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO **Rp181.882.332.256,78** **Rp156.238.538.507,91**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-lain PAD yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	387.984.789,00	391.549.865,00
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	245.439.600,00	197.161.000,00
c. Jasa Giro	1.296.222.110,95	1.068.350.534,78
d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	813.422.637,90	85.640.920,22
e. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	231.787.484,77
f. Pendapatan Denda Pajak Daerah	271.524.784,00	476.897.224,00
g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	736.899.322,36	699.805.854,80
h. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	100.000,00

i. Pendapatan dari Pengembalian	1.417.948.337,34	21.454.477,00
j. Pendapatan BLUD	176.815.713.456,70	153.003.477.873,80
k. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergilir	40.750.000,00	61.750.000,00
l. Remunerasi	56.427.218,53	563.273,54
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah –LO	181.882.332.256,78	156.238.538.507,91

Pengakuan nilai Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 berbeda dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Lain-lain PAD yang Sah-LO	181.882.332.256,78
• Lain-lain PAD yang Sah-LRA	181.588.587.871,85
Selisih LO dan LRA	293.734.384,93

Penjelasan selisih:

• Penambahan Piutang Kontribusi Penyertaan Modal TA 2023	36.250.000,00
• Pembayaran Piutang Kontribusi Penyertaan Modal TA 2022	(1.750.000,00)
• Penambahan Piutang Pendapatan BLUD - RSUD TA 2023	1.366.666.624,00
• Penambahan Piutang Pendapatan BLUD - RSGS TA 2023	42.539.600,00
• Penambahan Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas TA 2023	9.505.000,00
• Pembayaran Piutang Pendapatan BLUD - RSUD TA 2022	(893.369.807,80)
• Pembayaran Piutang Pendapatan BLUD - RSGS TA 2022	(940.543.355,00)
• Pembayaran Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas TA 2022	(67.103.000,00)
• Pembayaran remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) TA 2022	(563.273,54)
• Penambahan piutang denda pendapatan pajak daerah TA 2023	176.314.263,00
• Pembayaran piutang denda pendapatan pajak daerah TA 2022	(49.006.298,00)
• Penambahan piutang denda retribusi pelayanan tempat rekreasi TA 2023	650.807.045,20
• Penambahan piutang denda retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol TA 2023	3.480.000,00
• Pembayaran piutang denda retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol TA 2022	(975.000,00)
• Penambahan piutang denda retribusi pelayanan pasar TA 2023	52.646.598,00
• Pembayaran piutang denda retribusi pelayanan pasar TA 2022	(76.176.290,00)
• Penambahan piutang denda retribusi sewa tanah toko TA 2023	16.845.416,00
• Penambahan Piutang Remunerasi TDF Tahun 2023	20.291,07
• Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah Diterima Dimuka TA 2023	(20.528,00)
• Pendapatan Diterima Dimuka BLUD - RSUD TA 2022	75.516.666,67
• Pendapatan Diterima Dimuka BLUD - RSUD TA 2023	(55.816.666,67)
• Pendapatan Diterima Dimuka BLUD – RSUD Gema Santi TA 2023	(51.300.900,00)
Jumlah	293.734.384,93

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer-LO Rp1.001.719.073.325,00 Rp794.643.714.220,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	788.819.632.913,00	696.287.844.115,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	232.899.440.412,00	98.355.870.105,00
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	1.001.719.073.325,00	794.643.714.220,00

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	Rp768.819.632.913,00	Rp696.287.844.115,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Dana Perimbangan-LO	743.345.086.913,00	675.033.462.115,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	13.661.524.925,00	20.763.382.778,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) - LO	1.842.525.000,00	2.170.118.509,00
Dana Alokasi Umum - LO	516.451.973.000,00	494.287.735.000,00
Dana Alokasi Khusus - LO	211.389.063.988,00	157.812.225.828,00
b. Dana Insentif Daerah (DID)-LO	25.474.546.000,00	21.254.382.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- LO	768.819.632.913,00	696.287.844.115,00

Pengakuan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	768.819.632.913,00
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	818.590.718.389,00
Selisih LO dan LRA	(49.771.085.476,00)
Penjelasan selisih:	
• Penyaluran DAK Non Fisik-BOP PAUD ke sekolah swasta	(1.489.147.503,00)
• Penyaluran DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan ke sekolah swasta	(257.627.763,00)
• Pengakuan Pendapatan DBH Non Tunai yang disalurkan dalam bentuk TDF TA 2023	2.141.433.000,00
• Pencairan Pendapatan DBH Non Tunai yang disalurkan dalam bentuk TDF TA 2022	(2.322.486.210,00)
• Dana Desa	(47.843.257.000,00)
Jumlah	(49.771.085.476,00)

Sesuai dengan Bultek Nomor 21 Akuntansi Transfer Akrua! Pendapatan dan Beban Transfer Dana Desa pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak diakui karena dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai penampung sementara sebelum disalurkan sehingga Pendapatan dan Beban Transfer Dana Desa tidak dapat diukur sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung (Lihat CaLK 5.4.1.2.2.2).

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	Rp232.899.440.412,00	Rp98.355.870.105,00

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
1. Pendapatan Bagi Hasil -LO	Rp112.934.707.847,00	Rp91.998.519.132,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor-LO	39.452.524.269,00	38.437.423.845,00
b. Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama	32.038.413.613,00	17.958.473.875,00

Kendaraan Bermotor-LO		
c. Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	25.662.516.222,00	19.317.862.341,00
d. Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LO	118.951.449,00	99.806.329,00
e. Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LO	15.662.302.294,00	16.184.952.742,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil-LO	112.934.707.847,00	91.998.519.132,00

Pengakuan nilai Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2023 berbeda dengan Pendapatan Bagi Hasil-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Pendapatan Bagi Hasil-LO	112.934.707.847,00
• Pendapatan Bagi Hasil-LRA	103.794.221.756,00
Selisih LO dan LRA	9.140.486.091,00

Penjelasan selisih:

• Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2023	10.528.502.598,00
• Penambahan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2023	8.876.863.444,00
• Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2023	6.842.690.007,00
• Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan TA 2023	32.034.544,00
• Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2022	(8.768.950.741,00)
• Pembayaran Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2022	(4.260.631.724,00)
• Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2022	(4.090.577.561,00)
• Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2022	(19.444.476,00)
Jumlah	9.140.486.091,00

2. Bantuan Keuangan –LO Tahun 2023 Rp119.964.732.565,00 Tahun 2022 Rp6.357.350.973,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Bantuan Keuangan-LO dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LO	47.054.565.280,00	6.104.550.973,00
b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten-LO	72.910.147.285,00	252.800.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan-LO	119.964.732.565,00	6.357.350.973,00

Pengakuan nilai Bantuan Keuangan-LO Tahun 2023 berbeda dengan Bantuan Keuangan-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Bantuan Keuangan-LO	119.964.732.565,00
• Bantuan Keuangan-LRA	97.457.413.641,00
Selisih LO dan LRA	22.507.318.924,00

Penjelasan Selisih:

Selisih LO dan LRA sebesar Rp22.507.318.924,00 merupakan penambahan pengakuan Piutang berdasarkan BA rekon Nomor B.31.900.1.6.3/2708/Sat/BPKAD Tahun 2024 tentang pengakuan Utang Pendapatan Transfer kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Rp6.955.609.301,00	Rp6.046.801.322,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	4.754.056.727,00	2.793.400.000,00
b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	626.589.000,00	2.678.444.500,00
c. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri -LO	200.000.000,00	173.174.060,00
d. Pendapatan Hibah Kelompok Masyarakat/Perorangan dalam Negeri-LO	1.355.745.000,00	328.495.300,00
e. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.960.479,00	895.628,00
f. Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia-LO	7.258.095,00	72.291.834,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	6.955.609.301,00	6.046.801.322,00

Pengakuan nilai Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023 berbeda dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	6.955.609.301,00
• Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA	207.218.574,00
Selisih LO dan LRA	6.748.390.727,00

Selisih sebesar Rp6.738.390.727,00 merupakan pengakuan pendapatan hibah aset dari pihak luar yang terdiri dari:

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat:

• Hibah dari Kemenkes yang diberikan langsung kepada Dinas Kesehatan berupa peralatan dan mesin	322.082.340,00
• Hibah dari BUMN yang diberikan langsung kepada Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida berupa obat	8.300.000,00
• Hibah tanah negara yang diberikan langsung kepada Dinas PUPR/PPK	56.000.000,00
• Hibah dari Kementerian Dalam Negeri yang diberikan langsung kepada SatpolPP berupa sepeda motor	45.234.525,00
• Hibah dari BPBD Provinsi Bali yang diberikan langsung kepada BPBD Klungkung berupa peralatan bencana kekeringan	1.609.450.000,00
• Hibah dari Bappenas yang diberikan langsung kepada DKPP berupa papan pengumuman	12.350.000,00
• Hibah dari Bappenas yang diberikan langsung kepada DKPP berupa menara pantau di hutan mangrove Lembangan	1.225.707.679,00
• Hibah dari Pemprov yang diberikan langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa persediaan bahan cetak	219.107.500,00
• Hibah dari Pemprov yang diberikan langsung kepada DPMD/PPKB berupa persediaan bahan lainnya berupa alat kesehatan	201.589.983,00
• Hibah dari Perpustakaan RI kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa peralatan dan mesin	192.075.000,00
• Hibah dari Perpustakaan RI kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa buku pojok baca digital	41.512.200,00
• Hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Bali kepada PPKD	820.647.500,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO:

• Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali yang kepada PPKD berupa tanah	626.589.000,00
---	----------------

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO

• Hibah dari Developer Pesona Leping yang diberikan langsung kepada Dinas PUPR/PPK berupa tanah	435.380.000,00
• Hibah dari Developer Pesona Leping yang diberikan langsung kepada Dinas PUPR/PPK berupa jalan, irigasi dan jaringan	930.385.000,00

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

• Hibah dari PT. Citra Dian Pratama yang diberikan langsung kepada RSUD berupa kursi roda	2.000.000,00
---	--------------

Jumlah	6.748.390.727,00
---------------	-------------------------

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**

5.4.1.2 Beban **Rp1.270.338.328.610,16 Rp1.164.734.848.937,19**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Operasi	1.195.100.500.916,16	1.096.165.971.258,19
b. Beban Transfer	75.237.827.694,00	68.568.877.679,00
Jumlah Beban	1.270.338.328.610,16	1.164.734.848.937,19

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**

5.4.1.2.1 Beban Operasi **Rp1.195.100.500.916,16 Rp1.096.165.971.258,19**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Pegawai	537.845.100.163,00	526.896.656.057,20
b. Beban Barang dan Jasa	393.006.498.679,52	365.732.389.560,82
c. Beban Bunga	3.432.910.119,00	1.834.470.783,00
d. Beban Subsidi	0,00	0,00
e. Beban Hibah	113.776.483.855,00	81.570.701.337,00
f. Beban Bantuan Sosial	4.570.130.500,00	5.551.732.700,00
g. Beban Penyusutan	2.530.664.335,17	878.183.617,29
h. Beban Amortisasi	138.576.533.799,67	111.765.085.494,00
i. Beban Penyisihan Piutang	362.179.464,80	280.989.793,20
j. Beban Lain-lain	0,00	1.655.761.915,68
Jumlah Beban Operasi	1.195.100.500.916,16	1.096.165.971.258,19

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai **Rp537.845.100.163,00 Rp526.896.656.057,20**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN	277.039.384.358,00	281.587.562.430,00
b. Beban Tambahan Penghasilan ASN	108.111.782.053,00	102.708.148.453,00
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.082.329.157,00	118.150.109.729,20
d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.120.652.124,00	23.087.433.174,00
e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	608.397.426,00	561.803.271,00
f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	771.600.000,00	801.600.000,00
g. Beban Pegawai BLUD	69.110.975.045,00	0,00
Jumlah Beban Pegawai	537.845.100.163,00	526.896.656.057,20

Pengakuan nilai Beban Pegawai-LO Tahun 2023 berbeda dengan Belanja Pegawai-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Beban Pegawai-LO	537.845.100.163,00
• Belanja Pegawai-LRA	532.237.023.471,00
Selisih LO dan LRA	5.608.076.692,00
Penjelasan selisih:	
• Penambahan Utang Beban TA 2023	25.783.300.877,00

• Pengurangan atas pembayaran Utang Beban TA 2022	(18.412.317.428,00)
• Koreksi utang iuran jaminan kesehatan BPJS tahun 2020 yang belum tercatat	(1.763.360.042,00)
• Koreksi utang insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2022	429.106,00
• Koreksi utang insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir tahun 2022	24.180,00
• Koreksi utang insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tahun 2022	(1,00)
Jumlah	5.608.076.692,00

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.1.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp393.006.498.679,52 Rp365.732.389.560,82

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Barang	38.741.970.664,78	114.597.199.843,84
b. Beban Jasa	161.658.763.888,49	197.606.455.644,22
c. Beban Pemeliharaan	17.113.207.533,94	17.367.865.887,28
d. Beban Perjalanan Dinas	30.184.672.612,00	28.956.986.709,13
e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.595.420.500,00	6.620.995.250,00
f. Beban Barang Ekstrakomptable	0,00	582.887.416,35
g. Beban Barang dan Jasa BOS	21.090.106.497,00	0,00
h. Beban Barang dan Jasa BLUD	118.622.356.983,31	0,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa	393.006.498.679,52	365.732.389.560,82

Pengakuan nilai Beban Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 berbeda dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Beban Barang dan Jasa-LO	393.006.498.679,52
• Belanja Barang dan Jasa-LRA	390.939.219.129,44
Selisih LO dan LRA	2.067.279.550,08

Penjelasan selisih:

• Utang Beban Barang dan Jasa TA 2023	18.146.524.992,00
• Utang Beban Barang dan Jasa TA 2022	(20.844.041.836,00)
• Saldo Persediaan TA 2023	(21.441.453.051,83)
• Saldo Persediaan TA 2022	27.609.185.990,64
• Berkurangnya persediaan karena pemberian hibah barang persediaan	(2.190.718.675,00)
• Berkurangnya persediaan karena adanya persediaan barang kadaluwarsa	(1.482.652.666,02)
• Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah	432.201.115,55
• Bertambahnya persediaan karena koreksi saldo awal tahun	31.859.324,90
• Beban Dibayar Dimuka TA 2023	(718.589.826,86)
• Beban Dibayar Dimuka TA 2022	162.083.218,24
• Reklas Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomptable Peralatan dan Mesin	269.176.883,00
• Reklas Belanja Modal – Gedung dan Bangunan TA 2023 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomptable Gedung dan Bangunan	75.679.373,02
• Reklas Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomptable Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.363.165.376,00
• Reklas Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya TA 2023 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomptable Aset Tetap Lainnya	188.327.192,00
• Reklas Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa selain Beban Barang Ekstrakomptable (beban pemeliharaan)	513.360.682,00
• Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa TA 2023	(331.272.986,00)
• Koreksi Catat Beban Dibayar Dimuka tahun 2022	264.444.444,44
Jumlah	2.067.279.550,08

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.2.1.3 Beban Bunga	Rp3.432.910.119,00	Rp1.834.470.783,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang Tahun 2023 dan 2022. Pengakuan nilai Beban Bunga-LO Tahun 2023 sama dengan Belanja Bunga-LRA sebesar Rp3.432.910.119,00.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.2.1.4 Beban Subsidi	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Subsidi Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.2.1.5 Beban Hibah	Rp113.776.483.855,00	Rp81.570.701.337,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.774.626.210,00	5.645.649.126,00
b. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0,00	24.027.783.000,00
c. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	97.358.234.000,00	51.231.942.926,00
d. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	643.621.645,00	665.346.285,00
Jumlah Beban Hibah	113.776.483.855,00	81.570.701.337,00

Pengakuan nilai Beban Hibah Tahun 2023 berbeda dengan Belanja Hibah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Beban Hibah-LO	113.776.483.855,00
• Belanja Hibah-LRA	112.552.519.446,00
Selisih LO dan LRA	1.223.964.409,00
Penjelasan Selisih:	
• Persediaan barang di Dinas PUPRPKP yang sudah diserahkan kepada masyarakat TA 2022	421.023.600,00
• Persediaan barang di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang sudah diserahkan ke Pemerintah Pusat (Kodim) TA 2022	1.769.695.075,00
• Hibah aset tetap di PPKD berupa tanah ke BNN	3.575.000,00
• Hibah aset tetap di PPKD berupa tanah ke Desa	174.721.750,00
• Hibah aset tetap di PPKD berupa peralatan dan Mesin ke Desa Adat	232.040.750,00
• Hibah aset tetap di PPKD berupa gedung dan bangunan ke BNN	236.346.000,00
• Hibah aset lain-lain di PPKD ke Polres	133.000.000,00
• Hibah aset lain-lain di PPKD ke Desa	337.500,00
• Pengurangan beban hibah atas belanja BOP PAUD Sekolah Swasta	(1.489.147.503,00)
• Pengurangan beban hibah atas belanja BOP Kesetaraan Sekolah Swasta	(257.627.763,00)
Jumlah	1.223.964.409,00

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.2.1.6 Beban Bantuan Sosial	Rp 4.570.130.500,00	Rp5.551.732.700,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	795.500.000,00	2.319.850.000,00
b. Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.774.630.500,00	3.231.882.700,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial	4.570.130.500,00	5.551.732.700,00

Pengakuan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sama dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA sebesar Rp4.570.130.500,00.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang	Rp2.530.664.335,17	Rp878.183.617,29

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	947.922.154,83	3.365.490,45
b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	604.872.855,01	436.038.453,28
c. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
d. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	815.212.800,26	417.904.321,59
e. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
f. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	158.239.025,07	20.875.351,97
g. Beban Penyisihan Pokok Dana Bergulir	4.417.500,00	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	2.530.664.335,17	878.183.617,29

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 termasuk didalamnya beban penyisihan Investasi Non Permanen yaitu beban penyisihan pokok dana bergulir sesuai hasil pemutakhiran kode rekening yang diatur dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/7571/Keuda tanggal 5 April 2024.

Untuk Tahun 2022 Beban Penyisihan Investasi Non Permanen dicatat sebagai Beban lain-lain.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp139.938.713.264,47	Rp112.046.075.287,20

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Penyusutan	139.576.533.799,67	111.765.085.494,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	45.689.537.021,67	46.373.205.073,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.391.667.371,00	23.822.937.223,00

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.498.329.407,00	41.588.943.198,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
b. Beban Amortisasi	362.179.464,80	280.989.793,20
Jumlah Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi	139.938.713.264,47	112.046.075.287,20

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.2.1.9 Beban Lain-lain	Rp0,00	Rp1.655.761.915,68

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Lain-lain Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022, yang terdiri dari :

- Beban penyisihan investasi non permanen – Dana Bergulir sebesar Rp.711.125,00
- Beban aset ekstrakomtabel Rp. 1.655.050.790,68.

Tahun 2023 tidak ada lagi akun rekening beban lain-lain sehingga Beban Penyisihan Investasi dicatat sebagai beban penyisihan piutang lainnya yaitu beban penyisihan pokok dana bergulir, sedangkan beban aset ekstrakomtabel dicatat pada rekening Beban Barang Tak Habis Pakai - Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.2.2 Beban Transfer	Rp75.237.827.694,00	Rp68.568.877.679,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Bagi Hasil	15.942.739.694,00	9.584.421.965,00
b. Beban Bantuan Keuangan	59.295.088.000,00	58.984.455.714,00
Jumlah Beban Transfer	75.237.827.694,00	68.568.877.679,00

Pengakuan nilai Beban Transfer tahun 2023 berbeda dengan Belanja Transfer-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Beban Transfer-LO	75.237.827.694,00
• Belanja Transfer-LRA	122.594.344.451,00
Selisih LO dan LRA	(47.356.516.757,00)

Penjelasan selisih:

• Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA 2023	2.161.964.829,00
• Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA 2022	(1.708.963.179,00)
• Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA 2023	866.739.897,00
• Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA 2022	(823.001.304,00)
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	(47.843.257.000,00)
Jumlah	(47.356.516.757,00)

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.2.2.1 Beban Bagi Hasil	Rp15.942.739.694,00	Rp9.584.421.965,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp11.172.731.327,00	Rp6.372.151.542,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Klungkung dan dibagikan kepada pemerintah desa.

Pengakuan nilai Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2023 berbeda dengan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Beban Bagi Hasil Pajak Daerah-LO	11.172.731.327,00
• Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah-LRA	10.719.729.877,00
Selisih LO dan LRA	453.001.650,00
Penjelasan selisih:	
• Utang Beban Bagi Hasil Pajak TA 2023	2.161.964.829,00
• Utang Beban Bagi Hasil Pajak TA 2022	(1.708.963.179,00)
Jumlah	453.001.650,00

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
2. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp4.770.008.367,00	Rp3.212.270.423,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, atas pendapatan retribusi daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Klungkung dan dibagikan kepada pemerintah desa.

Pengakuan nilai Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 berbeda dengan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah-LRA akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

• Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah-LO	4.770.008.367,00
• Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah-LRA	4.736.269.774,00
Selisih LRA dan LO	33.738.593,00
Penjelasan selisih:	
• Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2023	856.739.897,00
• Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2022	(823.001.304,00)
Jumlah	33.738.593,00

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan	Rp59.295.088.000,00	Rp58.984.455.714,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Keuangan ke Desa Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2023 dan 2022. Pengakuan Beban Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 lebih rendah dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA TA 2022 sebesar Rp47.843.257.000,00 karena Dana Desa merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai penampung sementara sebelum disalurkan, sehingga Pendapatan dan Beban Dana Desa tidak dapat diukur sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung (Lihat CaLK 5.1.1.2.3).

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.1.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp90.835.392.303,69	Rp(101.341.526.261,49)

Jumlah tersebut merupakan selisih lebih antara Pendapatan Operasional dan Beban selama Tahun 2023 dan 2022.

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.2.1	Surplus Non Operasional	Rp1.943.282.432,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus Non Operasional Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00
b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.943.282.432,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional	1.943.282.432,00	0,00

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.2.1.1	Surplus Penjualan /Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.2.1.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.2.1.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp1.943.282.432,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan pengakuan laba Perumda Panca Mahottama Tahun 2023.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.2.2	Defisit Non Operasional	Rp(3.550.793.848,13)	Rp(2.957.739.237,00)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	(2.068.141.182,11)	(0,00)
b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(0,00)	(0,00)
c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(1.482.652.666,02)	(2.957.739.237,00)
Jumlah Defisit Non Operasional	(3.550.793.848,13)	(2.957.739.237,00)

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.2.2.1 Defisit Penjualan /Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	Rp(2.068.141.182,11)	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 merupakan pengakuan atas penghapusan BMD yaitu:

a. RSUD, DPUPRPKP dan Dinas Koperasi atas penghapusan gedung dan bangunan	(910.385.228,00)
b. Dinas Koperasi atas penghapusan jalan, irigasi dan jaringan	(87.790.450,00)
c. Dinas Kesehatan, DPUPRPKP dan DPMDPPKB atas penghapusan aset lain-lain	(1.089.965.504,11)
Jumlah Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	(2.068.141.182,11)

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.2.2.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.2.2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp(1.482.652.666,02)	Rp(2.957.739.237,00)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 merupakan pengakuan yaitu:

a. Dinas Kesehatan dan Puskesmas atas berkurangnya persediaan obat karena kadaluwarsa	(878.219.391,15)
b. RSUD atas berkurangnya persediaan obat karena kadaluwarsa	(593.050.703,87)
c. DKPP atas berkurangnya persediaan bahan cetak karena kadaluwarsa	(249.667,00)
d. DKPP atas berkurangnya persediaan benda pos karena kadaluwarsa	(477.000,00)
e. Dinas Koperasi atas berkurangnya persediaan bahan cetak karena kadaluwarsa	(2.253.420,00)
f. Dinas Pariwisata atas berkurangnya persediaan bahan cetak karena kadaluwarsa	(7.152.984,00)
g. Dinas Pertanian atas berkurangnya persediaan bahan cetak karena kadaluwarsa	(1.249.500,00)
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(1.482.652.666,02)

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp(1.607.511.416,13)	Rp(2.957.739.237,00)

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.3	Pos Luar Biasa	Rp(2.940.474.524,26)	Rp(6.511.272.257,00)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.3.1	Pendapatan Luar Biasa	Rp0,00	Rp0,00

Tidak ada pengakuan Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.3.2	Beban Luar Biasa	Rp2.940.474.524,26	Rp6.511.272.257,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022. Pengakuan nilai Beban Luar Biasa Tahun 2023 sama dengan Belanja Tak Terduga-LRA sebesar Rp2.940.474.524,26.

Beban Luar Biasa tahun 2023 merupakan pengakuan beban atas pengembalian pendapatan transfer pemerintah pusat berupa SILPA DAK Non Fisik Tahun 2022 yang oleh Pemerintah Pusat dijadikan perhitungan dan dipotong langsung pada saat penyaluran dana DAK Non Fisik Tahun 2023.

Rincian Beban Luar Biasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi BTT (Rp)
1	Pemotongan DAK Non Fisik - PK2UKM 2023 sebagai penyelesaian SILPA TA 2022	7.964.400,00
2	Pemotongan DAK Non Fisik - BOK 2023 sebagai penyelesaian SILPA TA 2022	1.428.742.644,00
3	Pemotongan DAK Non Fisik - BOKB 2023 sebagai penyelesaian SILPA TA 2022	1.021.448.106,00
4	Pemotongan DAK Non Fisik - Dana Kepariwisata 2023 sebagai penyelesaian SILPA TA 2022	347.528.524,00
5	Pemotongan DAK Non Fisik - BOP Museum 2023 sebagai penyelesaian SILPA TA 2022	8.627.850,00
6	Pemotongan DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan Pertanian 2023 sebagai penyelesaian SILPA TA 2022	385.000,00
7	Pemotongan DAK Non Fisik - Dana Fasilitas Penanaman Modal 2023 sebagai penyelesaian SILPA TA 2022	124.098.000,00
8	Kelebihan pengembalian DAK Non Fisik ke RKUN - Dana BOP TK Dewa Kumara karena regrouping dan berubah status menjadi TKN Desa Tangkas	0,26
9	Pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2022	1.700.000,00
	Jumlah Beban Luar Biasa	2.940.474.524,26

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.4.4	Surplus/(Defisit)-LO	Rp86.275.687.669,30	Rp(110.810.537.755,49)

Jumlah tersebut merupakan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2023 dan 2022. Saldo Surplus/(Defisit)-LO tahun 2023 sebesar Rp86.275.687.669,30 dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama TA 2023. Tujuan pelaporan arus kas untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2023 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2023.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi pemerintah. Arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2023 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1.1	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	• Penerimaan Pajak Daerah	113.695.107.806,00	66.962.734.049,00
	• Penerimaan Retribusi Daerah	47.649.857.636,55	31.578.996.300,38
	• Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.602.949.070,93	7.035.424.452,66
	• Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	181.200.613.082,85	203.493.753.767,77
	• Penerimaan Perimbangan	745.272.915.389,00	674.518.732.905,00
	• Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	25.474.546.000,00	21.254.382.000,00
	• Penerimaan Dana Desa	47.843.257.000,00	45.857.734.000,00
	• Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	103.794.221.756,00	90.357.255.218,00
	• Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Bali	97.457.413.641,00	6.357.350.973,00
	• Penerimaan Hibah	199.960.479,00	995.628,00
	• Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	7.258.095,00	72.291.834,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1.370.198.099.956,33	1.147.489.651.127,81

5.5.1.2 Arus Keluar Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
• Pembayaran Pegawai	532.237.023.471,00	547.933.902.006,20
• Pembayaran Barang dan Jasa	390.939.219.129,44	351.182.651.334,91
• Pembayaran Bunga	3.432.910.119,00	1.160.435.668,00
• Pembayaran Hibah	112.552.519.446,00	53.221.636.678,00
• Pembayaran Bantuan Sosial	4.570.130.500,00	5.471.791.500,00
• Pembayaran Tak Terduga	2.940.474.524,26	6.615.770.807,00
• Pembayaran Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.455.999.451,00	7.901.892.982,00
• Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	107.138.345.000,00	104.842.189.714,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.169.266.621.640,70	1.078.330.270.690,11
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	200.931.478.315,63	69.159.380.437,70

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2023 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
• Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
• Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	387.984.789,00	391.549.865,00
• Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
• Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
• Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	387.984.789,00	391.549.865,00

5.5.2.2	Arus Keluar Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	• Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
	• Perolehan Tanah	1.458.000,00	2.179.000,00
	• Perolehan Peralatan dan Mesin	19.547.281.141,00	52.122.546.755,00
	• Perolehan Gedung dan Bangunan	119.708.395.962,77	38.249.152.175,32
	• Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.368.269.276,00	38.233.177.115,00
	• Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.917.785.979,00	2.266.226.681,00
	• Perolehan Aset Lainnya	817.365.838,00	0,00
	• Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	• Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	186.360.556.196,77	130.873.281.726,32
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(185.972.571.407,77)	(130.481.731.861,32)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2023 yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2023 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.3.1	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	• Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	55.899.353.269,00
	• Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	66.500.000,00	682.775.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	66.500.000,00	56.582.128.269,00

5.5.3.2	Arus Keluar Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	• Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
	• Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	66.500.000,00	56.582.128.269,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk TA 2023. Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2023 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.4.1	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	• Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	104.277.050.100,12	95.485.990.843,00
	• Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	10.547.100,00	0,00
	• Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	104.287.597.200,12	95.485.990.843,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris yang berupa Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Iuran Wajib Pegawai (8)	14.591.801.536,00	14.583.166.303,00
b. Taperum	0,00	290.147,00
c. Iuran BPJS Kesehatan – PNS	0,00	0,00
d. Iuran BPJS Kesehatan	14.368.604.332,00	19.360.588.372,00
e. Pajak Penghasilan Ps 21	23.696.171.790,00	24.329.310.836,00
f. Pajak Penghasilan Ps 22	1.451.945.396,00	1.639.206.633,00
g. Pajak Penghasilan Ps 23	696.121.734,12	619.236.205,00
h. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.329.413.954,00	1.459.034.054,00
i. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	30.427.749.178,00	22.085.770.582,00
j. Lainnya	4.985.709.797,00	4.821.889.764,00
k. Iuran Wajib Pegawai (1)	3.614.576.732,00	4.215.562.658,00
l. Iuran BPJS Kesehatan Dewan	73.844.196,00	0,00
m. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja – PNS	629.759.229,00	629.229.182,00
n. Iuran Jaminan Kematian – PNS	1.523.554.923,00	1.537.867.611,00
o. Iuran BPJS Ketenagakerjaan – Non PNS	0,00	0,00
p. Iuran Wajib Pegawai PPPK (1)	1.048.215.654,00	0,00
q. Iuran Wajib Pegawai (3,25)	310.654.373,00	203.938.496,00
r. Iuran Wajib Pegawai PPPK (4)	3.528.927.276,00	0,00
s. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja – PPPK	0,00	0,00
t. Iuran Jaminan Kematian – PPPK	0,00	0,00
u. Sewa Rumah	0,00	900.000,00
Jumlah Penerimaan PFK	104.277.050.100,12	95.485.990.843,00

5.5.4.2	Arus Keluar Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	• Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	104.277.050.100,12	95.485.990.843,00
	• Kas Lainnya di Bend. Pengeluaran	20.799,00	36.404.300,00
	• Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	104.277.070.899,12	95.522.395.143,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	10.526.301,00	(36.404.300,00)

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris yang berupa Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan 2022, terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Iuran Wajib Pegawai (8)	14.591.801.536,00	14.583.166.303,00
b. Taperum	0,00	290.147,00
c. Iuran BPJS Kesehatan – PNS	0,00	0,00
d. Iuran BPJS Kesehatan	14.368.604.332,00	19.360.588.372,00
e. Pajak Penghasilan Ps 21	23.696.171.790,00	24.329.310.836,00
f. Pajak Penghasilan Ps 22	1.451.945.396,00	1.639.206.633,00
g. Pajak Penghasilan Ps 23	896.121.734,12	619.236.205,00
h. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.329.413.954,00	1.459.034.054,00
i. Sewa Rumah	0,00	900.000,00
j. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	30.427.749.178,00	22.085.770.582,00
k. Lainnya	4.985.709.797,00	4.821.889.764,00
l. Iuran Wajib Pegawai (1)	3.614.576.732,00	4.215.562.658,00
m. Iuran BPJS Kesehatan Dewan	73.844.196,00	0,00
n. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - PNS	629.759.229,00	629.229.182,00
o. Iuran Jaminan Kematian – PNS	1.523.554.923,00	1.537.867.611,00
p. Iuran BPJS Ketenagakerjaan - Non PNS	0,00	0,00
q. Iuran Wajib Pegawai PPPK (1)	1.048.215.654,00	0,00
r. Iuran Wajib Pegawai (3,25)	310.654.373,00	203.938.496,00
s. Iuran Wajib PPPK (4)	3.528.927.276,00	0,00
t. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - PPPK	0,00	0,00
u. Iuran Jaminan Kematian – PPPK	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan PFK	104.277.050.100,12	95.485.990.843,00

Rincian Arus Masuk dan Keluar Aktivitas Transitoris PFK pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

5.5.5 Kenaikan/ (Penurunan Kas selama Periode ini)

Jumlah Kenaikan kas selama periode TA 2023 sebesar Rp15.035.933.208,86 yang merupakan penjumlahan dari keseluruhan arus kas bersih aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	200.931.478.315,63	69.159.380.437,70
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(185.972.571.407,77)	(130.481.731.861,32)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	66.500.000,00	56.582.128.269,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	10.526.301,00	(36.404.300,00)
Kenaikan/ (Penurunan) Kas TA 2022	15.035.933.208,86	(4.776.627.454,62)

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo Awal Kas	Rp55.767.186.811,36	Rp60.537.866.802,98

Jumlah Saldo Awal Kas di BUD TA 2023 tersebut merupakan Saldo Akhir Kas TA 2022.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Koreksi SILPA Tahun Lalu	Rp40.873.695,28	Rp5.926.664,00

Koreksi Saldo Awal Kas BOSP Tahun 2022 sebesar Rp40.873.695,28.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Koreksi Lainnya di Bendahara (Selain BUD) – Terkait PFK	Rp0,00	Rp20.799,00

Koreksi atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran BOS kurang transfer/bayar pihak ketiga.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo Akhir Kas	Rp70.843.993.715,50	Rp55.767.186.811,36

Jumlah Saldo Akhir Kas TA 2023 sebesar Rp70.843.993.715,50 diperoleh dari penjumlahan kenaikan kas TA 2023 sebesar Rp15.035.933.208,86, saldo awal kas sebesar Rp55.767.186.811,36, dan koreksi saldo awal kas di BUD sebesar Rp40.873.695,28.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo Akhir Kas	Rp70.843.993.715,50	Rp55.767.186.811,36

Jumlah saldo sebesar Rp70.843.993.715,50 merupakan Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Klungkung 31 Desember 2023. Jumlah Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Klungkung ini tidak sama dengan SiLPA LRA dan SiLPA LPSAL disebabkan karena terdapat Kas Lainnya sebesar Rp10.547.100,00 yang merupakan Utang Pengembalian Dana BOSP untuk disetorkan ke Pemerintah Pusat berupa temuan Inspektorat. Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	40.986.804.681,79	14.745.063.214,37
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	2.564.505.424,80	237.596.243,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	140.208,24
4.	Kas di BLUD	25.248.409.256,63	40.292.233.321,75
5.	Kas di Bendahara BOS	0,00	488.140.066,00
6.	Kas di Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan	0,00	3.992.859,00
7.	Kas Lainnya	10.547.100,00	20.799,00
8.	Kas Dana BOSP	399.593.536,28	0,00
9.	Kas BOK Puskesmas	1.634.333.716,00	0,00
	Jumlah Kas dan Setara Kas	70.843.993.715,50	55.767.186.811,36

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.6.1	Ekuitas Awal	Rp1.044.463.769.071,29	Rp1.152.454.009.011,76
	Jumlah Ekuitas Awal TA 2023 sebesar Rp1.152.454.009.011,76 merupakan saldo akhir ekuitas TA 2022.		

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.6.2	Surplus/(Defisit)-LO	Rp86.287.406.363,30	Rp(110.810.537.755,49)
	Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/(Defisit)-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.		

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp25.219.962.460,75	Rp2.820.297.815,02
	Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2023 yang terdiri dari:		

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.6.3.1	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp0,00	Rp0,00
	Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas adanya perubahan penerapan kebijakan akuntansi terhadap akun-akun laporan keuangan. TA 2023 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan.		

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.6.3.2	Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	Rp25.219.962.460,75	Rp2.820.297.815,02
	Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas terjadinya kesalahan pencatatan pada periode sebelumnya dan dilakukan koreksi pencatatan pada tahun pelaporan, dengan uraian sebagai berikut:		

Uraian	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
Koreksi Ekuitas - Kas dan Setara Kas	40.873.695,28	5.926.664,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah	1.606.534.128,00	1.511.818,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi Daerah	(74.509.476,40)	(144.080.289,00)
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain - lain PAD yang Sah	221.060.994,33	2.003.761.545,60
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	386.871.293,93	(823.004.616,58)
Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	264.444.444,44	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan	35.082.957,45	820.782,28
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Investasi Jangka Panjang	(221.504.000,00)	0,00

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Permanen		
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Tanah	0,00	1.112.508.780,00
Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin	6.110.230.294,00	2.862.499.696,82
Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan	18.651.210.146,51	2.724.766.477,09
Koreksi Ekuitas - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	739.752.387,08	296.566.000,42
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya	(0,51)	(1.589.999,69)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.399.801.057,19)	(5.102.716.655,20)
Koreksi Ekuitas - Aset Tidak Berwujud	(7.975.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lain - lain	1.630.584.000,00	(114.800.000,00)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Amortisasi ATB	1.595.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	2.998.439.410,83	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Belanja	(1.782.906.757,00)	(1.860.368,72)
Jumlah	25.219.962.460,75	2.820.297.815,02

Penjelasan koreksi atas Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar terdiri dari:

- Koreksi Kas dan Setara Kas sebesar Rp40.873.695,28,00 merupakan koreksi saldo awal kas BOSP.
- Koreksi Piutang Pajak Daerah pada BPKPD sebesar Rp1.606.534.128,00 terdiri dari:
 - Koreksi piutang pajak hotel sebesar Rp3.749.778,00.
 - Koreksi piutang pajak restoran sebesar Rp10.726.975,00.
 - Koreksi piutang pajak air tanah sebesar Rp74.254,00.
 - Koreksi piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp1.591.983.121,00
- Koreksi Piutang Retribusi Daerah merupakan koreksi saldo awal piutang tanah dan bukti pada DLHP sebesar Rp(74.509.476,40).
- Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp221.060.994,33 terdiri dari:
 - Koreksi saldo awal piutang pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Gema Santi sebesar Rp(23.956.900,40).
 - Koreksi piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah pada BPKPD sebesar Rp245.017.894,73.
- Koreksi atas penurunan nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp386.871.395,39 terdiri dari:
 - Penyisihan piutang Dinas Kesehatan sebesar Rp4.907.918,28 yang terdiri dari penurunan penyisihan piutang pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Gema Santi sebesar Rp4.609.803,28, penurunan penyisihan piutang pendapatan BLUD pada Puskesmas Banjarangkan I sebesar Rp151.890,00, penurunan penyisihan piutang pendapatan BLUD pada Puskesmas Dawan I sebesar Rp8.975,00, penurunan penyisihan piutang pendapatan BLUD pada Puskesmas Nusa Penida I sebesar Rp14.250,00 dan penurunan penyisihan piutang pendapatan BLUD pada Puskesmas Nusa Penida II sebesar Rp123.000,00.
 - Penyisihan piutang DLHP sebesar Rp74.509.476,00 berupa penurunan penyisihan piutang tanah dan bukti.
 - Penyisihan piutang Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp4.720.000,00 berupa penurunan penyisihan piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 - Penyisihan piutang Dinas Pariwisata sebesar Rp30.000.000,00 berupa penurunan penyisihan piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi.
 - Penyisihan piutang BPKPD sebesar Rp272.731.184,34 yang terdiri dari penurunan penyisihan piutang pajak hotel sebesar Rp283.633.767,48, penurunan penyisihan piutang pajak restoran sebesar Rp221.727.945,32, penurunan penyisihan piutang pajak air tanah sebesar Rp1.100.000,73, penurunan penyisihan piutang pajak BPHTB sebesar Rp9.617.900,00, penurunan penyisihan piutang retribusi kios terminal sebesar Rp176.558,40, penurunan penyisihan piutang retribusi tempat tinggal sebesar Rp1.492.907,14 dan koreksi penyisihan piutang denda retribusi sewa tanah sebesar Rp(245.017.894,73).
 - Penyisihan piutang PPKD sebesar Rp2.714,91 merupakan penurunan penyisihan piutang TDF.
- Koreksi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp284.444.444,44 merupakan koreksi belanja sewa dibayar dimuka Parkir RSUD Tahun 2022 untuk 3 Tahun yang belum tercatat.
- Koreksi Persediaan sebesar Rp35.062.957,45 yang terdiri dari:
 - Koreksi persediaan pada Dinas Kesehatan atas hibah dari Kemenkes sebesar Rp34.162.957,45.
 - Koreksi saldo awal persediaan ATK pada Puskesmas Nusa Penida III sebesar Rp900.000,00.
- Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp(221.504.000,00) merupakan koreksi nilai investasi permanen Penyertaan modal PDAM.
- Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.110.230.294,00 yang terdiri dari:
 - Koreksi ekuitas peralatan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.802.386.494,00 yaitu berupa koreksi catat hibah peralatan mesin tahun 2022 sebesar Rp2.647.682.999,00, koreksi catat hibah dari Kemenkes sebesar Rp2.154.703.488,60 dan koreksi pembulatan koma nilai Harga Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp(3,60).
 - Koreksi ekuitas peralatan dan mesin pada BPBD sebesar Rp689.337.800 berupa hibah peralatan mesin sebelum tahun 2023.

- Koreksi ekuitas peralatan mesin pada Dinas Perhubungan sebesar Rp27.565.000 berupa koreksi catat hibah tahun 2022 yang baru dibukukan pada tahun 2023.
 - Koreksi ekuitas peralatan dan mesin pada PPKD sebesar Rp390.941.000,00 berupa koreksi pencatatan hasil dari inventarisasi berupa sepeda motor.
- j. Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.651.210.146,51 yang terdiri dari :
- Koreksi ekuitas gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp(1,13) berupa koreksi pencatatan.
 - Koreksi ekuitas gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp(0,65) berupa koreksi pencatatan.
 - Koreksi ekuitas gedung dan bangunan pada Rumah Sakit Gema Santi berupa koreksi pencatatan gedung rusunawa hibah dari Kementerian PUPR tahun 2022 sebesar Rp14.734.300.000,00
 - Koreksi ekuitas gedung bangunan pada RSUD sebesar Rp1.842.252.655,00 berupa koreksi pencatatan gedung farmasi dua lantai tahun 2007 dari DHS dan APBD dan biaya perencanaan pagar RSUD.
 - Koreksi ekuitas gedung dan bangunan pada DPUPRPPK sebesar Rp(1,00) merupakan koreksi pencatatan.
 - Koreksi ekuitas gedung dan bangunan pada DKPP sebesar Rp74.657.490,00 berupa kapitalisasi dari belanja tahun lalu yaitu biaya perencanaan
 - Koreksi ekuitas gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi sebesar Rp4,02 berupa koreksi pencatatan.
 - Koreksi ekuitas gedung dan bangunan pada Kecamatan Banjarangkan sebesar Rp0,40 berupa koreksi pencatatan.
 - Koreksi ekuitas gedung dan bangunan pada Kecamatan Nusa Penida sebesar Rp(0,40) berupa koreksi pencatatan.
 - Koreksi ekuitas gedung bangunan pada Kecamatan Dawan sebesar Rp0,27 berupa koreksi pencatatan.
- k. Koreksi Ekuitas Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp739.752.367,08, yang terdiri dari:
- Koreksi ekuitas JIJ pada Dinas PUPRPPK sebesar Rp392.073.000 berupa jalan penilaian dari KNPL tahun 2023 yg dihibahkan tahun 2022
 - Koreksi ekuitas JIJ pada Dinas PUPRPPK sebesar Rp131.529.812,50 berupa koreksi catat belanja perencanaan tahun 2022.
 - Koreksi ekuitas JIJ pada Dinas PUPRPPK sebesar Rp12.000.000 rekias dari aset ekstrakomptable karena memenuhi batas kapitalisasi.
 - Koreksi ekuitas JIJ pada Dinas PUPRPPK sebesar Rp(0,42) merupakan koreksi pencatatan.
 - Koreksi ekuitas JIJ pada Dinas Perhubungan sebesar Rp204.149.775,00 merupakan koreksi catat belanja barang tahun 2021.
- l. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp(0,51) pada Dinas Pendidikan berupa koreksi pencatatan.
- m. Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp(3.399.801.067,19) yang terdiri dari:
- Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(67.158.450,17) dan koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp(4.284.961,35) pada Dinas Pendidikan.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(Rp160.712.148,00), koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp115.745.885,00 dan koreksi akumulasi JIJ sebesar Rp(3.311.870,00) pada Dinas Kesehatan.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(1.485.199.974,00) dan koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp49.724.764,00 dan koreksi akumulasi JIJ sebesar Rp(828.727.023,00) pada RSUD.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(3.000.000,00) dan koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp8.150.333,00 dan koreksi akumulasi JIJ sebesar Rp(1.699.277.708,00) pada DPUPRPPK.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(53.616.430,00) pada DKPP.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp211.421.900,00 dan koreksi akumulasi JIJ sebesar Rp(26.153.216,00) pada DLHP.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(300.000,00) pada DPMOPPKB.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(128.503.999,00), koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp43.641.692,00 dan koreksi akumulasi penyusutan JIJ sebesar Rp965.712.776,00 pada Dinas Perhubungan.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(24.266.667,00) pada Diskominfo.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(24.246.752,00), koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp(43.641.692,00) pada Dinas Koperasi.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(290.944.720,00) pada Dinas Kebudayaan.
 - Koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp(614.173,00) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - Koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp62.028.227,00 dan koreksi akumulasi penyusutan JIJ sebesar Rp(239.629,00) pada Dinas Pariwisata.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(79.040.953,00) pada Bagian Umum.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(0,67) pada Sekretariat DPRD.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp145.065.000,00 pada Kecamatan Klungkung.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp180.550.000,00 pada Kecamatan Banjarangkan.

- Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp197.600.000,00 pada Kecamatan Nusa Penida.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp148.200.000,00 pada Kecamatan Dawan.
 - Koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp30.862.763,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(3.031.800,00) pada Inspektorat.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp145.921.619,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp(9.702.776,00) pada BPKPD.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(486.783.570,00) dan koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp(115.745.885,00) pada PPKD.
 - Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(145.921.619,00) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- n. Koreksi Ekuitas Aset Tidak Berwujud sebesar Rp(7.975.000,00) pada Dinas Perhubungan berupa koreksi catat mutasi kurang ATB Smart Pos System ke peralatan dan mesin.
- o. Koreksi Ekuitas Aset Lain-lain sebesar Rp1.630.584.000,00 yang terdiri dari:
- Koreksi harga perolehan aset lain-lain yang sudah di rusak beratkan pada tahun 2022 sebesar Rp15.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - Koreksi harga perolehan aset lain-lain sebesar Rp1.630.569.000,00 yang nilai bukunya sudah tercatat pada audited TA 2022 pada DPUPRPPK.
- p. Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.595.000,00 pada Dinas Perhubungan berupa koreksi akumulasi penyusutan ATB Smart Pos System karena rekles ke peralatan dan mesin tahun 2023
- q. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp2.998.439.410,83 merupakan koreksi saldo awal penyusutan aset lain-lain.
- r. Koreksi Ekuitas Utang Belanja sebesar Rp(1.762.906.757,00) yang terdiri dari:
- Koreksi ekuitas utang belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp(1.763.360.042,00) berupa utang iuran jaminan kesehatan BPJS tahun 2020 yang belum tercatat.
 - Koreksi ekuitas utang belanja pada Bagian Umum sebesar Rp453.285,00 berupa koreksi utang insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi tahun 2022.

		<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.6.4	Ekuitas Akhir	Rp1.155.959.419.201,34	Rp1.044.463.769.071,29
	Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung TA 2023. Saldo ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas sama dengan nilai ekuitas pada Neraca 31 Desember 2023 (Lihat CaLK 5.3.3).		

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Letak Geografis

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang paling kecil dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali, terletak pada koordinat 115° 21' 28" - 115° 37' 43" Bujur Timur dan 008° 27' 37" - 008° 49' 00" Lintang Selatan. Dengan letak koordinat seperti tersebut di atas berarti wilayah Kabupaten Klungkung beriklim tropis hangat sehingga sangat baik untuk pertanian. Sebanyak 30,5 desa di Kabupaten Klungkung terletak di daerah pesisir dengan panjang pantai mencapai 77,7 km sehingga berpotensi terhadap hasil perikanan. Salah satu hasil perikanan terbesar yang dihasilkan adalah rumput laut di Kecamatan Nusa Penida. Namun, saat ini hasil produksi budidaya rumput laut mulai berkurang sebagai akibat perkembangan pariwisata yang begitu pesat sehingga banyak yang beralih ke sektor pariwisata.

Luas wilayah Kabupaten Klungkung secara keseluruhan 315 km², dimana sepertiga wilayahnya (112 km²) terletak di Pulau Bali dan dua pertiga wilayahnya (202,84 km²) lagi merupakan kepulauan, yang terdiri dari Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Secara administrasi, Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Nusa Penida, dan Dawan. Batas-batas wilayah Kabupaten Klungkung adalah:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bangli;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem;
- c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung terbagi-bagi sesuai peruntukannya, yaitu lahan sawah seluas 4.013 hektar, lahan kering seluas 9.631 hektar, hutan negara seluas 202 hektar, perkebunan seluas 10.060 hektar, dan lain-lain seluas 7.594 hektar. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang, dimana sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering serta tandus, dan hanya sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan tanah mencapai derajat di atas 40 (terjal) dengan luas mencapai 16,47 km² atau 5,23 dari wilayah Kabupaten Klungkung.

6.2 Dasar Hukum Pembentukan

Sejak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka nama DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menggantikan nama Kabupaten. Kemudian dalam perkembangannya, ibukota kabupaten yakni Kota Klungkung diubah dan diresmikan nama menjadi Kota Semarapura pada 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri (Bapak Rudini) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Selanjutnya, setiap 28 April ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Semarapura karena bertepatan juga dengan peresmian Monumen Puputan Klungkung.

6.3 Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Klungkung merupakan Daerah Otonom. Pemerintah

Kabupaten Klungkung mempunyai kewenangan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, Perangkat Daerah yang dibentuk terdiri dari 38 Perangkat Daerah yaitu: 7 Bagian Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 RSUD, 1 Satuan Pol PP, 17 Dinas, 6 Badan dan 4 Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Klungkung juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perda tersebut. Kantor Pemerintah Kabupaten Klungkung berada di Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura.

Pada Tahun 2023, terjadi beberapa kali pergantian Kepala Daerah, dimana sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Klungkung dipimpin oleh Bupati I Nyoman Suwirta dan Wakil Bupati I Made Kasta berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018. Pada tanggal 4 November 2023, Bupati I Nyoman Suwirta mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Bupati I Made Kasta sebagai Plt. Bupati sampai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung yaitu pada tanggal 16 Desember 2023. Selanjutnya, sejak masa 17 Desember hingga Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya dilantik, Pemerintah Kabupaten Klungkung dipimpin oleh Pj. Bupati (Bapak I Nyoman Jendrika).

BAB VII

Penutup

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Rp 1.207.836.791.826,00
 - b. Belanja Rp 1.391.014.394.183,00
 - c. Pembiayaan Rp 183.177.602.357,00
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan Terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 45 Tahun 2023, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Rp 1.405.774.287.570,00
 - b. Belanja Rp 1.461.599.953.582,00
 - c. Pembiayaan Rp 55.825.666.012,00
3. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp1.370.586.084.745,33 atau 97,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.405.774.287.570,00;
4. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.233.032.833.386,47 atau 92,19% dari anggaran sebesar Rp1.337.460.788.099,00;
5. Realisasi Transfer sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp122.594.344.451,00 atau 98,76% dari anggaran sebesar Rp124.139.165.483,00;
6. Realisasi Pembiayaan Netto sampai dengan 31 Desember 2023 sejumlah Rp55.833.666.012,36 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp55.825.666.012,00;
7. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 2023 sebesar sejumlah Rp55.833.666.012,36 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp55.825.666.012,00;
8. Dari derajat kemandirian, bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai hasil persentase perbandingan PAD dengan Belanja Daerah sebesar 25,86%, PAD dengan Belanja Operasi sebesar 33,58% dan PAD tambah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan belanja daerah sebesar 33,51%, PAD tambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan belanja operasi sebesar 43,53%, sebagian besar masih menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menggantungkan diri dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat guna menjelaskan tentang kebijakan dan kondisi keuangan daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pj. BUPATI KLUNGKUNG

INYOMAN JENDRIKA

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

LAMPIRAN VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi Saldo awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
A Piutang Pajak							
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Hotel	2.952.249.555,09	3.749.778,00	1.057.125.307,00	862.377.903,00	3.150.746.737,09
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Restoran	2.352.145.004,16	10.726.975,00	1.353.336.934,00	913.457.536,00	2.802.751.377,16
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Hiburan - BPKPD	-	-	-	-	-
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Reklame - BPKPD	750.000,00	-	-	-	750.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Parkir - BPKPD	-	-	-	-	-
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Air Tanah - BPKPD	60.459.845,00	74.254,00	46.701.997,00	28.982.733,00	78.253.363,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang PBB P2 - BPKPD	31.123.951.148,00	-	2.098.671.338,00	1.319.482.617,00	31.903.139.869,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang BPHTB - BPKPD	414.837.800,00	-	-	9.617.900,00	405.219.900,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	1.591.983.121,00	1.315.686.598,00	1.591.983.121,00	1.315.686.598,00
		Jumlah Piutang Pajak	36.904.393.352,25	1.606.534.128,00	5.871.522.174,00	4.725.901.810,00	39.656.547.844,25
B Piutang Retribusi							
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Piutang Retribusi Tanah Bukt - DLHP	74.509.476,40	(74.509.476,40)	-	-	-
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Retribusi Sewa Tanah Toko - BPKPD	2.045.387.704,00	-	487.137.520,00	1.827.000,00	2.510.698.224,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Retribusi Kios Terminal - BPKPD	1.065.600,00	-	417.600,00	768.960,00	714.240,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Retribusi Tempat Tinggal - BPKPD	24.511.260,00	-	2.334.324,00	5.007.528,00	21.838.056,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Retribusi Sewa Tanah Pemerintah di Desa Jungutbatu - BPKPD	1.150.800.000,00	-	781.073.638,55	325.274.242,11	1.606.599.396,44
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sewa Kantin Daerah	23.423.400,00	-	8.517.600,00	8.517.600,00	23.423.400,00
7	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Piutang Retribusi Peleayanan Pasar (sewa kios/ los pasar) - Diskop	1.532.677.341,00	-	219.360.825,00	397.998.166,00	1.354.040.000,00
8	Dinas Pariwisata	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi - Dispar	2.441.816.020,00	-	-	30.000.000,00	2.411.816.020,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.280.000,00	-	840.000,00	10.280.000,00	840.000,00
10	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - Diskop	35.500.000,00	-	3.500.000,00	10.000.000,00	29.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	-	11.924.010,00	-	11.924.010,00
		Jumlah Piutang Retribusi	7.339.970.801,40	(74.509.476,40)	1.515.105.517,55	789.673.496,11	7.990.893.346,44
C Piutang Lain-lain PAD yang Sah							
1	Piutang Pendapatan BLUD :		2.560.318.742,80	(23.956.900,00)	1.418.701.224,00	1.901.016.162,80	2.054.046.904,00
	RSUD	Piutang Pendapatan BLUD	1.528.715.487,80	-	1.366.656.624,00	893.369.807,80	2.002.002.304,00
	RSGS	Piutang Pendapatan BLUD	964.500.255,00	(23.956.900,00)	42.539.600,00	940.543.355,00	42.539.600,00
	Banjarangkan I	Piutang Pendapatan BLUD	30.378.000,00	-	-	30.378.000,00	-
	Banjarangkan II	Piutang Pendapatan BLUD	-	-	-	-	-
	Dawan I	Piutang Pendapatan BLUD	1.795.000,00	-	-	1.795.000,00	-
	Dawan II	Piutang Pendapatan BLUD	2.170.000,00	-	2.650.000,00	2.170.000,00	2.650.000,00

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi Saldo awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
	Klungkung I	Piutang Pendapatan BLUD	5.310.000,00		6.855.000,00	5.310.000,00	6.855.000,00
	Klungkung II	Piutang Pendapatan BLUD	-				-
	Nusa Perida I	Piutang Pendapatan BLUD	2.850.000,00			2.850.000,00	-
	Nusa Perida II	Piutang Pendapatan BLUD	24.600.000,00			24.600.000,00	-
	Nusa Perida III	Piutang Pendapatan BLUD	-				-
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang kontribusi PM Koperasi & LPD - BPKPD	266.000.000,00		36.250.000,00	1.750.000,00	300.500.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Remuherasi dana TDF - TKD	563.273,54		20.291,07	563.273,54	20.291,07
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Denda Pajak Hotel	296.563.803,00		100.668.554,00	18.152.377,00	379.077.980,00
		Piutang Denda Pajak Restoran	451.344.857,00		74.750.428,00	30.044.243,00	495.551.052,00
		Piutang Denda Pajak Hiburan	94.983.198,00		149.179,00	-	95.132.377,00
		Piutang Denda Pajak Parkir	19.385,00		61.143,00	19.385,00	61.143,00
		Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	792.293,00		1.184.959,00	792.293,00	1.184.959,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah	-	245.017.894,73	-	-	245.017.894,73
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah Toko	-	-	16.645.416,00	-	16.645.416,00
7	Dinas Perhubungan	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi - Dispar	1.758.107.534,40	(0,40)	650.807.045,20	-	2.408.914.579,20
8	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Piutang Denda Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan	5.780.000,00	-	3.460.000,00	975.000,00	8.265.000,00
9	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	105.277.030,00		52.646.598,00	76.176.290,00	81.747.338,00
		Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.539.748.106,74	221.060.994,33	2.354.844.837,27	2.029.489.024,34	6.086.164.914,00
0	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya						
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor	8.768.950.741,00		10.528.502.598,00	8.768.950.741,00	10.528.502.598,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPD	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.260.631.724,00		8.876.863.444,00	4.260.631.724,00	8.876.863.444,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPD	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.090.577.561,00		6.842.690.007,00	4.090.577.561,00	6.842.690.007,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPD	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	19.444.476,00		32.034.544,00	19.444.476,00	32.034.544,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPD	Penerimaan Pajak Rokok	-			-	-
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPD	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-	22.507.318.924,00	-	22.507.318.924,00
		Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	17.139.604.502,00	-	48.787.409.517,00	17.139.604.502,00	48.787.409.517,00
		Jumlah Keseluruhan	60.923.716.762,39	1.753.085.645,53	58.528.882.045,82	24.684.668.832,45	102.521.015.621,69



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
A	Piutang Pajak			
1	Piutang Pajak Hotel	3.150.746.737,09	839.490.915,14	2.311.255.821,95
2	Piutang Pajak Restoran	2.802.751.377,16	767.851.145,46	2.034.900.231,70
3	Piutang Pajak Hiburan-BPKPD	-	-	-
4	Piutang Pajak Reklame - BPKPD	750.000,00	750.000,00	-
5	Piutang Pajak Parkir - BPKPD	-	-	-
6	Piutang Pajak Air Tanah - BPKPD	78.253.363,00	15.862.898,70	62.390.464,30
7	Piutang PBB P2 - BPKPD	31.903.139.869,00	23.214.310.547,39	8.688.829.321,61
8	Piutang BPHTB - BPKPD	405.219.900,00	405.219.900,00	-
9	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.315.686.598,00	6.578.433,00	1.309.108.165,00
	Jumlah Piutang Pajak	39.656.547.844,25	25.250.063.839,69	14.406.484.004,56
B	Piutang Retribusi			
1	Piutang Retribusi Tanah Bukti -DLHP	-	-	-
2	Piutang Retribusi Sewa Tanah Toko - BPKPD	2.530.698.224,00	2.384.742.072,00	145.956.152,00
3	Piutang Retribusi Kios Terminal - BPKPD	714.240,00	298.728,00	415.512,00
4	Piutang Retribusi Tempat Tinggal - BPKPD	21.838.056,00	21.574.806,86	263.249,14
5	Piutang Retribusi Sewa Tanah Pemerintah di Desa Jungutbatu - BPKPD	1.606.599.396,44	1.253.944.485,25	352.654.911,19
6	Sewa Kantin Daerah	23.423.400,00	19.185.894,00	4.237.506,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (sewa kios/ los pasar) - Diskop	1.354.040.000,00	1.198.188.407,00	155.851.593,00
8	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi - Dispar	2.411.816.020,00	2.411.816.020,00	-
9	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	840.000,00	420.000,00	420.000,00
10	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - Diskop	29.000.000,00	25.636.250,00	3.363.750,00
11	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	11.924.010,00	59.620,05	11.864.389,95
	Jumlah Piutang Retribusi	7.990.893.346,44	7.315.866.283,16	675.027.063,28
C	Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
1	Piutang Pendapatan BLUD	2.054.046.904,00	642.439.186,12	1.411.607.717,88
-	RSUD	2.002.007.304,00	642.178.963,12	1.359.823.340,88
-	RSGS	42.539.600,00	212.698,00	42.326.902,00
-	Banjarangkan I	-	-	-
-	Banjarangkan II	-	-	-
-	Dawan I	-	-	-
-	Dawan II	2.650.000,00	13.250,00	2.636.750,00
-	Klungkung I	6.855.000,00	34.275,00	6.820.725,00
-	Klungkung II	-	-	-
-	Nusa Penida I	-	-	-
-	Nusa Penida II	-	-	-
-	Nusa Penida III	-	-	-
2	Piutang kontribusi PM Koperasi & LPD - BPKPD	300.500.000,00	291.723.750,00	8.776.250,00
3	Piutang Remunerasi dana TDE - TKD	20.291,67	101,46	20.189,61
4	Piutang Denda Pajak Daerah :	971.007.511,00	411.223.494,33	559.784.016,67
-	Piutang Denda Pajak Hotel	379.077.980,00	150.674.399,40	228.403.580,60
-	Piutang Denda Pajak Restoran	495.551.052,00	212.663.411,56	282.887.640,44
-	Piutang Denda Pajak Hiburan	95.132.377,00	47.261.665,76	47.870.711,24
-	Piutang Denda Pajak Parkir	61.143,00	28.697,93	32.445,07
-	Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.184.959,00	595.319,68	589.639,32
5	Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah	245.017.894,73	245.017.894,73	-
6	Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah Toko	16.645.416,00	6.526.390,19	10.119.025,81

No.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
7	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi - Dispar	2.408.914.579,20	1.761.361.569,63	647.553.009,57
8	Piutang Denda Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	8.265.000,00	8.220.000,00	45.000,00
9	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	81.747.318,00	44.342.936,00	37.404.382,00
	Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.086.164.914,00	3.410.855.322,46	2.675.309.591,54
D	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			
1	Pajak Kendaraan Bermotor	10.528.502.598,00	52.642.512,99	10.475.860.085,01
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.876.863.444,00	44.384.317,22	8.832.479.126,78
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.842.690.007,00	34.213.450,04	6.808.476.556,97
4	Pajak Pemertfaatan Air Permukaan	32.034.544,00	160.172,72	31.874.371,28
5	Penerimaan Pajak Rokok	-	-	-
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	22.507.318.924,00	112.536.594,62	22.394.782.329,38
	Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	48.787.409.517,00	243.937.047,59	48.543.472.469,42
	Jumlah Keseluruhan	102.521.015.621,69	36.220.722.492,89	66.300.293.128,80



LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

**DAFTAR REKAPITULASI DANA
BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA
BERGULIR**

LAMPIRAN X : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR (INVESTASI NON PERMANEN)
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama KOPERASI/LPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
	KOPERASI			
1	KSU Mandiri	125.000.000,00	125.000.000,00	-
2	KSU Dharma Arta	75.000.000,00	75.000.000,00	-
3	KSU Artha Buana	105.000.000,00	105.000.000,00	-
4	Kopwan Sri Artha	125.000.000,00	125.000.000,00	-
5	KUD Arta Wiguna	116.000.000,00	580.000,00	115.420.000,00
	Jumlah Koperasi	546.000.000,00	430.580.000,00	115.420.000,00
	LPD			
1	LPD DP Kutampi	-	-	-
2	LPD DP Dawan Kolod	50.000.000,00	5.000.000,00	45.000.000,00
3	LPD Desa Pekraman Pemanukan	16.000.000,00	80.000,00	15.920.000,00
	Jumlah LPD	66.000.000,00	5.080.000,00	60.920.000,00
	TOTAL Investasi Non Permanen Lainnya	612.000.000,00	435.660.000,00	176.340.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PE BUPATI KLUNGKUNG
INYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 DAFTAR PENYERTAAN MODEL (DPTAS) PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Model	Nama Sistem/Lembar/Plakat Kotaja	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Model Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Model Daerah	Jumlah Model Yang Telah Dibagikan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Model Tahun Ini	Jumlah Model Yang Dibagikan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Model Yang Belum Dibagikan	Hasil Penyertaan Model Daerah Tahun Ini	Jumlah Model Yang Dibagikan Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Model Yang Dibagikan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	PT Bank BPD Ika	-	-	-	31.425.000.000,00	-	31.425.000.000,00	-	7.991.507.000,00	-	31.425.000.000,00
		PT BPD Bali Selatan dan sekitarnya	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
3	1990	PGAD Tana Mandaraka	-	-	-	47.000.400.000,00	-	47.000.400.000,00	-	(14.000.200.000,00)	-	47.000.400.000,00
2	1974	PGAD	-	-	-	110.000.700,00	-	110.000.700,00	-	-	-	110.000.700,00
4	2012	PT Jembera Bali Standards	-	-	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	4.071.813,00	-	1.000.000.000,00
	Jumlah					80.186.216.070,00	-	80.186.216.070,00	-	17.063.308.813,00	-	80.186.216.070,00



LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH**

LAMPIRAN XII : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TA 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	327.802.504.204,04	18.123.105.635,13	1.662.156.591,64	344.263.453.247,53
2	Dinas Kesehatan	184.659.412.276,82	30.973.089.431,42	8.603.815.570,27	207.028.686.137,97
3	Rumah Sakit Umum Daerah	249.870.932.947,00	20.609.812.255,00	11.085.844.186,00	259.394.901.016,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	810.424.616.789,63	99.304.945.213,92	3.891.099.831,42	905.838.462.172,13
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.916.567.332,00	1.547.442.525,00	-	13.464.009.857,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.448.296.282,00	49.802.000,00	19.680.000,00	8.478.418.282,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	23.848.549.647,00	2.445.725.609,00	72.608.000,00	26.221.667.256,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan	37.338.637.374,00	6.634.134.849,00	1.498.735.163,00	42.474.037.060,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8.887.256.260,00	19.980.000,00	-	8.907.236.260,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP dan KB	5.927.840.492,32	171.795.000,00	-	6.099.635.492,32
11	Dinas Perhubungan	122.551.114.061,00	468.428.780,00	1.412.963.505,00	121.606.579.336,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.164.406.711,00	411.700.000,00	185.539.500,00	9.390.567.211,00
13	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	96.944.783.214,47	79.630.277.868,37	4.497.602.496,37	172.077.458.586,47
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.492.523.120,00	-	-	1.492.523.120,00
15	Dinas Kebudayaan	13.947.731.283,00	266.996.450,00	-	14.214.727.733,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.617.706.452,00	384.152.200,00	-	8.001.858.652,00
17	Dinas Pariwisata	39.477.480.366,00	15.850.150.273,00	9.376.782.425,00	45.950.848.214,00
18	Dinas Pertanian	23.546.716.477,09	-	57.816.000,00	23.488.900.477,09
19	Dinas Ketenagakerjaan	1.184.313.634,00	19.073.500,00	-	1.203.387.134,00
20	Sekretariat Daerah:				

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
	Bagian Pemerintahan dan Kesra	3.305.950.700,00	-	84.727.500,00	3.221.223.200,00
	Bagian Hukum	-	-	-	-
	Bagian Hubungan Masyarakat	-	6.570.000,00	6.570.000,00	-
	Bagian Administrasi Pembangunan & Perekonomian SDA	-	-	-	-
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	76.993.000,00	70.000.000,00	6.993.000,00
	Bagian Umum	29.516.581.057,00	1.271.260.500,00	1.158.571.640,00	29.629.269.917,00
	Bagian Organisasi	-	-	-	-
21	Sekretariat DPRD	16.594.013.468,51	541.820.010,00	141.798.895,67	16.994.034.582,84
	Kecamatan:				
22	Kecamatan Klungkung	7.659.475.391,33	513.419.164,00	231.852.722,00	7.941.041.833,33
23	Kecamatan Banjarangkan	5.224.950.934,00	1.357.464.290,00	211.121.372,00	6.371.293.852,00
24	Kecamatan Nusa Penida	12.470.739.125,00	1.398.668.982,40	217.555.925,40	13.651.852.182,00
25	Kecamatan Dawan	6.008.049.150,89	2.060.098.908,00	188.184.800,00	7.879.963.258,89
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	2.298.262.738,00	43.830.130,00	239.921.000,00	2.102.171.868,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.317.599.025,00	2.524.782.000,00	23.300.000,00	6.819.081.025,00
28	Inspektorat	3.728.254.981,00	655.509.190,00	165.388.185,00	4.218.375.986,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.949.331.869,00	48.913.700,00	182.192.326,00	1.815.053.243,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	13.924.270.997,00	514.132.080,00	18.150.000,00	14.420.253.077,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPRD	6.518.870.810,00	3.440.206.988,00	2.995.366.160,00	6.963.711.638,00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.450.070.890,00	115.110.700,00	3.840.000,00	1.561.341.590,00
33	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	553.213.160,00	-	553.213.160,00
	Total	2.100.017.810.060,10	291.479.391.232,24	48.303.183.794,77	2.343.747.230.657,57



 PJ. BUPATI KLUNGKUNG



 J NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

LAMPIRAN XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	TANAH	95.059.717.855,00	2.964.201.000,00	3.284.841.610,00	94.739.077.245,00
2	PERALATAN DAN MESIN	487.397.821.848,83	37.257.622.542,95	8.430.622.077,62	516.224.822.314,16
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	615.092.451.796,92	155.121.243.182,11	22.742.728.555,22	747.470.966.423,81
4	JALAN, IRIGASI, dan JARINGAN	853.734.916.082,66	85.636.983.506,92	1.888.001.995,42	937.483.897.594,16
5	ASET TETAP LAINNYA	34.846.059.641,69	4.401.210.956,00	243.397.191,51	39.003.873.406,18
6	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.188.427.832.496,00)	(139.576.533.799,67)	(1.194.420.811,48)	(1.326.809.945.484,19)
7	KONSTRUKSI DLM Pengerjaan	13.886.842.835,00	6.651.343.204,26	11.713.592.365,00	8.824.593.674,26
	TOTAL	911.589.977.564,10	152.456.070.592,57	47.108.762.983,29	1.016.937.285.173,38



 P. BUPATI KLUNGKUNG

 I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

LAMPIRAN 87/ Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
 Nomor : 3 Tahun 2024
 Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGURAIAN
 PER 31 DESEMBER 2023

NO	SAPO	Saldo Awal	MUTASI							REKLASIFIKASI/ PENYAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH				BERKURANG				
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga	100.418.251,00		1.237.580.639,00							1.137.998.914,00
2	Dinas Kesehatan	136.164.528,00		632.813.219,36	2.838.825,00			36.131.000,00			733.285.572,36
3	RSUD	10.855.576.386,00						10.855.576.386,00			-
4	Dinas Purbakarya	1.356.470.000,00			104.137.500,00			352.883.750,00	83.080.250,00		944.883.500,00
5	Dinas Keresnagan Kerajinan	67.023.000,00									67.023.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	105.000.000,00									105.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	707.684.371,00							7.013.000,00		700.671.366,00
8	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	516.601.680,00		99.107.460,00				817.461.943,00			298.247.200,00
9	Dinas Pariwisata	-		4.627.649.771,00							4.627.649.771,00
10	Sekretariat DPRD	10.790.229,00						10.790.229,00			-
11	Kecamatan Klungkung	-		49.362.943,00							49.362.943,00
12	Kecamatan Benjangin	50.571.372,00						50.571.372,00			-
13	Kecamatan Nusa Penida	19.895.925,00						19.895.925,00			-
14	Kecamatan Dawan	60.617.272,00									60.617.272,00
15	Inspektoral	-		99.752.925,00							99.752.925,00
TOTAL		13.986.642.836,00	-	6.544.366.879,36	186.978.325,00	-	-	11.823.530.108,00	90.042.260,00	-	8.824.883.874,36



**LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**DAFTAR REKAPITULASI ASET
LAINNYA**

LAMPIRAN XV : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023

No	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
I	Tagihan penjualan angsuran/ / Cicilan Kios	51.936.000,00	-	-	51.936.000,00
	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	51.936.000,00	-	-	51.936.000,00
II	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.299.759.692,86	341.202.544,17	341.202.544,17	2.299.759.692,86
	- Inspektorat	2.299.759.692,86	341.202.544,17	341.202.544,17	2.299.759.692,86
III	Aset Tidak Berwujud	446.703.793,20	922.653.358,00	717.654.464,80	651.702.686,40
	- Dinas Pendidikan	73.028.000,00	33.744.888,00	43.262.977,60	63.509.910,40
	- Dinas Kesehatan	125.435.200,00		37.957.600,00	87.477.600,00
	-Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	53.613.206,00	10.722.641,20	42.890.564,80
	- Rumah Sakit Umum Daerah	4.642.480,00		4.642.480,00	-
	- Dinas Perhubungan	41.386.400,00	1.595.000,00	19.643.800,00	23.337.600,00
	-Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	-	50.079.314,00	10.015.862,80	40.063.451,20
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	115.559.160,00		70.032.360,00	45.526.800,00
	-Dinas Kebudayaan	-	39.600.000,00	7.920.000,00	31.680.000,00
	- Bagian Hukum	-	29.936.700,00	5.987.340,00	23.949.360,00
	- Bagian Organisasi	-	248.500.000,00	248.500.000,00	-
	- Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	44.046.753,20	198.000.000,00	83.646.753,20	158.400.000,00
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	42.605.800,00	9.740.250,00	44.553.850,00	7.792.200,00
	-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	99.000.000,00	99.000.000,00	-

	-Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	158.844.000,00	31.768.800,00	127.075.200,00
IV	Aset lain-lain	30.644.843.158,67	1.365.669.772,42	15.312.338.388,59	16.698.174.542,50
	- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	401.594.892,00	7.415.000,00	153.162.446,48	255.847.445,52
	- Dinas Kesehatan	122.363.989,00	188.454.042,11	156.470.964,11	154.347.067,00
	- Rumah Sakit Umum Daerah	12.418.556,00	-	-	12.418.556,00
	- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.685.141.236,00	511.013.454,00	14.400.481.646,00	13.795.673.044,00
	- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	376.167.881,00			376.167.881,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.519.790,00			14.519.790,00
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-			-
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	32.373.783,00	-		32.373.783,00
	- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan	53.678.674,00			53.678.674,00
	- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-			-
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP dan KB	27.261.702,00		5.819.166,00	21.442.536,00
	- Dinas Perhubungan	-			-
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	15.830.283,00	670.000,00		16.500.283,00
	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	5.841.200,00			5.841.200,00
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-			-
	- Dinas Kebudayaan	1.125.833,00		337.500,00	788.333,00
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-			-
	- Dinas Pariwisata	5.887.885,00			5.887.885,00
	- Dinas Pertanian	24.422.989,00	4.465.449,00		28.888.438,00
	- Dinas Ketenagakerjaan	5.920.250,00			5.920.250,00
	- Bagian Pemerintahan dan Kesra	-			-
	- Bagian Hukum	-			-
	- Bagian Hubungan Masyarakat	125.000,00			125.000,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan & Perekonomian SDA	233.334,00			233.334,00
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-			-
	- Bagian Umum	1.540.334.087,00	484.994.999,00	462.729.166,00	1.562.599.920,00

- Bagian Organisasi	1.190.875,00			1.190.875,00
- Sekretariat DPRD	12.899.786,67			12.899.786,67
- Kecamatan Klungkung	1.178.700,00			1.178.700,00
- Kecamatan Banjarangkan	9.011.350,00			9.011.350,00
- Kecamatan Nusa Penida	3.981.751,00	3.500.000,00		7.481.751,00
- Kecamatan Dawan	6.509.493,00	29.608.494,31		36.117.987,31
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-
- Inspektorat	8.464.021,00	1.874.784,00		10.338.805,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.098.184,00	336.050,00		4.434.234,00
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.733.067,00			1.733.067,00
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPKD	268.250.000,00	133.337.500,00	133.337.500,00	268.250.000,00
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.284.567,00			2.284.567,00
- Badan Riset dan Inovasi Daerah	-			-
V Dana TDF - DBH	2.322.486.210,00	2.141.433.000,00	2.322.486.210,00	2.141.433.000,00
Jumlah	35.765.728.854,73	4.770.958.674,59	18.693.681.607,56	21.843.005.921,76



 PJ. BUPATI KLUNGKUNG



 NYOMAN JENDRIKA

**LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

LAMPIRAN XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								
Jumlah								



LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

LAMPIRAN XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	5.434.659.783,00	0,00	5.434.659.783,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	329.760.447,92	290.413.164,42	329.760.447,92	290.413.164,42
4	Utang Belanja	41.788.323.747,00	72.458.443.158,42	41.788.323.747,00	72.458.443.158,42
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	20.799,00	295.495.373,35	20.799,00	295.495.373,35
	Total	42.118.104.993,92	78.479.011.479,19	42.118.104.993,92	78.479.011.479,19


BUPATI KLUNGKUNG
[Signature]
I NYOMAN JENDRIKA

**LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG**

LAMPIRAN XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		
1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat - Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - jangka Panjang (Pinjaman PEN)	55.899.353.285,00		5.434.659.783,00	50.464.693.486,00	Pengurangan kewajiban jangka panjang merupakan reklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang merupakan pokok pinjaman PEN yang jatuh tempo tahun 2024


PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
I NYOMAN JENDRAKA

**LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya**

LAMPIRAN XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	Paket Pekerjaan	Jumlah Realisasi				JUMLAH YANG DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
				Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Tambah/Kurang	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang kelas Baru SDN Manduang	1.876.200.000,00	1.037.580.659,00	(838.619.341,00)	55,30		
2	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehab Puskesmas Pembantu Ceningan	660.000.000,00	625.069.069,26	(34.930.930,74)	94,71		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengawasan Rehab Puskesmas Pembantu Ceningan	15.840.000,00	-	(15.840.000,00)	0,00		
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan Gunaksa - Dawan Kaler	1.880.000.000,00	602.020.024,00	(1.277.979.976,00)	32,02	1.238.915.085,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
			Peningkatan Jalan Pesinggahan - Pangi	1.880.000.000,00	607.820.074,00	(1.272.179.926,00)	32,33	1.251.968.837,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
			Peningkatan Jalan Pesinggahan - Gelogor	5.000.000.000,00	1.508.978.741,00	(3.491.021.259,00)	30,18	3.290.444.644,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
			Peningkatan Jalan Tihingadi - Gunaksa	1.880.000.000,00	583.846.903,00	(1.296.153.097,00)	31,06	1.195.640.120,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
			Peningkatan Jalan Pikat - Pesinggahan	1.692.000.000,00	546.178.657,00	(1.145.821.343,00)	32,28	1.124.455.866,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD

		Peningkatan Jalan Pikat - Dawan Kaler	564.000.000,00	20.979.000,00	(543.021.000,00)	3,72	600.000.000,00	
		Peningkatan Jalan Buayang - Babung	3.023.200.000,00	960.153.363,00	(2.063.046.637,00)	31,76	2.008.293.847,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
		Peningkatan Jalan Kusamba - Dawan	1.880.000.000,00	612.013.177,00	(1.267.986.823,00)	32,55	1.262.991.830,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
		Peningkatan Jalan Dawan Kelod - Dawan Kaler	2.256.000.000,00	709.407.722,00	(1.546.592.278,00)	31,45	1.598.605.229,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
		Peningkatan Jalan Dawan Kaler - Banjar Kayehan	3.773.585.000,00	886.320.698,00	(2.887.264.302,00)	23,49	1.835.548.813,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
		Peningkatan Jalan Pakseballi - Lapengan Pakseballi	3.023.200.000,00	856.463.871,00	(2.156.736.129,00)	28,66	1.790.164.674,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
		Peningkatan Jalan Tihingadi - Besan	564.000.000,00	21.108.925,00	(542.891.075,00)	3,74	390.260.304,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
		Peningkatan Jalan Paku - Pertigaan Banjar Bingin	4.000.000.000,00	1.130.520.990,00	(2.869.479.010,00)	28,26	2.480.669.310,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
	Rehabilitasi Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan Sampalan Toyapakeh	2.000.000.000,00	997.050.000,00	(1.002.950.000,00)	49,85	782.000.000,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	10.000.000.000,00	9.689.217.999,00	(310.782.001,00)	96,89	2.400.000.000,00	Surat Sekda Provinsi Bali No. B.13.900/7359/PADFE/BPKAD
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan	Pengawasan Peningkatan Jalan Gunaksa - Dawan Kaler	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	-	47.490.795,00	
		Pengawasan Peningkatan Jalan Pesinggahan - Pangli	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	-	47.397.000,00	
		Pengawasan Peningkatan Jalan Pesinggahan - Gelogor	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	-	99.142.980,00	
		Pengawasan Peningkatan Jalan Tihingadi - Gunaksa	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	-	47.711.685,00	
		Pengawasan Peningkatan Jalan Pikat - Pesinggahan	43.200.000,00	-	(43.200.000,00)	-	42.180.000,00	

			Pengawasan Peningkatan Jalan Ploet - Dawan Kaler	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	14.052.600,00	
			Pengawasan Peningkatan Jalan Buayang - Babung	76.800.000,00	-	(76.800.000,00)	-	75.813.000,00	
			Pemeliharaan Berkala Jalan Sempolan Toyopakeh	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	-	47.297.000,00	
			Pengawasan Peningkatan Jalan Dawan Kelod - Dawan Kaler	57.600.000,00	-	(57.600.000,00)	-	57.217.170,00	
			Pengawasan Peningkatan Jalan Dawan Kaler - Banjar Kayehan	90.566.000,00	-	(90.566.000,00)	-	66.267.000,00	
			Pengawasan Peningkatan Jalan Paktebali - Lapangan Paktebali	76.800.000,00	-	(76.800.000,00)	-	76.203.165,00	
			Pengawasan Peningkatan Jalan Tihingadi - Besan	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	-	13.941.600,00	
4	Dinas Pariwisata	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Pembangunan Plaza / Area Pengunjung di Pantai Goa Lawah	4.217.000.000,00	2.607.168.000,00	(1.609.832.000,00)	61,83		
			Pengawasan Pembangunan Plaza / Area Pengunjung di Pantai Goa Lawah (DIAK RISK)	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	-		
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Tool Gate dan Pagar di Pantai Batu Belek Lembangan	954.900.000,00	309.889.600,00	(445.010.400,00)	32,40		
			Pengawasan Pembangunan Tool Gate dan Pagar di Pantai Batu Belek Lembangan	22.917.600,00	-	(22.917.600,00)	-		



**LAMPIRAN XX.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN
USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH**

PENERIMAAN KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
 BUKTIAN LAFORUM PENGANTARAN PERALIHAN HAK MILIK TANAH/PERALIHAN GABUNG
 (BUTIR TANAH) TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	Kategori/Persepsi Daerah	Subjek	Objek	Nilai Lantai	Nilai Total Lantai	Nilai Lantai	Total Area	Penjualan Lantai Persepsi	Penjualan Lantai Persepsi	Total Penjualan	Nilai Lantai	Tambahan/Reduksi Lantai	Saldo Persepsi Yang Dipersepsi Masyarakat (Rp/Rp)	Nilai Lantai	Lantai Objek	Total Objek	% Saldo Daerah	Responsibilitas Daerah
1																		
1	Persepsi Klungkung	12.12.2024	Persepsi Klungkung	11.000.000.000	84.000.000.000	170.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000	7.000.000.000				80.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	84.000.000.000	100	100%
2	Persepsi	12.12.2024	Persepsi Klungkung	11.000.000.000	84.000.000.000	170.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000	7.000.000.000				80.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	84.000.000.000	100	100%



**LAMPIRAN XX.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN
LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/
PERUSAHAAN DAERAH**

LAMPIRAN XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 4 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	BUMD/Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Pendapatan	Beban	Labarugi Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Labarugi Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	7	9		10	11 = 9-10
1	PDAM Kab Klungkung	LK PDAM 2022	Audited KAP	44.304.096.598	41.013.641.510	3.290.455.088	64.505.037	98.133.484	3.266.826.642
2	PDNKK	LK PDNKK 2018	Dibekukan Tahun 2019	STATUS DIBEKUKAN					

BUPATI KLUNGKUNG

NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA

KABUPATEN KLUNGKUNG
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Rp.					Realisasi				
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01				PELAYANAN UMUM										
01	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	208.851.941.897,00	375.290.000,00	-	-	209.227.231.897,00	202.450.152.762,00	334.430.000,00	-	-	202.784.582.762,00
01	02	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	258.034.503.599,00	8.688.057.621,00	-	-	276.722.561.220,00	257.059.120.910,50	7.855.874.286,00	-	-	264.914.995.196,50
01	03	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.947.955.653,00	32.920.000,00	-	-	10.980.875.653,00	10.606.007.181,00	32.644.000,00	-	-	10.638.651.181,00
01	04	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERUNDUNGAN MASYARAKAT	16.062.727.834,00	234.982.800,00	-	-	16.317.710.634,00	15.804.244.647,00	29.142.300,00	-	-	15.833.386.947,00
01	05	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.762.797.760,00	-	-	-	4.762.797.760,00	4.638.828.475,00	-	-	-	4.638.828.475,00
01	06	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.654.532.035,00	19.721.900,00	-	-	3.674.253.935,00	3.595.572.447,00	19.073.500,00	-	-	3.614.645.947,00
01	07	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.219.234.371,00	11.978.000,00	-	-	5.231.192.371,00	4.968.745.682,00	11.978.000,00	-	-	4.980.723.682,00
01	08	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.670.719.893,00	10.000.000,00	-	-	12.680.719.893,00	12.329.478.341,00	10.000.000,00	-	-	12.339.478.341,00
01	09	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	6.700.040.934,00	20.720.000,00	-	-	6.720.760.934,00	6.381.285.100,00	15.980.000,00	-	-	6.407.265.100,00

Kode				Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Rp.					Realisasi				
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01	10	2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.821.245.427,00	8.000.000,00	-	-	9.829.245.427,00	9.561.990.118,00	6.935.000,00	-	-	9.568.925.118,00
01	11	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.712.265.006,00	10.360.000,00	-	-	10.722.625.006,00	10.509.861.943,00	10.200.000,00	-	-	10.520.061.943,00
01	12	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.121.360.967,00	-	-	-	4.121.360.967,00	3.973.620.030,00	-	-	-	3.973.620.030,00
01	13	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.912.546.354,00	-	-	-	7.912.546.354,00	7.825.817.827,00	-	-	-	7.825.817.827,00
01	14	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.676.812.162,00	-	-	-	4.676.812.162,00	4.399.316.069,00	-	-	-	4.399.316.069,00
01	15	2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.864.800,00	-	-	-	2.864.800,00	2.370.530,00	-	-	-	2.370.530,00
01	16	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.999.621.503,00	81.058.000,00	-	-	5.082.679.503,00	4.930.097.810,00	81.996.450,00	-	-	5.012.094.260,00
01	17	2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.641.625.616,00	149.746.000,00	-	-	3.791.372.216,00	3.547.587.832,00	143.065.000,00	-	-	3.690.652.832,00
01	18	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA	7.173.844.050,00	110.428.300,00	-	-	7.284.272.350,00	6.998.624.239,00	104.430.000,00	-	-	7.103.054.239,00
01	19	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11.923.417.606,00	-	-	-	11.923.417.606,00	11.702.656.639,00	-	-	-	11.702.656.639,00
01	20	4	01	SEKRETARIAT DAERAH	41.456.749.544,00	2.054.263.690,00	-	-	43.511.013.234,00	36.736.357.466,00	1.556.690.200,00	-	-	38.293.047.666,00
01	21	4	02	SEKRETARIAT DPRD	50.144.160.874,00	336.288.000,00	-	-	50.480.448.874,00	47.814.273.781,00	328.071.795,00	-	-	48.142.345.576,00
01	22	5	01	PERENCANAAN	5.779.282.430,00	150.518.000,00	-	-	5.929.800.430,00	5.099.792.544,00	147.913.700,00	-	-	5.247.706.244,00
01	23	5	02	KEUANGAN	18.933.974.040,00	876.853.600,00	3.825.721.728,00	124.139.165.483,00	147.775.714.851,00	16.241.170.536,00	662.232.080,00	2.940.474.524,26	122.594.344.431,00	142.438.221.591,26

Kode				Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Rp.					Realisasi				
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01	24	5	03	KEPEGAWAIAN	6.625.692.872,00	132.636.000,00	-	-	6.758.328.872,00	5.419.880.272,00	124.850.950,00	-	-	5.544.731.222,00
01	25	5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.256.465.896,00	-	-	-	2.256.465.896,00	2.054.691.707,00	-	-	-	2.054.691.707,00
01	26	5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.953.626.006,00	559.451.000,00	-	-	2.512.477.006,00	1.539.404.491,00	549.324.000,00	-	-	2.088.728.491,00
01	27	6	01	INSPEKTORAT DAERAH	13.167.673.821,00	931.543.000,00	-	-	14.099.216.821,00	8.554.283.011,00	555.756.265,00	-	-	9.110.039.276,00
01	28	7	01	KECAMATAN	21.422.834.133,00	6.486.986.036,00	-	-	27.909.822.169,00	20.677.714.332,00	5.204.047.903,73	-	-	25.881.762.235,73
01	29	8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.325.321.758,00	44.576.000,00	-	-	19.369.897.758,00	19.076.193.115,00	43.830.130,00	-	-	19.120.023.245,00
03				KETERTIBAN DAN KEAMANAN										-
03	01	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.950.492.638,00	1.507.500.000,00	-	-	6.457.992.638,00	4.581.856.071,00	1.502.208.000,00	-	-	6.084.064.071,00
03	02	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	442.149.700,00	-	-	-	442.149.700,00	208.746.600,00	-	-	-	208.746.600,00
04				EKONOMI					-					-
04	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.674.474.617,00	82.428.599.221,00	-	-	93.103.073.838,00	9.976.227.409,00	51.629.349.982,00	-	-	61.605.577.391,00
04	02	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.591.485.609,00	-	-	-	1.591.485.609,00	1.058.052.150,00	-	-	-	1.058.052.150,00
04	03	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	225.955.050,00	-	-	-	225.955.050,00	97.356.450,00	-	-	-	97.356.450,00
04	04	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.871.926.540,00	227.140.000,00	-	-	18.099.066.540,00	16.698.982.491,00	219.562.000,00	-	-	16.918.484.491,00
04	05	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.621.733.234,00	432.000.000,00	-	-	5.053.733.234,00	4.583.055.300,00	44.000.000,00	-	-	4.627.055.300,00
04	06	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.306.332.506,00	351.467.109,00	-	-	1.657.999.615,00	1.358.562.344,00	345.637.638,00	-	-	1.704.199.982,00

Kode				Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Rp.					Realisasi				
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
04	07	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	967.951.022,00	-	-	-	967.951.022,00	880.207.374,00	-	-	-	880.207.374,00
04	08	2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	13.954.813,00	20.000.000,00	-	-	33.954.813,00	13.512.354,00	19.700.000,00	-	-	33.212.354,00
04	09	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	630.652.016,00	4.097.614.000,00	-	-	4.728.266.016,00	763.437.151,00	-	-	-	763.437.151,00
04	10	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.906.631.651,00	-	-	-	1.906.631.651,00	1.657.046.060,00	-	-	-	1.657.046.060,00
04	11	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.263.990.805,00	77.467.995.400,00	-	-	87.731.986.205,00	9.090.109.516,00	76.394.712.580,00	-	-	85.484.822.096,00
04	12	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	524.983.512,00	-	-	-	524.983.512,00	382.361.978,00	-	-	-	382.361.978,00
05				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					-					-
05	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.418.159.402,00	-	-	-	3.418.159.402,00	3.374.288.136,00	-	-	-	3.374.288.136,00
05	02	2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	122.289.624,00	211.153.810,00	-	-	333.443.434,00	111.429.424,00	1.458.000,00	-	-	112.887.424,00
05	03	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11.905.642.288,00	6.555.294.000,00	-	-	18.460.936.288,00	11.483.440.854,00	5.382.607.310,00	-	-	16.866.048.164,00
05	04	3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	10.853.900,00	-	-	-	10.853.900,00	8.202.400,00	-	-	-	8.202.400,00
06				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					-					-

Kode				Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Rp.					Realisasi				
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
06	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	75.597.018,00	157.440.000,00	-	-	233.037.018,00	75.541.818,00	156.395.000,00	-	-	231.936.818,00
06	02	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	158.784.800,00	-	-	-	158.784.800,00	58.013.700,00	-	-	-	58.013.700,00
07				KESIHATAN					-					-
07	01	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	80.051.870.517,00	4.874.736.042,00	-	-	84.926.606.659,00	73.063.280.842,00	4.499.256.121,91	-	-	77.562.536.963,91
07	02	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.832.848.416,00	188.580.000,00	-	-	4.021.428.416,00	2.744.172.972,00	164.860.000,00	-	-	2.909.032.972,00
08				PARIWISATA					-					-
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.315.486.868,00	14.778.039.775,00	-	-	22.093.526.643,00	6.244.258.343,00	11.014.675.500,00	-	-	17.258.933.843,00
10				PENDIDIKAN					-					-
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	44.382.488.424,00	17.494.265.250,00	-	-	61.876.753.674,00	42.971.583.214,00	16.431.627.345,13	-	-	59.403.220.559,13
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.813.414.300,00	137.630.800,00	-	-	15.951.045.100,00	15.419.873.240,94	136.973.520,00	-	-	15.556.846.760,94
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	88.648.182.466,00	-	-	-	88.648.182.466,00	88.857.528.431,00	-	-	-	88.857.528.431,00
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	103.954.986,00	7.500.000,00	-	-	111.454.986,00	94.063.992,00	7.500.000,00	-	-	101.563.992,00
11				PERLINDUNGAN SOSIAL					-					-
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.073.177.240,00	15.000.000,00	-	-	6.088.177.240,00	5.718.706.118,00	14.802.000,00	-	-	5.733.508.118,00

Kode				Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Rp.					Realisasi				
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
11	02	2	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	258.555.810,00	6.060.000,00	-	-	264.715.810,00	213.809.505,00	-	-	-	213.809.505,00
11	03	3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	8.931.600,00	-	-	-	8.931.600,00	7.772.000,00	-	-	-	7.772.000,00
TOTAL					1.101.348.670.417,00	232.286.395.954,00	3.825.721.728,00	124.139.165.483,00	1.461.599.953.582,00	1.044.194.628.395,44	185.797.730.556,77	2.940.474.524,26	122.594.344.451,00	1.355.627.177.837,47

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Komponen Perhitungan		Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Realisasi Rp.	Persentase (%)
1	a.	Belanja pada Dinas Pendidikan :	Rp 287.055.030.671	Rp 216.907.870.864	75,56
		1) Belanja Operasi	Rp 269.047.844.621	Rp 200.004.839.999	74,34
		a) belanja pegawai	Rp 206.312.928.927	Rp 200.004.839.999	96,94
		b) belanja barang dan jasa	Rp 48.006.275.694	Rp 46.044.503.952	95,91
		c) belanja hibah	Rp 13.918.440.000	Rp 13.996.775.266	100,56
		d) belanja bantuan sosial	Rp 810.200.000	Rp 795.500.000	98,19
		2) Belanja Modal	Rp 18.007.186.050	Rp 16.903.030.865	93,87
		3) Belanja Transfer	Rp -	Rp -	-
	b.	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	Rp 93.842.516.955	Rp 91.971.186.683	98,01
		1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 3.665.000	Rp 3.630.600	99,06
		2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 2.242.500	Rp 2.207.650	98,45
		3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 4.543.486.824	Rp 4.494.577.514	98,92
		4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 250.000	Rp 248.000	99,20
		5) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 144.390.584	Rp 144.290.584	99,93
		6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 386.844.795	Rp 365.186.422	94,40
		7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 1.999.800	Rp 1.953.490	97,68
		8) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 10.391.661.400	Rp 10.362.701.315	99,72
		9) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 2.220.049.212	Rp 2.070.163.862	93,25
		10) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Rp 181.711.762	Rp 178.688.937	98,34
		11) Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 442.284.024	Rp 429.177.424	97,04
		12) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 73.964.984.682	Rp 72.449.537.137	97,92
		13) Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 71.152.000	Rp 56.015.470	78,73
	14)	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 36.632.500	Rp 31.881.570	87,03

No	Komponen Perhitungan		Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Realisasi Rp.	Persentase (%)
	15)	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 32.764.000	Rp 29.784.000	90,90
	16)	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 11.313.550	Rp 11.313.550	100,00
	17)	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 412.128.512	Rp 398.428.762	96,68
	18)	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 745.846.824	Rp 722.182.384	96,83
	19)	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum pada SKPD Dinas Kebudayaan	Rp 117.654.000	Rp 117.654.000	100,00
	20)	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 17.084.100	Rp 7.376.656	43,18
	21)	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka pada SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 921.500	Rp 916.700	99,48
	22)	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat pada SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 93.449.386	Rp 93.270.636	99,81
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan		Rp 380.897.547.626,00	Rp 308.879.057.547,13	81,09
3	Total Belanja Daerah		Rp 1.461.599.953.582,00	Rp 1.355.627.177.837,47	92,75
4	Rasio Anggaran Pendidikan		27,15%	22,78%	83,93

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING -BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Realisasi Rp.	Persentase (%)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan :	Rp 361.649.167.879,00	Rp 342.477.532.160,41	94,70
	1) Belanja Operasi	Rp 348.086.374.216,00	Rp 330.122.401.752,50	94,84
	a) belanja pegawai	Rp 145.268.980.336,00	Rp 139.279.462.759,00	95,88
	b) belanja barang dan jasa	Rp 201.401.579.880,00	Rp 189.427.104.993,50	94,05
	c) belanja hibah	Rp 1.415.834.000,00	Rp 1.415.834.000,00	100,00
	d) belanja bantuan sosial	Rp -	Rp -	-
	2) Belanja Modal	Rp 13.562.793.663,00	Rp 12.355.130.407,91	91,10
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	Rp 4.171.101.534,00	Rp 3.133.783.895,00	75,13
	1) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 18.000.000,00	Rp 14.012.360,00	77,85
	2) Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga Pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 64.200.000,00	Rp 58.939.000,00	91,81
	3) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 101.209.774,00	Rp 97.743.974,00	96,58
	4) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 150.000.000,00	Rp 130.162.600,00	86,79
	5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 52.000.000,00	Rp 39.700.000,00	76,35
	6) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 144.450.000,00	Rp 113.696.420,00	78,71
	7) Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 80.000.000,00	Rp 60.684.000,00	75,86
	8) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 28.800.000,00	Rp 25.949.900,00	90,10
	9) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 932.790.000,00	Rp 141.583.000,00	15,18

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Realisasi Rp.	Persentase (%)
	10) Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 80.000.000,00	Rp 76.550.000,00	95,69
	11) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 17.700.000,00	Rp 16.411.200,00	92,72
	12 Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 77.500.000,00	Rp 69.750.000,00	90,00
	13) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 1.001.700.000,00	Rp 1.001.700.000,00	100,00
	14) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 360.000.000,00	Rp 235.280.000,00	65,36
	15) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	Rp 1.062.751.760,00	Rp 1.051.601.441,00	98,95
2	Anggaran Kesehatan	Rp 365.820.269.413,00	Rp 345.611.316.055,41	94,46
3	Total Belanja Daerah	Rp 1.461.599.953.582,00	Rp 1.355.627.177.837,47	92,75
4	Gaji ASN	Rp 291.063.674.739,00	Rp 277.039.384.358,00	95,18
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	Rp 1.170.536.278.843,00	Rp 1.078.587.793.479,47	92,14
6	Rasio Anggaran Kesehatan	31,25%	32,04%	

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING - BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2023

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASI DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a. DAU	516.451.973.000,00	516.451.973.000,00	100,00
	b. DBH	13.371.902.000,00	15.685.103.135,00	117,30
	Jumlah Penerimaan	529.823.875.000,00	532.137.076.135,00	100,44
2	Pengurang			
	a. DBH CHT	206.335.000,00	225.433.984,00	109,26
	b. DBH DR	0,00	0,00	-
	c. ADD	52.982.388.000,00	52.982.388.000,00	100,00
	Jumlah Pengurang	53.188.723.000,00	53.207.821.984,00	100,04
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	476.635.152.000,00	478.929.254.151,00	100,48

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase (%)
1	a) Belanja Modal	206.106.457.345,00	162.076.665.238,77	78,64
	1) Tanah	-	-	-
	2) Peralatan dan Mesin	-	-	-
	3) Bangunan dan Gedung	135.147.613.345,00	119.708.395.962,77	88,58
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	70.958.844.000,00	42.368.269.276,00	59,71
	5) Aset tetap lainnya	-	-	-
	6) Aset lainnya	-	-	-
	b) Belanja Pemeliharaan	18.587.144.583,00	16.611.392.980,00	89,37
2	a) Belanja Hibah	78.346.850.000,00	78.326.850.000,00	99,97
	b) Belanja Bantuan Sosial	3.850.000.000,00	3.774.630.500,00	98,04
	c) Belanja Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	307.890.451.928,00	261.789.538.718,77	85,03
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	64,60	54,66	

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Bidang Pendidikan			
	Pendidikan Dasar			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	1.876.200.000,00	1.037.580.659,00
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	579.800.000,00	565.540.168,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	675.205.000,00	665.385.050,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	250.000.000,00	165.500.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.545.361.778,00	5.416.275.720,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	1.529.488.200,00	1.182.024.750,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	142.200.000,00	135.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125.000.000,00	82.750.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.993.345.740,00	3.873.722.172,00
		Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pertama	1.591.500,00	1.560.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.551.500,00	2.551.500,00
		Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.551.500,00	2.520.000,00
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.106.000,00	2.070.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.029.156.340,00	1.010.148.191,13
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	158.800.000,00	158.227.935,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.458.011.802,00	1.451.536.802,00
		Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.928.639.300,00	1.774.249.800,00
		Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	734.500,00	484.500,00
		Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.626.800,00	1.626.800,00
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	13.542.800,00	13.326.800,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.106.000,00	2.070.000,00
		Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.666.000,00	4.630.000,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan		19.322.684.760,00	17.546.780.847,13
II	Bidang Kesehatan			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	539.041.000,00	487.538.600,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.527.150,00	3.767.550,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.732.050,00	6.605.550,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	266.524.750,00	247.458.750,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	274.394.800,00	268.399.600,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	506.508.100,00	457.940.800,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	188.197.600,00	186.321.750,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.531.250,00	531.250,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	177.238.000,00	154.170.900,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	91.035.400,00	81.605.300,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	783.626.050,00	205.370.950,00
		Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	423.592.850,00	361.116.462,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan		3.294.949.000,00	2.460.827.462,00
III	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	59.841.500,00	59.024.500,00
		Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	71.884.118,00	71.868.918,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
		Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	101.311.400,00	101.043.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.627.850,00	5.592.650,00
		Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2.934.556.924,00	2.933.382.224,00
IV Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	101.498.100,00	1.475.200,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		101.498.100,00	1.475.200,00
V Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		PROGRAM PENANGGULAN BENCANA		
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		
		Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	38.480.750,00	14.150.500,00
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	26.428.900,00	6.788.080,00
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
		Sub Kegiatan Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	11.827.000,00	8.393.185,00
		Sub Kegiatan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	751.099.207,00	702.862.040,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.804.000,00	2.038.852,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub. Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	148.093.052,00	144.851.128,00
		Sub. Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.109.879.679,00	2.076.703.156,00
		Sub. Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.853.250,00	9.797.200,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
		Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	69.703.774,00	68.331.162,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.055.348.040,00	1.024.165.277,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		5.292.865.692,00	5.082.243.857,00
VI	Bidang Sosial			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	333.475.800,00	310.974.300,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	53.618.700,00	48.225.950,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		Sub kegiatan Penyediaan Makanan	442.149.700,00	208.746.800,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Bidang Sosial		829.244.200,00	567.947.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.405.774.287.570,00	1.370.585.084.748,33	(35.189.202.824,67)	97,50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	352.325.957.788,00	350.536.512.385,33	(1.789.445.402,67)	99,49
4.1.01	Pajak Daerah	88.607.636.827,00	113.695.107.806,00	15.087.270.979,00	115,30
4.1.01.06	Pajak Hotel	25.997.026.325,00	34.670.921.791,00	8.673.895.466,00	133,36
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	25.997.026.325,00	34.670.921.791,00	8.673.895.466,00	133,36
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	25.997.026.325,00	34.670.921.791,00	8.673.895.466,00	133,36
4.1.01.07	Pajak Restoran	26.195.394.249,00	36.528.728.221,00	10.332.333.972,00	139,44
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	26.195.394.249,00	36.528.728.221,00	10.332.333.972,00	139,44
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	26.195.394.249,00	36.528.728.221,00	10.332.333.972,00	139,44
4.1.01.08	Pajak Hiburan	343.692.450,00	683.787.863,00	340.095.413,00	198,95
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	9.192.975,00	7.761.821,00	(1.441.154,00)	84,32
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	9.192.975,00	7.761.821,00	(1.441.154,00)	84,32
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	98.849.467,00	120.898.756,00	22.049.289,00	122,31
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	98.849.467,00	120.898.756,00	22.049.289,00	122,31
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	235.650.008,00	555.137.286,00	319.487.278,00	235,58
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	235.650.008,00	555.137.286,00	319.487.278,00	235,58
4.1.01.09	Pajak Reklame	308.957.200,00	192.488.750,00	(116.468.450,00)	62,30
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	308.957.200,00	192.488.750,00	(116.468.450,00)	62,30
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	308.957.200,00	192.488.750,00	(116.468.450,00)	62,30
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17.013.752.628,00	16.937.478.841,00	(76.275.787,00)	99,55
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	17.013.752.628,00	16.937.478.841,00	(76.275.787,00)	99,55
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	17.013.752.628,00	16.937.478.841,00	(76.275.787,00)	99,55
4.1.01.11	Pajak Parkir	76.548.600,00	54.827.228,00	(21.721.372,00)	71,62
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	76.548.600,00	54.827.228,00	(21.721.372,00)	71,62
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	76.548.600,00	54.827.228,00	(21.721.372,00)	71,62
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	327.269.075,00	449.775.497,00	122.506.422,00	137,43
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	327.269.075,00	449.775.497,00	122.506.422,00	137,43
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	327.269.075,00	449.775.497,00	122.506.422,00	137,43
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.823.483.600,00	2.867.033.925,00	(956.449.675,00)	74,98
4.1.01.15.01	PBBP2	3.823.483.600,00	2.867.033.925,00	(956.449.675,00)	74,98
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.823.483.600,00	2.867.033.925,00	(956.449.675,00)	74,98
4.1.01.18	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.520.712.700,00	21.310.067.690,00	(3.210.645.010,00)	86,91
4.1.01.18.01	BPHTB Pemindahan Hak	24.520.712.700,00	21.310.067.690,00	(3.210.645.010,00)	86,91



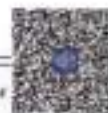
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	24.520.712.700,00	21.310.067.890,00	(3.210.645.010,00)	86,91
4.1.02	Retribusi Daerah	48.080.714.238,00	47.849.857.636,55	1.589.143.398,55	103,41
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	10.355.127.300,00	9.755.025.753,60	(600.101.546,40)	94,20
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	206.940.000,00	198.237.000,00	(8.703.000,00)	95,79
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	206.940.000,00	198.237.000,00	(8.703.000,00)	95,79
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	312.000.000,00	256.742.000,00	(55.258.000,00)	82,29
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	312.000.000,00	256.742.000,00	(55.258.000,00)	82,29
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	9.536.358.400,00	9.089.843.453,80	(486.714.946,40)	95,11
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	3.836.160.000,00	3.804.898.000,00	(231.462.000,00)	99,37
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Loe	3.808.440.000,00	3.873.245.773,80	(135.194.226,40)	98,45
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.891.758.400,00	1.791.899.880,00	(100.058.720,00)	94,71
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	199.610.000,00	130.759.000,00	(68.851.000,00)	65,51
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	199.610.000,00	130.759.000,00	(68.851.000,00)	65,51
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.618.900,00	8.743.500,00	124.600,00	101,88
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	8.618.900,00	8.743.500,00	124.600,00	101,88
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	93.600.000,00	92.900.800,00	(699.200,00)	99,25
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	93.600.000,00	92.900.800,00	(699.200,00)	99,25
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	33.105.222.246,00	34.801.847.083,95	1.696.424.837,95	105,12
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	932.315.246,00	863.821.470,95	(78.493.775,05)	91,58
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	25.771.200,00	28.104.060,00	2.332.860,00	109,05
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	809.444.046,00	865.192.160,95	(144.251.885,05)	82,18
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	18.750.000,00	21.875.250,00	3.125.250,00	116,57
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	78.350.000,00	138.650.000,00	60.300.000,00	175,96
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	57.200.000,00	37.685.000,00	(19.515.000,00)	65,88
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	57.200.000,00	37.685.000,00	(19.515.000,00)	65,88
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	214.880.000,00	163.423.000,00	(51.457.000,00)	75,05
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000.000,00	148.543.000,00	(51.457.000,00)	74,27
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.320.626.000,00	2.661.142.000,00	(659.484.000,00)	80,14
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	3.320.626.000,00	2.661.142.000,00	(659.484.000,00)	80,14
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	54.000.000,00	26.400.000,00	(27.600.000,00)	48,89
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	54.000.000,00	26.400.000,00	(27.600.000,00)	48,89
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.200.000,00	9.800.000,00	2.400.000,00	133,33
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	7.200.000,00	9.800.000,00	2.400.000,00	133,33
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.100.000.000,00	2.432.631.059,00	332.631.059,00	115,84
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.100.000.000,00	2.432.631.059,00	332.631.059,00	115,84
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.613.050.000,00	20.522.595.000,00	1.909.545.000,00	110,26
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.613.050.000,00	20.522.595.000,00	1.909.545.000,00	110,26
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	7.710.475.000,00	8.034.789.554,00	324.313.554,00	104,21
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	594.000.000,00	750.957.910,00	156.957.910,00	126,42



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.02.02.10.0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	7.116.478.000,00	7.283.831.844,00	167.353.844,00	102,36
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	96.475.000,00	99.560.000,00	(30.915.000,00)	62,36
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	17.400.000,00	22.545.000,00	5.145.000,00	129,57
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	78.075.000,00	37.015.000,00	(41.060.000,00)	47,41
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.620.364.662,00	3.093.184.769,00	472.820.107,00	118,04
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	129.500.000,00	114.000.000,00	(15.500.000,00)	88,03
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	129.500.000,00	114.000.000,00	(15.500.000,00)	88,03
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.100.000,00	2.780.000,00	680.000,00	132,38
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.100.000,00	2.780.000,00	680.000,00	132,38
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.200.000.000,00	2.517.788.051,00	317.788.051,00	114,44
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.200.000.000,00	2.517.788.051,00	317.788.051,00	114,44
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	288.764.692,00	458.618.748,00	169.854.056,00	158,82
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	288.764.692,00	458.618.748,00	169.854.056,00	158,82
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.602.949.071,00	7.602.949.070,93	(0,07)	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.602.949.071,00	7.602.949.070,93	(0,07)	100,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.602.949.071,00	7.602.949.070,93	(0,07)	100,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.602.949.071,00	7.602.949.070,93	(0,07)	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.034.457.652,00	181.588.597.871,85	(18.445.859.780,15)	90,78
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	387.984.789,00	287.984.789,00	387,98
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	387.984.789,00	287.984.789,00	387,98
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	60.000.000,00	387.984.789,00	327.984.789,00	546,64
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	324.866.000,00	296.740.500,00	(28.125.500,00)	91,34
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	324.866.000,00	296.740.500,00	(28.125.500,00)	91,34
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	324.866.000,00	296.740.500,00	(28.125.500,00)	91,34
4.1.04.05	Jasa Giro	950.000.000,00	1.296.222.110,95	346.222.110,95	136,44
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	850.000.000,00	1.230.808.444,34	380.808.444,34	144,80
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	850.000.000,00	1.230.808.444,34	380.808.444,34	144,80
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	65.413.666,61	(34.586.333,39)	65,41
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	65.413.666,61	(34.586.333,39)	65,41
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	51.991.955,00	0,00	(51.991.955,00)	0
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	51.991.955,00	0,00	(51.991.955,00)	0
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	51.991.955,00	0,00	(51.991.955,00)	0
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	541.853.166,00	813.422.637,90	271.569.471,90	150,12
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	541.853.166,00	813.422.637,90	271.569.471,90	150,12
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	541.853.166,00	813.422.637,90	271.569.471,90	150,12
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	37.899.268.488,00	144.238.347,00	(37.815.029.121,00)	0,38
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	53.000.000,00	18.182.377,00	(34.817.623,00)	34,25



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	53.000.000,00	18.152.377,00	(34.847.623,00)	34,25
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	19.400.000,00	30.044.243,00	10.644.243,00	154,87
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	19.400.000,00	30.044.243,00	10.644.243,00	154,87
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Pantil Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Centre)	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	246.895,00	253.295,00	6.400,00	102,68
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	246.895,00	253.295,00	6.400,00	102,68
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.500.000,00	829.004,00	(5.670.996,00)	12,75
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.500.000,00	829.004,00	(5.670.996,00)	12,75
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	37.879.021.773,00	94.960.428,00	(37.784.061.345,00)	0,25
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	37.879.021.773,00	94.960.428,00	(37.784.061.345,00)	0,25
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	47.736.000,00	90.491.553,16	42.755.553,16	189,57
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	76.176.290,00	76.176.290,00	0
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	76.176.290,00	76.176.290,00	0
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	47.736.000,00	8.605.263,16	(41.130.736,84)	13,84
4.1.04.13.02.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	47.736.000,00	8.605.263,16	(41.130.736,84)	13,84
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	7.710.000,00	7.710.000,00	0
4.1.04.13.03.0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	7.710.000,00	7.710.000,00	0
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.305.386,00	1.417.948.337,34	917.642.971,34	283,42
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	296.115.341,00	267.340.341,00	1.225.000,00	100,46
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	296.115.341,00	267.340.341,00	1.225.000,00	100,46
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	225.931.848,00	1.150.607.998,34	924.676.150,34	509,27
4.1.04.15.16.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	4.275.000,00	5.275.084,00	1.000.084,00	123,30
4.1.04.15.16.0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	221.656.848,00	1.145.332.912,34	923.676.064,34	516,71
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.258.095,00	0,00	(7.258.095,00)	0
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.258.095,00	0,00	(7.258.095,00)	0
4.1.04.15.84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.000.084,00	0,00	(1.000.084,00)	0
4.1.04.15.84.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	1.000.084,00	0,00	(1.000.084,00)	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	159.548.842.342,00	177.078.328.395,50	17.529.686.053,50	110,99
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	159.548.842.342,00	177.078.328.395,50	17.529.686.053,50	110,99
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	159.548.842.342,00	177.078.328.395,50	17.529.686.053,50	110,99
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	9.794.355,00	6.250.000,00	(3.544.355,00)	63,81
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	9.794.355,00	6.250.000,00	(3.544.355,00)	63,81
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	9.794.355,00	6.250.000,00	(3.544.355,00)	63,81
4.1.04.23	Remunerasi	0,00	66.970.201,00	66.970.201,00	0



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.1.04.23.01	Remunerasi	0,00	56.970.201,00	56.970.201,00	0
4.1.04.23.01.0001	1Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	56.970.201,00	56.970.201,00	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.053.249.934.803,00	1.019.842.353.766,00	(33.407.581.037,00)	96,83
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	818.654.573.000,00	818.590.718.389,00	(63.854.611,00)	99,97
4.2.01.01	Dana Perimbangan	745.538.770.000,00	745.272.915.389,00	(263.854.611,00)	99,96
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.371.902.000,00	15.685.103.135,00	2.313.201.135,00	117,30
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	388.903.000,00	928.630.090,00	541.727.090,00	240,02
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	10.235.544.000,00	11.677.749.351,00	1.442.205.351,00	114,09
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPON	700.595.000,00	799.006.201,00	98.411.201,00	114,05
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	206.335.000,00	225.433.984,00	19.098.984,00	109,26
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.000,00	12.298,00	5.298,00	175,69
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.842.518.000,00	2.054.271.211,00	211.753.211,00	111,49
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	516.451.973.000,00	516.451.973.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	507.633.323.000,00	507.633.323.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.618.650.000,00	7.618.650.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	104.582.408.000,00	102.526.224.590,00	(2.056.181.410,00)	98,03
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	457.894.000,00	454.114.872,00	(3.679.328,00)	99,22
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.110.901.000,00	1.026.398.279,00	(84.502.721,00)	92,39
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.162.888.000,00	4.120.609.821,00	(42.278.179,00)	98,98
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	206.601.000,00	181.625.000,00	(24.975.000,00)	87,91
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	9.550.329.000,00	8.645.213.370,00	(905.115.630,00)	90,52
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.157.500.000,00	11.270.265.300,00	(887.234.700,00)	92,70
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.634.694.000,00	1.547.000.000,00	(87.694.000,00)	94,64
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	301.799.000,00	289.850.000,00	(11.949.000,00)	96,36
4.2.01.01.03.0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	75.000.000.000,00	74.981.148.148,00	(18.851.852,00)	99,97
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	111.130.489.000,00	110.809.614.664,00	(520.874.336,00)	99,63
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.949.890.000,00	26.373.487.611,00	(576.402.389,00)	97,86
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.845.000.000,00	1.845.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	56.878.493.000,00	56.878.491.000,00	(2.000,00)	100,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.029.000.000,00	1.108.750.000,00	77.750.000,00	107,66
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.163.200.000,00	3.140.982.290,00	(22.217.710,00)	99,30
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	352.890.000,00	352.687.763,00	(2.202,00)	100,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.065.179.000,00	13.065.179.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	468.140.000,00	468.140.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.250.740.000,00	3.250.740.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PKZUKM	457.770.000,00	457.770.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.726.912.000,00	1.726.912.000,00	0,00	100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	408.900.000,00	408.900.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Kelangkaan Pangan dan Pertanian	326.575.000,00	326.575.000,00	0,00	100,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	25.474.546.000,00	25.474.546.000,00	0,00	100,00
4.2.01.02.01	DID	25.474.546.000,00	25.474.546.000,00	0,00	100,00
4.2.01.02.01.0001	DID	25.474.546.000,00	25.474.546.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05	Dana Desa	47.843.257.000,00	47.843.257.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	47.843.257.000,00	47.843.257.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	47.843.257.000,00	47.843.257.000,00	0,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	234.385.361.803,00	201.251.635.397,00	(33.143.726.406,00)	85,86
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	108.697.251.606,00	103.794.221.756,00	(4.903.029.850,00)	95,49
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.697.251.606,00	103.794.221.756,00	(4.903.029.850,00)	95,49
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	42.672.567.701,00	37.692.972.412,00	(4.979.595.289,00)	88,33
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.585.908.196,00	27.422.181.893,00	836.273.697,00	103,15
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.267.412.759,00	22.910.403.776,00	642.991.017,00	102,89
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	112.401.219,00	106.361.381,00	(6.039.838,00)	94,63
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.056.961.731,00	15.662.302.294,00	(1.394.659.437,00)	91,81
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	125.689.110.197,00	97.457.413.641,00	(28.240.696.556,00)	77,53
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	52.787.962.912,00	24.547.266.356,00	(28.240.696.556,00)	46,50
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	52.787.962.912,00	24.547.266.356,00	(28.240.696.556,00)	46,50
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	72.910.147.285,00	72.910.147.285,00	0,00	100,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.910.147.285,00	72.910.147.285,00	0,00	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	198.394.979,00	207.218.574,00	8.823.595,00	104,45
4.3.01	Pendapatan Hibah	198.394.979,00	199.960.479,00	1.565.500,00	100,79
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	394.979,00	1.960.479,00	1.565.500,00	496,35
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	394.979,00	1.960.479,00	1.565.500,00	496,35
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	394.979,00	1.960.479,00	1.565.500,00	496,35
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.258.095,00	7.258.095,00	0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	7.258.095,00	7.258.095,00	0
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	7.258.095,00	7.258.095,00	0
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	7.258.095,00	7.258.095,00	0
5	BELANJA DAERAH	1.461.599.953.582,00	1.355.627.177.837,47	(105.972.775.744,53)	92,75
5.1	BELANJA OPERASI	1.101.348.670.417,00	1.043.731.802.866,44	(57.616.867.550,56)	94,77
5.1.01	Belanja Pegawai	550.857.552.365,00	532.237.023.471,00	(18.620.528.894,00)	96,82
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	291.063.674.739,00	277.039.384.358,00	(14.024.290.381,00)	95,18
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	212.212.162.802,00	204.143.908.967,00	(8.068.253.835,00)	96,20
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	197.032.565.196,00	193.949.673.067,00	(3.082.892.129,00)	98,44



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	15.179.597.806,00	10.194.235.900,00	(4.985.361.706,00)	67,16
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.815.930.554,00	18.982.427.448,00	(833.503.106,00)	95,79
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.390.169.015,00	18.089.418.822,00	(320.750.193,00)	98,26
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.425.761.539,00	913.008.626,00	(512.752.913,00)	64,04
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.005.178.890,00	3.912.029.000,00	(93.149.890,00)	97,67
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.005.178.890,00	3.912.029.000,00	(93.149.890,00)	97,67
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.060.040.220,00	18.198.454.000,00	(883.586.220,00)	95,37
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.275.547.420,00	17.045.768.000,00	(229.779.420,00)	98,67
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.804.492.800,00	1.150.886.000,00	(653.606.800,00)	63,77
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.378.178.269,00	2.343.606.850,00	(34.569.419,00)	98,55
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.378.178.269,00	2.343.606.850,00	(34.569.419,00)	98,55
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.473.648.448,00	10.970.388.860,00	(503.249.588,00)	95,61
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.417.639.245,00	10.294.285.740,00	(123.353.505,00)	98,82
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.056.009.203,00	676.113.120,00	(379.896.083,00)	64,03
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.290.909.996,00	2.181.671.870,00	(79.238.126,00)	96,50
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.253.467.438,00	2.178.493.729,00	(76.973.709,00)	96,58
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.442.558,00	5.178.141,00	(2.264.417,00)	69,57
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.894.959,00	2.638.910,00	(256.049,00)	91,16
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.747.973,00	2.543.177,00	(204.796,00)	92,56
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	146.986,00	95.733,00	(51.253,00)	65,13
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.848.083.487,00	14.824.707.396,00	(3.023.376.091,00)	81,94
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.088.543.672,00	14.128.501.957,00	(2.960.041.715,00)	82,68
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	759.539.815,00	496.205.439,00	(263.334.376,00)	65,33
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	442.252.524,00	422.941.210,00	(19.321.314,00)	95,63
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	407.014.078,00	401.885.198,00	(5.125.880,00)	98,74
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	35.248.446,00	21.053.012,00	(14.195.434,00)	59,73
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.316.410.888,00	1.258.599.847,00	(57.810.821,00)	95,61
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.210.858.046,00	1.185.538.337,00	(25.129.709,00)	97,92
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	105.742.822,00	73.061.510,00	(32.681.112,00)	69,09
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	227.975.922,00	0,00	(227.975.922,00)	0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	170.641.622,00	0,00	(170.641.622,00)	0
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	57.334.300,00	0,00	(57.334.300,00)	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	109.897.206.272,00	107.781.796.102,00	(1.935.410.170,00)	98,24
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	105.318.599.193,00	103.641.497.658,00	(1.677.071.535,00)	98,41
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	103.173.903.297,00	101.657.561.086,00	(1.516.342.211,00)	98,53
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.144.695.896,00	1.983.936.472,00	(160.729.424,00)	92,51
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.361.881.264,00	2.166.248.234,00	(192.633.030,00)	91,84
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.361.881.264,00	2.166.248.234,00	(192.633.030,00)	91,84
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.094.708.107,00	1.088.665.871,00	(6.042.236,00)	99,45
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.094.708.107,00	1.088.665.871,00	(6.042.236,00)	99,45



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	922.047.708,00	862.384.439,00	(59.663.269,00)	93,53
5.1.01.02.06.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	922.047.708,00	862.384.439,00	(59.663.269,00)	93,53
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	59.448.366.900,00	59.082.329.157,00	(367.037.743,00)	99,38
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	57.124.946.900,00	57.123.515.400,00	(1.431.500,00)	100,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	57.124.946.900,00	57.123.515.400,00	(1.431.500,00)	100,00
5.1.01.03.06	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.102.000.000,00	1.048.500.000,00	(53.500.000,00)	95,15
5.1.01.03.06.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.102.000.000,00	1.048.500.000,00	(53.500.000,00)	95,15
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.222.420.000,00	910.313.757,00	(312.106.243,00)	74,47
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.222.420.000,00	910.313.757,00	(312.106.243,00)	74,47
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.558.567.260,00	23.120.852.124,00	(538.915.136,00)	97,72
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	712.433.295,00	671.790.000,00	(40.643.295,00)	94,30
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	712.433.295,00	671.790.000,00	(40.643.295,00)	94,30
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	88.298.078,00	77.145.800,00	(11.152.478,00)	87,37
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	88.298.078,00	77.145.800,00	(11.152.478,00)	87,37
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91.263.962,00	78.213.800,00	(13.070.362,00)	85,66
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91.263.962,00	78.213.800,00	(13.070.362,00)	85,66
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	983.836.455,00	974.095.500,00	(9.740.955,00)	99,01
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	983.836.455,00	974.095.500,00	(9.740.955,00)	99,01
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.628.200,00	85.889.000,00	(6.739.200,00)	92,70
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.628.200,00	85.889.000,00	(6.739.200,00)	92,70
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.214.200,00	12.240.900,00	(50.973.300,00)	19,36
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.214.200,00	12.240.900,00	(50.973.300,00)	19,36
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Rentes DPRD	1.260.000.000,00	945.000.000,00	(315.000.000,00)	75,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Rentes DPRD	1.260.000.000,00	945.000.000,00	(315.000.000,00)	75,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	408.329,00	352.300,00	(56.029,00)	86,28
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	408.329,00	352.300,00	(56.029,00)	86,28
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.583.782.241,00	11.571.043.224,00	(12.739.017,00)	99,89
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	71.382.800,00	59.075.362,00	(12.307.448,00)	82,78
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.497.308,00	1.497.132,00	(176,00)	99,99
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.462.133,00	4.030.740,00	(431.393,00)	90,33
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.506.440.000,00	11.506.440.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.867.320.000,00	4.867.320.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.867.320.000,00	4.867.320.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	78.780.500,00	0,00	(78.780.500,00)	0
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	78.780.500,00	0,00	(78.780.500,00)	0
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.003.426.974,00	638.123.805,00	(365.303.169,00)	63,59



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	52.500.000,00	(2.100.000,00)	96,15
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	52.500.000,00	(2.100.000,00)	96,15
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	6.846.000,00	(294.000,00)	95,88
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	6.846.000,00	(294.000,00)	95,88
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	97.197.128,00	94.505.000,00	(2.692.128,00)	97,23
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	97.197.128,00	94.505.000,00	(2.692.128,00)	97,23
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.180,00	6.807.480,00	(289.680,00)	95,92
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.180,00	6.807.480,00	(289.680,00)	95,92
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.568.744,00	1.516.135,00	(52.609,00)	96,65
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.568.744,00	1.516.135,00	(52.609,00)	96,65
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.080,00	1.960,00	(120,00)	94,23
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.080,00	1.960,00	(120,00)	94,23
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.485.400,00	5.239.440,00	(245.960,00)	95,50
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.485.400,00	5.239.440,00	(245.960,00)	95,50
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	107.280,00	(5.040,00)	95,51
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	107.280,00	(5.040,00)	95,51
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	321.840,00	(15.120,00)	95,51
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	321.840,00	(15.120,00)	95,51
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	530.361.542,00	257.023.724,00	(273.337.818,00)	48,46
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	166.980.671,00	65.507.968,00	(103.472.703,00)	38,77
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	170.276.582,00	48.996.505,00	(121.280.057,00)	28,77
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.234.000,00	609.875,00	(1.624.125,00)	27,30
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.008.221,00	200.822,00	(1.807.399,00)	10,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	497.565,00	265.120,00	(232.445,00)	53,30
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.127.248,00	1.823.877,00	(303.371,00)	85,74
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	24.852.643,00	0,00	(24.852.643,00)	0
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	159.384.632,00	139.599.557,00	(19.785.075,00)	87,59
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	299.524.640,00	213.259.946,00	(86.264.694,00)	71,20
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.345.110,00	0,00	(1.345.110,00)	0
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.028.000,00	0,00	(2.028.000,00)	0
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	61.986.329,00	53.501.062,00	(8.485.277,00)	86,31
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.297.455,00	400.382,00	(897.073,00)	30,86
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	43.022,00	0,00	(43.022,00)	0
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	608.400,00	0,00	(608.400,00)	0
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.060.049,00	93.819,00	(5.966.230,00)	1,55
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	371.800,00	0,00	(371.800,00)	0



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.396.720,00	0,00	(1.396.720,00)	0
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	21.584.069,00	5.993.910,00	(15.590.159,00)	27,77
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	351.000,00	0,00	(351.000,00)	0
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	46.800,00	0,00	(46.800,00)	0
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	13.650.000,00	13.583.385,00	(66.615,00)	99,51
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	120.984.825,00	93.180.966,00	(27.803.859,00)	77,02
5.1.01.05.11.0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air	50.118.094,00	46.405.203,00	(3.712.891,00)	92,59
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	620.587,00	0,00	(620.587,00)	0
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	14.300.000,00	0,00	(14.300.000,00)	0
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	841.750,00	89.376,00	(752.374,00)	10,62
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	13.650,00	11.843,00	(1.807,00)	86,76
5.1.01.05.11.0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.876.970,00	0,00	(1.876.970,00)	0
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	771.600.000,00	(30.000.000,00)	96,28
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	570.000.000,00	(30.000.000,00)	95,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	570.000.000,00	(30.000.000,00)	95,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	65.182.710.240,00	63.823.137.925,00	(1.359.572.315,00)	97,91
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	65.182.710.240,00	63.823.137.925,00	(1.359.572.315,00)	97,91
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	65.182.710.240,00	63.823.137.925,00	(1.359.572.315,00)	97,91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.976.043.177,00	390.639.219.129,44	(37.336.824.047,56)	91,35
5.1.02.01	Belanja Barang	45.113.001.808,00	37.140.910.370,00	(7.972.091.438,00)	82,33
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.113.001.808,00	37.138.959.370,00	(7.974.042.438,00)	82,33
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	152.859.200,00	148.801.400,00	(4.057.800,00)	97,35
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	189.428.000,00	148.774.770,00	(20.653.230,00)	87,81
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.622.880.900,00	7.580.028.977,00	(642.851.923,00)	92,54
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	126.030.000,00	114.780.000,00	(11.250.000,00)	91,07
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-lai Tabung Pemadam Kebakaran	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-lai Tabung Gas	27.320.000,00	20.020.000,00	(7.300.000,00)	73,28
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3.280.000,00	1.987.500,00	(1.292.500,00)	60,59
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.909.361.145,00	7.923.709.436,66	(1.985.651.708,34)	79,96
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	275.824.000,00	273.716.520,00	(2.107.480,00)	99,24
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	71.241.469,00	65.100.000,00	(6.141.469,00)	91,38
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	21.848.000,00	21.588.720,00	(259.280,00)	98,81
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.927.150.530,00	2.646.561.164,34	(280.589.365,66)	90,41
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.334.035.126,00	2.860.423.172,00	(473.611.954,00)	85,70



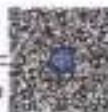
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	192.299.500,00	185.046.500,00	(7.253.000,00)	96,23
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.891.000,00	15.830.400,00	(8.060.600,00)	66,26
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.451.835.296,00	1.348.796.304,00	(103.038.992,00)	92,90
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	627.092.500,00	552.006.473,00	(75.086.027,00)	88,03
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.559.500,00	6.730.430,00	(829.070,00)	89,03
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	72.400.000,00	29.415.000,00	(42.985.000,00)	40,63
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	133.945.300,00	128.341.400,00	(5.603.900,00)	95,82
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.719.475.702,00	2.130.338.598,00	(589.137.104,00)	78,34
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	218.780.000,00	172.556.500,00	(46.223.500,00)	78,87
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.696.028.850,00	1.143.066.083,00	(552.962.767,00)	67,40
5.1.02.01.01.0043	Belanja Nature dan Pakan-Nature	2.194.997.900,00	1.809.891.400,00	(385.106.500,00)	82,46
5.1.02.01.01.0044	Belanja Nature dan Pakan-Pakan	163.009.800,00	159.762.000,00	(3.247.800,00)	98,01
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.353.107.230,00	2.385.203.490,00	(967.903.740,00)	70,54
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	934.654.000,00	707.090.450,00	(227.563.550,00)	75,85
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	51.281.000,00	51.245.500,00	(35.500,00)	99,93
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.445.573.000,00	1.419.418.600,00	(1.026.154.400,00)	58,04
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	298.068.360,00	284.207.300,00	(13.861.060,00)	95,35
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.802.797.000,00	1.385.021.750,00	(217.775.250,00)	86,41
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	0
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	34.870.000,00	32.870.000,00	(2.000.000,00)	94,26
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.400.000,00	8.000.000,00	(3.400.000,00)	70,18
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	254.300.000,00	250.050.780,00	(4.249.240,00)	98,33
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	34.500.000,00	28.500.000,00	(6.000.000,00)	82,61
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	29.735.000,00	22.695.000,00	(7.040.000,00)	76,32
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	58.300.000,00	47.557.225,00	(10.742.775,00)	81,47
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	722.144.500,00	697.856.047,00	(24.288.453,00)	96,64
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	114.000.000,00	113.470.500,00	(529.500,00)	99,54
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.000.000,00	1.951.000,00	(49.000,00)	97,55
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	2.000.000,00	1.951.000,00	(49.000,00)	97,55
5.1.02.02	Belanja Jasa	175.885.248.956,00	161.828.429.528,00	(14.056.819.428,00)	92,01
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	111.761.827.839,00	102.667.514.898,00	(9.094.313.141,00)	91,86
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.324.756.000,00	1.539.929.500,00	(784.826.500,00)	66,24
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.334.500.000,00	2.050.166.000,00	(284.334.000,00)	87,81
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	589.600.456,00	567.268.456,00	(22.332.000,00)	96,21
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	7.000.000,00	5.200.000,00	(1.800.000,00)	74,29
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Penyelenggara Ujian	80.500.000,00	27.500.000,00	(53.000.000,00)	34,16
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	78.000.000,00	72.000.000,00	(6.000.000,00)	92,31



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.243.328.404,00	14.939.817.786,00	(303.510.638,00)	98,01
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.580.850.276,00	9.962.109.435,00	(628.540.840,00)	94,06
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	243.550.500,00	197.139.000,00	(46.411.500,00)	80,94
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	242.250.882,00	188.428.004,00	(53.822.878,00)	77,78
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pertindungan Masyarakat	2.533.197.832,00	2.501.990.050,00	(31.207.572,00)	98,77
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	478.275.071,00	470.451.485,00	(8.823.586,00)	98,78
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	448.388.507,00	444.508.532,00	(3.889.975,00)	99,14
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	293.950.000,00	293.950.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	211.200.000,00	172.710.000,00	(38.490.000,00)	81,78
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknik Pertanian dan Pangan	21.818.810,00	12.855.048,00	(9.163.762,00)	58,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	58.947.716,00	56.772.716,00	(2.175.000,00)	99,69
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.033.720.000,00	4.838.416.879,00	(195.303.321,00)	96,12
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.488.760.442,00	15.112.982.350,00	(375.778.092,00)	97,57
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.000.194.177,00	4.347.795.732,00	(652.398.445,00)	86,95
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.806.000.000,00	1.681.750.000,00	(124.250.000,00)	93,12
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.240.542.701,00	10.852.417.039,00	(388.125.662,00)	96,55
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	644.567.572,00	481.845.006,00	(162.722.566,00)	74,75
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	7.812.278.407,00	7.331.332.757,00	(480.945.650,00)	93,84
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	151.860.576,00	148.878.895,00	(2.981.681,00)	98,04
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	37.065.144,00	36.870.572,00	(1.294.572,00)	98,59
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Pertumbuhan/Pertandingan	161.840.000,00	156.240.000,00	(5.600.000,00)	96,54
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	94.615.000,00	82.115.000,00	(12.500.000,00)	86,79
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	158.986.004,00	157.065.404,00	(1.920.600,00)	98,78
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	987.185.532,00	968.900.778,00	(18.284.754,00)	98,15
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	82.448.824,00	78.677.478,00	(3.771.346,00)	93,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	200.577.872,00	104.134.204,00	(96.443.668,00)	51,92
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	343.500.000,00	321.237.600,00	(22.262.500,00)	93,52
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.005.227.109,00	446.520.100,00	(558.707.009,00)	44,42
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	75.713.458,00	67.000.000,00	(8.713.458,00)	88,49
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenthan dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	293.757.630,00	241.896.352,00	(51.861.278,00)	82,35
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	40.250.000,00	38.500.000,00	(1.750.000,00)	95,65
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	695.426.850,00	618.612.160,00	(76.814.690,00)	88,95
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pamotretan	5.040.548.000,00	4.218.729.800,00	(821.818.400,00)	83,70
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	3.395.088.808,00	3.395.088.808,00	(1,00)	100,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.237.067.000,00	898.482.197,00	(340.604.803,00)	72,47
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	886.527.000,00	686.684.198,00	(331.842.802,00)	66,77
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.567.062.000,00	6.830.492.102,00	(936.569.898,00)	67,02
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.453.769.000,00	1.131.516.930,00	(322.252.070,00)	77,83



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.01.0083	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.954.155.940,00	3.486.636.155,00	(467.519.785,00)	88,25
5.1.02.02.01.0084	Belanja Paket/Pengiriman	182.819.000,00	94.046.980,00	(88.772.020,00)	51,76
5.1.02.02.01.0087	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	619.587.500,00	350.625.981,00	(268.961.519,00)	56,59
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	96.000.000,00	75.197.500,00	(20.802.500,00)	78,33
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	93.571.439,00	93.571.439,00	0,00	100,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.594.721.358,00	49.288.851.828,00	(2.305.869.530,00)	96,53
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	868.251.832,00	836.270.744,00	(31.981.088,00)	96,20
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	48.231.229.312,00	44.128.844.100,00	(2.102.385.212,00)	96,45
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.548.820.878,00	3.440.921.047,00	(107.899.831,00)	96,96
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	204.672.824,00	200.036.218,00	(4.634.406,00)	97,74
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	255.748.712,00	249.850.120,00	(5.898.592,00)	97,69
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	486.000.000,00	433.927.599,00	(52.072.401,00)	89,29
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.025.517.100,00	2.745.218.060,00	(1.280.299.040,00)	68,20
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	174.620.000,00	142.020.000,00	(32.600.000,00)	81,33
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	324.579.000,00	289.360.000,00	(35.219.000,00)	89,15
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	57.200.000,00	38.380.000,00	(18.820.000,00)	67,10
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	489.000,00	240.000,00	(249.000,00)	49,18
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	86.000.000,00	32.723.750,00	(53.276.250,00)	38,05
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	645.350.000,00	480.300.000,00	(165.050.000,00)	74,42
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.374.688.000,00	1.139.093.800,00	(235.474.400,00)	82,87
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	108.688.100,00	90.688.150,00	(28.018.950,00)	74,22
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	12.852.000,00	0,00	(12.852.000,00)	0
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54.240.000,00	16.600.000,00	(37.640.000,00)	34,29
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	382.720.000,00	316.825.000,00	(65.895.000,00)	83,31
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	187.632.000,00	187.632.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	17.000.000,00	12.094.560,00	(4.905.440,00)	71,14
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	585.500.000,00	0,00	(585.500.000,00)	0
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	784.789.820,00	591.496.500,00	(193.293.320,00)	77,34
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	83,33
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	480.474.820,00	392.975.000,00	(87.499.820,00)	81,79
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	111.500.000,00	106.201.500,00	(5.298.500,00)	95,25
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Masa/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	71.965.000,00	14.070.000,00	(57.895.000,00)	19,55
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	75.000.000,00	59.000.000,00	(16.000.000,00)	78,67
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.000.000,00	12.850.000,00	(3.150.000,00)	80,31
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	18.000.000,00	12.850.000,00	(3.150.000,00)	80,31



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Berحرك Kesenian Lainnya	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.314.200.000,00	1.298.180.758,00	(16.019.242,00)	98,78
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	37.000.000,00	36.000.851,00	(999.149,00)	97,30
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	427.200.000,00	425.127.411,00	(2.072.589,00)	99,51
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	480.000.000,00	468.734.130,00	(11.265.870,00)	97,65
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	150.000.000,00	148.818.386,00	(1.181.614,00)	99,21
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	220.000.000,00	219.500.000,00	(500.000,00)	99,77
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.068.155.000,00	1.984.777.736,00	(83.377.264,00)	96,76
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	100.000.000,00	99.439.350,00	(560.650,00)	99,44
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	245.000.000,00	243.450.000,00	(1.550.000,00)	99,37
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	98,67
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	99.800.000,00	(200.000,00)	99,80
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	50.000.000,00	49.533.750,00	(466.250,00)	99,07
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	550.000.000,00	248.956.160,00	(301.043.840,00)	45,26
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	40.000.000,00	39.872.200,00	(127.800,00)	99,68
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	105.000.000,00	44.800.000,00	(60.200.000,00)	42,57
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	681.155.000,00	645.726.678,00	(35.428.322,00)	94,80
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	40.000.000,00	39.660.300,00	(339.700,00)	99,15
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	50.000.000,00	49.539.300,00	(460.700,00)	99,08
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.696.885.998,00	3.257.909.076,00	(438.976.922,00)	88,60
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.248.059.998,00	1.818.681.576,00	(429.378.422,00)	81,07
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	278.274.000,00	271.025.600,00	(7.248.400,00)	97,40
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.374.552.000,00	1.368.202.000,00	(6.350.000,00)	99,54
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	192.151.843,00	61.996.500,00	(130.155.343,00)	32,26
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.117.418,00	0,00	(19.117.418,00)	0
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	173.034.425,00	61.996.500,00	(111.037.925,00)	35,83
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	195.300.000,00	181.834.370,00	(13.465.630,00)	93,11
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	77.000.000,00	69.275.211,00	(7.724.789,00)	89,97
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	118.300.000,00	112.559.159,00	(5.740.841,00)	95,15
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.590.644.583,00	16.921.117.337,94	(1.669.527.245,06)	91,02
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.580.679.547,00	5.580.310.229,00	(369.318,00)	99,99
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	70.000.000,00	68.571.170,00	(1.428.830,00)	98,10
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	108.830.000,00	108.595.150,00	(234.850,00)	99,78
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	2.200.000.000,00	2.183.522.469,00	(16.477.531,00)	99,25
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	31.720.000,00	10.012.954,00	(21.707.046,00)	31,57



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Batu-Alat Pengolahan Air Kotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Batu-Alat Batu Lainnya	12.000.000,00	11.999.100,00	(900,00)	99,99
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.521.519.870,00	1.192.864.868,00	(328.654.202,00)	78,40
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	240.514.079,00	152.573.785,00	(87.940.294,00)	63,44
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	204.063.000,00	122.888.245,00	(81.174.755,00)	60,22
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	200.000.000,00	199.887.850,00	(112.150,00)	99,94
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	9.065.650,00	8.851.000,00	(214.650,00)	97,83
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	418.438,00	0,00	(418.438,00)	0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	220.225.131,00	165.235.492,00	(54.989.639,00)	75,03
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.420.000,00	1.296.000,00	(3.124.000,00)	29,32
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	231.000.000,00	163.691.649,00	(67.308.351,00)	70,86
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	64.730.000,00	55.737.800,00	(8.992.400,00)	86,11
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	15.113.000,00	(34.887.000,00)	30,23
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	49.400.000,00	27.650.000,00	(21.750.000,00)	55,97
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	42.500.000,00	34.950.000,00	(7.550.000,00)	82,24
5.1.02.03.02.0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	8.250.000,00	5.758.750,00	(2.491.250,00)	69,80
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	15.000.000,00	11.593.950,00	(3.406.050,00)	77,29
5.1.02.03.02.0143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	10.000.000,00	2.864.000,00	(7.136.000,00)	28,64
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	387.434.500,00	284.670.482,00	(112.764.008,00)	71,83
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	38.300.000,00	27.340.000,00	(10.960.000,00)	71,38
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	421.210.000,00	326.956.400,00	(94.253.600,00)	77,62
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	193.890.000,00	150.477.500,00	(43.412.500,00)	77,61
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuara	70.000.000,00	69.416.000,00	(584.000,00)	99,17
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuara	43.000.000,00	42.697.000,00	(303.000,00)	99,30
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50.000.000,00	49.495.986,00	(504.434,00)	98,99
5.1.02.03.02.0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	68.189.679,00	68.600.439,00	(389.440,00)	99,44
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.468.654.626,00	4.165.606.819,94	(304.048.006,06)	93,20
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.120.542.864,00	961.460.845,00	(159.081.919,00)	85,80
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	12.740.000,00	12.612.350,00	(127.650,00)	99,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	75.000.000,00	74.900.000,00	(100.000,00)	99,87
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	86.094.679,00	83.954.980,00	(2.139.699,00)	97,51
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	88.600.000,00	89.779.922,94	(20.077,06)	99,98
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.931.752.082,00	1.875.754.115,00	(55.997.967,00)	97,10



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	48.427.100,00	48.865.704,00	(561.395,00)	98,86
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	425.280.000,00	362.874.629,00	(62.405.371,00)	85,33
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	151.000.000,00	141.896.080,00	(9.103.920,00)	93,84
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	483.477.901,00	459.168.094,00	(24.309.807,00)	99,07
5.1.02.03.03.0084	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	7.225.010.210,00	6.981.293.344,00	(243.716.866,00)	96,63
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.753.610.210,00	5.718.469.959,00	(35.140.251,00)	99,39
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	404.800.000,00	402.852.158,00	(1.947.842,00)	99,52
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	212.000.000,00	211.278.500,00	(721.500,00)	99,66
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	24.000.000,00	23.734.000,00	(266.000,00)	98,89
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	400.000.000,00	397.485.000,00	(2.515.000,00)	99,37
5.1.02.03.04.0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	11.700.000,00	11.639.500,00	(60.500,00)	99,48
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	40.000.000,00	38.896.500,00	(1.103.500,00)	97,24
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	298.700.000,00	144.887.727,00	(153.812.273,00)	48,51
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	80.200.000,00	32.050.000,00	(48.150.000,00)	39,96
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	14.600.000,00	9.820.000,00	(4.780.000,00)	67,26
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	14.600.000,00	9.820.000,00	(4.780.000,00)	67,26
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	300.500.000,00	203.886.945,00	(96.613.055,00)	67,85
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	300.500.000,00	203.886.945,00	(96.613.055,00)	67,85
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.367.308.416,00	30.184.672.612,00	(7.182.635.804,00)	80,76
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.367.308.416,00	30.184.672.612,00	(7.182.635.804,00)	80,76
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.209.892.416,00	24.553.372.612,00	(6.656.519.804,00)	78,67
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.752.066.000,00	4.350.820.000,00	(401.246.000,00)	91,56
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.405.350.000,00	1.280.480.000,00	(124.870.000,00)	91,11
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.635.187.000,00	5.695.420.500,00	(238.766.500,00)	95,89
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.506.187.000,00	5.283.070.000,00	(223.117.000,00)	95,95
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.054.267.000,00	952.215.000,00	(102.072.000,00)	90,32
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Susta Prestasi	1.815.000.000,00	1.728.755.000,00	(86.245.000,00)	95,25
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.636.900.000,00	2.802.100.000,00	(34.600.000,00)	98,68
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	329.000.000,00	312.350.500,00	(16.649.500,00)	94,94
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	324.000.000,00	308.850.500,00	(15.149.500,00)	95,32
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.808.435.240,00	21.090.106.497,00	(718.328.743,00)	96,71
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.808.435.240,00	21.090.106.497,00	(718.328.743,00)	96,71
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.808.435.240,00	21.090.106.497,00	(718.328.743,00)	96,71
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	123.375.217.174,00	118.178.862.284,50	(5.197.654.889,50)	95,79



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	123.376.217.174,00	118.178.582.284,50	(5.197.634.889,50)	95,79
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	123.376.217.174,00	118.178.582.284,50	(5.197.634.889,50)	95,79
5.1.03	Belanja Bunga	3.902.690.675,00	3.432.910.119,00	(469.780.556,00)	87,96
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	3.902.690.675,00	3.432.910.119,00	(469.780.556,00)	87,96
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	3.902.690.675,00	3.432.910.119,00	(469.780.556,00)	87,96
5.1.03.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	3.902.690.675,00	3.432.910.119,00	(469.780.556,00)	87,96
5.1.05	Belanja Hibah	113.952.184.180,00	112.562.518.446,00	(1.389.664.734,00)	98,77
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.210.988.535,00	13.210.988.535,00	0,00	100,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	12.789.757.800,00	12.789.757.800,00	0,00	100,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	12.789.757.800,00	12.789.757.800,00	0,00	100,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	421.230.735,00	421.230.735,00	0,00	100,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	421.230.735,00	421.230.735,00	0,00	100,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.097.574.000,00	98.697.909.266,00	(1.399.664.734,00)	98,60
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.334.274.000,00	15.412.808.266,00	78.534.266,00	100,51
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.334.274.000,00	15.412.808.266,00	78.534.266,00	100,51
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	84.555.300.000,00	83.077.300.000,00	(1.478.000.000,00)	98,25
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	84.435.300.000,00	82.975.300.000,00	(1.460.000.000,00)	98,27
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	120.000.000,00	102.000.000,00	(18.000.000,00)	85,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	643.621.645,00	643.621.645,00	0,00	100,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	643.621.645,00	643.621.645,00	0,00	100,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	643.621.645,00	643.621.645,00	0,00	100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.680.200.000,00	4.570.130.500,00	(90.069.500,00)	98,07
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.680.200.000,00	4.570.130.500,00	(90.069.500,00)	98,07
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	810.200.000,00	795.500.000,00	(14.700.000,00)	98,19
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	810.200.000,00	795.500.000,00	(14.700.000,00)	98,19
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.850.000.000,00	3.774.630.500,00	(75.369.500,00)	98,04
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.850.000.000,00	3.774.630.500,00	(75.369.500,00)	98,04
5.2	BELANJA MODAL	232.285.395.954,00	185.360.556.196,77	(46.925.839.757,23)	80,23
5.2.01	Belanja Modal Tanah	311.153.810,00	1.458.000,00	(309.695.810,00)	0,47
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	311.153.810,00	1.458.000,00	(309.695.810,00)	0,47
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	211.153.810,00	1.458.000,00	(209.695.810,00)	0,69
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	211.153.810,00	1.458.000,00	(209.695.810,00)	0,69
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.143.897.804,00	19.847.281.141,00	(1.596.616.663,00)	92,45
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	13.300.000,00	13.100.000,00	(200.000,00)	98,50
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	13.300.000,00	13.100.000,00	(200.000,00)	98,50
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	13.300.000,00	13.100.000,00	(200.000,00)	98,50
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.040.890.000,00	2.823.453.340,00	(217.436.660,00)	92,85
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.040.890.000,00	2.823.453.340,00	(217.436.660,00)	92,85
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	850.000.000,00	840.000.000,00	(210.000.000,00)	75,29
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Perumpang	840.890.000,00	840.200.000,00	(890.000,00)	99,89
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	44.253.340,00	(5.746.660,00)	88,51
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.500.000.000,00	1.499.000.000,00	(1.000.000,00)	99,93
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.436.805.000,00	1.394.511.000,00	(42.294.000,00)	97,06
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.436.805.000,00	1.394.511.000,00	(42.294.000,00)	97,06
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biaya	16.611.000,00	16.511.000,00	(100.000,00)	99,40
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.420.194.000,00	1.378.000.000,00	(42.194.000,00)	97,03
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.694.927.510,00	5.257.494.412,00	(407.433.098,00)	92,81
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.695.013.854,00	1.548.647.705,00	(146.366.149,00)	91,36
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	677.388.400,00	608.647.780,00	(68.740.620,00)	89,85
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.017.625.454,00	939.999.925,00	(77.625.529,00)	92,37
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.998.483.009,00	3.655.839.080,00	(250.623.949,00)	91,58
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	717.891.482,00	623.005.707,00	(94.885.775,00)	86,78
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	56.673.000,00	47.127.987,00	(9.545.013,00)	83,16
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.007.840.511,00	1.943.310.351,00	(64.530.160,00)	96,79
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.121.058.016,00	1.040.295.015,00	(80.763.001,00)	92,80
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	70,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	63.460.647,00	53.007.647,00	(10.443.000,00)	83,54
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	43.090.000,00	33.000.000,00	(10.090.000,00)	76,58
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12.460.000,00	12.097.000,00	(353.000,00)	97,16
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	7.910.647,00	7.910.647,00	0,00	100,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	697.926.364,00	523.315.910,00	(174.610.454,00)	74,98
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	633.556.364,00	468.558.710,00	(164.997.654,00)	73,96
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	184.240.667,00	178.636.057,00	(5.604.610,00)	96,96
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	431.986.697,00	273.038.643,00	(158.948.054,00)	63,21
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	1.300.000,00	964.000,00	(316.000,00)	73,89
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	16.029.000,00	15.900.000,00	(129.000,00)	99,20
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	64.370.000,00	54.757.200,00	(9.612.800,00)	85,07
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	18.870.000,00	18.000.000,00	(870.000,00)	95,39
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	45.500.000,00	36.757.200,00	(8.742.800,00)	80,79
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.455.832.677,00	3.270.559.447,00	(185.273.230,00)	94,64
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.062.575.650,00	2.039.908.160,00	(22.668.490,00)	98,90
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	380.475.650,00	372.043.960,00	(8.432.690,00)	95,28



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	7.100.000,00	4.767.000,00	(2.333.000,00)	67,14
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	45.000.000,00	43.097.200,00	(1.902.800,00)	95,77
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.393.256.027,00	1.230.651.287,00	(162.604.740,00)	88,33
5.2.02.07.02.0006	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.393.256.027,00	1.230.651.287,00	(162.604.740,00)	88,33
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	398.516.982,00	390.416.907,00	(8.100.055,00)	98,46
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	11.441.500,00	11.441.500,00	0,00	100,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	2.941.500,00	2.941.500,00	0,00	100,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	347.725.457,00	341.625.407,00	(6.100.050,00)	98,25
5.2.02.08.03.0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Menengah	41.451.840,00	41.451.840,00	0,00	100,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Kesenian	161.899.660,00	161.899.660,00	0,00	100,00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga	136.373.957,00	129.277.357,00	(6.096.600,00)	95,50
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	9.000.000,00	8.996.950,00	(3.450,00)	99,96
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	37.350.005,00	37.350.000,00	(5,00)	100,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	37.350.005,00	37.350.000,00	(5,00)	100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.363.805.391,00	5.803.308.225,00	(560.497.166,00)	91,19
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.244.096.746,00	4.853.477.368,00	(390.619.380,00)	92,55
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.944.096.746,00	4.553.477.368,00	(390.619.380,00)	92,10
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.119.708.643,00	949.830.857,00	(169.877.786,00)	84,83
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	969.942.093,00	809.703.607,00	(160.239.386,00)	83,48
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	28.318.000,00	28.311.000,00	(7.000,00)	99,98
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	121.447.650,00	111.816.250,00	(9.631.400,00)	92,07
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	18.250.000,00	15.478.000,00	(2.772.000,00)	84,81
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	18.250.000,00	15.478.000,00	(2.772.000,00)	84,81
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	10.000.000,00	7.278.000,00	(2.722.000,00)	72,78
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	8.250.000,00	8.200.000,00	(50.000,00)	99,39
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	55.643.900,00	55.643.900,00	0,00	100,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	55.643.900,00	55.643.900,00	0,00	100,00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	40.643.900,00	40.643.900,00	0,00	100,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.147.813.345,00	119.708.395.962,77	(15.439.217.382,23)	88,58
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	134.015.091.345,00	118.575.973.962,77	(15.439.117.382,23)	88,46
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	133.806.762.845,00	118.575.973.962,77	(15.229.788.882,23)	88,62
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.861.312.000,00	1.536.170.385,91	(325.141.614,09)	82,64
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.613.616.064,00	2.750.215.971,00	(63.400.063,00)	97,75
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.268.422.840,00	8.062.186.799,13	(1.206.236.040,87)	86,99
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	8.148.403.036,00	3.368.920.825,33	(4.779.482.210,67)	41,34
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Per tokoan/Koperasi/Pasar	77.409.633.600,00	76.342.043.080,00	(1.067.590.420,00)	98,62



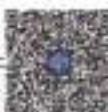
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	207.860.000,00	122.822.944,00	(85.037.056,00)	58,99
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Genset/Pool	342.128.000,00	179.987.534,00	(162.140.466,00)	52,61
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Parkiran	189.511.000,00	188.497.219,00	(1.013.781,00)	99,47
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	264.607.109,00	219.714.338,00	(84.892.771,00)	77,20
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	26.491.248.999,00	20.452.488.999,00	(6.038.761.999,00)	77,20
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.899.000.000,00	1.341.500.557,40	(357.499.442,60)	70,66
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.090.000.000,00	4.009.627.310,00	(1.080.372.690,00)	78,77
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	209.328.800,00	0,00	(209.328.800,00)	0
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	209.328.800,00	0,00	(209.328.800,00)	0
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titi Kontrol/Pasti	1.132.522.000,00	1.132.422.000,00	(100.000,00)	99,99
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.132.522.000,00	1.132.422.000,00	(100.000,00)	99,99
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.132.522.000,00	1.132.422.000,00	(100.000,00)	99,99
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.958.844.000,00	42.388.269.278,00	(28.570.574.722,00)	59,71
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	69.788.484.000,00	41.870.014.011,00	(27.918.469.989,00)	59,71
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	68.181.484.000,00	40.079.149.555,00	(28.102.334.445,00)	58,78
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	68.116.380.000,00	40.015.572.127,00	(28.100.807.873,00)	58,75
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	65.104.000,00	63.577.428,00	(1.526.572,00)	97,66
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.607.000.000,00	1.590.864.458,00	(16.135.542,00)	99,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.607.000.000,00	1.590.864.458,00	(16.135.542,00)	99,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	540.000.000,00	333.895.400,00	(206.104.600,00)	61,80
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	116.000.000,00	115.707.900,00	(292.100,00)	99,75
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	116.000.000,00	115.707.900,00	(292.100,00)	99,75
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	424.000.000,00	217.987.500,00	(206.012.500,00)	51,41
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	424.000.000,00	217.987.500,00	(206.012.500,00)	51,41
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	377.440.000,00	159.233.825,00	(218.206.175,00)	42,19
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	237.440.000,00	159.233.825,00	(78.206.175,00)	67,06
5.2.04.03.01.0006	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	237.440.000,00	159.233.825,00	(78.206.175,00)	67,06
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gas	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	0
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	0
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	252.920.000,00	205.326.040,00	(47.593.960,00)	81,16
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0
5.2.04.04.01.0006	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	249.920.000,00	205.326.040,00	(44.593.960,00)	82,16
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	249.920.000,00	205.326.040,00	(44.593.960,00)	82,16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.672.644.995,00	3.917.785.979,00	245.140.984,00	106,67
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.207.394.995,00	3.486.455.095,00	279.060.100,00	108,08
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.155.024.999,00	3.414.785.099,00	259.760.100,00	108,23
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	670.532.899,00	750.270.199,00	79.737.300,00	111,89
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filosofis	3.728.000,00	3.728.000,00	0,00	100,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	401.116.800,00	419.244.100,00	18.127.300,00	104,52



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	108.179.300,00	108.889.000,00	2.889.700,00	102,83
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	851.507.800,00	888.033.900,00	34.526.300,00	104,05
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	486.582.000,00	484.062.800,00	17.480.800,00	103,75
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	100,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga	653.883.400,00	761.082.100,00	107.198.700,00	116,39
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	52.369.999,00	51.669.999,00	(700.000,00)	98,66
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	52.369.999,00	51.669.999,00	(700.000,00)	98,66
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	300.250.000,00	288.888.884,00	(13.361.116,00)	96,55
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	238.450.000,00	225.088.884,00	(13.361.116,00)	94,40
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	206.500.000,00	206.138.884,00	(361.116,00)	99,83
5.2.05.02.01.0002	Belanja Modal Lukisan	24.650.000,00	11.650.000,00	(13.000.000,00)	47,26
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	100,00
5.2.05.02.02.0001	Belanja Modal Pahatan	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	100,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	15.000.000,00	14.802.000,00	(198.000,00)	98,66
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	15.000.000,00	14.802.000,00	(198.000,00)	98,66
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	15.000.000,00	14.802.000,00	(198.000,00)	98,66
5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	150.000.000,00	149.640.000,00	(360.000,00)	99,76
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	150.000.000,00	149.640.000,00	(360.000,00)	99,76
5.2.05.06.01.0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi	150.000.000,00	149.640.000,00	(360.000,00)	99,76
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.052.242.000,00	817.365.838,00	(234.876.162,00)	77,66
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.052.242.000,00	817.365.838,00	(234.876.162,00)	77,66
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.052.242.000,00	817.365.838,00	(234.876.162,00)	77,66
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.052.242.000,00	817.365.838,00	(234.876.162,00)	77,66
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.825.721.728,00	2.940.474.524,26	(885.247.203,74)	76,86
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.825.721.728,00	2.940.474.524,26	(885.247.203,74)	76,86
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.825.721.728,00	2.940.474.524,26	(885.247.203,74)	76,86
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.825.721.728,00	2.940.474.524,26	(885.247.203,74)	76,86
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.825.721.728,00	2.940.474.524,26	(885.247.203,74)	76,86
5.4	BELANJA TRANSFER	124.139.165.483,00	122.594.344.451,00	(1.544.821.032,00)	98,76
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.000.820.483,00	15.455.999.451,00	(1.544.821.032,00)	90,91
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.569.747.179,00	10.719.729.677,00	(850.017.502,00)	92,65
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.569.747.179,00	10.719.729.677,00	(850.017.502,00)	92,65
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.569.747.179,00	10.719.729.677,00	(850.017.502,00)	92,65
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.431.073.304,00	4.736.269.774,00	(694.803.530,00)	87,21
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.431.073.304,00	4.736.269.774,00	(694.803.530,00)	87,21
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.431.073.304,00	4.736.269.774,00	(694.803.530,00)	87,21
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.138.345.000,00	107.138.345.000,00	0,00	100,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	107.138.345.000,00	107.138.345.000,00	0,00	100,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.982.388.000,00	52.982.388.000,00	0,00	100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.982.388.000,00	52.982.388.000,00	0,00	100,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	54.155.957.000,00	54.155.957.000,00	0,00	100,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	6.312.700.000,00	6.312.700.000,00	0,00	100,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	47.843.257.000,00	47.843.257.000,00	0,00	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	(55.825.666.012,00)	14.958.906.007,86	70.784.572.919,86	0
	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.825.666.012,00	55.874.539.707,84	48.873.695,84	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.787.166.012,00	55.808.036.707,84	40.873.695,84	100,07
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	23.154.437.204,00	23.154.437.204,36	0,36	100,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	20.508.229.604,00	20.508.229.604,36	0,36	100,00
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	9.166.889.432,00	9.166.889.432,36	0,36	100,00
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	8.406.640.405,00	8.406.640.405,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	108.358.580,00	108.358.580,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	22.927.389,00	22.927.389,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	99.617.841,00	99.617.841,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bisa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.613.797.957,00	2.613.797.957,00	0,00	100,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	1.923.603.295,00	1.923.603.295,00	0,00	100,00
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	820.794.422,00	820.794.422,00	0,00	100,00
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	1.102.808.873,00	1.102.808.873,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	724.604.305,00	724.604.305,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	136.211.000,00	136.211.000,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	145.411.531,00	145.411.531,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	61.364.554,00	61.364.554,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	231.787.485,00	231.787.485,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	147.050.894,00	147.050.894,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.045.540,00	1.045.540,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	1.733.301,00	1.733.301,00	0,00	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	31.425.703.502,00	31.425.703.502,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	31.425.703.502,00	31.425.703.502,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	5.921.037.518,00	5.921.037.518,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	3.150.655.678,00	3.150.655.678,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.170.148.802,00	5.170.148.802,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	772.134.086,00	772.134.086,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	195.067.054,00	195.067.054,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	6.049.132.526,00	6.049.132.526,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	10.167.527.838,00	10.167.527.838,00	0,00	100,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	1.187.025.306,00	1.187.025.306,00	0,00	100,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.187.025.306,00	1.187.025.306,00	0,00	100,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.187.025.306,00	1.187.025.306,00	0,00	100,00
6.1.01.99	Koreksi SilPA	0,00	40.873.695,28	40.873.695,28	0



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.01.99.02	Lain-lain	0,00	40.873.895,28	40.873.895,28	0
6.1.01.99.02.0001	Lain-lain	0,00	40.873.895,28	40.873.895,28	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	58.500.000,00	58.500.000,00	8.000.000,00	113,68
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	180,00
6.1.05.05.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	180,00
6.1.05.05.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	180,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	53.500.000,00	57.500.000,00	4.000.000,00	107,48
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	53.500.000,00	57.500.000,00	4.000.000,00	107,48
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	53.500.000,00	57.500.000,00	4.000.000,00	107,48
	PEMBIAYAAN NETTO	55.825.668.012,00	55.874.538.707,64	48.873.895,64	100,06
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	70.833.448.818,50	70.833.448.818,50	0



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
I	BELANJA OPERASI	546.535.427.357,00	546.535.427.357,00	508.061.869.075,44	92,96	
I.1	Belanja Barang dan Jasa (Termasuk Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat)	427.923.043.177,00	427.923.043.177,00	390.939.219.129,44	91,36	
I.2	Belanja Hibah Barang/Jasa	113.952.184.180,00	113.952.184.180,00	112.552.519.446,00	98,77	
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	4.660.200.000,00	4.660.200.000,00	4.570.130.500,00	98,07	
II	BELANJA MODAL	230.918.350.144,00	230.918.350.144,00	185.541.732.358,77	80,35	
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.143.897.804,00	21.143.897.804,00	19.547.281.141,00	92,45	
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.147.613.345,00	135.147.613.345,00	119.708.395.962,77	88,58	
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.958.844.000,00	70.958.844.000,00	42.368.269.276,00	59,71	
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.667.994.995,00	3.667.994.995,00	3.917.785.979,00	106,81	
	TOTAL (I + II)	777.453.777.501,00	777.453.777.501,00	693.603.601.434	89,21	

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.695.162	-	-	-	27.695.162	27.401.962	-	-	-	27.401.962	98,94
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL												
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	734.130.234	-	-	-	734.130.234	581.442.123	-	-	-	581.442.123	79,20
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.618.700	-	-	-	53.618.700	48.225.950	-	-	-	48.225.950	89,94
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.615.600	-	-	-	6.615.600	3.740.100	-	-	-	3.740.100	56,53

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.021.000	188.580.000	-	-	206.601.000	16.765.000	164.860.000	-	-	181.625.000	87,91
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.478.500	-	-	-	3.478.500	3.215.400	-	-	-	3.215.400	92,44
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM												
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	25.127.650	-	-	-	25.127.650	24.617.300	-	-	-	24.617.300	97,97
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI												
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.733.400	-	-	-	5.733.400	5.703.500	-	-	-	5.703.500	99,48
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Dinas Pariwisata	489.315.280	-	-	-	489.315.280	486.521.524	-	-	-	486.521.524	99,43

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	49.548.250	-	-	-	49.548.250	14.666.200	-	-	-	14.666.200	29,60
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan													
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI											
			Dinas Ketenagakerjaan	8.931.600	-	-	-	8.931.600	7.772.000	-	-	-	7.772.000	87,02
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	64.843.350	-	-	-	64.843.350	64.622.650	-	-	-	64.622.650	99,66
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	90.442.800	809.091.000	-	-	899.533.800	82.365.363	808.118.114	-	-	890.483.477	98,99
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Kesehatan	405.320.360	52.798.700	-	-	458.119.060	314.006.158	50.100.000	-	-	364.106.158	79,48
			Rumah Sakit Umum Daerah	159.709.537.310	5.659.566.921	-	-	165.369.104.231	157.454.392.566	5.649.422.350	-	-	163.103.814.916	98,63
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
			Dinas Kesehatan	59.000.000	-	-	-	59.000.000,00	49.888.600	-	-	-	49.888.600	84,56
			Rumah Sakit Umum Daerah	-	2.260.561.064	-	-	2.260.561.064	0	2.260.561.064	-	-	2.260.561.064	100,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											
			Dinas Kesehatan	784.056.500	-	-	-	784.056.500	777.560.112	-	-	-	777.560.112	99,17

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN													
		Dinas Kesehatan	7.086.000	-	-	-	7.086.000	5.946.000	-	-	-	5.946.000	83,91		
		Dinas Kesehatan	6.124.000	-	-	-	6.124.000	6.066.000	-	-	-	6.066.000	99,05		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
		Dinas Ketenagakerjaan	3.642.800	-	-	-	3.642.800	3.584.800	-	-	-	3.584.800	98,41		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
		Dinas Ketenagakerjaan	92.890.850	-	-	-	92.890.850	86.852.600	-	-	-	86.852.600	93,50		
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
		Dinas Ketenagakerjaan	11.695.850	-	-	-	11.695.850	11.429.050	-	-	-	11.429.050	97,72		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
		Dinas Ketenagakerjaan	12.269.150	-	-	-	12.269.150	11.958.450	-	-	-	11.958.450	97,47		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN													
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	921.500	-	-	-	921.500	916.700	-	-	-	916.700	99,48		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
		Sekretariat Daerah	58.546.012	-	-	-	58.546.012	50.160.974	-	-	-	50.160.974	85,68		
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan														
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
		Dinas Kebudayaan	2.220.049.212	-	-	-	2.220.049.212	2.070.163.882	-	-	-	2.070.163.882	93,25		
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH													
		Dinas Kebudayaan	442.284.024	-	-	-	442.284.024	429.177.424	-	-	-	429.177.424	97,04		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												
		Dinas Kebudayaan	36.632.500	-	-	-	36.632.500	31.881.570	-	-	-	31.881.570	87,03	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN												
		Dinas Kebudayaan	117.654.000	-	-	-	117.654.000	117.654.000	-	-	-	117.654.000	100,00	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
		Dinas Kesehatan	42.397.112.971	52.798.700	-		42.449.911.671	38.452.271.530	50.100.000	-	-	38.502.371.530	90,70	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
		Dinas Kesehatan	4.050.000	-	-		4.050.000	4.050.000	-	-	-	4.050.000	100,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
		Dinas Kesehatan	20.800.000	-	-		20.800.000	20.800.000	-	-	-	20.800.000	100,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.818.500	200.000.000	-	-	204.818.500	4.696.528	199.200.000	-	-	203.896.528	99,55	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.876.291.310	12.507.500.000	-	-	19.383.791.310	6.743.168.880	11.135.684.884	-	-	17.878.853.764	92,24	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	101.498.100	-	-	-	101.498.100	1.475.200	-	-	-	1.475.200	1,45
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT												
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	32.686.412	-	-	-	32.686.412	31.086.912	-	-	-	31.086.912	95,11
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.212.100	-	-	-	1.212.100	1.184.500	-	-	-	1.184.500	97,72
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.679.898.714	-	-	-	1.679.898.714	1.577.694.394	-	-	-	1.577.694.394	93,92
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	224.890.020	-	-	-	224.890.020	220.999.020	-	-	-	220.999.020	98,27
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.496.655.352	-	-	-	1.496.655.352	1.412.031.111	-	-	-	1.412.031.111	94,35
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Dinas Perhubungan	4.819.200	-	-	-	4.819.200	4.801.050	-	-	-	4.801.050	99,62

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
			Dinas Perhubungan	1.049.500	-	-	-	1.049.500	279.500	-	-	-	279.500	26,63
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											
			Dinas Perhubungan	306.399.250	24.220.000	0		330.619.250	147.662.058	23.841.000,00	-	-	171.523.058	51,88
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Pertanian	1.954.500	-	-	-	1.954.500	1.954.500	-	-	-	1.954.500	100,00
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.565.000	-	-	-	1.565.000	1.304.500	-	-	-	1.304.500	83,35
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.816.000	-	-	-	15.816.000	6.334.400	-	-	-	6.334.400	40,05
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	109.111.950	-	-	-	109.111.950	100.536.200	-	-	-	100.536.200	92,14
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	34.543.712	-	-	-	34.543.712	34.028.712	-	-	-	34.028.712	98,51
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA											
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	10.853.900	-	-	-	10.853.900	8.202.400	-	-	-	8.202.400	75,57

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	19.449.600	-	-	-	19.449.600	19.307.617	-	-	-	19.307.617	99,27	
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	231.438.288	32.920.000	-	-	264.358.288	209.512.839	32.644.000	-	-	242.156.839	91,60	
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.084.250	-	-	-	3.084.250	2.606.200	-	-	-	2.606.200	84,50	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.084.100	-	-	-	2.084.100	1.841.900	-	-	-	1.841.900	88,38	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.409.900	-	-	-	2.409.900	2.297.900	-	-	-	2.297.900	95,35	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.760.800	-	-	-	3.760.800	3.570.800	-	-	-	3.570.800	94,95	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
			Dinas Komunikasi dan Informatika	4.419.900	-	-	-	4.419.900	4.412.600	-	-	-	4.412.600	99,83	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
			Dinas Komunikasi dan Informatika	41.816.400	-	-	-	41.816.400	32.029.945	-	-	-	32.029.945	76,60
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											
			Dinas Komunikasi dan Informatika	767.188.400	352.000.000	-	-	1.119.188.400	675.675.752	348.000.000	-	-	1.023.675.752	91,47
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22.631.612	-	-	-	22.631.612	22.615.512	-	-	-	22.615.512	99,93
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP											
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.033.450	116.240.000	-	-	120.273.450	3.405.949	110.490.000	-	-	113.895.949	94,70
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Sekretariat Daerah	66.740.000	250.000.000	-	-	316.740.000	59.685.159	248.500.000	-	-	308.185.159	97,30
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											
			Sekretariat Daerah	215.600	-	-	-	215.600	-	-	-	-	-	-
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											
			Sekretariat Daerah	49.904.262	7.000.000	-	-	56.904.262	47.519.501	6.993.000	-	-	54.512.501	95,80
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14.566.200	-	-	-	14.566.200	2.419.500	-	-	-	2.419.500	16,61

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.906,262	-	-	-	22.906.262	21.329.262	-	-	-	21.329.262	93,12
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32.305.300	-	-	-	32.305.300	28.115.900	-	-	-	28.115.900	87,03
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	29.416.412	-	-	-	29.416.412	28.554.674	-	-	-	28.554.674	97,07
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.920.778.820	-	-	-	4.920.778.820	4.795.579.458	-	-	-	4.795.579.458	97,46
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.293.800	-	-	-	35.293.800	30.422.440	-	-	-	30.422.440	86,20
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.256.465.896	-	-	-	2.256.465.896	2.054.691.707	-	-	-	2.054.691.707	91,06

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
		Inspektorat	4.237.400	-	-	-	4.237.400	2.929.000	-	-	-	2.929.000	69,12	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												
		Inspektorat	4.119.250	-	-	-	4.119.250	2.631.350	-	-	-	2.631.350	63,88	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
		Kecamatan Klungkung	1.177.400	-	-	-	1.177.400	1.177.400	-	-	-	1.177.400	100,00	
		Kecamatan Nusa Penida	8.453.850	-	-	-	8.453.850	7.639.380	-	-	-	7.639.380	90,37	
		Kecamatan Dawan	2.427.650	-	-	-	2.427.650	2.266.700	-	-	-	2.266.700	93,37	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		Kecamatan Dawan	26.297.400	2.491.000.000	-	-	2.517.297.400	25.754.000	1.999.168.908	-	-	2.024.922.908	80,44	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Kecamatan Klungkung	66.797.200	-	-	-	66.797.200	66.797.200	-	-	-	66.797.200	100,00	
		Kecamatan Nusa Penida	13.686.100	-	-	-	13.686.100	13.660.005	-	-	-	13.660.005	99,81	
		Kecamatan Dawan	5.244.200	-	-	-	5.244.200	5.205.200	-	-	-	5.205.200	99,26	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Kecamatan Klungkung	5.488.900	-	-	-	5.488.900	4.062.950	-	-	-	4.062.950	74,02	
		Kecamatan Banjarangkan	2.464.100	-	-	-	2.464.100	2.258.050	-	-	-	2.258.050	91,64	
		Kecamatan Dawan	3.443.700	-	-	-	3.443.700	3.413.700	-	-	-	3.413.700	99,13	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.699.400	-	-	-	19.699.400	15.884.340	-	-	-	15.884.340	80,63	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan					Realisasi					Persentase
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61.039.050	-	-	-	61.039.050	57.121.840	-	-	-	57.121.840	93,58
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK												
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.482.317.345	-	-	-	13.482.317.345	13.481.219.345	-	-	-	13.481.219.345	99,99
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA												
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92.204.950	-	-	-	92.204.950	90.742.971	-	-	-	90.742.971	98,41

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
2023

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	1.623.084.900,00	1.413.743.432,00	87,10
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	14.327.960.200,00	14.143.103.328,94	98,71
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Dinas Kesehatan	2.951.880.000,00	2.951.880.000,00	100,00
			Rumah Sakit Umum Daerah	2.530.561.064,00	2.515.411.564,00	99,40
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Dinas Kesehatan	8.175.406.296,00	7.825.362.521,00	95,72
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
			Dinas Kesehatan	426.003.750,00	372.816.500,00	87,51
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
			Dinas Kesehatan	457.414.200,00	457.414.200,00	100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	100.148.063.616,00	59.323.272.059,13	59,24
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
			Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	139.080.000,00	73.248.500,00	52,67
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
			Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	13.544.000,00	6.700.000,00	49,47
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	222.909.972,00	101.563.992,00	45,56
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	209.575.916.105,00	202.784.582.762,00	96,76
			Dinas Kesehatan	33.675.800.425,00	33.675.800.425,00	100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	11.696.495.606,00	11.696.495.606,00	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Kesehatan	4.154.431.012,00	4.154.431.012,00	100,00
			Dinas Kesehatan	43.821.110.771,00	43.821.110.771,00	100,00
			Rumah Sakit Umum Daerah	194.842.224.838,00	192.278.606.962,00	98,68

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Dinas Kesehatan	986.259.000,00	986.259.000,00	100,00
			Dinas Kesehatan	67.273.680.849,00	65.321.939.928,91	97,10
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
			Dinas Kesehatan	26.855.000,00	26.855.000,00	100,00
			Dinas Kesehatan	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	313.518.895,00	305.265.505,00	97,37
			Dinas Ketenagakerjaan	3.584.594.052,00	3.584.594.052,00	100,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Dinas Ketenagakerjaan	92.890.850,00	86.852.600,00	93,50
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Dinas Ketenagakerjaan	35.196.000,00	22.326.200,00	63,43
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
			Dinas Kebudayaan	13.043.422.374,00	12.611.554.134,00	96,69
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
			Dinas Kebudayaan	75.785.420.706,00	72.934.730.031,00	96,24
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
			Dinas Kebudayaan	36.632.500,00	31.881.570,00	87,03
			Dinas Kebudayaan	44.077.550,00	41.097.550,00	93,24
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
			Dinas Kebudayaan	1.275.629.336,00	1.238.265.146,00	97,07
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
			Dinas Ketenagakerjaan	8.931.600,00	7.772.000,00	87,02
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Dinas Perhubungan	9.458.906.431,00	8.518.948.125,00	90,06
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
			Dinas Perhubungan	8.640.480.209,00	8.399.536.366,00	97,21
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	333.443.434,00	112.887.424,00	33,86
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	109.111.950,00	100.536.200,00	92,14
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.715.815.848,00	1.602.755.048,00	93,41
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.679.898.714,00	1.577.694.394,00	93,92
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK				
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	224.890.020,00	220.999.020,00	98,27
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	13.653.262.069,00	13.364.063.532,00	97,88
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10.853.900,00	8.202.400,00	75,57

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Perhubungan	10.705.084.074,00	10.520.061.943,00	98,27
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Sekretariat Daerah	441.027.184,00	441.027.184,00	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.559.094.173,00	10.361.498.100,00	98,13
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	388.740.939,00	277.153.081,00	71,30
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	492.074.500,00	285.408.041,00	58,00
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	624.476.850,00	624.476.850,00	100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	233.037.018,00	231.936.818,00	99,53
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.746.800,00	9.128.722,00	93,66
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.627.850,00	5.592.650,00	99,37
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	430.261.250,00	427.447.750,00	99,35
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.535.671.033,00	10.060.576.167,00	80,26
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	78.039.936.527,00	49.737.519.964,00	63,73
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.422.550,00	2.422.550,00	100,00
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.859.800,00	27.893.645,00	54,84
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	706.892.696,00	663.714.008,00	93,89

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	101.498.100,00	1.475.200,00	1,45
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.627.300,00	6.545.600,00	98,77
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Sekretariat Daerah	353.176.600,00	353.176.600,00	100,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Kecamatan Banjarangkan	4.064.100,00	2.258.050,00	55,56
3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	51.008.416,00	44.331.066,00	86,91
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.636.910.800,00	678.609.085,00	14,63
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	40.846.800,00	40.497.000,00	99,14
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	734.130.472,00	581.442.123,00	79,20
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	88.623.250,00	81.714.750,00	92,20
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	124.241.450,00	2.694.900,00	2,17
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	13.090.350,00	12.946.800,00	98,90
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Dinas Kesehatan	645.480.000,00	645.480.000,00	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.236.245.006,00	4.980.723.682,00	95,12
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.708.717.782,00	4.548.578.187,00	96,60
			Dinas Pariwisata	7.261.602.284,00	7.103.054.239,00	97,82
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.419.500,00	9.671.950,00	62,73
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.776.629.964,00	1.082.609.930,00	60,94
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM				
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.867.029.572,00	3.928.065.051,00	49,93

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	164.695.600,00	152.941.360,00	92,86
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.793.550.774,00	1.124.309.094,00	62,69
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.814.682.042,00	1.631.782.518,00	89,92
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
			Dinas Kesehatan	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.930.750,00	3.890.750,00	65,60
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.410.277.294,00	4.410.277.294,00	100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.451.786.886,00	4.362.593.235,00	98,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	635.271.696,00	523.144.186,00	82,35
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	267.027.224,00	266.328.574,00	99,74
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	441.039.700,00	208.746.800,00	47,33
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Dinas Ketenagakerjaan	11.695.850,00	11.429.050,00	97,72
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Dinas Ketenagakerjaan	28.446.850,00	23.306.450,00	81,93
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	91.588.150,00	71.610.625,00	78,19
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	91.724.600,00	63.539.600,00	69,27
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.636.750,00	11.636.750,00	100,00

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57.487.960,00	52.994.260,00	92,18
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.388.350,00	13.248.650,00	98,96
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	248.500.000,00	248.500.000,00	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.844.595.419,00	7.819.587.927,00	99,68
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6.701.400,00	6.229.900,00	92,96
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	25.127.650,00	24.617.300,00	97,97
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	158.091.460,00	144.836.712,00	91,62
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.813.400,00	5.703.500,00	73,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	474.946.000,00	466.142.750,00	98,15
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	225.394.400,00	221.745.500,00	98,38
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	56.254.550,00	27.101.700,00	48,18
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	917.452.156,00	814.052.520,00	88,73
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			Dinas Pariwisata	17.635.952.890,00	13.955.802.815,00	79,13
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
			Dinas Pariwisata	2.312.397.650,00	2.054.313.430,00	88,84
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK				
			Dinas Pariwisata	63.086.000,00	18.319.400,00	29,04
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
			Dinas Pariwisata	1.483.579.750,00	1.230.498.198,00	82,94

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	39.138.950,00	31.159.725,00	79,61
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	87.271.146.402,00	85.144.419.901,00	97,56
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	44.846.250,00	15.825.400,00	35,29
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	263.242.500,00	202.756.250,00	77,02
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	167.782.104,00	90.660.820,00	54,03
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	524.983.512,00	382.361.978,00	72,83
4	Percepatan reformasi birokrasi	untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif				
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Dinas Pertanian	360.680.812,00	360.680.812,00	100,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Dinas Pertanian	399.395.475,00	399.395.475,00	100,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN				
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.501.360.795,00	13.499.243.795,00	99,98
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Kecamatan Klungkung	10.977.800,00	4.062.950,00	37,01
			Kecamatan Nusa Penida	7.668.600,00	1.911.950,00	24,93
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.797.550,00	6.304.850,00	92,75
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
			Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.086.828.350,00	1.032.595.950,00	95,01
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			Kecamatan Klungkung	24.429.900,00	11.336.900,00	46,41
			Kecamatan Nusa Penida	376.492.150,00	356.013.640,00	94,56
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Kecamatan Klungkung	18.231.350,00	14.895.350,00	81,70
			Kecamatan Nusa Penida	21.555.950,00	20.750.900,00	96,27
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.155.941.850,00	1.108.165.075,00	95,87
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.777.450,00	18.289.450,00	97,40
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92.204.950,00	90.742.971,00	98,41
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI				
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	914.118.485,00	802.688.725,00	87,81
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.199.296.409,00	5.199.296.409,00	100,00
			Dinas Komunikasi dan Informatika	4.107.408.343,00	3.973.620.030,00	96,74

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
			Dinas Komunikasi dan Informatika	1.234.674.050,00	1.213.682.295,00	98,30
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
			Dinas Komunikasi dan Informatika	3.819.059.184,00	3.413.373.005,00	89,38
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
			Dinas Komunikasi dan Informatika	2.864.800,00	2.370.530,00	82,75
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Kebudayaan	5.047.712.595,00	5.012.094.260,00	99,29
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.665.339.974,00	3.568.672.483,00	97,36
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	138.838.400,00	121.980.349,00	87,86
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Sekretariat Daerah	1.951.681.786,00	1.951.681.786,00	100,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Sekretariat Daerah	163.031.900,00	163.031.900,00	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.999.243.492,00	4.682.427.535,00	93,66
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	412.355.600,00	386.267.740,00	93,67
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68.145.412,00	68.145.412,00	100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	127.763.270.736,00	123.391.830.589,00	96,58
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	756.433.462,00	538.999.840,00	71,26
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.881.835.903,00	1.721.688.800,00	91,49
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.899.473.539,00	4.899.473.539,00	100,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.167.113.300,00	456.657.114,00	39,13
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.256.465.896,00	2.054.691.707,00	91,06
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Kecamatan Klungkung	9.446.803.447,00	9.060.999.261,00	95,92
			Kecamatan Nusa Penida	4.941.964.239,00	4.571.354.058,40	92,50
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Kecamatan Klungkung	600.435.792,00	600.435.792,00	100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Kecamatan Klungkung	3.044.341.636,00	2.606.514.491,00	85,62
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Kecamatan Klungkung	19.178.200,00	8.391.100,00	43,75
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	101.407.048,00	101.407.048,00	100,00
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	589.953.975,00	589.953.975,00	100,00

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.769.016.624,00	3.621.284.753,00	96,08
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	252.458.724,00	252.458.724,00	100,00
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.591.988.479,00	2.591.988.479,00	100,00
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.591.988.479,00	2.591.988.479,00	100,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	870.339.657,00	749.748.062,00	86,14
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.920.461.740,00	2.738.715.477,00	93,78
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.920.461.740,00	2.738.715.477,00	93,78
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.865.113.700,00	1.714.550.200,00	91,93
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.695.162,00	27.401.962,00	98,94
			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	12.703.849.696,00	12.339.478.341,00	97,13
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	233.123.968,00	208.200.978,00	89,31
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.176.695.450,00	1.126.424.350,00	95,73
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65.090.200,00	62.564.400,00	96,12
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.760.800,00	3.570.800,00	94,95
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Dinas Kebudayaan	5.907.500,00	5.838.250,00	98,83
			Dinas Pertanian	11.891.317.852,00	11.702.656.639,00	98,41
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Dinas Pertanian	776.528.564,00	651.082.418,00	83,85
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Dinas Pertanian	89.451.800,00	88.205.200,00	98,61
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Sekretariat Daerah	34.236.003.129,00	34.236.003.129,00	100,00
			Sekretariat Daerah	5.049.747.696,00	5.049.747.696,00	100,00
			Sekretariat Daerah	47.600.000,00	47.600.000,00	100,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Sekretariat Daerah	801.835.166,00	626.899.478,00	78,18
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Sekretariat Daerah	424.946.386,00	367.046.440,00	86,37
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.568.500,00	3.817.200,00	83,55
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	319.794.700,00	13.321.000,00	4,17
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11.921.611.729,00	10.413.992.719,00	87,35

No	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
			Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.788.500,00	8.750.450,00	99,57
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
			Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	337.609.000,00	150.296.240,00	44,52
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.420.865.767,00	1.056.132.541,00	74,33
			Inspektorat	7.597.886.444,00	7.484.202.110,00	98,50
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
			Inspektorat	2.106.671.262,00	1.508.592.642,00	71,61
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
			Inspektorat	375.298.324,00	117.244.524,00	31,24
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Kecamatan Banjarangkan	2.872.199.058,00	2.830.641.437,00	98,55
			Kecamatan Banjarangkan	437.533.807,00	405.631.805,00	92,71
			Kecamatan Dawan	4.405.620.538,00	2.495.289.813,00	56,64
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			Kecamatan Banjarangkan	1.392.830.609,00	1.377.329.667,60	98,89
			Kecamatan Dawan	2.057.376.381,00	2.033.613.557,73	98,84
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Kecamatan Klungkung	597.726.000,00	597.726.000,00	100,00
			Kecamatan Banjarangkan	6.526.000,00	6.306.000,00	96,63
			Kecamatan Nusa Penida	13.686.100,00	13.660.005,00	99,81
			Kecamatan Dawan	6.084.200,00	5.205.200,00	85,55
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Kecamatan Dawan	3.443.700,00	3.413.700,00	99,13
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Kecamatan Dawan	13.252.400,00	13.190.900,00	99,54
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Kecamatan Banjarangkan	3.939.000,00	3.825.800,00	97,13
			Kecamatan Nusa Penida	15.610.850,00	15.103.600,00	96,75
			Kecamatan Dawan	13.513.600,00	11.715.600,00	86,69
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.580.499.779,00	3.426.592.498,00	95,70

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

REALISASI BELANJA DAERAH SINERGISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
1	Pangan, Sandang dan Papan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.930.750	3.890.750	65,60
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	406.685.671	406.685.671	100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Penurunan Fakir Miskin (Persen)				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	297.799.586	289.698.484	97,28
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase penurunan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	160.548.474	141.486.724	88,13
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Presentase Fakir Miskin yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (Persen)				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	109.628.100	109.431.050	99,82
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	74.749.450	59.078.050	79,03
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Kasus Perempuan yang ditangani				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66.504.500	50.297.200	75,63
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Persentase Pemenuhan Hak Anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.529.800	18.473.900	94,59
		PROGRAM PENUNJANG URLUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.231.192.371	4.980.723.682	95,21
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Skor PPH Konsumsi				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	88.623.250	81.714.750	92,20
		PROGRAM PENANGANAN KERAUANGAN PANGAN					
			Presentase Kecamatan yang Aman Pangan dan Gizi (tdk terjadi rawan pangan)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	124.241.450	2.694.900	2,17
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Presentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	13.090.350	12.946.800	98,90

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			persentase desa dengan administrasi desasesuai ketentuan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	241.422.836	227.739.686	94,33
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			persentase pemenuhan kebutuhan layanan KB keliling				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	154.800.000	143.951.360	92,99
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			persentase PUS yang memperoleh konseling				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.433.740.000	875.809.094	61,09
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	248.500.000	248.500.000	100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			jumlah PIK-R yang aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.361.700.000	1.236.980.000	90,84
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indek Reformasi Birokrasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	667.003.884	667.003.884	100,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Presentase Koperasi Sehat				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.733.400	5.703.500	99,48
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Jumlah Koperasi yang Di Bina				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.061.400	3.061.400	100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	22.416.500	16.002.200	71,39
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Produksi Perikanan Budidaya (ton)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.623.410.800	678.609.085	14,68
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Nilai Tambah Produksi Perikanan (Rp/kg)				
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	40.846.800	40.497.000	99,14
2	Kesehatan dan Pendidikan						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A				
				Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	5.382.897.800	5.382.897.800	100,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase Pemenuhan Guru				
				Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	4.666.000	4.630.000	99,23

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah				
				Dinas Kesehatan	4.154.431.012	4.154.431.012	100,00
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Dinas Kesehatan	29.236.507.825	29.236.507.825	100,00
				Rumah Sakit Umum Daerah	194.867.256.549	192.278.606.962	98,67
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka kematian ibu				
				Dinas Kesehatan	742.440.000	742.440.000	100,00
			Angka Kematian Ibu				
				Dinas Kesehatan	7.875.707.400	7.825.362.521	99,36
				Rumah Sakit Umum Daerah	2.530.561.064	2.515.411.564	99,40
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				
				Dinas Kesehatan	-	-	
			Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar				
				Dinas Kesehatan	-	-	
			Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				
				Dinas Kesehatan	-	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Jumlah indikator kinerja promosi kesehatan kabupaten yang mencapai target				
				Dinas Kesehatan	13.847.000	13.847.000	100,00
			Jumlah indikator kinerja promosi kesehatan kabupaten yang mencapai target				
				Dinas Kesehatan	26.855.000	26.855.000	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Dinas Ketenagakerjaan	2.621.800	2.324.800	88,67
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Pekerja Yang Terserti kasi sesuai Job Desc				
				Dinas Ketenagakerjaan	525.139.750	508.980.000	96,92
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Norma dan Peraturan Perundang - undangan				
				Dinas Ketenagakerjaan	51.373.700	33.674.200	65,55
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Jumlah Atlet Kabupaten Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional				
				Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	699.185.300	605.943.819	86,66
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Jumlah kuota transmigrasi yang terpenuhi (20 Jumlah KK)				
				Dinas Ketenagakerjaan	8.931.600	7.772.000	87,02
4	Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Persentase Destinasi Sesuai Standar Siap Di Kunjungi				
				Dinas Pariwisata	744.272.492	595.823.496	80,05
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase Industri Pariwisata Sesuai Standar				
				Dinas Pariwisata	63.086.000	18.319.400	29,04
5	Penguatan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase layanan pengolahan air limbah domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.695.892.056	2.695.852.756	100,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.725.000.000	14.397.087.184	86,08
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase Kawasan Kumuh				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.659.400	49.992.900	98,68
6	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	101.407.048	101.215.048	99,81
			Indeks Reformasi Birokrasi				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	589.953.975	589.953.975	100,00
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.457.300	20.446.460	91,05
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Angka Gangguan Kamtibmas				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	252.458.724	238.157.124	94,34
			Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengamanan Satlinmas				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.591.988.479	2.591.988.479	100,00
			Persentase Pelanggaran Perda				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.591.988.479	2.591.988.479	100,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Indeks Kapasitas Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.816.000	6.334.400	40,05
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Angka Korban Kebakaran				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.920.461.740	2.920.461.740	100,00
			Nilai kerugian akibat kebakaran				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.920.461.740	2.920.461.740	100,00
			Nilai Kerugian Akibat Kebakaran				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.865.113.700	1.865.113.700	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.625.900	2.210.900	84,20
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Cakupan Penurunan Tingkat data Ganda dan Anomali Data				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63.140.600	60.621.400	96,01
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	8.409.800	8.392.900	99,80
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Persen)				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.095.999.250	1.085.016.200	99,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Cakupan Layanan Media Informasi Berjalan Lancar (Persen)				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.302.488.950	1.158.886.268	88,97
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Level)				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	33.954.813	33.212.354	97,81
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Indeks Kegemaran Membaca				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.084.100	7.376.656	43,18
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	431.607.784	402.924.317,00	93,35
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Indeks Kearsipan Daerah				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.535.900	7.078.750	40,37
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Sekretariat Daerah	1.003.426.974	638.123.805	63,59
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Sekretariat Daerah	353.176.600	353.176.600	100,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Persentase capaian IKU Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
				Sekretariat Daerah	2.753.516.952	2.543.904.357	92,39
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Cakupan IKU Bidang Pembangunan dan Perekonomian				
				Sekretariat Daerah	429.352.274	429.352.274	100,00
			Tingkat Kepuasan Pengguna Atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa				
				Sekretariat Daerah	228.907.962	228.907.962	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	259.337.804	259.337.804	100,00
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.324.500	2.949.950	88,73
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.420.865.767	1.056.132.541	74,33
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.082.916.550	1.030.062.950	95,12
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Inspektorat	7.605.429.244	7.484.202.110	98,41
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan				
				Inspektorat	2.816.688.324	1.508.592.642	53,56
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				
				Inspektorat	375.298.324	117.244.524	31,24
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Kecamatan Banjarangkan	2.872.199.058	2.872.199.058	100,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Kecamatan Banjarangkan	434.048.007	434.048.007	100,00
				Kecamatan Nusa Penida	4.941.964.239	4.571.354.058	92,50
				Kecamatan Dawan	2.529.219.870	2.495.289.813	98,66
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Kecamatan Nusa Penida	374.292.150	356.013.640	95,12
				Kecamatan Dawan	2.529.583.850	2.033.613.558	80,39
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju				
				Kecamatan Nusa Penida	13.686.100	13.660.005	99,81
			Jumlah Desa dengan klasifikasi desa mandiri				
				Kecamatan Dawan	5.244.200	5.205.200	99,26
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup				
				Kecamatan Banjarangkan	2.464.100	2.258.050	91,64
			Jumlah pelanggaran perda/perbup				
				Kecamatan Nusa Penida	3.834.300	1.911.950	49,86
				Kecamatan Dawan	3.443.700	3.413.700	99,13
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Jumlah potensi kerawanan sosial di Kecamatan				
				Kecamatan Nusa Penida	21.555.950	20.750.900	96,27
				Kecamatan Dawan	13.252.400	13.190.900	99,54
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Desa yang Tertib Administrasi				
				Kecamatan Nusa Penida	15.610.850	15.103.600	96,75
			Persentase Desa Taat Azas				
				Kecamatan Dawan	12.193.600	11.715.600	96,08
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.175.774.897	3.175.774.897	100,00

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.542.800,00	13.326.800,00	98,41
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	13.542.800,00	13.326.800,00	98,41
	Belanja Operasi	13.542.800,00	13.326.800,00	98,41
	Belanja Barang dan Jasa	13.542.800,00	13.326.800,00	98,41
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.024.928.100,00	1.077.203.450,00	53,20
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.024.928.100,00	1.077.203.450,00	53,20
	Belanja Operasi	2.024.928.100,00	1.077.203.450,00	53,20
	Belanja Barang dan Jasa	2.024.928.100,00	1.077.203.450,00	53,20
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	101.311.400,00	101.043.400,00	99,74
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	101.311.400,00	101.043.400,00	99,74
	Belanja Operasi	1.311.400,00	1.293.400,00	98,63
	Belanja Barang dan Jasa	1.311.400,00	1.293.400,00	98,63
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	100.000.000,00	99.750.000,00	99,75
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	100.000.000,00	99.750.000,00	99,75
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00	100,00
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00	100,00
	Belanja Operasi	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.695.892.056,00	2.695.852.756,00	100,00
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
5	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	9.746.800,00	9.128.722,00	93,66
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	9.746.800,00	9.128.722,00	93,66
	Belanja Operasi	9.746.800,00	9.128.722,00	93,66
	Belanja Barang dan Jasa	9.746.800,00	9.128.722,00	93,66
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
6	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.659.400,00	49.992.900,00	98,68
1	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	50.659.400,00	49.992.900,00	98,68
	Belanja Operasi	50.659.400,00	49.992.900,00	98,68
	Belanja Barang dan Jasa	50.659.400,00	49.992.900,00	98,68
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
7	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	109.628.100,00	109.431.050,00	99,82
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	109.628.100,00	109.431.050,00	99,82
	Belanja Operasi	109.628.100,00	109.431.050,00	99,82
	Belanja Barang dan Jasa	109.628.100,00	109.431.050,00	99,82
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
8	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.846.800,00	40.497.000,00	99,14
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro	40.846.800,00	40.497.000,00	99,14
	Belanja Operasi	40.846.800,00	40.497.000,00	99,14
	Belanja Barang dan Jasa	40.846.800,00	40.497.000,00	99,14
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
9	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	24.348.600,00	23.915.300,00	98,22
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5.155.500,00	5.005.200,00	97,08
	Belanja Operasi	5.155.500,00	5.005.200,00	97,08
	Belanja Barang dan Jasa	5.155.500,00	5.005.200,00	97,08
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	19.193.100,00	18.910.100,00	98,53
	Belanja Operasi	19.193.100,00	18.910.100,00	98,53
	Belanja Barang dan Jasa	19.193.100,00	18.910.100,00	98,53
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
10	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	100,00
1	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	100,00
	Belanja Operasi	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	100,00
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
11	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	251.209.774,00	227.926.574,00	90,73
1	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	130.182.600,00	86,79
	Belanja Operasi	150.000.000,00	130.182.600,00	86,79
	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	130.182.600,00	86,79
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	101.209.774,00	97.743.974,00	96,58
	Belanja Operasi	101.209.774,00	97.743.974,00	96,58
	Belanja Barang dan Jasa	101.209.774,00	97.743.974,00	96,58
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
12	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	932.790.000,00	141.583.000,00	15,18
1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	932.790.000,00	141.583.000,00	15,18
	Belanja Operasi	932.790.000,00	141.583.000,00	15,18
	Belanja Barang dan Jasa	932.790.000,00	141.583.000,00	15,18
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
13	Pemberdayaan Kelurahan	645.456.910,00	524.528.710,00	81,26
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	645.456.910,00	524.528.710,00	81,26
	Belanja Operasi	645.456.910,00	524.528.710,00	81,26
	Belanja Barang dan Jasa	645.456.910,00	524.528.710,00	81,26
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
	Total Belanja Stunting	8.834.850.740,00	6.157.712.662,00	69,79

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2023

B. KABUPATEN / KOTA

No	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4.153.948.500,00	4.072.894.751,00	98,05
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.153.948.500,00	4.072.894.751,00	98,05
	BELANJA OPERASI	4.138.948.500,00	4.058.092.751,00	98,05
	Belanja Barang dan Jasa	288.948.500,00	283.462.251,00	98,10
	Belanja Subsidi	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	3.850.000.000,00	3.774.630.500,00	98,04
	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.802.000,00	98,68
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	14.802.000,00	98,68
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	387.094.500,00	359.200.250,00	92,79
	1. Penyediaan Permakanan	333.475.800,00	310.974.300,00	93,25
	BELANJA OPERASI	333.475.800,00	310.974.300,00	93,25
	Belanja Barang dan Jasa	333.475.800,00	310.974.300,00	93,25
	Belanja Subsidi	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	2. Penyediaan Alat Bantu	53.618.700,00	48.225.950,00	89,94
	BELANJA OPERASI	53.618.700,00	48.225.950,00	89,94
	Belanja Barang dan Jasa	53.618.700,00	48.225.950,00	89,94
	Belanja Subsidi	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
TOTAL ANGGARAN		4.541.043.000,00	4.432.095.001,00	97,60

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	Total Nilai Pengadaan barang/jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui e- purchasing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.273.259.952	227.809.526	17,89	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.259.452.770	758.641.550	60,24	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	459.495.264	84.912.560	18,48	
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.408.328.186	1.500.781.415	44,03	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	747.182.652	209.713.250	28,07	
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah	773.707.248	401.152.200	51,85	
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	439.090.050	133.615.360	30,43	
8	Dinas Kebudayaan	2.928.632.321	487.473.435	16,65	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.168.960	356.946.850	50,98	
10	Dinas Kesehatan	36.688.323.915	15.721.598.345	42,85	
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.021.541.280	438.232.522	8,73	
12	Dinas Ketenagakerjaan	642.575.660	54.676.600	8,51	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.071.283.320	3.479.171.191	85,46	
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	83.585.739.329	2.396.027.870	2,87	
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	11.460.923.480	1.916.021.900	16,72	
16	Dinas Pariwisata	19.861.768.563	2.739.807.622	13,79	
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	91.383.336.151	279.007.569	0,31	
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.439.806.103	1.375.847.790	56,39	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	503.477.555	112.007.765	22,25	
20	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	40.448.393.860	2.662.096.544	6,58	
21	Dinas Perhubungan	17.421.709.561	534.906.390	3,07	
22	Dinas Pertanian	1.002.969.930	276.749.000	27,59	
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.032.630.975	1.100.955.168	54,16	
24	Inspektorat	1.774.369.553	730.461.186	41,17	
25	Kecamatan Banjarangkan	2.002.717.457	59.964.500	2,99	
26	Kecamatan Dawan	2.750.472.210	98.417.300	3,58	
27	Kecamatan Klungkung	2.072.765.204	887.916.388	42,84	
28	Kecamatan Nusa Penida	2.223.553.489	63.965.730	2,88	
29	Rumah Sakit Umum Daerah	108.863.359.326	15.958.466.359	14,66	
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.844.142.788	1.720.120.600	60,48	
31	Sekretariat Daerah	15.118.287.818	5.752.777.700	38,05	
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.861.326.797	1.131.456.505	23,27	
TOTAL		471.064.791.727	63.651.698.690	13,51	

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TA 2023

NO	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Ket.
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi Belanja KKPD (Rp.)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi Belanja KKPD (Rp.)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	48.006.275.694,00	-	-	18.007.186.050,00	-	-	
2	Dinas Kesehatan	97.927.787.475,00	-	-	5.642.665.678,00	-	-	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	103.473.792.405,00	-	-	7.920.127.985,00	-	-	
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.991.104.066,00	-	-	82.618.959.221,00	-	-	
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.812.122.023,00	-	-	1.716.828.800,00	-	-	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.288.471.513,00	-	-	25.654.000,00	-	-	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.336.599.171,00	-	-	21.060.000,00	-	-	
8	Dinas Ketenagakerjaan	1.955.149.205,00	-	-	19.721.900,00	-	-	
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.613.454.950,00	-	-	4.109.592.000,00	-	-	
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	13.884.176.446,00	-	-	6.776.447.810,00	-	-	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.107.755.128,00	-	-	20.720.000,00	-	-	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.134.189.742,00	-	-	196.580.000,00	-	-	
13	Dinas Perhubungan	19.933.551.345,00	-	-	237.500.000,00	-	-	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.003.312.121,00	-	-	452.000.000,00	-	-	
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	12.778.482.257,00	-	-	77.819.462.509,00	-	-	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.264.004.187,00	-	-	-	-	-	
17	Dinas Kebudayaan	7.309.667.145,00	-	-	83.058.000,00	-	-	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	571.875.594,00	-	-	157.246.600,00	-	-	
19	Dinas Pariwisata	8.018.700.518,00	-	-	14.888.468.075,00	-	-	
20	Dinas Pertanian	2.358.048.862,00	-	-	-	-	-	
21	Bagian Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	2.051.681.786,00	-	-	-	-	-	
22	Bagian Hukum	771.835.166,00	-	-	30.000.000,00	-	-	
23	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.977.547.696,00	-	-	72.200.000,00	-	-	
24	Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	604.059.084,00	-	-	-	-	-	
25	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	347.946.386,00	-	-	77.000.000,00	-	-	
26	Bagian Umum	12.887.246.320,00	-	-	1.625.063.690,00	-	-	
27	Bagian Organisasi	102.736.600,00	-	-	250.000.000,00	-	-	
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	22.915.275.273,00	-	-	336.288.000,00	-	-	
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.132.771.040,00	-	-	150.518.000,00	-	-	
30	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.627.919.930,00	-	-	876.853.600,00	-	-	
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.961.379.948,00	-	-	132.636.000,00	-	-	

NO	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Ket.
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi Belanja KKPD (Rp.)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi Belanja KKPD (Rp.)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
32	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.003.318.248,00	-	-	559.451.000,00	-	-	
33	Inspektorat	6.895.440.595,00	-	-	931.543.000,00	-	-	
34	Kecamatan Klungkung	3.622.968.962,00	-	-	479.898.000,00	-	-	
35	Kecamatan Banjarangkan	544.629.907,00	-	-	1.722.760.036,00	-	-	
36	Kecamatan Nusa Penida	1.003.184.145,00	-	-	1.732.400.000,00	-	-	
37	Kecamatan Dawan	569.640.012,00	-	-	2.551.930.000,00	-	-	
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.187.942.232,00	-	-	44.576.000,00	-	-	
TOTAL		427.976.043.177	-	-	232.286.395.954,00	-	-	